



**LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN SOLOK  
TA. 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah, karena atas limpahan Rahmat, Karunia serta Perkenaan-Nya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025 yang merupakan amanat konstitusional telah dapat diselesaikan.

Penyampaian LPPD Kabupaten Solok pada dasarnya mengetengahkan gambaran kinerja Pemerintah Daerah secara utuh sepanjang tahun 2025. Gambaran kinerja tahun ini merupakan sebuah implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Sudah pasti dengan segala keterbatasan menyebabkan belum optimalnya beberapa hal dalam proses pencapaian target kinerja. Segala saran, pendapat maupun kritik yang bersifat konstruktif, sangat kami harapkan untuk meningkatkan bobot pelaksanaan tugas kami kedepan.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian laporan ini, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar besarnya, seraya berharap, semoga senantiasa memperoleh petunjuk serta dari Ridha Allah SWT.

Arosuka,                      Maret 2026

**BUPATI SOLOK,**



**DR. (H.C.) JON FIRMAN PANDU, S.H.**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.1.1 Penjelasan Umum .....	1
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah.....	1
b. Data Geografis Wilayah.....	3
c. Jumlah Penduduk.....	5
d. Jumlah Kecamatan dan Nagari .....	5
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintahan.....	7
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	8
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah .....	39
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah .....	39
b. Visi Dan Misi Kepala Daerah.....	50
c. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah .....	54
d. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan .....	64
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal .....	168
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	179
2.1 Capaian Kinerja Makro.....	179
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan .....	180
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci.....	180
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan .	186
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.....	187
a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.....	187
b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja .....	187
c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya.....	187
d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah .....	187

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai .....	187
f. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja .....	187
<b>BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....</b>	<b>346</b>
1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan .....	346
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Solok .....	346
3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	347
3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan .....	347
3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan .....	347
3.3 Permasalahan dan Kendala.....	350
3.4 Saran dan Tindak Lanjut.....	350
<b>BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL .....</b>	<b>351</b>
4.1 Bidang Urusan Pendidikan .....	351
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar .....	351
4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal .....	351
4.1.3 Realisasi .....	352
4.1.4 Alokasi Anggaran.....	353
4.1.5 Dukungan Personil.....	353
4.1.6 Permasalahan dan Solusi .....	354
4.2 Urusan Kesehatan .....	354
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar .....	354
4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah .....	355
4.2.3 Realisasi .....	356
4.2.4 Anggaran .....	365
4.2.5 Dukungan Personil .....	365
4.2.6 Kendala, Permasalahan dan Solusi .....	366
4.3 Urusan Pekerjaan Umum .....	366
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar .....	366
4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah .....	367
4.3.3 Realisasi .....	367
4.3.4 Anggaran .....	370
4.3.5 Dukungan Personil.....	370
4.3.6 Permasalahan dan Solusi .....	371
4.4 Urusan Perumahan Rakyat .....	371
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar .....	371

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah .....	371
4.4.3 Realisasi .....	371
4.4.4 Alokasi Anggaran.....	374
4.4.5 Dukungan Personil.....	375
4.4.6 Permasalahan dan Solusi .....	375
4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	376
4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar .....	376
4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah .....	376
4.5.3 Realisasi .....	377
4.5.4 Alokasi Anggaran.....	380
4.5.5 Dukungan Personil.....	381
4.5.6 Permasalahan dan Solusi .....	382
4.6 Urusan Sosial.....	382
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar .....	382
4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah .....	382
4.6.3 Realisasi .....	383
4.6.4 Alokasi Anggaran.....	391
4.6.5 Dukungan Personil.....	392
4.6.6 Permasalahan dan Solusi .....	392
4.7 Progam dan Kegiatan.....	393
4.7.1 Urusan Pendidikan .....	393
4.7.2 Urusan Kesehatan .....	401
4.7.3 Urusan Pekerjaan Umum.....	402
4.7.4 Urusan Perumahan Rakyat.....	406
4.7.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	408
4.7.6 Urusan Sosial .....	415
BAB V PENUTUP.....	417

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Luas Wilayah Administratif Kabupaten Solok .....	3
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan pada Tahun 2025 .....	5
Tabel 1.3 Batas-Batas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Solok .....	6
Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Solok Tahun 2025 .....	7
Tabel 1.5 Perbandingan APBD dan APBD P Tahun 2025 .....	8
Tabel 1.6 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Konsolidasi) Kabupaten Solok Tahun 2025 .....	9
Tabel 1.7 Rumusan Masalah Pokok, Masalah Dan Akar Masalah Kabupaten Solok .....	40
Tabel 1.8 Sasaran, Indikator dan Target Visi RPJMD Kabupaten Solok.....	51
Tabel 1.9 Seluruh Program Perangkat Daerah TA.2025 .....	54
Tabel 1.10 Seluruh Kegiatan Pembangunan Daerah TA. 2025.....	64
Tabel 1.11 Alokasi Belanja Daerah Dalam Rangka Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Solok TA.2025 .....	170
Tabel 2.1 Capaian Kinerja Makro.....	179
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Kunci .....	181
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan .....	186

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Solok.....	4
Gambar 1.2 Penyelarasan antara Visi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi dan RPJMN Tahun 2025-2029.....	51
Gambar 1.3 Keselarasan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 .....	53

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

##### **1.1.1 Penjelasan Umum**

###### **a. Undang-Undang Pembentukan Daerah**

Undang-Undang pembentukan daerah meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Arosukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Bupati Solok Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
20. Peraturan Bupati Solok Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Bupati Solok Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
22. Peraturan Bupati Solok Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Bupati Solok Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

#### **b. Data Geografis Wilayah**

Kabupaten Solok merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang secara geografis berada pada posisi 00°32'14" - 01°46'45" Lintang Selatan, 100°25'00" - 101°41'41" Bujur Timur dengan luas 373.800 Ha (3.738 Km<sup>2</sup>) dan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar;
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan;
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Solok dan Kabupaten Padang Pariaman; dan
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya.

Gambaran luas wilayah administratif Kabupaten Solok dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Luas Wilayah Administratif Kabupaten Solok**

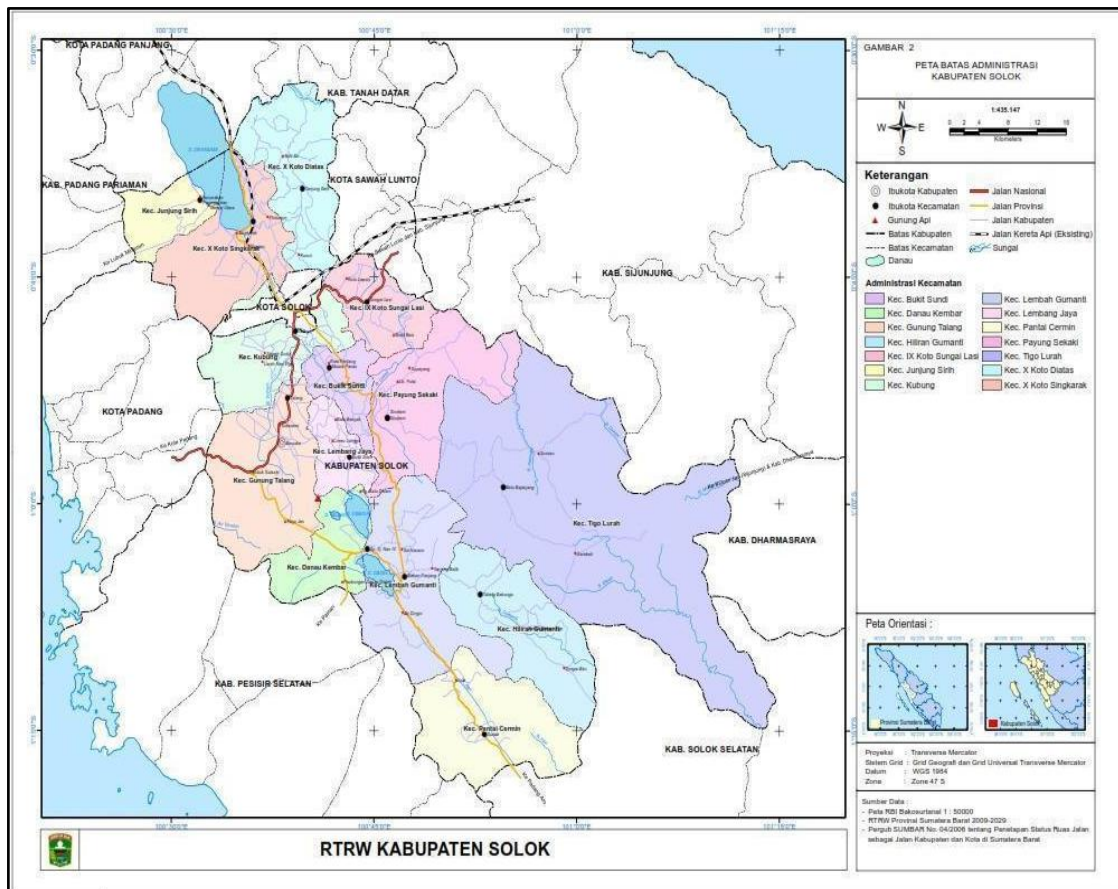
No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Nagari	Jorong	Luas (km <sup>2</sup> )
1.	Pantai Cermin	Surian	2	28	366
2.	Lembah Gumanti	Alahan Panjang	4	39	439
3.	Hiliran Gumanti	Talang Babungo	3	20	284
4.	Payung Sekaki	Sirukam	3	11	392
5.	Tigo Lurah	Batu Bajanjang	5	20	575
6.	Lembang Jaya	Selayo Tanang Bukik Sileh	6	43	94

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Nagari	Jorong	Luas (km <sup>2</sup> )
7.	Danau Kembar	Sp. Tj. Nan IV	2	19	76
8.	Gunung Talang	Talang	8	40	385
9.	Bukit Sundi	Muaro Paneh	5	20	109
10.	IX Koto Sungai Lasi	Sungai Lasi	9	28	171
11.	Kubung	Koto Baru	8	37	192
12.	X Koto Singkarak	Singkarak	8	46	251
13.	Junjung Sirih	Panningahan	2	11	147
14.	X Koto Diatas	Tanjung Balik	9	52	257
<b>Total</b>			<b>74</b>	<b>414</b>	<b>3.738</b>

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka, 2026

Berdasarkan tabel diatas, kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Kecamatan Tigo Lurah dengan luas 575 km<sup>2</sup>, sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Danau Kembar dengan luas 76 km<sup>2</sup>. Gambaran wilayah administrasi Kabupaten Solok dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:

**Gambar 1.1**  
**Peta Administrasi Kabupaten Solok**



Sumber : Perda 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Solok Tahun 2012-2031

**c. Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk di Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan pada Tahun 2025**

No	Kode	Kecamatan	Jumlah
1	13.02.03	Pantai Cermin	24.714
2	13.02.04	Lembah Gumanti	69.170
3	13.02.05	Payung Sekaki	9.786
4	13.02.06	Lembang Jaya	32.404
5	13.02.07	Gunung Talang	57.432
6	13.02.08	Bukit Sundi	28.112
7	13.02.09	IX Koto Sungai Lasi	10.907
8	13.02.10	Kubung	62.546
9	13.02.11	X Koto Singkarak	35.332
10	13.02.12	X Koto Diatas	19.384
11	13.02.13	Junjung Sirih	13.559
12	13.02.17	Hiliran Gumanti	19.818
13	13.02.18	Tigo Lurah	11.413
14	13.02.19	Danau Kembar	24.454
<b>Jumlah</b>			<b>413.075</b>

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Kemendagri, 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Solok pada tahun 2025 ialah 413.075 jiwa.

**d. Jumlah Kecamatan dan Nagari**

Secara administratif Kabupaten Solok terbagi dalam 14 kecamatan, 74 Nagari dan 414 Jorong, dengan batas-batas wilayah administratif Kabupaten Solok sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar;
- sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan;
- sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman; dan
- sebelah timur berbatasan dengan Kota Sawahlunto.

Yang dapat dirinci pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.3**  
**Batas-Batas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Solok**

No	Kecamatan	Sebelah			
		Utara	Selatan	Timur	Barat
1	Pantai Cermin	Kec. L. Gumanti	Kab. Sol Sel	Kec. Hiliran Gumanti	Kab. Pessel
2	Lembah Gumanti	Kec. Payung Sekaki	Kec. Pantai Cermin	Kec. Hiliran Gumanti & Kec. Tigo Lurah	Kec. Danau Kembar
3	Hiliran Gumanti	Kec. Tigo Lurah	Kec. Pantai Cermin	Kec. Tigo Lurah	Kec. Lembah Gumanti
4	Payung Sekaki	Kec. IX Koto Sungai Lasi	Kec. Lembah Gumanti	Kec. Tigo Lurah	Kec. Lembang Jaya & Kec. Bukik Sundi
5	Tigo Lurah	Kab. Sijunjung	Kec. Hiliran Gumanti	Kab. Sijunjung	Kec. Lembah Gumanti
6	Lembang Jaya	Kec. Bukit Sundi	Kec. Danau Kembar	Kec. Payung Sekaki	Kec. Gunung Talang
7	Danau Kembar	Kec. Lembang Jaya	Kab. Pessel	Kec. Lembah Gumanti	Kec. Gunung Talang
8	Gunung Talang	Kec. Kubung	Kab. Pessel	Kec. Lembang Jaya	Kota Padang
9	Bukit Sundi	Kec. Sungai Lasi	Kec. Lembang Jaya	Kec. Payung Sekaki	Kec. Kubung
10	IX Koto Sungai Lasi	Kota Sawahlunto	Kec. Bukit Sundi	Kec. Tigo Lurah	Kota Solok
11	Kubung	Kota Solok	Kec. Gunung Talang	Kec. Bukit Sundi	Kota Padang
12	X Koto Diatas	Kab. Tanah Datar	Kec. X Koto Singkarak	Kota Sawahlunto	Kab. Tanah Datar
13	X Koto Singkarak	Kec. X Koto diatas	Kec. Kubung	Kec. X Koto Diatas	Kec. Junjung Sirih
14	Junjung Sirih	Kab. Tanah Datar	Kec. X Koto Singkarak	Kec. X Koto Diatas	Kab. Pdg Pariaman
Kabupaten Solok		Kab. Tanah Datar	Kab. Sol Sel	Kota Sawahlunto	Kota Padang & Kab. Pessel

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka, 2026

Secara administratif Kabupaten Solok terbagi dalam 14 Kecamatan, 74 Nagari dan 414 Jorong. Kecamatan yang memiliki nagari terbanyak adalah Kecamatan IX Koto Sungai Lasi dan Kecamatan X Koto Diatas masing-masing memiliki 9 nagari, sedangkan kecamatan dengan jumlah nagari terkecil terdapat di Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Danau Kembar dan Kecamatan Junjung Sirih masing-masing hanya memiliki 2 nagari.

Kecamatan yang memiliki jorong terbanyak adalah Kecamatan X Koto

Diatas dengan jumlah 52 jorong dan kecamatan yang memiliki jorong paling sedikit adalah Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Junjung Sirih dengan jumlah masing-masing 11 jorong.

**e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintahan**

Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah. Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Formasi dan persyaratan jabatan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Jumlah Perangkat Daerah di Kabupaten Solok sebanyak 41 (empat puluh satu), yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan. Jumlah Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1.4  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Solok Tahun 2025**

No	Perangkat Daerah	Jumlah	Ket
1	Sekretariat Daerah	78	
2	Sekretariat DPRD	24	
3	Inspektorat Daerah	34	
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	24	
5	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	30	
6	Badan Keuangan Daerah	29	
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14	
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	80	
9	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	65	
	*TK, Sekolah Dasar, SMP	2269	
10	Dinas Kesehatan	52	
	*Puskesmas, Labkesda, Instalasi Farmasi	535	
	*RSUD	190	
11	Dinas Pertanian	86	
12	Dinas Perikanan dan Pangan	21	
13	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	21	
14	Dinas Perhubungan	40	
15	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	26	
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan	31	
17	Dinas Lingkungan Hidup	21	

No	Perangkat Daerah	Jumlah	Ket
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	25	
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	23	
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	26	
21	Dinas Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	25	
22	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	29	
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	22	
24	Dinas Sosial	21	
25	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	48	
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7	
27	Badan Pendapatan Daerah	17	
28	Kecamatan Pantai Cermin	11	
29	Kecamatan Lembah Gumanti	10	
30	Kecamatan Hiliran Gumanti	6	
31	Kecamatan Payung Sekaki	7	
32	Kecamatan Tigo Lurah	11	
33	Kecamatan Lembang Jaya	10	
34	Kecamatan Danau Kembar	8	
35	Kecamatan Gunung Talang	10	
36	Kecamatan Bukit Sundi	8	
37	Kecamatan IX Koto Sungai Lasi	6	
38	Kecamatan Kubung	15	
39	Kecamatan X Koto Diatas	10	
40	Kecamatan X Koto Singkarak	11	
41	Kecamatan Junjung Sirih	9	
<b>TOTAL</b>		<b>4045</b>	

Sumber: BKPSDM Kab. Solok, 2026

#### f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Realisasi Anggaran (LRA) APBD adalah laporan keuangan yang menyandingkan rencana (target) pendapatan dan belanja dengan realisasi aktual selama satu periode tahun anggaran. LRA berfungsi untuk transparansi kinerja, menilai efektivitas penggunaan dana, dan memuat unsur pendapatan, belanja, transfer, serta pembiayaan. Perbandingan APBD dengan APBD P Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.5**  
**Perbandingan APBD dan APBD P Tahun 2025**

Uraian	Pendapatan	Belanja	Surplus/ Defisit	Pembiayaan	SiLPA
Perda Nomor 8 Tahun 2024 tentang APBD Tahun 2025	1.346.109.035.955,00	1.391.109.035.955,00	(45.000.000.000,00)	45.000.000.000,00	0,00
Perda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun 2025	1.308.066.519.672,00	1.321.543.449.296,88	(13.475.929.624,88)	13.475.929.624,88	0,00

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Solok, 2026

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (konsolidasi) Kabupaten Solok Tahun 2025 ialah sebagai berikut:

**Tabel 1.6**  
**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Konsolidasi)**  
**Kabupaten Solok Tahun 2025**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.308.066.519.672,00</b>	<b>1.270.143.026.029,29</b>	<b>97,10</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>145.369.021.199,00</b>	<b>123.712.330.289,29</b>	<b>85,10</b>
Pajak Daerah	68.141.157.873,00	53.817.569.603,19	78,97
Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00
Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00
Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00
Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00
Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00
Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00
Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/ Tari/ Busana	0,00	0,00	0,00
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/ Tari/ Busana	0,00	0,00	0,00
Pajak Reklame	1.876.759.000,00	637.378.500,00	33,96
Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron	1.250.000.000,00	629.998.500,00	50,39
Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron	1.250.000.000,00	629.998.500,00	50,39
Pajak Reklame Kain	626.759.000,00	7.380.000,00	1,17
Pajak Reklame Kain	626.759.000,00	7.380.000,00	1,17
Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	0,00	0,00
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	0,00	0,00
Pajak Air Tanah	3.000.000.000,00	1.127.860.045,00	37,59
Pajak Air Tanah	3.000.000.000,00	1.127.860.045,00	37,59
Pajak Air Tanah	3.000.000.000,00	1.127.860.045,00	37,59
Pajak Sarang Burung Walet	3.500.000,00	0,00	0,00
Pajak Sarang Burung Walet	3.500.000,00	0,00	0,00
Pajak Sarang Burung Walet	3.500.000,00	0,00	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.077.027.158,00	666.842.893,00	21,67
Pajak Tras	20.000.000,00	0,00	0,00
Pajak Tras	20.000.000,00	0,00	0,00
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.057.027.158,00	666.842.893,00	21,81
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.057.027.158,00	666.842.893,00	21,81
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.934.118.234,00	2.690.728.352,00	68,39
PBBP2	3.934.118.234,00	2.690.728.352,00	68,39
PBBP2	3.934.118.234,00	2.690.728.352,00	68,39
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10.813.240.383,00	4.447.107.660,00	41,12
BPHTB-Pemindahan Hak	10.813.240.383,00	4.447.107.660,00	41,12

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
BPHTB-Pemindahan Hak	10.813.240.383,00	4.447.107.660,00	41,12
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	21.253.500.000,00	16.149.206.453,19	75,98
PBJT-Makanan dan/atau Minuman	4.900.000.000,00	2.579.203.416,19	52,63
PBJT-Restoran	4.900.000.000,00	2.579.203.416,19	52,63
PBJT-Tenaga Listrik	15.000.000.000,00	12.919.116.912,00	86,12
PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	15.000.000.000,00	12.919.116.912,00	86,12
PBJT-Jasa Perhotelan	1.351.500.000,00	650.886.125,00	48,16
PBJT-Hotel	1.351.500.000,00	650.886.125,00	48,16
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	2.000.000,00	0,00	0,00
PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	1.000.000,00	0,00	0,00
PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	0,00	0,00
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	16.145.521.697,00	18.035.163.601,00	111,70
Opsen PKB	16.145.521.697,00	18.035.163.601,00	111,70
Opsen PKB	16.145.521.697,00	18.035.163.601,00	111,70
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	8.037.491.401,00	10.063.282.099,00	125,20
Opsen BBNKB	8.037.491.401,00	10.063.282.099,00	125,20
Opsen BBNKB	8.037.491.401,00	10.063.282.099,00	125,20
Retribusi Daerah	56.973.267.865,00	52.127.118.150,00	91,49
Retribusi Jasa Umum	50.829.569.439,00	49.435.153.060,00	97,25
Retribusi Pelayanan Kesehatan	49.884.284.466,00	48.880.218.060,00	97,98
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	21.700.863.432,00	21.134.266.858,00	97,38
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	28.183.421.034,00	27.745.951.202,00	98,44
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	478.704.973,00	502.233.000,00	104,91
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	478.704.973,00	502.233.000,00	104,91
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	209.130.000,00	9.702.000,00	4,63
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	209.130.000,00	9.702.000,00	4,63
Retribusi Pelayanan Pasar	257.450.000,00	43.000.000,00	16,70
Retribusi Kios	257.450.000,00	43.000.000,00	16,70
Retribusi Jasa Usaha	4.230.668.500,00	1.994.754.940,00	47,14
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.756.271.000,00	1.127.886.940,00	40,92
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	900.000,00	0,00
Retribusi Penyewaan Tanah	166.500.000,00	10.597.500,00	6,36
Retribusi Penyewaan Bangunan	1.023.185.000,00	293.315.840,00	28,66
Retribusi Pemakaian Laboratorium	0,00	128.565.000,00	0,00
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	1.500.000.000,00	682.030.000,00	45,46
Retribusi Pemakaian Alat	66.586.000,00	12.478.600,00	18,74
Retribusi Terminal	4.132.500,00	4.132.500,00	100,00
Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	4.132.500,00	4.132.500,00	100,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	468.470.000,00	78.132.000,00	16,67
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	468.470.000,00	78.132.000,00	16,67

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	211.400.000,00	151.050.000,00	71,45
Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	211.400.000,00	151.050.000,00	71,45
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	5.000.000,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	5.000.000,00	0,00	0,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	640.380.000,00	534.308.000,00	83,43
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	640.380.000,00	534.308.000,00	83,43
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	145.015.000,00	99.245.500,00	68,43
Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	20.000.000,00	4.092.500,00	20,46
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	125.015.000,00	95.153.000,00	76,11
Retribusi Perizinan Tertentu	1.913.029.926,00	697.210.150,00	36,44
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.913.029.926,00	697.210.150,00	36,44
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.913.029.926,00	697.210.150,00	36,44
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.068.840.764,00	9.071.696.960,00	100,03
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	9.068.840.764,00	9.071.696.960,00	100,03
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	9.048.840.764,00	9.071.696.960,00	100,25
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	9.048.840.764,00	9.071.696.960,00	100,25
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	20.000.000,00	0,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	20.000.000,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	11.185.754.697,00	8.695.945.576,10	77,74
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	410.000.000,00	119.607.910,00	29,17
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	29.114.000,00	0,00
Hasil Penjualan Hewan-Ternak-Ternak Potong	0,00	29.114.000,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	410.000.000,00	90.493.910,00	22,07
Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	300.000.000,00	90.340.435,00	30,11
Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	110.000.000,00	153.475,00	0,13
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	520.000.000,00	1.603.228.088,00	308,31
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	520.000.000,00	1.603.228.088,00	308,31
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	520.000.000,00	1.603.228.088,00	308,31
Jasa Giro	4.250.000.000,00	1.237.509.938,10	29,11
Jasa Giro pada Kas Daerah	4.000.000.000,00	1.065.890.092,00	26,64
Jasa Giro pada Kas Daerah	4.000.000.000,00	1.065.890.092,00	26,64
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	250.000.000,00	115.658.571,10	46,26

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	250.000.000,00	115.658.571,10	46,26
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	67.931,00	0,00
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	67.931,00	0,00
Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	0,00	55.893.344,00	0,00
Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	0,00	55.893.344,00	0,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	5.000.000,00	1.216.000,00	24,32
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	5.000.000,00	1.216.000,00	24,32
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	5.000.000,00	1.216.000,00	24,32
Pendapatan Bunga	1.500.000.000,00	669.018.821,00	44,60
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	669.018.821,00	44,60
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	669.018.821,00	44,60
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	4.500.754.697,00	4.274.884.765,00	94,98
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	4.500.754.697,00	4.274.884.765,00	94,98
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	4.500.754.697,00	4.274.884.765,00	94,98
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	182.635.425,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	182.635.425,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	182.635.425,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	236.719.403,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	31.325.403,00	0,00
Pendapatan Denda PBBP2	0,00	31.325.403,00	0,00
Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	205.272.600,00	0,00
Pendapatan Denda Opsen PKB	0,00	205.272.600,00	0,00
Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0,00	121.400,00	0,00
Pendapatan Denda Opsen BBNKB	0,00	121.400,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	371.125.226,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	297.906.589,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	0,00	237.528.404,00	0,00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK	0,00	11.184.576,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	0,00	42.231.039,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS	0,00	1.620.000,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	0,00	3.604.330,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	0,00	1.738.080,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	0,00	160,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD-TPG PNSD	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0,00	337.837,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	0,00	337.837,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	65.680.800,00	0,00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	65.680.800,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP	0,00	7.200.000,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	0,00	7.200.000,00	0,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>145.369.021.199,00</b>	<b>123.712.330.289,29</b>	<b>85,10</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.158.697.498.473,00</b>	<b>1.141.237.540.098,00</b>	<b>98,49</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.088.728.588.110,00	1.085.359.537.766,00	99,69
Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
DBH PPh Pasal 21	0,00	0,00	0,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	0,00	0,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	0,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	0,00	0,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	0,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	0,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	0,00	0,00	0,00
DBH Sawit	0,00	0,00	0,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00
DAU	0,00	0,00	0,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	0,00	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	0,00	0,00	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	0,00	0,00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	13.976.500.000,00	14.438.141.800,00	103,30
DBH Pajak	6.988.004.000,00	7.443.197.800,00	106,51
DBH PBB	1.526.295.000,00	1.903.563.800,00	124,71
DBH PPh Pasal 21	5.321.588.000,00	5.161.692.000,00	96,99
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	0,00	234.009.000,00	0,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	140.121.000,00	143.933.000,00	102,72
DBH Sumber Daya Alam (SDA)	4.407.249.000,00	4.413.697.000,00	100,14
DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	1.328.669.000,00	1.328.672.000,00	100,00
DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent	2.163.359.000,00	28.975.000,00	1,33
DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty	0,00	2.134.386.000,00	0,00
DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	64.045.000,00	70.488.000,00	110,06
DBH SDA Perikanan	851.176.000,00	851.176.000,00	100,00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
DBH Lainnya	2.581.247.000,00	2.581.247.000,00	100,00
DBH Sawit	2.581.247.000,00	2.581.247.000,00	100,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	713.434.985.000,00	712.481.279.991,00	99,86
DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	608.100.357.000,00	608.096.611.797,00	99,99
DAU	608.100.357.000,00	608.096.611.797,00	99,99
DAU yang Ditentukan Penggunaannya	105.334.628.000,00	104.384.668.194,00	99,09
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	16.401.351.000,00	15.451.391.194,00	94,20
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	48.371.871.000,00	48.371.871.000,00	100,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	40.561.406.000,00	40.561.406.000,00	100,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	278.586.658.110,00	282.025.259.929,00	101,23
DAK Fisik	43.912.720.000,00	43.200.570.880,00	98,37
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.768.307.000,00	1.761.384.212,00	99,60
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	321.673.000,00	318.136.500,00	98,90
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	236.224.000,00	231.090.000,00	97,82
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	237.036.000,00	193.940.000,00	81,81
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	7.902.007.000,00	7.898.021.731,00	99,94
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	817.600.000,00	786.724.270,00	96,22
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	1.908.160.000,00	1.906.926.310,00	99,93
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	2.150.401.000,00	2.000.924.766,00	93,04
DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan	28.571.312.000,00	28.103.423.091,00	98,36
DAK Non Fisik	234.673.938.110,00	238.824.689.049,00	101,76
DAK Non Fisik-BOS Reguler	57.099.278.000,00	57.031.448.943,00	99,88
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.040.750.000,00	2.040.750.000,00	100,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	130.321.111.150,00	133.745.444.400,00	102,62
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	465.250.000,00	398.500.000,00	85,65
DAK Non Fisik-TKG PNSD	5.332.290.000,00	6.348.087.900,00	119,04
DAK Non Fisik-BOP PAUD	5.968.548.000,00	5.957.885.476,00	99,82
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	3.925.900.000,00	3.832.118.502,00	97,61
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	510.429.900,00	537.457.000,00	105,29
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.540.754.871,00	4.540.754.871,00	100,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	313.484.711,00	294.205.250,00	93,84
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.196.391.000,00	4.196.391.000,00	100,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	8.789.767.586,00	8.762.703.126,00	99,69
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	10.855.342.892,00	10.824.302.581,00	99,71
DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	314.640.000,00	314.640.000,00	100,00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.005.998.143.110,00</b>	<b>1.008.944.681.720,00</b>	<b>100,29</b>
Dana Desa	82.730.445.000,00	76.414.856.046,00	92,36
Dana Desa	82.730.445.000,00	76.414.856.046,00	92,36
Dana Desa	82.730.445.000,00	76.414.856.046,00	92,36
Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00
Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00
Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>	<b>82.730.445.000,00</b>	<b>76.414.856.046,00</b>	<b>92,36</b>
Pendapatan Transfer Antar Daerah	69.968.910.363,00	55.878.002.332,00	79,86
Pendapatan Bagi Hasil	68.618.910.363,00	52.063.002.332,00	75,87
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	68.618.910.363,00	52.063.002.332,00	75,87
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	4.467.770.375,00	4.582.920.696,00	102,57
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.668.595.566,00	1.773.844.143,00	106,30
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	40.122.033.966,00	23.929.639.393,00	59,64
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	2.075.900.138,00	2.166.849.436,00	104,38
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	20.284.610.318,00	19.609.748.664,00	96,67
Bantuan Keuangan	1.350.000.000,00	3.815.000.000,00	282,59
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	1.250.000.000,00	3.495.000.000,00	279,60
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	1.250.000.000,00	3.495.000.000,00	279,60
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	320.000.000,00	320,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	320.000.000,00	320,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>69.968.910.363,00</b>	<b>55.878.002.332,00</b>	<b>79,86</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.158.697.498.473,00</b>	<b>1.141.237.540.098,00</b>	<b>98,49</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>4.000.000.000,00</b>	<b>5.193.155.642,00</b>	<b>129,82</b>
Pendapatan Hibah	0,00	100.000.000,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	0,00	100.000.000,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	0,00	100.000.000,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan dalam Negeri	0,00	100.000.000,00	0,00
Dana Darurat	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00
Dana Darurat	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00
Dana Darurat	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	1.093.155.642,00	0,00
Lain-lain Pendapatan	0,00	1.093.155.642,00	0,00
Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	1.093.155.642,00	0,00
Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	0,00	1.093.155.642,00	0,00
<b>JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>4.000.000.000,00</b>	<b>5.193.155.642,00</b>	<b>129,82</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.308.066.519.672,00</b>	<b>1.270.143.026.029,29</b>	<b>97,10</b>
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.321.543.449.296,88</b>	<b>1.236.006.856.287,49</b>	<b>93,52</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.024.431.982.040,60</b>	<b>961.505.703.592,15</b>	<b>93,85</b>
Belanja Pegawai	678.001.964.201,23	645.999.864.501,43	95,27
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	410.499.982.407,75	389.329.237.202,00	94,84
Belanja Gaji Pokok ASN	307.276.968.964,02	295.482.992.880,00	96,16
Belanja Gaji Pokok PNS	249.188.900.704,22	239.741.618.368,00	96,20
Belanja Gaji Pokok PPPK	58.088.068.259,80	55.741.374.512,00	95,96
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	31.299.280.516,17	28.854.879.257,00	92,19
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	24.543.243.556,57	22.980.552.269,00	93,63
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6.756.036.959,60	5.874.326.988,00	86,94
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.080.621.625,00	5.571.362.000,00	91,62
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.080.621.625,00	5.571.362.000,00	91,62
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	19.126.193.112,00	17.608.263.950,00	92,06
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	19.126.193.112,00	17.608.263.950,00	92,06
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.760.914.580,25	4.446.589.543,00	93,39
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.354.364.236,50	1.234.825.793,00	91,17
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.406.550.343,75	3.211.763.750,00	94,28
Belanja Tunjangan Beras ASN	17.208.539.757,50	15.998.769.096,00	92,96
Belanja Tunjangan Beras PNS	12.701.529.765,00	12.067.634.280,00	95,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.507.009.992,50	3.931.134.816,00	87,22
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.232.618.182,36	1.067.938.189,00	86,63
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.225.093.042,36	1.067.938.189,00	87,17
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	7.525.140,00	0,00	0,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	15.145.612,30	3.893.722,00	25,70
Belanja Pembulatan Gaji PNS	9.997.981,88	2.891.161,00	28,91
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.147.630,42	1.002.561,00	19,47
Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	20.825.924.419,02	17.841.663.973,00	85,67
Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	18.323.442.078,04	15.526.317.838,00	84,73
Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	2.502.482.340,98	2.315.346.135,00	92,52
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	721.933.756,82	618.860.853,00	85,72
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	552.988.583,41	491.855.110,00	88,94

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	168.945.173,41	127.005.743,00	75,17
Belanja luran Jaminan Kematian ASN	1.951.841.882,31	1.834.023.739,00	93,96
Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1.568.071.796,34	1.475.568.284,00	94,10
Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	383.770.085,97	358.455.455,00	93,40
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	232.641.525.856,24	224.370.805.225,00	96,44
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	41.081.636.810,58	37.044.857.926,00	90,17
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	40.412.934.003,58	36.411.767.926,00	90,09
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	668.702.807,00	633.090.000,00	94,67
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	147.335.021,39	122.780.400,00	83,33
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	147.335.021,39	122.780.400,00	83,33
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	889.538.424,39	790.990.884,00	88,92
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	889.538.424,39	790.990.884,00	88,92
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.690.253.165,00	1.616.415.995,00	95,63
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.690.253.165,00	1.616.415.995,00	95,63
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	44.468.301.788,56	40.469.899.692,00	91,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	44.468.301.788,56	40.469.899.692,00	91,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	144.364.460.646,32	144.325.860.328,00	99,97
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	70.378.462,50	8.304.654,00	11,79
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	112.500.000,00	13.274.996,00	11,79
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	131.250,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	115.388.518,43	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	110.057.734,91	13.705.848,00	12,45
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	405.496.514,36	47.848.588,00	11,79
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	797.006.250,00	377.350.129,00	47,34
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	567.957.063,64	439.660.611,00	77,41
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	282.655.927,54	219.220.378,00	77,55
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	11.520.102,00	10.683.787,00	92,74

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	9.526.950,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	13.627.793,77	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	124.849.777,78	26.608.635,00	21,31
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	7.200.000,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	36.405.150,00	28.674.150,00	78,76
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	5.105.700,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	6.649.650,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	28.695.448,89	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan	5.815.950,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	61.987,50	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	18.471.150,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	225.000,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	53.681.565,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	132.598.480.000,00	133.747.941.300,00	100,86
Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	6.476.276.000,00	7.365.035.000,00	113,72
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	705.250.000,00	638.500.000,00	90,53
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.801.046.700,00	1.389.052.252,00	77,12
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	41.380.000,00	41.380.000,00	100,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	0,00
Belanja TPG PNSD	0,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00	0,00	0,00
Belanja TKG PNSD	0,00	0,00	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	0,00	0,00
Belanja Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00
Belanja Honorarium	41.380.000,00	41.380.000,00	100,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	41.380.000,00	41.380.000,00	100,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	14.101.913.733,70	13.512.146.962,00	95,81
Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000,00	782.040.000,00	100,00
Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000,00	782.040.000,00	100,00
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	109.485.600,00	78.115.800,00	71,34
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	109.485.600,00	78.115.800,00	71,34
Belanja Tunjangan Beras DPRD	102.311.000,00	85.238.340,00	83,31

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
Belanja Tunjangan Beras DPRD	102.311.000,00	85.238.340,00	83,31
Belanja Uang Paket DPRD	67.032.000,00	67.032.000,00	100,00
Belanja Uang Paket DPRD	67.032.000,00	67.032.000,00	100,00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00	1.133.958.000,00	100,00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00	1.133.958.000,00	100,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	124.784.100,00	121.495.500,00	97,36
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	124.784.100,00	121.495.500,00	97,36
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	5.622.500,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	5.622.500,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.646.000.000,00	2.646.000.000,00	100,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.646.000.000,00	2.646.000.000,00	100,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	661.500.000,00	630.000.000,00	95,23
Belanja Tunjangan Reses DPRD	661.500.000,00	630.000.000,00	95,23
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	327.429.297,70	325.935.006,00	99,54
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	327.429.297,70	325.935.006,00	99,54
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.922.151.236,00	2.863.652.316,00	97,99
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	109.351.236,00	62.707.176,00	57,34
Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	12.000.000,00	5.397.840,00	44,98
Belanja Jaminan Kematian DPRD	12.000.000,00	6.747.300,00	56,22
Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.788.800.000,00	2.788.800.000,00	100,00
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.199.600.000,00	4.778.680.000,00	91,90
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.199.600.000,00	4.778.680.000,00	91,90
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	20.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	20.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	945.537.234,38	637.450.523,00	67,41
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	108.100.000,00	101.400.000,00	93,80
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	108.100.000,00	101.400.000,00	93,80
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.116.000,00	882.000,00	21,42
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.116.000,00	882.000,00	21,42
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	100,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	100,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.069.400,00	2.679.540,00	52,85
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.069.400,00	2.679.540,00	52,85
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	726.226,00	547.134,00	75,33
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	726.226,00	547.134,00	75,33
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.240,00	2.180,00	97,32
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.240,00	2.180,00	97,32
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.917.871,00	5.265.120,00	76,10

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.917.871,00	5.265.120,00	76,10
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	112.320,00	100,00
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	112.320,00	100,00
Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	336.960,00	100,00
Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	336.960,00	100,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	689.240.081,99	427.945.269,00	62,08
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	19.705.969,50	2.955.895,00	14,99
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	31.500.000,00	4.725.000,00	15,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	36.750,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	32.308.785,16	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	30.816.165,78	4.930.585,00	15,99
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	88.539.024,02	17.030.853,00	19,23
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	223.161.750,00	144.381.300,00	64,69
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor [(J),PKB],	174.027.977,82	169.527.978,00	97,41
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor [(J),BBNKB],	89.143.659,71	84.393.658,00	94,67
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	32.636.135,39	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	878.346,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	1.081.290,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	2.164.680,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.429.596,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	609.063,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	8.034.725,69	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan	1.628.466,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	17.356,50	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	1.740.774,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	21.000,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	15.030.838,20	0,00	0,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00	510.876.000,00	99,99
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	100,00
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	100,00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	399.996.000,00	99,99
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	399.996.000,00	99,99
Belanja Pegawai BLUD	19.260.744.969,16	17.597.968.589,43	91,36
Belanja Pegawai BLUD	19.260.744.969,16	17.597.968.589,43	91,36
Belanja Pegawai BLUD	19.260.744.969,16	17.597.968.589,43	91,36
Belanja Barang dan Jasa	327.850.458.129,93	297.150.271.020,28	90,63
Belanja Barang	87.423.298.381,58	78.431.759.128,00	89,71
Belanja Barang Pakai Habis	87.417.273.381,58	78.427.091.128,00	89,71
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	70.604.216,00	62.657.125,00	88,74
Belanja Bahan-Bahan Kimia	74.515.420,00	67.115.280,00	90,06
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.791.922.142,91	6.655.564.075,00	85,41
Belanja Bahan-Bahan Baku	512.500,00	0,00	0,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	83.342.490,00	82.097.670,00	98,50
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	10.147.500,00	9.500.000,00	93,61

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	158.110.370,00	147.799.170,00	93,47
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.051.098.834,00	6.529.256.746,00	81,09
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	187.353.939,00	187.276.868,00	99,95
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	151.145.700,00	113.327.116,00	74,97
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	189.238.100,00	3.709.010,00	1,95
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	51.411.500,00	38.119.800,00	74,14
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	0,00	0,00
Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.767.362.613,61	4.819.832.254,00	83,57
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.885.703.357,01	1.646.589.156,00	87,31
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	173.033.625,00	165.564.485,00	95,68
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.767.459.964,00	2.392.245.433,00	86,44
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.161.744.750,00	1.062.131.316,00	91,42
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	753.949.323,00	689.421.199,00	91,44
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	335.037.785,00	251.498.296,00	75,06
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	42.301.875,00	9.634.800,00	22,77
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	157.677.725,00	143.301.877,00	90,88
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	20.458.342,00	19.888.360,00	97,21
Belanja Obat-Obatan-Obat	4.245.241.327,00	4.026.525.691,00	94,84
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	34.879.961.821,00	33.703.431.582,00	96,62
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	502.694.400,00	492.222.900,00	97,91
Belanja Natura dan Pakan-Natura	484.843.000,00	473.758.191,00	97,71
Belanja Natura dan Pakan-Pakan	480.186.035,00	425.263.530,00	88,56
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.518.450.080,00	6.134.348.110,00	81,59
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.016.710.500,05	1.920.808.160,00	95,24
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	792.000.000,00	508.965.000,00	64,26
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.330.440.647,00	3.567.588.229,00	82,38
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	353.000.000,00	341.680.000,00	96,79
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	125.900.000,00	125.104.500,00	99,36
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	126.000.000,00	125.679.750,00	99,74
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	112.125.000,00	109.890.584,00	98,00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	755.588.500,00	663.912.483,00	87,86
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	70.000.000,00	69.541.500,00	99,34
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	57.500.000,00	17.675.960,00	30,74
Belanja Pakaian KORPRI	0,00	0,00	0,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	0,00	0,00	0,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	279.750.000,00	258.020.756,00	92,23
Belanja Pakaian Olahraga	222.750.000,00	189.654.166,00	85,14
Belanja Pakaian Paskibraka	180.000.000,00	176.490.000,00	98,05
Belanja Pakaian Jas/Safari	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	6.025.000,00	4.668.000,00	77,47
Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00
Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	0,00	0,00
Belanja Pipa-Pipa Lainnya	6.025.000,00	4.668.000,00	77,47
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa	100.144.313.807,48	89.423.292.019,38	89,29
Belanja Jasa Kantor	73.010.650.838,48	65.993.236.797,00	90,38
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.930.950.000,00	1.945.185.000,00	66,36
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	123.380.000,00	12.980.000,00	10,52
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	226.600.000,00	64.400.000,00	28,42
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	0,00	0,00	0,00
Honorarium Rohaniwan	6.800.000,00	2.000.000,00	29,41
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	61.200.000,00	61.200.000,00	100,00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	115.635.000,00	98.490.000,00	85,17
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	618.000.000,00	569.400.000,00	92,13
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	1.068.000.000,00	1.047.650.000,00	98,09
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	6.329.456.000,00	5.876.181.507,00	92,83
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	140.347.200,00	110.270.000,00	78,56
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	21.600.000,00	20.646.000,00	95,58
Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.496.000.000,00	2.300.897.092,00	92,18

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	864.000.000,00	840.510.000,00	97,28
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	10.000.000,00	1.245.000,00	12,45
Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	748.800.000,00	727.002.865,00	97,08
Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	1.044.540.000,00	1.016.678.947,00	97,33
Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	124.200.000,00	124.200.000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	43.200.000,00	43.200.000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	10.704.200.000,00	9.967.423.343,00	93,11
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	5.471.400.000,00	4.985.446.373,00	91,11
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	524.400.000,00	502.873.821,00	95,89
Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.333.550.000,00	1.954.485.200,00	83,75
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.680.100.000,00	3.501.262.521,00	95,14
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	4.004.550.000,00	3.655.672.807,00	91,28
Belanja Jasa Tenaga Supir	1.161.900.000,00	940.947.530,00	80,98
Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	79.200.000,00	78.997.500,00	99,74
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	997.100.000,00	993.943.182,00	99,68
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.105.020.000,00	961.770.750,00	87,03
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	100.000.000,00	99.600.000,00	99,60
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	1.707.798.259,00	1.426.169.259,00	83,50
Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	53.000.000,00	47.671.200,00	89,94
Belanja Jasa Kalibrasi	169.812.984,00	165.143.658,00	97,25
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	449.148.175,58	431.692.250,00	96,11
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Pengukuran Tanah	60.000.000,00	5.046.884,00	8,41
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	722.400.000,00	677.907.800,00	93,84
Belanja Tagihan Telepon	145.132.500,00	116.612.540,00	80,34
Belanja Tagihan Air	223.994.865,00	111.878.426,00	49,94
Belanja Tagihan Listrik	9.984.213.064,90	8.886.920.741,00	89,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.431.480.000,00	1.279.546.000,00	89,38
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.247.754.800,00	2.139.678.644,00	95,19
Belanja Paket/Pengiriman	11.254.000,00	9.420.000,00	83,70
Belanja Penambahan Daya	204.544.300,00	142.909.050,00	69,86
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	603.480.000,00	467.954.867,00	77,54
Belanja Lembur	2.413.072.880,00	2.369.593.480,00	98,19
Belanja Medical Check Up	67.143.900,00	28.762.650,00	42,83
Belanja Sewa Jasa Internet	242.400.000,00	225.448.000,00	93,00
Belanja Jasa Pengujian Sampel Pangan	88.440.000,00	80.295.000,00	90,79
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.979.452.910,00	4.804.026.910,00	96,47
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	21.048.081.742,00	17.987.067.001,00	85,45

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.257.910.912,00	1.250.581.464,00	99,41
Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	15.338.766.487,11	13.315.479.000,00	86,80
Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.950.681.712,89	1.639.414.000,00	84,04
Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.984.568.579,00	1.315.285.174,00	66,27
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	140.532.282,00	119.055.866,13	84,71
Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	175.621.769,00	147.995.697,87	84,26
Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	200.000.000,00	199.255.799,00	99,62
Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.947.723.500,00	1.706.511.400,00	87,61
Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	347.699.000,00	219.182.000,00	63,03
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.474.724.500,00	1.362.058.400,00	92,36
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	125.300.000,00	125.271.000,00	99,97
Belanja Sewa Personal Computer	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	265.500.000,00	207.689.000,00	78,22
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	32.500.000,00	14.200.000,00	43,69
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	22.250.000,00	13.050.000,00	58,65
Belanja Sewa Bangunan Terbuka	140.000.000,00	140.000.000,00	100,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50.000.000,00	37.150.000,00	74,30
Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	3.250.000,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	17.500.000,00	3.289.000,00	18,79
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	2.250.000,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	2.250.000,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.732.607.500,00	3.426.896.144,38	91,80
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	2.311.000.000,00	2.093.314.589,04	90,58
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	437.500,00	284.000,00	64,91
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.421.170.000,00	1.333.297.555,34	93,81
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	131.283.822,00	101.891.677,00	77,61
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	3.753.518,00	703.782,00	18,74
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	6.000.000,00	1.125.000,00	18,75
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	7.000,00	0,00	0,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.154.054,00	0,00	0,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5.869.745,00	1.173.938,00	19,99
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	4.626.480,00	4.054.959,00	87,64
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(I),PBJT],	42.507.000,00	34.376.496,00	80,87
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor [(I),PKB],	41.291.043,00	40.363.791,00	97,75
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	21.074.982,00	20.093.711,00	95,34
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	6.216.405,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	167.304,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	205.960,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	412.320,00	0,00	0,00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	272.304,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	116.012,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	1.530.423,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan	310.184,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	3.306,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	331.576,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	4.000,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2.863.016,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Hak Paten	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan	11.095.362.632,68	9.786.326.376,64	88,20
Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.817.728.134,96	6.191.283.131,00	90,81
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	130.560.000,00	117.899.118,00	90,30
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	432.040.000,00	319.378.576,00	73,92
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5.581.668.134,96	5.214.016.347,00	93,41
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	46.500.000,00	45.998.000,00	98,92
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	13.000.000,00	12.110.100,00	93,15
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	80.520.000,00	73.339.000,00	91,08
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000,00	1.989.000,00	99,45

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	6.400.000,00	6.350.000,00	99,21
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	200.000,00	195.000,00	97,50
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	4.000.000,00	3.495.000,00	87,37
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	301.290.000,00	241.693.140,00	80,21
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	175.950.000,00	122.501.750,00	69,62
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	26.000.000,00	18.500.000,00	71,15
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	17.000.000,00	13.818.100,00	81,28
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	600.000,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.509.279.549,72	2.282.141.645,64	90,94
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.965.038.166,72	1.738.096.268,64	88,45
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	544.241.383,00	544.045.377,00	99,96
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.768.354.948,00	1.312.901.600,00	74,24
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.768.354.948,00	1.312.901.600,00	74,24
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	46.547.766.130,49	42.779.314.433,00	91,90
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	46.547.766.130,49	42.779.314.433,00	91,90
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.393.406.043,62	27.755.804.733,00	91,32
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.235.227.086,87	11.445.418.670,00	93,54
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.272.135.000,00	1.213.505.000,00	95,39
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.646.998.000,00	2.364.586.030,00	89,33
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.612.873.165,00	2.937.104.594,00	81,29
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.046.500.000,00	809.210.000,00	77,32
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	646.500.000,00	582.210.000,00	90,05
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	175.000.000,00	2.000.000,00	1,14
Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	225.000.000,00	225.000.000,00	100,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.566.373.165,00	2.127.894.594,00	82,91
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.566.373.165,00	2.127.894.594,00	82,91
Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP	42.623.929.571,00	42.408.692.650,00	99,49
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	42.623.929.571,00	42.408.692.650,00	99,49
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	40.916.901.758,00	40.704.288.250,00	99,48
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	1.707.027.813,00	1.704.404.400,00	99,84
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	7.409.657.000,00	4.495.540.000,00	60,67
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	7.409.657.000,00	4.495.540.000,00	60,67
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	7.409.657.000,00	4.495.540.000,00	60,67
Belanja Barang dan Jasa BLUD	28.993.257.441,70	26.888.241.819,26	92,73
Belanja Barang dan Jasa BLUD	28.993.257.441,70	26.888.241.819,26	92,73
Belanja Barang dan Jasa BLUD	28.993.257.441,70	26.888.241.819,26	92,73
Belanja Hibah	18.579.559.709,44	18.355.568.070,44	98,79
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.700.000.000,00	2.465.000.000,00	91,29
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.000.000.000,00	1.765.000.000,00	88,25
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.000.000.000,00	1.765.000.000,00	88,25
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
Belanja Hibah Dana BOS	5.100.060.000,00	5.096.277.383,00	99,92
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	5.100.060.000,00	5.096.277.383,00	99,92
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	5.100.060.000,00	5.096.277.383,00	99,92
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.004.421.709,44	1.004.421.709,44	100,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.004.421.709,44	1.004.421.709,44	100,00
Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.004.421.709,44	1.004.421.709,44	100,00
Belanja Hibah Dana BOSP	9.775.078.000,00	9.789.868.978,00	100,15
Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	0,00	0,00	0,00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	5.959.578.000,00	5.957.885.476,00	99,97
Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	5.959.578.000,00	5.957.885.476,00	99,97
Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	3.815.500.000,00	3.831.983.502,00	100,43
Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	3.815.500.000,00	3.831.983.502,00	100,43
<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>1.024.431.982.040,60</b>	<b>961.505.703.592,15</b>	<b>93,85</b>
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>124.612.480.587,28</b>	<b>117.897.232.519,34</b>	<b>94,61</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.324.365.593,22	36.503.669.035,00	95,24
Belanja Modal Alat Besar	254.250.000,00	245.825.000,00	96,68
Belanja Modal Alat Besar Darat	180.000.000,00	174.825.000,00	97,12
Belanja Modal Mesin Proses	180.000.000,00	174.825.000,00	97,12
Belanja Modal Alat Bantu	74.250.000,00	71.000.000,00	95,62
Belanja Modal Pompa	10.750.000,00	7.500.000,00	69,76
Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	63.500.000,00	63.500.000,00	100,00
Belanja Modal Alat Angkutan	6.728.002.229,00	6.353.531.700,00	94,43
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	6.728.002.229,00	6.353.531.700,00	94,43
Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.617.850.000,00	5.324.414.900,00	94,77
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	349.920.000,00	302.900.000,00	86,56
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	760.232.229,00	726.216.800,00	95,52
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.840.621.250,50	10.351.828.737,00	95,49
Belanja Modal Alat Kantor	228.257.500,00	218.153.250,00	95,57
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	113.157.500,00	105.709.800,00	93,41
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	115.100.000,00	112.443.450,00	97,69
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	10.567.363.750,50	10.088.936.937,00	95,47
Belanja Modal Mebel	2.404.085.708,50	2.346.042.523,00	97,58
Belanja Modal Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Pendingin	442.330.048,00	433.591.126,00	98,02
Belanja Modal Alat Dapur	69.684.940,00	52.340.300,00	75,10
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.414.223.112,00	7.021.886.078,00	94,70
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	237.039.942,00	235.076.910,00	99,17
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	45.000.000,00	44.738.550,00	99,41
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	45.000.000,00	44.738.550,00	99,41

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.653.184.148,00	2.593.833.440,00	97,76
Belanja Modal Alat Studio	870.063.199,00	832.337.191,00	95,66
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	175.391.125,00	165.279.200,00	94,23
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	495.832.000,00	480.721.900,00	96,95
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	198.840.074,00	186.336.091,00	93,71
Belanja Modal Alat Komunikasi	352.453.949,00	334.734.249,00	94,97
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	352.453.949,00	334.734.249,00	94,97
Belanja Modal Peralatan Pemancar	1.430.667.000,00	1.426.762.000,00	99,72
Belanja Modal Sumber Tenaga	1.430.667.000,00	1.426.762.000,00	99,72
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.806.371.875,00	1.769.364.621,00	97,95
Belanja Modal Alat Kedokteran	1.806.371.875,00	1.769.364.621,00	97,95
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.806.371.875,00	1.769.364.621,00	97,95
Belanja Modal Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	17.679.700,00	14.968.130,00	84,66
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	7.679.700,00	5.023.130,00	65,40
Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	7.679.700,00	5.023.130,00	65,40
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	10.000.000,00	9.945.000,00	99,45
Belanja Modal System/Power Supply	10.000.000,00	9.945.000,00	99,45
Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Komputer	4.714.281.318,00	4.453.781.163,00	94,47
Belanja Modal Komputer Unit	3.849.939.007,00	3.665.185.341,00	95,20
Belanja Modal Personal Computer	3.849.939.007,00	3.665.185.341,00	95,20
Belanja Modal Peralatan Komputer	864.342.311,00	788.595.822,00	91,23
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	566.399.293,00	498.086.622,00	87,93
Belanja Modal Peralatan Jaringan	297.943.018,00	290.509.200,00	97,50
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	2.320.000.000,00	2.319.000.000,00	99,95
Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	2.320.000.000,00	2.319.000.000,00	99,95
Belanja Modal Alat Pengolahan Air	2.320.000.000,00	2.319.000.000,00	99,95
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	41.958.000,00	41.958.000,00	100,00
Belanja Modal Alat Pelindung	41.958.000,00	41.958.000,00	100,00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	41.958.000,00	41.958.000,00	100,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	50.000.000,00	49.982.995,00	99,96
Belanja Modal Peralatan Olahraga	50.000.000,00	49.982.995,00	99,96
Belanja Modal Peralatan Permainan	50.000.000,00	49.982.995,00	99,96
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	5.515.881.234,00	5.506.011.734,00	99,82
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	5.515.881.234,00	5.506.011.734,00	99,82
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	5.483.551.234,00	5.473.681.734,00	99,82
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	32.330.000,00	32.330.000,00	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.382.135.838,72	2.803.583.515,00	82,89
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.382.135.838,72	2.803.583.515,00	82,89
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.382.135.838,72	2.803.583.515,00	82,89
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.612.446.832,06	32.289.429.224,78	93,28
Belanja Modal Bangunan Gedung	34.360.028.211,06	32.038.547.524,78	93,24
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	34.360.028.211,06	32.038.547.524,78	93,24
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	29.232.423.534,00	27.195.594.178,78	93,03
Belanja Modal Bangunan Kesehatan	2.248.345.000,00	2.177.687.396,00	96,85
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.167.600.000,00	2.076.477.650,00	95,79
Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	247.100.749,00	246.538.300,00	99,77
Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	303.484.780,06	182.036.000,00	59,98
Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	65.000.000,00	64.801.000,00	99,69
Belanja Modal Bangunan Parkir	96.074.148,00	95.413.000,00	99,31
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	14.668.621,00	14.465.700,00	98,61
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	14.668.621,00	14.465.700,00	98,61
Belanja Modal Pagar	14.668.621,00	14.465.700,00	98,61
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	237.750.000,00	236.416.000,00	99,43
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	237.750.000,00	236.416.000,00	99,43
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	237.750.000,00	236.416.000,00	99,43
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	44.780.420.927,00	42.172.625.744,56	94,17
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	29.814.097.000,00	27.294.321.195,61	91,54
Belanja Modal Jalan	29.466.497.000,00	26.947.587.195,61	91,45
Belanja Modal Jalan Kabupaten	22.814.497.000,00	20.663.590.800,00	90,57
Belanja Modal Jalan Desa	6.652.000.000,00	6.283.996.395,61	94,46
Belanja Modal Jembatan	347.600.000,00	346.734.000,00	99,75
Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	347.600.000,00	346.734.000,00	99,75

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
Belanja Modal Bangunan Air	7.637.850.000,00	7.601.514.084,45	99,52
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	5.279.650.000,00	5.253.667.700,00	99,50
Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	5.279.650.000,00	5.253.667.700,00	99,50
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.288.900.000,00	1.283.343.000,00	99,56
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.288.900.000,00	1.283.343.000,00	99,56
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.069.300.000,00	1.064.503.384,45	99,55
Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	1.069.300.000,00	1.064.503.384,45	99,55
Belanja Modal Instalasi	5.644.764.227,00	5.599.997.856,50	99,20
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	3.164.764.227,00	3.123.997.856,50	98,71
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	3.164.764.227,00	3.123.997.856,50	98,71
Belanja Modal Instalasi Air Kotor	2.480.000.000,00	2.476.000.000,00	99,83
Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	2.480.000.000,00	2.476.000.000,00	99,83
Belanja Modal Jaringan	1.683.709.700,00	1.676.792.608,00	99,58
Belanja Modal Jaringan Air Minum	2.209.700,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	2.209.700,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jaringan Listrik	1.681.500.000,00	1.676.792.608,00	99,72
Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	1.681.500.000,00	1.676.792.608,00	99,72
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.895.247.235,00	6.931.508.515,00	100,52
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	818.494.400,00	798.254.610,00	97,52
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	818.494.400,00	798.254.610,00	97,52
Belanja Modal Buku Umum	818.494.400,00	798.254.610,00	97,52
Belanja Modal Buku Agama	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	95.000.000,00	92.577.330,00	97,44
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	95.000.000,00	92.577.330,00	97,44
Belanja Modal Alat Musik	95.000.000,00	92.577.330,00	97,44
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	5.981.752.835,00	6.040.676.575,00	100,98
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	5.981.752.835,00	6.040.676.575,00	100,98
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	5.752.767.535,00	5.811.691.275,00	101,02
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	228.985.300,00	228.985.300,00	100,00
<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>124.612.480.587,28</b>	<b>117.897.232.519,34</b>	<b>94,61</b>

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>8.689.617.334,00</b>	<b>5.393.254.748,00</b>	<b>62,06</b>
Belanja Tidak Terduga	8.689.617.334,00	5.393.254.748,00	62,06
Belanja Tidak Terduga	8.689.617.334,00	5.393.254.748,00	62,06
Belanja Tidak Terduga	8.689.617.334,00	5.393.254.748,00	62,06
Belanja Tidak Terduga	8.689.617.334,00	5.393.254.748,00	62,06
<b>JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>8.689.617.334,00</b>	<b>5.393.254.748,00</b>	<b>62,06</b>
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>163.809.369.335,00</b>	<b>151.210.665.428,00</b>	<b>92,30</b>
Belanja Bagi Hasil	8.337.775.835,00	2.007.251.794,00	24,07
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	6.814.115.788,00	1.452.538.365,00	21,31
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	6.814.115.788,00	1.452.538.365,00	21,31
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	6.814.115.788,00	1.452.538.365,00	21,31
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.523.660.047,00	554.713.429,00	36,40
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.523.660.047,00	554.713.429,00	36,40
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.523.660.047,00	554.713.429,00	36,40
Belanja Bantuan Keuangan	155.471.593.500,00	149.203.413.634,00	95,96
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	155.471.593.500,00	149.203.413.634,00	95,96
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	155.471.593.500,00	149.203.413.634,00	95,96
Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	155.471.593.500,00	149.203.413.634,00	95,96
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH BELANJA TRANSFER</b>	<b>163.809.369.335,00</b>	<b>151.210.665.428,00</b>	<b>92,30</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.321.543.449.296,88</b>	<b>1.236.006.856.287,49</b>	<b>93,52</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(13.476.929.624,88)</b>	<b>34.136.169.741,80</b>	<b>(253,29)</b>
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>13.476.929.624,88</b>	<b>13.460.116.124,88</b>	<b>99,87</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>13.476.929.624,88</b>	<b>13.460.116.124,88</b>	<b>99,87</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	13.476.929.624,88	13.448.050.124,88	99,78
Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja	11.487.325.841,30	11.458.446.341,30	99,74
Penghematan Belanja-Belanja Operasi	11.202.250.541,30	11.173.371.041,30	99,74
Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	2.567.450.000,00	2.538.570.500,00	98,87
Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	6.645.030.000,00	6.645.030.000,00	100,00
Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	1.989.770.541,30	1.989.770.541,30	100,00
Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja Pegawai-Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja-Belanja Modal	285.075.300,00	285.075.300,00	100,00
Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Komputer	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	285.075.300,00	285.075.300,00	100,00
Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0,00	0,00	0,00
Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Sisa Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
Sisa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	0,00	0,00	0,00
Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
Sisa Belanja Lainnya	1.989.603.783,58	1.989.603.783,58	100,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	1.989.603.783,58	1.989.603.783,58	100,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	1.989.603.783,58	1.989.603.783,58	100,00
Sisa Dana BOK Puskesmas	0,00	0,00	0,00
Sisa Dana BOK Puskesmas	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	12.066.000,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	12.066.000,00	0,00
Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	0,00	12.066.000,00	0,00
Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	0,00	12.066.000,00	0,00
<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>13.476.929.624,88</b>	<b>13.460.116.124,88</b>	<b>99,87</b>
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>13.476.929.624,88</b>	<b>13.460.116.124,88</b>	<b>99,87</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>47.596.285.866,68</b>	<b>0,00</b>

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Solok, 2026

## 1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

### a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Analisis permasalahan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan langkah awal yang tepat untuk dilakukan, agar pemerintah daerah dapat menemukan isu utama yang dihadapi sebagai bahan untuk mendalami pokok permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah merupakan gap antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Rumusan masalah pokok dan akar masalah di Kabupaten Solok sebagai berikut:

Tabel 1.7

Rumusan Masalah Pokok, Masalah Dan Akar Masalah Kabupaten Solok

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
<b>TATA KELOLA PEMERINTAHAN</b>		
Belum optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Belum optimalnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Belum optimalnya kualitas kinerja, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara efektif
		Belum optimalnya sistem merit
		Belum optimalnya Penerapan sanksi atau hukuman terhadap praktik suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan belum optimal
		Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal untuk memperkuat fondasi transformasi dalam meningkatkan daya saing daerah
		Belum optimalnya penyelenggaraan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan
		Belum optimalnya penggunaan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pencapaian kinerja
		Penggunaan big data analisis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan masih belum optimal
		belum optimal kerjasama dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait untuk ketertiban dan ketentraman masyarakat penyuluhan tentang anti gratifikasi dan penanggulangan korupsi belum menjangkau semua elemen
		belum optimal kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
		Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah belum optimal
		Belum optimalnya Penyederhanaan dan pembentukan produk hukum daerah yang mendukung kebutuhan daerah
		Masih belum optimalnya pemerataan SDM Penyelenggara Pemerintah sesuai kebutuhan dan kompetensi
		belum optimal kebijakan pengembangan SDM
		Belum optimal penguatan kapasitas ASN untuk meningkatkan kualitas regulasi.
		Belum optimal kapasitas lembaga demokrasi dan parpol
		Belum optimalnya pelayanan dasar
		Belum optimalnya akses informasi dan kebebasan berpendapat, berkeyakinan dan berekspresi, dan serta memastikan perlindungan terhadap kebebasan berkeyakinan dan hak-hak asasi manusia.
		belum optimalnya pengamanan toleransi dan kerukunan hidup berbangsa dan beragama di masyarakat
		Belum optimal pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya untuk mendukung kerukunan dan stabilitas di masyarakat
		Penguatan rasa nasionalisme berwawasan nusantara masih belum optimal
Peningkatan kewaspadaan nasional belum optimal		

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Penguatan rasa nasionalisme berwawasan nusantara masih belum optimal
		Peningkatan kewaspadaan nasional belum optimal
		belum optimal partisipasi masyarakat dalam perbaikan pelayanan publik
		belum optimalnya kebijakan pelayanan Publik
		belum optimalnya kualitas pelayanan publik
		Belum optimalnya aksesibilitas layanan publik
		Belum optimal penggunaan arsitektur SPBE dalam digitalisasi
		Belum optimal penyelenggaraan pelayanan publik
		Belum optimal penerapan zona integritas dalam meningkatkan pelayanan publik
		Belum meratanya kreativitas perangkat daerah dalam pemanfaatan IT
		Ekspansi Layanan Publik masih belum optimal
		interoperabilitas antar layanan untuk pertukaran informasi belum efisien
		Keamanan Data yang masih belum optimal
		belum optimalnya Sinergitas kegiatan pembangunan TIK
		Belum optimalnya Intensifikasi literasi digital masyarakat
		Masih adanya daerah lemah sinyal
		masih belum meratanya layanan TIK
		belum optimal layanan publik yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dan investasi
		belum optimal literasi digital di lingkungan bisnis dan sektor publik
		ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung TIK termasuk di daerah terpencil belum merata
		belum optimalnya kesiapan publik untuk penerimaan dan penggunaan TIK
		belum optimalnya kegiatan Pendampingan dan edukasi TIK bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses TIK seperti penyandang disabilitas dan masyarakat berpendapatan rendah
		belum optimalnya kegiatan Pendampingan pelaku usaha Untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi digital secara efektif
		belum optimalnya Penguatan pengembangan digitalisasi di berbagai bidang
	Masih belum optimalnya pusat inovasi lokal dan pelatihan kreativitas	
	Penguatan pengembangan inovasi daerah	
	Belum optimalnya pencapaian pendapatan asli daerah	
Menggali potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap		
Melakukan kerjasama dengan swasta atau stakeholder lainnya dalam pengelolaan aset daerah		

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Penyempurnaan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi
		masih rendahnya profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia dalam layanan pemungutan pajak daerah
		belum optimalnya database layanan pajak daerah
		masih rendahnya kepatuhan wajib pajak
<b>DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA</b>		
Belum optimalnya kualitas SDM Kabupaten Solok	Masih tingginya tingkat kemiskinan	Terbatasnya akses infrastruktur seperti air bersih, sanitasi, jalan berkualitas, listrik dan jaringan internet
		Keterbatasan Akses terhadap Pendidikan Berkualitas
		Pelayanan Kesehatan Belum Merata
		Kesenjangan Data dalam Program Perlindungan Sosial sehingga bantuan sosial sering tidak tepat sasaran atau tidak berkelanjutan.
		Ketergantungan pada sektor pertanian tradisional tanpa hilirisasi menyebabkan nilai tambah rendah dan kerentanan terhadap harga pasar
		Rendahnya Produktivitas Petani dan Nelayan
		Minimnya Lapangan Kerja Formal
		Pariwisata Belum tergarap Optimal
		Budaya Konsumtif dan Ketergantungan Bantuan
		Pernikahan Dini dan Beban Ganda Perempuan
	Rendahnya Literasi Keuangan dan Kewirausahaan	
	Masih rendahnya indeks Pembangunan Manusia	Akses pelayanan kesehatan belum merata, terutama di nagari terpencil dan wilayah perbukitan.
		Fasilitas kesehatan dasar (Puskesmas, Posyandu) belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan minimal, baik dari segi tenaga medis maupun peralatan
		Angka gizi buruk dan stunting masih tinggi, terutama pada balita dan ibu hamil akibat keterbatasan edukasi gizi.
		Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) rendah
		Distribusi dan Ketersediaan Tenaga Kesehatan Kurang Merata
		Tingkat Partisipasi Sekolah Menurun di Jenjang Lanjut
		Rendahnya Mutu dan Pemerataan Pendidikan
		Kurangnya Akses Pendidikan tinggi dan Non-Formal
		Minimnya pendidikan vokasional dan literasi digital
Ketergantungan pada Sektor Pertanian Tradisional		
Rendahnya Akses ke Peluang Ekonomi Produktif		

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Banyak Pekerja di Sektor Informal & Rentan
		Infrastruktur ekonomi (pasar, jalan produksi, konektivitas digital) belum mendukung
		Kurangnya pelatihan dan inkubasi UMKM.
		Belum optimalnya perkembangan ekonomi kreatif dan pariwisata sebagai sumber pendapatan baru.
Belum optimalnya kesejahteraan sosial masyarakat	Belum Optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Masih kuatnya budaya patriarki
		Pernikahan usia anak masih terjadi
		Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sering tidak dilaporkan karena dianggap aib
		Kurangnya kesadaran masyarakat bahwa kekerasan adalah pelanggaran hukum, bukan masalah pribadi
		Kurangnya program pemberdayaan ekonomi berbasis gender
		Rendahnya pengetahuan anak dan remaja tentang hak-hak mereka
		Anak rentan terhadap eksploitasi digital dan kekerasan siber
		Pengawasan orang tua terhadap aktivitas online anak rendah.
		Kurangnya SDM terlatih dalam program perlindungan perempuan dan anak(konselor, psikolog, pendamping hukum).
		Layanan pendampingan korban masih sangat terbatas
	Tidak semua nagari memiliki mekanisme perlindungan yang aktif	
	Belum optimalnya kesetaraan gender	kesenjangan Akses dan Mutu Pendidikan Perempuan
		Rendahnya partisipasi perempuan dalam pendidikan vokasional atau teknologi
		Masih rendahnya pengetahuan dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi di beberapa nagari
		Tingkat kematian ibu melahirkan belum sepenuhnya dapat ditekan
		Sebagian besar perempuan di pedesaan bekerja di sektor informal dan tanpa perlindungan kerja, seperti buruh tani, pelaku UMKM skala rumah tangga, atau pengrajin
		Pembagian peran domestik dan sosial menyebabkan beban ganda, perempuan dituntut bekerja dan mengurus rumah tangga sekaligus
		Representasi dan Kepemimpinan Perempuan Masih Rendah
		Kasus KDRT, pelecehan seksual, dan kekerasan anak masih terjadi, tetapi banyak yang tidak dilaporkan karena tekanan sosial atau minimnya layanan perlindungan
		layanan perlindungan perempuan dan anak (PPA) belum menjangkau seluruh kecamatan secara efektif, dan SDM pendamping kasus masih terbatas
integrasikan analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran ( <i>gender budgeting</i> ) belum optimal		
Data terpilah berdasarkan jenis kelamin belum digunakan secara maksimal dalam pengambilan keputusan.		

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	Masih rendahnya mutu dan akses pendidikan	letak geografis kabupaten Solok menyebabkan akses ke sekolah (terutama jenjang SMP dan SMA) menjadi sulit dan mahal
		Ketersediaan Sarana Prasarana pendidikan Belum Merata
		Transportasi ke sekolah terbatas
		Angka Putus Sekolah dan Tidak Sekolah Masih Tinggi
		Minimnya Layanan Pendidikan Inklusif dan Kesetaraan
		Distribusi Guru Tidak Merata
		Belum semua guru memiliki sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan yang memadai
		Rendahnya Literasi dan Numerasi Siswa
		masih kurangnya perangkat TIK dan koneksi internet serta Guru belum terlatih secara optimal dalam pembelajaran digital.
		Kurangnya Kegiatan Penguatan Karakter dan Kreativitas
		Minimnya Kesadaran akan Pentingnya Pendidikan Tinggi
		Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat
	Tenaga Kesehatan Terbatas	
	Fasilitas dan Peralatan Kesehatan Tidak Memadai	
	Proses rujukan dari Puskesmas ke rumah sakit kabupaten memerlukan waktu dan biaya yang tinggi, khususnya di wilayah dengan keterbatasan transportasi.	
	Sanitasi Lingkungan Masih rendah	
	Angka stunting masih cukup	
	Pola Hidup Tidak Sehat	
	Rendahnya Kesadaran Preventif dan Promotif	
	Partisipasi dalam JKN/UHC Belum Merata	
	Belum optimalnya pelayanan sosial masyarakat	Pendataan dan Basis Data Kesejahteraan Sosial Belum Akurat
		Kapasitas dan Cakupan Lembaga Kesejahteraan Sosial Masih Terbatas
		Belum Optimalnya Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial bagi Kelompok Rentan
		Respons Terhadap Bencana Sosial dan Kekerasan Masih Lemah
		Minimnya Literasi Sosial dan Partisipasi Masyarakat
		Keterbatasan sarana, tenaga, dan anggaran rehabilitasi sosial
		Belum terintegrasinya program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan sosial

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	Belum optimalnya pembangunan pemuda dan olahraga	Keterbatasan fasilitas, pembinaan, dan program pemberdayaan pemuda
		Rendahnya akses, partisipasi, dan ruang pengembangan diri bagi pemuda
		Minimnya penguatan SDM dan sistem pembinaan olahraga
	Belum optimalnya pembangunan literasi masyarakat	Masih lemahnya infrastruktur literasi
		Pengelolaan perpustakaan belum optimal
		Kurangnya budaya baca dan kegiatan literasi
		Literasi belum dipandang sebagai kebutuhan utama seperti ekonomi, kesehatan, dan infrastruktur.
		Minim kegiatan literasi berbasis masyarakat seperti bedah buku, lomba menulis, kelas baca anak, atau komunitas baca
		Budaya membaca masih lemah, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat umum
		Penggunaan media sosial dan hiburan digital lebih dominan, tanpa diimbangi literasi digital atau bacaan produktif.
<b>Implementasi Nilai Adat, Budaya dan Agama</b>		
Melemahnya implementasi nilai adat dan budaya masyarakat yang sesuai dengan ABS-SBK	Masih rendahnya pelestarian nilai-nilai adat dan budaya masyarakat yang sesuai dengan ABS-SBK	Berkurangnya penggunaan pakaian adat daerah.
		Belum optimalnya upaya babaliak ka nagari
		Memudarnya penggunaan kato nan ampek.
		Memudarnya gotong royong
		Tergerusnya etika dan sopan santun generasi muda.
	Terkikisnya pemahaman dalam penerapan ABS-SBK.	
	Kurangnya dukungan pemerintah untuk pelestarian adat, budaya dan cagar budaya	Terbatasnya perhatian pemerintah terhadap isu pelestarian adat, budaya dan cagar budaya karena keterbatasan anggaran
<b>Ekonomi inklusif, Infrastruktur, Lingkungan dan Kebencanaan</b>		
Masih rendahnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Masih rendahnya produktivitas pertanian dan perikanan	Tingginya alih fungsi lahan pertanian
		Masih kurangnya bibit benih unggul
		Belum optimalnya penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana
		Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi
		Belum optimalnya kuantitas dan kapasitas SDM
		Belum optimalnya pengendalian penyakit dan hama
		Masih terjadinya overfishing
		Terganggunya keseimbangan ekosistem
		Belum optimalnya penangkaran potensi lokal

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Masih rendahnya jangkauan pemasaran
		Belum optimalnya penggunaan kalender tanam
		Masih lemahnya pengawasan perlindungan kawasan pertanian dan peternakan
		belum optimalnya pengendalian ternak
	Masih Rendahnya hilirisasi pertanian	Masih pola pikir masyarakat terhadap nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan
		Kelembagaan belum berorientasi agribisnis
		Belum optimalnya pemanfaatan digitalisasi
		Kurangnya tindak lanjut MoU dengan stakeholder terkait
Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian	Belum optimalnya daya saing sektor pariwisata	Belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata
		Belum optimalnya sarana dan prasarana
		Belum optimalnya pemasaran di sektor pariwisata
		Masih kurangnya dukungan masyarakat
		Masih kurangnya kemitraan dengan stakeholder terkait
		Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM
		Belum optimalnya pemanfaatan digitalisasi
		Masih kurangnya penyelenggaraan event
		Belum optimalnya pengembangan seni budaya lokal
		Menurunnya nilai adat dan budaya ditengah generasi muda
	Belum optimalnya pengembangan seni budaya	
	belum merata investasi sektor pariwisata	
	Masih rendahnya daya saing ekonomi kreatif	Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM
		Masih rendahnya pemanfaatan dan perlindungan hak intelektual
		Masih kurangnya sarana dan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif
		Belum optimalnya pemanfaatan digitalisasi
		Masih terbatasnya akses permodalan
		Belum optimalnya pemasaran

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	
Masih rendahnya pertumbuhan UMKM naik kelas dan Koperasi Berkualitas	Masih rendahnya daya saing	Masih terbatasnya akses permodalan	
		Belum optimalnya kualitas SDM	
		Belum optimalnya sarana (peralatan) UMKM	
		Masih rendahnya pengembangan usaha dan diversifikasi produk	
		Masih kurangnya pemanfaatan digitalisasi untuk pemasaran produk UMKM	
		Masih kurangnya promosi produk UMKM	
	Belum optimalnya kemitraan	Kurangnya kerjasama dengan lembaga keuangan	
		Kurangnya kerjasama sesama pelaku usaha dan stakeholder terkait	
	Masih rendahnya koperasi berkualitas	Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM pengurus /pengelola koperasi dan pembina	Masih rendahnya Kepercayaan masyarakat terhadap koperasi
			masih belum optimalnya akses permodalan
			Masih rendahnya partisipasi aktif anggota
			Masih kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi
			masih terbatasnya inovasi dalam berkoperasi
	Masih Rendahnya pertumbuhan sektor Industri	Masih rendahnya daya saing industri kecil menengah	Masih kurangnya sarana IKM
Masih rendahnya kapasitas SDM pelaku IKM			
Belum adanya kawasan khusus untuk pengembangan industri potensial			
Masih kurangnya promosi produk IKM			
Belum optimalnya pemanfaatan digitalisasi IKM			
Masih kurangnya pengembangan usaha dan diversifikasi produk IKM			
Belum optimalnya kerja sama pola kemitraan IKM		Masih kurangnya kerjasama dengan lembaga keuangan	
		Masih kurangnya kerjasama / kemitraan sesama pelaku IKM dan stakeholder terkait	
Masih Rendahnya pertumbuhan sektor perdagangan		Belum optimalnya kualitas pelayanan pasar	Kurangnya sarana dan prasarana Perdagangan
			Status tanah pasar yang tidak jelas/bersertifikat
			Belum optimalnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan
Masih Rendahnya Iklim Investasi Yang kompetitif	Masih Rendahnya Investasi di Kabupaten Solok	Belum Tersedianya Regulasi tentang Kemudahan dan Perlindungan Berinvestasi	
		Belum Adanya Database dan Dokumen Perencanaan Investasi yang valid	
		Sebagian besar status tanah adalah tanah ulayat dan belum bersertifikat	
		Belum optimalnya promosi dalam berinvestasi	
		masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat investasi	

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	
Kompetensi angkatan kerja belum sesuai dengan kebutuhan dunia usaha	Masih Rendahnya Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja	Angkatan kerja belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan Dunia Usaha	
		Kurangnya Keterampilan Angkatan Kerja	
		Masih Tingginya angka anak putus sekolah	
	Terbatasnya peluang dan Kesempatan Kerja yang tersedia		Masih Terbatasnya lapangan Pekerjaan yang tersedia
			Masih rendahnya Motivasi pencari kerja untuk berwirausaha
			Rendahnya minat pencari kerja untuk bekerja di luar daerah dan luar negeri
			Kurangnya informasi lowongan kerja
	Masih belum harmonisnya hubungan industrial		masih terbatasnya akses dan informasi kebutuhan dunia usaha
			Masih rendahnya kepatuhan dunia usaha dalam menerapkan peraturan ketenagakerjaan
			belum optimalnya peninjauan dan kerjasama dengan dunia usaha
	Belum meratanya pembangunan infrastruktur	Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis	Masih kurangnya pembinaan dan pengawasan
			Masih rendahnya aksesibilitas dan konektivitas daerah
Belum terlayannya semua daerah irigasi kewenangan kabupaten			
Belum optimal pemenuhan akses air minum			
Belum optimalnya pemenuhan layanan air minum untuk daerah terpencil yang tidak terjangkau perpipaan			
Belum terpenuhinya sarana sanitasi untuk rumah tinggal			
Belum optimalnya penyediaan infrastruktur sanitasi sesuai SNI			
Belum optimalnya layanan pengelolaan lumpur tinja			
Belum meratanya fasilitas pengolahan sampah			
Belum meratanya infrastruktur digital dan teknologi informasi			
Belum optimalnya keterpaduan pembangunan infrastruktur			
Belum optimalnya sarana drainase pengendali banjir			
Masih terdapatnya kawasan permukiman yang tidak dilengkapi PSU			
Minimnya lahan yang clear and clean untuk pembangunan infrastruktur			
Masih rendahnya kualitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis			Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur publik
			belum optimalnya tingkat kemantapan jalan
			Belum optimalnya kondisi daerah irigasi
			Menurunnya kondisi bangunan pengelolaan air minum
	Bangunan sanitasi belum sesuai SNI		
	Belum adanya pembangunan tahan bencana		

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	
		Belum optimalnya penyediaan database infrastruktur yang valid	
		belum optimalnya ketersediaan sarana kelengkapan jalan	
		belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola infrastruktur	
		Belum Optimalnya tenaga konstruksi yang bersertifikat	
	Masih belum optimalnya pelayanan transportasi		Masih kurangnya fasilitas pendukung keselamatan dan keamanan transportasi
			Belum optimalnya database transportasi
			belum optimalnya peran serta forum Lalin
	Belum optimalnya Penyelenggaraan Penataan ruang daerah		Belum optimalnya perencanaan ruang
			Masih terdapatnya pelanggaran pemanfaatan ruang
			Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan ruang
			Pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan arahan tata ruang
			Masih rendahnya Law Enforcement tata ruang
			Belum optimalnya keterpaduan infrastruktur sesuai arahan tata ruang
Tingginya resiko kerawanan bencana	Kondisi geologi dan topografi Kab. Solok yang berada pada rawan bencana	Belum tersedianya Database kebencanaan yang valid	
		Tingginya resiko bencana	
		Masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait kebencanaan	
		Belum optimalnya penyediaan Sarpras kebencanaan baik untuk mitigasi, tanggap darurat dan pasca bencana	
		Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM Kebencanaan	
		Belum Optimalnya peran serta Kelompok Siaga Bencana (KSB) dalam Penanggulangan Bencana	
		masih lemah kolaborasi dan sinergitas dalam penanggulangan bencana	
masih terbatasnya akses informasi terkait kebencanaan			
Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan	belum terpenuhinya kualitas air, udara dan tutupan lahan	masih belum optimalnya pembangunan yang berbasis risiko bencana	
		Belum optimalnya kualitas air	
		Belum optimalnya kualitas udara	
		Belum optimalnya kualitas tutupan lahan	
		Masih rendahnya penegakan hukum lingkungan	
		Masih terbatasnya kuantitas dan kapasitas PPLH	
Belum optimalnya pengelolaan persampahan (sistem pengolahan sampah yang masih berfokus kepada pelayanan pengangkutan sampah ke TPA Regional),			

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Rendahnya kesadaran Masyarakat dlm penanganan sampah di sumber karena belum optimal advokasi terkait persampahan ke masyarakat
		Masih terbatasnya sarpras terkait persampahan
		Belum optimalnya pengelolaan ruang terbuka hijau (Belum tertatanya dan terpeliharanya RTH)
		Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup (lemah law enforcement terhadap pelanggaran bidang lingkungan hidup)
		Belum optimalnya peran stakeholder dalam penanganan sampah
		Belum optimalnya daya tampung TPA Regional (perlu hibah lahan ke Pemprov)

Sumber: Perda Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Solok 2025-2029.

### b. Visi Dan Misi Kepala Daerah

Visi dan misi yang menjadi dasar serta acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Solok tahun 2025-2029 adalah visi dan misi serta janji kerja dari Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2025-2029 yang terpilih. Oleh sebab itu visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok periode 2025-2029 yang terpilih langsung menjadi visi pembangunan daerah sebagai berikut :

#### **“TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG MELAYANI MENUJU MASYARAKAT MADANI NAN SEJAHTERA”**

Visi ini memuat tiga kata kunci kondisi yang diharapkan lima tahun ke depan yakni : Pemerintahan yang melayani, Madani dan Sejahtera. Ketiga kata kunci tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut ;

1. “Pemerintahan Yang Melayani“, dimaksudkan Penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh organ-organ pemerintahan dalam menjalankan amanah sesuai dengan aturan, memberikan kemudahan, kepastian dan berintegritas dalam melayani.
2. “Masyarakat madani“, dimaksudkan Pemerintah Daerah ingin mewujudkan atau membangun masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, memaknai kehidupannya, taat akan agama, memiliki integritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan filosofi ; “ Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah.
3. “Sejahtera“, dimaksudkan masyarakat yang terbebas dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga memperoleh kehidupan yang aman dan tentram.

Persandingan visi RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dengan visi RPJPD Kabupaten Solok Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029, dapat dilihat gambar berikut:

**Gambar 1.2**  
**Penyelarasan antara Visi RPJMD Tahun 2025-2029**  
**dengan RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi dan RPJMN Tahun 2025-2029**



Sumber:Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 dan Perda Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045 serta Rancangan Akhir RPJMD Prov. Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Berdasarkan pemaknaan visi Kabupaten Solok “Terwujudnya Pemerintahan yang Melayani Menuju Masyarakat Madani Nan Sejahtera”, maka dirumuskan sasaran visi yang mengacu kepada sasaran Visi RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.8**  
**Sasaran, Indikator dan Target Visi RPJMD Kabupaten Solok**

NO	INDIKATOR	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	Peningkatan PDRB per kapita						
	PDRB Per kapita ADHB (Juta Rupiah)	43,71	43.71	56.28	68.84	81.41	106.54
	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	4,84	5.11	5.38	5.65	5.92	6,19
II	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan						
	Tingkat Kemiskinan	5,46-6,18	5,15-5,86	4,84-5,54	4,54-5,22	4,23-4,90	3,93-4,59
	Indeks Gini	0,234	0.231	0.228	0.225	0.222	0,219
	Pertumbuhan Ekonomi	5,31	5.45	5.59	5.72	5.86	6,00
III	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah						
	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3	3,10	3,20	3,30	3,40	3.5
IV	Peningkatan daya saing sumber daya manusia						
	IPM	72,35	73,21	73,65	74,07	74,51	74,51

NO	INDIKATOR	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	19,683,151	24,583,170	29,483,189	34,383,209	39,283,228	24,500,096
V	Peningkatan kualitas lingkungan hidup						
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78.66	78,87	79,08	79,3	79,51	79.72

Sumber : Perda Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045.

Sedangkan Misi merupakan penggambaran dari visi yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Untuk dapat mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Solok yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Solok tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Smart Government dan Berintegritas dalam Melayani

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengoptimalkan sumber daya secara efisien. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penataan pemerintahan dan layanan berbasis digital adalah penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sehingga dapat membuat tata kelola pemerintahan lebih bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat menggunakan layanan-layanan digital yang sudah dikembangkan oleh Pemerintah Pusat maupun Provinsi sehingga nantinya tidak terdapat tumpang tindih layanan pemerintah. Dalam misi ini diharapkan juga adanya pengembangan sumber daya manusia secara digital, keamanan dan perlindungan data-data Pemerintah Daerah serta pengetahuan dan penguasaan teknologi informasi itu sendiri seperti infrastruktur jaringan, keamanan dan pengelolaan data.

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Global

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang baik secara fisik dan mental sehingga dapat menjadi pusat pembangunan sosial ekonomi karena memiliki kemampuan dinamis dalam melakukan kegiatan pembangunan. SDM merupakan faktor penting dalam pembangunan daerah. Tanpa SDM yang berkualitas, banyak aspek pembangunan yang akan terhambat. Peningkatan kualitas dilakukan melalui peningkatan kualitas Kesehatan dan peningkatan kualitas pendidikan.

### 3. Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Adat dan Budaya

Misi ini bertujuan untuk memfasilitasi dan meningkatkan peran pemerintah daerah dalam sektor adat dan budaya melalui peningkatan peran Tungku Tigo Sajaringan dan Tali Tigo Sapilin yang merupakan ciri khas daerah. Pelestarian nilai-nilai adat dan budaya masyarakat sesuai dengan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah juga merupakan salah satu tujuan dari misi ini. Setiap manusia pasti akan mendambakan kehidupan yang harmonis, tentram dan damai dalam kehidupannya. Disinilah norma-norma adat dan budaya tersebut memegang peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.

### 4. Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi dan Sumber Daya Nagari

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Sektor-sektor unggulan dan potensi yang ada di Kabupaten Solok. Sektor unggulan tersebut diantaranya adalah sektor Pertanian, UMKM, Perdagangan dan Pariwisata yang nantinya diharapkan dapat memberi dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat secara umum, upaya untuk menciptakan lapangan kerja serta upaya pengurangan kemiskinan dan pemerataan pendapatan.

**Gambar 1.3**  
**Keselarasan Misi RPJMD Tahun 2025-2029**  
**dengan Misi RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029**

Misi RPJMD Tahun 2025–2029	Misi RPJPD Tahun 2025–2045	Misi RPJMN Tahun 2025–2029
<p><b>1</b> Mewujudkan Smart Government dan Berintegritas dalam Melayani</p>	<p><b>M 3</b> Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan baik dan bersih</p> <p><b>M 4</b> Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah</p>	<p><b>7</b> Asta Cita Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba</p>
<p><b>2</b> Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Global</p>	<p><b>M 1</b> Mewujudkan transformasi sosial melalui pembangunan manusia yang berkualitas</p>	<p><b>4</b> Asta Cita Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.</p>
<p><b>3</b> Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Adat dan Budaya</p>	<p><b>M 5</b> Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai "ABS-SBK" dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan serta siaga bencana</p>	<p><b>8</b> Asta Cita Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur</p>
<p><b>4</b> Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi dan Sumber Daya Nagari</p>	<p><b>M 2</b> Mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan</p> <p><b>M 6</b> Mewujudkan pembangunan wilayah secara merata dan berkeadilan</p> <p><b>M 7</b> Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan</p> <p><b>M 8</b> Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah</p>	<p><b>1</b> Asta Cita Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)</p> <p><b>2</b> Asta Cita Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru</p> <p><b>3</b> Asta Cita Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur</p> <p><b>5</b> Asta Cita Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri</p> <p><b>6</b> Asta Cita Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan</p>

Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 dan Perda Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045.

**c. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah**

Program Pembangunan Daerah berdasarkan dokumen Rencana Perencanaan Jangka Menengah Daerah di Kabupaten Solok yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2026-2029, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.9**  
**Seluruh Program Perangkat Daerah TA.2025**

<b>BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME</b>
<b>1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>
<b>1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah
<b>1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah
<b>1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan
<b>1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidik
<b>1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan
<b>1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA</b>
Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah
<b>1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>
<b>1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah
<b>1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>
Meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat
<b>1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>
meningkatkan mutu dan distribusi tenaga kesehatan
<b>1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>
meningkatkan kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman
<b>1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>
meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
<b>1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>
<b>1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah
<b>1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>
meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatkan akses masyarakat terhadap irigasi
<b>1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum

<b>BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME</b>
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
Meningkatnya layanan persampahan
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap sanitasi yang layak
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
meningkatkan kualitas sistem drainase perkotaan
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
meningkatnya kualitas bangunan gedung
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
meningkatnya bangun dan lingkungan yang tertata
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
meningkatkan aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Terpenuhinya rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
Tercapainya peningkatan penanganan rumah tidak layak huni
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU tingkat kemampuan menengah
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkara
meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat
meningkatnya kapasitas SDM PPNS
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

<b>BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME</b>
meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana
<b>1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>
meningkatnya layanan pencegahan kebakaran
meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
<b>1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>
<b>1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah
<b>1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>
meningkatnya pemberdayaan sosial
<b>1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>
meningkatnya rehabilitasi sosial
<b>1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>
meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial
<b>1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>
meningkatnya perlindungan sosial korban bencana
<b>1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>
meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan
<b>2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>
<b>2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Meningkatnya Layanan Administrasi Kesekretariatan
<b>2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>
terkelolanya informasi tenaga kerja
<b>2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>
meningkatnya produktivitas tenaga kerja
<b>2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>
meningkatnya penempatan tenaga kerja
<b>2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>
meningkatnya pekerja indonesia yang terlindungi
<b>2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>
<b>2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>
meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan
<b>2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>
menurunnya kekerasan terhadap perempuan
<b>2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>
meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak
<b>2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>
meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak
<b>2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>
terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif
<b>2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>

<b>BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME</b>
meningkatnya pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak
<b>2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>
<b>2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah
<b>2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN</b>
meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
<b>2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>
meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
<b>2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>
meningkatnya penanganan kerawanan pangan
<b>2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>
meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan
<b>2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>
<b>2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan
<b>2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)
<b>2.10.07 - PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT</b>
meningkatnya pengelolaan tanah kosong
<b>2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>
meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah
<b>2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>
<b>2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah
<b>2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>
meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP
<b>2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>
menurunnya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup
<b>2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>
meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati
<b>2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>
meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)
<b>2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan
<b>2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>
meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup
<b>2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>
meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

<b>BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME</b>
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
meningkatnya tata kelola persampahan
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL
meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
meningkatnya kualitas profil kependudukan
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA
meningkatnya kualitas penataan desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
meningkatnya efektivitas kerja sama desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

<b>BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME</b>
meningkatnya kualitas layanan transportasi danau
2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
meningkatnya pengelolaan perlintasan kereta api
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
meningkatnya kualitas SDM perkoperasian
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
meningkatnya produktivitas koperasi
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
meningkatnya daya saing UMKM
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
meningkatnya kemudahan berinvestasi
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
terkendalinya pelaksanaan penanaman modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
Rasio pemuda berwirausaha
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

<b>BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME</b>
Persentase atlet yang mendapat medali
<b>2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>
Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan
<b>2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>
<b>2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>
Tercapainya kolaborasi , integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)
<b>2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>
<b>2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah
<b>2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>
<b>2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>
meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional
<b>2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>
meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional
<b>2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>
meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional
<b>2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>
meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan
<b>2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>
<b>2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>
<b>2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>
meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan
<b>2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>
meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno
<b>2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>
<b>2.24.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
<b>2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>
meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis
<b>2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>
meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK
<b>2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP</b>
meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup
<b>3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>
<b>3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>
meningkatnya produksi perikanan tangkap
<b>3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>
meningkatnya produksi perikanan budidaya
<b>3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>
meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati
<b>3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>
meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat
<b>3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>
<b>3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>

<b>BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME</b>
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah
<b>3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>
meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata
<b>3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>
meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata
<b>3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>
meningkatnya kualitas ekosistem kreatif
<b>3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>
meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
<b>3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>
<b>3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
<b>3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian
<b>3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>
meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian
<b>3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
<b>3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>
meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
<b>3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>
Meningkatnya SDM Bidang Penyuluhan Pertanian
<b>3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>
<b>3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>
meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran usaha
<b>3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>
meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien merata dan terintegrasi
<b>3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>
meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
<b>3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>
meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor
<b>3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>
meningkatnya tertib niaga dan mutu produk
<b>3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>
meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
<b>3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>
<b>3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>
meningkatnya realisasi pembangunan industri
<b>3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>
meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian
<b>3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>
meningkatnya pemanfaatan informasi industri

<b>BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME</b>
<b>4.01 - SEKRETARIAT DAERAH</b>
<b>4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah
Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah
<b>4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah
Meningkatnya kualitas kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan
<b>4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>
meningkatkan kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian
Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa
Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan
<b>4.02 - SEKRETARIAT DPRD</b>
<b>4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah
<b>4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>
meningkatkan kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan
meningkatkan kualitas penganggaran dan pengawasan
<b>5.01 - PERENCANAAN</b>
<b>5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah
<b>5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
<b>5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan
<b>5.02 - KEUANGAN</b>
<b>5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah
<b>5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>
meningkatkan tata kelola anggaran
meningkatkan tata kelola perbendaharaan
meningkatkan tata kelola akuntansi dan pelaporan
<b>5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>
meningkatkan tata kelola aset daerah
<b>5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan
Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan
<b>5.03 - KEPEGAWAIAN</b>
<b>5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>

<b>BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME</b>
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah
<b>5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>
meningkatnya pengembangan kompetensi ASN
meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN
meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian
meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN
<b>5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>
<b>5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>
meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi
meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi
meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional
meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis
<b>5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>
<b>5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan
meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah
<b>5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH</b>
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah
<b>6.01 - INSPEKTORAT DAERAH</b>
<b>6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah
<b>6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>
menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan
<b>6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>
meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi
<b>7.01 - KECAMATAN</b>
<b>7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah
<b>7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
<b>7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
<b>7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
<b>7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
meningkatkan kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
meningkatkan etika dan budaya politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
meningkatkan ketertiban organisasi kemasyarakatan
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
meningkatkan penanganan konflik sosial yang diselesaikan

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2026-2029

#### **d. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan**

Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan dimuat pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.10**  
**Seluruh Kegiatan Pembangunan Daerah TA. 2025**

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Mebel
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Mebel
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Pembangunan Perpustakaan Sekolah
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
Pengadaan Mebel Sekolah
Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
Pemeliharaan Mebel Sekolah
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
Pengembangan konten digital untuk pendidikan
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Penyediaan infrastruktur TIK
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
Penataan Ruang/Sudut Baca
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
Pembangunan Ruang Kelas Baru
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Pembangunan Perpustakaan Sekolah
Pembangunan Laboratorium
Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
Pembangunan Asrama Sekolah
Pembangunan Fasilitas Parkir
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Pengadaan Mebel Sekolah
Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
Pengembangan konten digital untuk pendidikan
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
Pembangunan Ruang Kelas Baru
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
Penyediaan infrastruktur TIK
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
Pengelolaan Dana BOP PAUD
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
Pengembangan konten digital untuk pendidikan
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pembangunan Ruang Kelas Baru
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
Pengembangan konten digital untuk pendidikan
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
Pembangunan Ruang Kelas Baru
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan
Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>
Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA</b>
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota
Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota
Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
Dinas Kesehatan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Mebel
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Mebel
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan Puskesmas
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
Pengembangan Puskesmas
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
<b>NON URUSAN</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pengembangan Rumah Sakit
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Operasional Pelayanan Rumah Sakit
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
Puskesmas Sulit Air
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
Operasional Pelayanan Puskesmas
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Puskesmas Singkarak
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
Operasional Pelayanan Puskesmas
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Puskesmas Peninggahan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
Operasional Pelayanan Puskesmas
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Puskesmas Paninjauan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
Operasional Pelayanan Puskesmas

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Puskesmas Kayu Jao
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
Operasional Pelayanan Puskesmas
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Puskesmas Sungai Lasi
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
Operasional Pelayanan Puskesmas
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Puskesmas Muara Panas
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
Operasional Pelayanan Puskesmas
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Puskesmas Sirukam
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
Operasional Pelayanan Puskesmas
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Puskesmas Selayo
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
Operasional Pelayanan Puskesmas
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Puskesmas Jua Gaek
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
Operasional Pelayanan Puskesmas
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Puskesmas Talang
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
Operasional Pelayanan Puskesmas
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Puskesmas Tanjung Bingkung
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
Operasional Pelayanan Puskesmas
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Puskesmas Simpang Tanjung Nan IV
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
Operasional Pelayanan Puskesmas
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Puskesmas Bukit Sileh
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
Operasional Pelayanan Puskesmas
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Puskesmas Alahan Panjang
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
Operasional Pelayanan Puskesmas
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Puskesmas Talang Babungo
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Operasional Pelayanan Puskesmas
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Puskesmas Surian
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
Operasional Pelayanan Puskesmas
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Puskesmas Batu Bajanjang
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
Operasional Pelayanan Puskesmas
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Puskesmas Sungai Nanam
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
Operasional Pelayanan Puskesmas
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
LABKESDA Kabupaten Solok
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Normalisasi/Restorasi Sungai
Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Pembangunan Jalan
Rekonstruksi Jalan
Pemeliharaan Berkala Jalan
Pembangunan Jembatan
Pemeliharaan Rutin Jalan
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>
<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
<b>NON URUSAN</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
<b>NON URUSAN</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
NON URUSAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
Investigasi Kejadian Kebakaran
Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
Dinas Sosial
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Penyediaan Permakanan
Penyediaan Sandang
Penyediaan Alat Bantu
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
Pemberian Layanan Kedaruratan
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
Pemberian Layanan Rujukan
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
Rujukan Anak-Anak Terlantar
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
Penyediaan Makanan
Penyediaan Sandang
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana
<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
Pengendalian Program KKBPK
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
Dinas Lingkungan Hidup
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>
Penyimpanan sementara Limbah B3
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>
Pengelolaan Sampah
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota
Penanganan sampah melalui pengangkutan
Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah
Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah
Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Bahan/Material
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>
Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
Penataan Pendaftaran Penduduk
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk
<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>
Pelayanan Pencatatan Sipil

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil
Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil
Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil
<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>
Penyusunan Profil Kependudukan
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>
Penyelenggaraan Penataan Desa
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
Dinas Perhubungan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>
Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Relasi Media
Pelayanan Informasi Publik
Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
Penyusunan Konten
<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
Koordinasi penyusunan dan/atau reu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia
Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>
<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pameran Dagang Nasional
Pameran Dagang Lokal

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>
<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>
<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Job Fair/Bursa Kerja
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
Pengawasan Penanaman Modal
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
<b>NON URUSAN</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Fasilitasi Kunjungan Tamu
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Fasilitasi Kunjungan Tamu
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat
<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota
Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang
Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang
Dinas Perikanan dan Pangan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN</b>
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Pemantauan Stok Pangan
Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota
Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan
Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Mebel
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
Penetapan Cagar Budaya
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota
Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)
Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota
Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota
<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>
Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah
Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)
Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual
Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual
Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah
Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI
Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
Dinas Pertanian
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pengadaan Mebel
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer
Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan
Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>
Pengembangan Prasarana Pertanian
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
Pembangunan Prasarana Pertanian
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum
Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum
Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)
Pengawasan Peredaran Produk Hewan
Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM
Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan
Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha
<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian
Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota
Sekretariat Daerah
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
Penataan Organisasi
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Fasilitasi Keprotokolan
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
Pendokumentasian Tugas Pimpinan
<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>
Administrasi Tata Pemerintahan
Penataan Administrasi Pemerintahan
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
Fasilitasi Bantuan Hukum
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
Fasilitasi Kerja Sama Daerah
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
Sekretariat DPRD
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>
<b>SEKRETARIAT DPRD</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Mebel
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
Layanan Administrasi DPRD
Fasilitasi Fraksi DPRD
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
Penyusunan Tata Tertib DPRD
Pembahasan Kebijakan Anggaran
Pembahasan KUA dan PPAS
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Pembahasan APBD
Pembahasan APBD Perubahan

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Pembahasan Laporan Semester
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Pengawasan Penggunaan Anggaran
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Peningkatan Kapasitas DPRD
Pendalaman Tugas DPRD
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
Penyusunan Program Kerja DPRD
Publikasi dan Dokumentasi DPRD
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
Kunjungan Kerja dalam Daerah
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Pelaksanaan Reses
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
Penyusunan Kode Etik DPRD
Pengawasan Kode Etik DPRD
Pembahasan Kerja Sama Daerah
Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah
Fasilitasi Tugas DPRD
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>
<b>PERENCANAAN</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
Pelaksanaan Konsultasi Publik
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>
<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan
Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial
Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
Badan Keuangan Daerah
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>
<b>KEUANGAN</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pengadaan Mebel
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Penyusunan Standar Harga
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah
Pengamanan Barang Milik Daerah
Penilaian Barang Milik Daerah
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
Penagihan Pajak Daerah
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
Badan Pendapatan Daerah
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
KEUANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pengadaan Mebel
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Mebel
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
Penagihan Pajak Daerah
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>
<b>KEPEGAWAIAN</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
<b>NON URUSAN</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>
<b>KEPEGAWAIAN</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
<b>NON URUSAN</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>
<b>KEPEGAWAIAN</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
<b>NON URUSAN</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
KEPEGAWAIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
KEPEGAWAIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
KEPEGAWAIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
KEPEGAWAIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
KEPEGAWAIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
KEPEGAWAIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
KEPEGAWAIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
KEPEGAWAIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
KEPEGAWAIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
KEPEGAWAIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
KEPEGAWAIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
KEPEGAWAIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
KEPEGAWAIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Umum Perangkat Daerah

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
KEPEGAWAIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
KEPEGAWAIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
KEPEGAWAIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
KEPEGAWAIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
KEPEGAWAIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
KEPEGAWAIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
KEPEGAWAIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
KEPEGAWAIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
KEPEGAWAIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
KEPEGAWAIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
NON URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
KEPEGAWAIAN
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
Pengelolaan Data Kepegawaian
Mutasi dan Promosi ASN
Pengelolaan Mutasi ASN
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
Pengelolaan Promosi ASN
Pengembangan Kompetensi ASN
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pengembangan Kompetensi Teknis
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
Inspektorat Daerah
<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>
<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>
Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu Laporan Kinerja
Reviu Laporan Keuangan
Pengawasan Desa
Kerja Sama Pengawasan Internal
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Pendampingan dan Asistensi
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Kecamatan Pantai Cermin
UNSUR KEWILAYAHAN
KECAMATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pengadaan Mebel
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
Kecamatan Lembah Gumanti
UNSUR KEWILAYAHAN
KECAMATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
Kecamatan Payung Sekaki
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>
<b>KECAMATAN</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Kecamatan Lembang Jaya
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>
<b>KECAMATAN</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Mebel
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
Kecamatan Gunung Talang
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>
<b>KECAMATAN</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
Kecamatan Bukit Sundi
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>
<b>KECAMATAN</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Kecamatan IX Koto Sungai Lasi
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>
<b>KECAMATAN</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
Kecamatan Kubung
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>
<b>KECAMATAN</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
Kecamatan X Koto Singkarak
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>
<b>KECAMATAN</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Kecamatan Junjung Sirih
UNSUR KEWILAYAHAN
KECAMATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pengadaan Mebel
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
Kecamatan Hiliran Gumanti
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>
<b>KECAMATAN</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Kecamatan Tigo Lurah
UNSUR KEWILAYAHAN
KECAMATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
Kecamatan Danau Kembar
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>
<b>KECAMATAN</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
Kecamatan X Koto Diatas
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>
<b>KECAMATAN</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>
<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

<b>Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Sumber: Peraturan Bupati Solok Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

### 1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan, salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur dan kriteria. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis-jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Nasional, pemerintah telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal untuk beberapa bidang program pelayanan dasar kepada masyarakat baik tingkat pusat maupun daerah. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Selanjutnya, pada ayat (2) pasal tersebut menyebutkan bahwa pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa SPM merupakan hal yang strategis dalam rangka memfokuskan kebijakan penyelenggaraan

pemerintahan daerah termasuk dalam hal yang harus diprioritaskan dalam penggunaan belanja daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pemerintah telah menetapkan SPM urusan pemerintahan wajib yang berkaitan Pelayanan Dasar yang terdiri dari:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka dalam implementasinya secara operasional, program-program yang telah dirumuskan harus dijabarkan ke dalam urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan Perangkat Daerah yang menjadi penanggungjawab dari setiap program tersebut, sehingga dapat dilihat dengan jelas pembagian tugas Perangkat Daerah dalam melaksanakan rencana pembangunan yang telah disusun dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok pada Tahun 2025, yang dibuktikan dengan kesediaan anggaran yang berlandaskan pada seluruh program dan kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.11

## Alokasi Belanja Daerah Dalam Rangka Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Solok TA.2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran APBD 2024	Alokasi Anggaran R KUA PPAS 2025	Bertambah/ (Berkurang)
<b>A</b>	<b>SPM Bidang Pendidikan</b>					
1	<b>Pendidikan Dasar</b>					
		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>				
			Penambahan Ruang Kelas Baru	0	1.000.808.500	1.000.808.500
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	2.176.730.000	2.176.730.000
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	250.000.000	250.000.000
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	3.344.547.440	3.339.317.140	(5.230.300)
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7.756.616.568	967.923.460	(6.788.693.108)
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	8.658.285.732	8.213.514.500	(444.771.232)
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	55.794.780	55.794.780	0
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	122.000.000	95.000.000	(27.000.000)
			Pengadaan Mebel Sekolah	2.609.195.880	2.121.781.580	(487.414.300)
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	618.063.200	200.000.000	(418.063.200)
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.991.200.000	0	(1.991.200.000)
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	19.990.000	250.000.000	230.010.000
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	320.010.000	350.000.000	29.990.000
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	276.166.360	159.000.000	(117.166.360)
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	43.140.600.000	43.140.600.000	0
			<b>Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>68.912.469.960</b>	<b>62.320.469.960</b>	<b>(6.592.000.000)</b>
			<b>Jumlah Pendidikan Dasar</b>	<b>68.912.469.960</b>	<b>62.320.469.960</b>	<b>(6.592.000.000)</b>
		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>				
			Penambahan Ruang Kelas Baru	0	0	0
			Pembangunan Laboratorium	2.450.257.620	2.607.483.800	157.226.180

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran APBD 2024	Alokasi Anggaran R KUA PPAS 2025	Bertambah/ (Berkurang)
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.103.100.000	1.300.000.000	196.900.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6.372.098.524	6.078.098.000	(294.000.524)
			Perlengkapan Belajar Peserta Didik	326.802.700	0	(326.802.700)
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	970.525.000	0	(970.525.000)
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	222.304.576	20.955.900	(201.348.676)
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	238.560.000	15.000.000	(223.560.000)
			<b>Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>11.683.648.420</b>	<b>10.021.537.700</b>	<b>(1.662.110.720)</b>
			<b>Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>11.683.648.420</b>	<b>10.021.537.700</b>	<b>(1.662.110.720)</b>
			<b>Jumlah Pendidikan Dasar</b>	<b>80.596.118.380</b>	<b>72.342.007.660</b>	<b>(8.254.110.720)</b>
2			<b>Pendidikan Kesetaraan</b>			
			<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>			
			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0	50.000.000	50.000.000
			Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	0	75.000.000	75.000.000
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	5.325.948.200	4.484.500.000	(841.448.200)
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	70.000.000	30.000.000	
			<b>Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>5.395.948.200</b>	<b>4.639.500.000</b>	<b>(756.448.200)</b>
			<b>Jumlah Pendidikan Kesetaraan</b>	<b>5.395.948.200</b>	<b>4.639.500.000</b>	<b>(756.448.200)</b>
3			<b>Pendidikan Anak Usia Dini</b>			
			<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>			
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		1.146.494.995	1.146.494.995
			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	3.002.953.150	0	(3.002.953.150)
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	99.947.500	84.000.000	(15.947.500)
			Pengelolaan Dana BOP PAUD	6.053.400.000	6.200.000.000	146.600.000
			<b>Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>9.156.300.650</b>	<b>7.430.494.995</b>	<b>(1.725.805.655)</b>
			<b>Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>9.156.300.650</b>	<b>7.430.494.995</b>	<b>(1.725.805.655)</b>

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran APBD 2024	Alokasi Anggaran R KUA PPAS 2025	Bertambah/ (Berkurang)	
			Jumlah SPM Bidang Pendidikan	95.148.367.230	84.412.002.655	(10.736.364.575)	
<b>B</b>	<b>SPM Bidang Kesehatan</b>						
1	<b>Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</b>						
		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	656.331.000	856.000.000	199.669.000	
		<b>Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>656.331.000</b>	<b>856.000.000</b>	<b>199.669.000</b>
		<b>Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</b>			<b>656.331.000</b>	<b>856.000.000</b>	<b>199.669.000</b>
2	<b>Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</b>						
		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	544.164.090	692.000.000	147.835.910	
		<b>Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>544.164.090</b>	<b>692.000.000</b>	<b>147.835.910</b>
		<b>Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</b>			<b>544.164.090</b>	<b>692.000.000</b>	<b>147.835.910</b>
3	<b>Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</b>						
		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	14.225.100	228.369.000	214.143.900	
		<b>Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>14.225.100</b>	<b>228.369.000</b>	<b>214.143.900</b>
		<b>Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</b>			<b>14.225.100</b>	<b>228.369.000</b>	<b>214.143.900</b>
4	<b>Pelayanan Kesehatan Balita</b>						
		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	177.045.000	482.000.000	304.955.000	
		<b>Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>177.045.000</b>	<b>482.000.000</b>	<b>304.955.000</b>
		<b>Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita</b>			<b>177.045.000</b>	<b>482.000.000</b>	<b>304.955.000</b>
5	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar</b>						
		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	408.698.750	550.000.000	141.301.250	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran APBD 2024	Alokasi Anggaran R KUA PPAS 2025	Bertambah/ (Berkurang)
			Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	408.698.750	550.000.000	141.301.250
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	408.698.750	550.000.000	141.301.250
6			<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif</b>			
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	5.480.000	120.500.000	115.020.000
			Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.480.000	120.500.000	115.020.000
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	5.480.000	120.500.000	115.020.000
7			<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut</b>			
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	16.874.900	181.500.000	164.625.100
			Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.874.900	181.500.000	164.625.100
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	16.874.900	181.500.000	164.625.100
8			<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</b>			
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	10.690.000	114.000.000	103.310.000
			Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.690.000	114.000.000	103.310.000
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	10.690.000	114.000.000	103.310.000
9			<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</b>			
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	340.517.200	707.000.000	366.482.800
			Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	340.517.200	707.000.000	366.482.800
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	340.517.200	707.000.000	366.482.800
10			<b>Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat</b>			
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.900.000	61.000.000	53.100.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran APBD 2024	Alokasi Anggaran R KUA PPAS 2025	Bertambah/ (Berkurang)
			Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.900.000	61.000.000	53.100.000
			Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	7.900.000	61.000.000	53.100.000
11			Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis			
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	542.540.000	696.000.000	153.460.000
			Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	542.540.000	696.000.000	153.460.000
			Jumlah Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	542.540.000	696.000.000	153.460.000
12			Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)			
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	45.100.000	301.100.000	256.000.000
			Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	45.100.000	301.100.000	256.000.000
			Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	45.100.000	301.100.000	256.000.000
			Jumlah SPM Bidang Kesehatan	2.769.566.040	4.989.469.000	2.219.902.960
C			SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
1			Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari			
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.180.147.399	2.455.387.399	1.275.240.000
			Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.180.147.399	2.455.387.399	1.275.240.000
			Jumlah Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1.180.147.399	2.455.387.399	1.275.240.000
2			Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik			
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
			Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	195.000.000	195.000.000	0
			Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	195.000.000	195.000.000	0

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran APBD 2024	Alokasi Anggaran R KUA PPAS 2025	Bertambah/ (Berkurang)
			<b>Jumlah Penyediaan Pelayanan</b>	<b>195.000.000</b>	<b>195.000.000</b>	<b>0</b>
			<b>Pengolahan Air Limbah Domestik</b>			
			<b>Jumlah SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</b>	<b>1.375.147.399</b>	<b>2.650.387.399</b>	<b>1.275.240.000</b>
<b>D</b>	<b>SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>					
1	<b>Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota</b>					
			<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>			
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	200.000.000	220.000.000	20.000.000
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	60.000.000	98.505.000	38.505.000
			<b>Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>260.000.000</b>	<b>318.505.000</b>	<b>58.505.000</b>
			<b>Jumlah Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota</b>	<b>260.000.000</b>	<b>318.505.000</b>	<b>58.505.000</b>
2	<b>Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota</b>					
			<b>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>			
			Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	0	0	0
			<b>Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Jumlah Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Jumlah SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>	<b>260.000.000</b>	<b>318.505.000</b>	<b>58.505.000</b>
<b>E</b>	<b>SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>					
1	<b>Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum</b>					
			<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	293.600.000	281.890.000	(11.710.000)
			Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	0	10.123.099	10.123.099
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	0	92.050.960	92.050.960

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran APBD 2024	Alokasi Anggaran R KUA PPAS 2025	Bertambah/ (Berkurang)
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	55.839.780	55.839.780
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	56.010.000	51.130.000	(4.880.000)
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	23.975.000	23.975.000	0
			Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	0	15.000.000	15.000.000
			Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	0	0	0
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.455.228.320	170.000.000	(2.285.228.320)
			<b>Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.828.813.320</b>	<b>700.008.839</b>	<b>(2.128.804.481)</b>
			<b>Jumlah Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum</b>	<b>2.828.813.320</b>	<b>700.008.839</b>	<b>(2.128.804.481)</b>
2	<b>Pelayanan informasi rawan bencana</b>					
		<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>				
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	0	42.000.000	42.000.000
			<b>Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>42.000.000</b>	<b>42.000.000</b>
			<b>Jumlah Pelayanan informasi rawan bencana</b>	<b>0</b>	<b>42.000.000</b>	<b>42.000.000</b>
3	<b>Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>					
		<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>				
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	52.443.900	0	(52.443.900)
			Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	8.690.228	40.000.000	31.309.772
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	58.490.600	0	(58.490.600)
			<b>Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>119.624.728</b>	<b>40.000.000</b>	<b>(79.624.728)</b>
			<b>Jumlah Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	<b>119.624.728</b>	<b>40.000.000</b>	<b>(79.624.728)</b>
4	<b>Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>					
		<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>				
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	915.840.224	1.120.000.000	204.159.776

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran APBD 2024	Alokasi Anggaran R KUA PPAS 2025	Bertambah/ (Berkurang)
			<b>Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>915.840.224</b>	<b>1.120.000.000</b>	<b>204.159.776</b>
			<b>Jumlah Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>	<b>915.840.224</b>	<b>1.120.000.000</b>	<b>204.159.776</b>
5			<b>Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</b>			
			<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			
			Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	15.620.000	15.620.000
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	320.571.802	170.000.000	(150.571.802)
			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	0	17.496.280	17.496.280
			Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	7.135.000	7.135.000
			Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	0	5.202.500	5.202.500
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1.895.250.000	20.303.000	(1.874.947.000)
			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran		9.052.900	9.052.900
			<b>Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.215.821.802</b>	<b>244.809.680</b>	<b>(1.971.012.122)</b>
			<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>			
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	19.910.000	10.760.000	(9.150.000)
			Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	0	13.181.000	13.181.000
			<b>Jumlah</b>	<b>19.910.000</b>	<b>23.941.000</b>	<b>4.031.000</b>
			<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>			
			<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>			
			Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	0	12.233.700	12.233.700
			Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	0	5.377.500	5.377.500
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	0	20.480.000	20.480.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran APBD 2024	Alokasi Anggaran R KUA PPAS 2025	Bertambah/ (Berkurang)
			Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	0	5.756.000	5.756.000
			<b>Jumlah Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>	<b>0</b>	<b>43.847.200</b>	<b>43.847.200</b>
			<b>Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</b>	<b>2.235.731.802</b>	<b>312.597.880</b>	<b>(1.923.133.922)</b>
			<b>Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>6.100.010.074</b>	<b>2.214.606.719</b>	<b>(3.885.403.355)</b>
<b>F</b>	<b>SPM Bidang Sosial</b>					
<b>1</b>	<b>Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti</b>					
			<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>			
			Penyediaan Permakanan	294.201.200	234.000.000	(60.201.200)
			Penyediaan Alat Bantu	59.850.200	50.000.000	(9.850.200)
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	0	35.000.000	35.000.000
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	67.023.410	85.000.000	17.976.590
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	52.272.110	67.340.000	15.067.890
			Pemberian Layanan Kedaruratan	49.048.200	55.000.000	5.951.800
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	0	0	0
			Pemberian Layanan Rujukan	28.850.250	71.000.000	42.149.750
			<b>Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>551.245.370</b>	<b>597.340.000</b>	<b>46.094.630</b>
			<b>Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti</b>	<b>551.245.370</b>	<b>597.340.000</b>	<b>46.094.630</b>
<b>2</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial</b>					
			<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>			
			Penyediaan Makanan	140.001.200	200.570.800	60.569.600
			<b>Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>140.001.200</b>	<b>200.570.800</b>	<b>60.569.600</b>
			<b>Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial</b>	<b>140.001.200</b>	<b>200.570.800</b>	<b>60.569.600</b>
			<b>Jumlah SPM Bidang Sosial</b>	<b>691.246.570</b>	<b>797.910.800</b>	<b>106.664.230</b>

Sumber: Badan Keuangan Daerah, 2026

## BAB II

### CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### 2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok dapat digambarkan dari tabel dibawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Capaian Kinerja Makro**

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Laju (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	72,29	73,26	1,34
2	Angka Kemiskinan	7,31	6,52	-10,81
3	Angka Pengangguran	4,91	4,7	-4,28
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,91	3,01	-23,02
5	Pendapatan Per Kapita	44.726,91	46.728,04	4,47
6	Ketimpangan Pendapatan	0,241	0,219	-9,13

Sumber : SILPPD Kemendagri, 2026

Keterangan:

1. Indeks pembangunan manusia adalah nilai indeks pembangunan manusia daerah yang bersangkutan.
2. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin daerah yang bersangkutan.
3. Angka pengangguran adalah persentase pengangguran daerah yang bersangkutan.
4. Pertumbuhan ekonomi adalah persentase pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan.
5. Pendapatan per kapita adalah persentase pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan.
6. Ketimpangan Pendapatan yang diukur dengan gini ratio adalah nilai gini ratio daerah yang bersangkutan.

a. Penghitungan capaian kinerja makro.

Capaian kinerja makro (CKM) diperoleh dengan tahapan sebagai berikut:

- Mengalikan nilai capaian kinerja indikator dengan bobot masing-masing indikator.
- Total hasil perkalian kemudian dikalikan dengan bobot indikator kinerja makro.
- Ilustrasi penjelasannya sebagai berikut:

$$\mathbf{CKM = [\sum nckivm1 \times bi1 + nckivm2 \times bi2 + nckivmn \times bin...]} \times bvm$$

Keterangan:

CKM = Capaian Kinerja Makro

Nckivm = nilai capaian kinerja indikator

nckivmn = nilai capaian kinerja indikator makro kunci ke- n

bi = bobot indikator

bvm = bobot indikator kinerja makro

bin = bobot indikator ke-n

b. Penghitungan perubahan capaian kinerja makro

Perubahan capaian kinerja makro (PCKM) diperoleh dengan tahapan sebagai berikut:

- Nilai perubahan kinerja setiap indikator kinerja makro dikonversi ke dalam skor kinerja berdasarkan skala kinerja.
- Mengalikan nilai perubahan kinerja indikator dengan bobot masing-masing indikator.
- Total hasil perkalian kemudian dikalikan dengan bobot indikator kinerja makro.
- Ilustrasi penjelasannya sebagai berikut:

$$\mathbf{PMK = [\sum nckivm1 \times bi1 + nckivm2 \times bi2 + nckivmn \times bin...]} \times bvm$$

Keterangan:

PKM = Perubahan Kinerja Makro

Nckivm = nilai perubahan kinerja indikator makro

nckivmn = nilai capaian kinerja indikator makro kunci ke- n

bi = bobot indikator

bvm = bobot indikator kinerja makro

bin = bobot indikator ke-n

## 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

### 2.2.1 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci Keluaran yang dimuat dalam Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD), yang dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Kunci**

No.	No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	1.a.1	Pendidikan	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	74,6055227	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	1.a.2	Pendidikan	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	98,8133592	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
3	1.a.3	Pendidikan	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	69,9950075	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
4	1.a.4	Pendidikan	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	24,0610329	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
5	1.a.5	Pendidikan	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	31,529052	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
6	1.b.1	Kesehatan	Persentase kematian ibu	0,0924727	Dinas Kesehatan
7	1.b.2	Kesehatan	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	12,9466523	Dinas Kesehatan
8	1.b.3	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	95,8629046	Dinas Kesehatan
9	1.b.4	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	93,5952917	Dinas Kesehatan
10	1.b.5	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	93,8742611	Dinas Kesehatan
11	1.b.6	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	99,1663948	Dinas Kesehatan
12	1.b.7	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100	Dinas Kesehatan
13	1.b.8	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	94,2447885	Dinas Kesehatan
14	1.b.9	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	97,3143842	Dinas Kesehatan
15	1.b.10	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	55,2012051	Dinas Kesehatan
16	1.b.11	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	48,5410334	Dinas Kesehatan
17	1.b.12	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	83,9704069	Dinas Kesehatan
18	1.b.13	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	67,6372712	Dinas Kesehatan
19	1.b.14	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	87,8183689	Dinas Kesehatan
20	1.c.1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	45,3685411	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
21	1.c.2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	48,8241008	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
22	1.c.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	26,003804	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data
23	1.c.4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	57,2352765	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
24	1.c.5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
25	1.c.6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	33,3333333	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
26	1.c.7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
27	1.c.8	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
28	1.c.9	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	55,1378446	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
29	1.c.10	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
30	1.d.1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	96,5116279	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
31	1.d.2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	10,1229212	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
32	1.d.3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	0,9126467	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
33	1.d.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	50	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
34	1.e.1	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	33,3333333	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
35	1.e.2	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
36	1.e.3	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	100	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
37	1.e.4	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
38	1.e.5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
39	1.e.6	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
40	1.f.1	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	31,0157523	Dinas Sosial

No.	No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data
41	1.f.2	Sosial	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	79,6469367	Dinas Sosial
42	1.f.3	Sosial	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	84,0423032	Dinas Sosial
43	1.f.4	Sosial	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	Dinas Sosial
44	1.f.5	Sosial	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	100	Dinas Sosial
45	1.f.6	Sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	75,6039329	Dinas Sosial
46	2.a.1	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
47	2.a.2	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	56	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
48	2.a.3	Tenaga Kerja	Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	-	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
49	2.b.1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
50	2.b.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	100	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
51	2.c.1	Pangan	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2,7232966	Dinas Perikanan dan Pangan
52	2.d.1	Pertanahan	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	0,7055505	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
53	2.d.2	Pertanahan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	-	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
54	2.d.3	Pertanahan	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	-	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
55	2.e.1	Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	100	Dinas Lingkungan Hidup
56	2.e.2	Lingkungan Hidup	Persentase jumlah sampah yang tertangani	28,5714286	Dinas Lingkungan Hidup
57	2.f.1	Administrasi Kependudukan	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	99,0765529	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
58	2.f.2	Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	62,1489777	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
59	2.f.3	Administrasi Kependudukan	Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data
60	2.f.4	Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	98,0641648	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
61	2.f.5	Administrasi Kependudukan	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
62	2.f.6	Administrasi Kependudukan	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	78,8929508	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
63	2.f.7	Administrasi Kependudukan	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	66,5326056	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
64	2.g.1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
65	2.g.2	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	16,6666667	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
66	2.g.3	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase fasilitasi kerja sama desa	70,2702703	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
67	2.h.1	Pengendalian Penduduk dan KB	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	0,7148936	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
68	2.h.2	Pengendalian Penduduk dan KB	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	62,7223073	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
69	2.h.3	Pengendalian Penduduk dan KB	Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	40,2291195	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
70	2.i.1	Perhubungan	Konektivitas Kabupaten/Kota	0,47	Dinas Perhubungan
71	2.i.2	Perhubungan	Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,26	Dinas Perhubungan
72	2.i.3	Perhubungan	Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	25	Dinas Perhubungan
73	2.j.1	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
74	2.j.2	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	85,3658537	Dinas Komunikasi dan Informatika
75	2.j.3	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	80,9998496	Dinas Komunikasi dan Informatika
76	2.k.1	Koperasi dan UKM	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	-5,7977542	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
77	2.k.2	Koperasi dan UKM	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	25,979758	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
78	2.l.1	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	-46,2221235	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
79	2.l.2	Penanaman Modal	Realisasi total terhadap target investasi	0,23	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
80	2.m.1	Kepemudaan dan Olahraga	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	10,3092784	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

No.	No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data
81	2.m.2	Kepemudaan dan Olahraga	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	10,3054049	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
82	2.m.3	Kepemudaan dan Olahraga	Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	5,1546392	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
83	2.m.4	Kepemudaan dan Olahraga	Persentase jumlah atlet berprestasi	100	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
84	2.n	Statistik	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
85	2.o	Persandian	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	39,9782135	Dinas Komunikasi dan Informatika
86	2.p.1	Kebudayaan	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	13,3333333	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
87	2.p.2	Kebudayaan	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	18,97	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
88	2.q.1	Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	59,66	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
89	2.q.2	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	1,36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
90	2.r	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	51,92	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
91	3.a.1	Kelautan dan Perikanan	Produksi perikanan tangkap dan budidaya	93,0620432	Dinas Perikanan dan Pangan
92	3.a.2	Kelautan dan Perikanan	Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	20,05	Dinas Perikanan dan Pangan
93	3.b.1	Pariwisata	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	34,0568185	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
94	3.b.2	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	24,6062992	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
95	3.b.3	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	8,87	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
96	3.c.1	Pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan	23,4810041	Dinas Pertanian
97	3.c.2	Pertanian	Peningkatan produksi hortikultura	7,5645865	Dinas Pertanian
98	3.c.3	Pertanian	Peningkatan produksi komoditas peternakan	8,7399869	Dinas Pertanian
99	3.c.4	Pertanian	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	100	Dinas Pertanian
100	3.f	Perdagangan	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	11,4893617	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
101	3.g.1	Perindustrian	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No.	No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data
102	3.g.2	Perindustrian	Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	35	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
103	3.g.3	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	-90	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
104	3.g.4	Perindustrian	Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	2,4810124	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Sumber : SILPPD Kemendagri, 2026

## 2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang dimuat dalam Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD), yang dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**

No.	No IKK	Urusan Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	4.a.1	Perencanaan	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	100	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
2	4.b.1	Kuangan	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	38,1560204	Badan Keuangan Daerah
3	4.b.2	Kuangan	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	9,7400315	Badan Pendapatan Daerah
4	4.b.3	Kuangan	Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	63,5373801	Badan Keuangan Daerah
5	4.b.4	Kuangan	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	29,4661779	Badan Keuangan Daerah
6	4.c	Kelembagaan dan Kepegawaian	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	79,0035587	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7	4.d	Penelitian dan Pengembangan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	100	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
8	4.e.1	Fungsi Pengawasan	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2	Inspektorat
9	4.e.2	Fungsi Pengawasan	Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	3	Inspektorat
10	4.e.3	Fungsi Pengawasan	Manajemen risiko Indeks	2	Inspektorat
11	4.e.4	Fungsi Pengawasan	Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	79,6623794	Inspektorat
12	4.f.1	Fungsi Pengadaan	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	40	Bagian PBJ/Setda
13	4.f.2	Fungsi Pengadaan	Pemanfaatan sistem pengadaan	23,36	Bagian PBJ/Setda

No.	No IKK	Urusan Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data
14	4.f.3	Fungsi Pengadaan	Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	9,55	Bagian PBJ/Setda
15	4.g.1	Hubungan dengan Perwakilan Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	1	Badan Keuangan Daerah
16	4.g.2	Hubungan dengan Perwakilan Daerah	Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	40	Bagian Hukum/Setda
17	4.h	Pelayanan Publik	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	79,58	Bagian Organisasi/Setda

Sumber : SILPPD Kemendagri, 2026

### 2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

- a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja
- b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja
- c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya
- d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah
- e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai
- f. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

### AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis daerah merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah wajib untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya.

#### I. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

##### A. Visi

Visi dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat pemilihan kepala daerah pada daerah setempat. Visi kepala daerah dan wakil kepala

daerah yang telah terpilih merupakan arah yang akan dilaksanakan dalam pembangunan pada suatu daerah atau kondisi pada masa depan daerah yang ingin dicapai dalam periode masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi dan misi yang menjadi dasar serta acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Solok tahun 2025-2029 adalah visi dan misi serta janji kerja dari Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2025-2029 yang terpilih. Oleh sebab itu visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok periode 2021-2026 yang terpilih langsung menjadi visi pembangunan daerah sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG MELAYANI MENUJU  
MASYARAKAT MADANI NAN SEJAHTERA”**

Visi ini memuat tiga kata kunci kondisi yang diharapkan lima tahun ke depan yakni: Pemerintahan yang melayani, Madani dan Sejahtera. Ketiga kata kunci tersebut dijelaskan sebagai berikut;

- “Pemerintahan Yang Melayani“, dimaksudkan Penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilakukan oleh organ-organ pemerintahan dalam menjalankan amanah sesuai dengan aturan, memberikan kemudahan, kepastian dan berintegritas dalam melayani.
- “Masyarakat madani“, dimaksudkan Pemerintah Daerah ingin mewujudkan atau membangun masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, memaknai kehidupannya, taat akan agama, memiliki integritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan filosofi ; “ Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah.
- “Sejahtera“, dimaksudkan masyarakat yang terbebas dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga memperoleh kehidupan yang aman dan tentram

**B. Misi**

Misi merupakan upaya dalam mewujudkan rencana dalam bentuk cara serta langkah yang akan dikerjakan selama satu periode yang telah ditetapkan. Misi merupakan pengan dari visi yang ingin dicapai yang berisi uraian dari upaya-upaya apa yang harus dilakukan secara bersama sama ataupun secara sendiri sendiri. Dengan demikian misi memberikan arah dan juga batasan dalam upaya melakukan proses pencapaian tujuan.

RPJMD Kabupaten Solok tahun 2025-2029 berfokus pada pembangunan dan peningkatan kompetensi seluruh sumber daya yang terdapat di Kabupaten Solok dalam segala bidang untuk mewujudkan kesejahteraan melalui peningkatan perekonomian Kabupaten Solok. Untuk dapat mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Solok yang

telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Solok tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Misi merupakan penggambaran dari visi yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Untuk dapat mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Solok yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Solok tahun 2025-2029 sebagai berikut :

#### **1. Mewujudkan *Smart Government* dan Berintegritas dalam Melayani**

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengoptimalkan sumber daya secara efisien. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penataan pemerintahan dan layanan berbasis digital adalah penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sehingga dapat membuat tata kelola pemerintahan lebih bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat menggunakan layanan-layanan digital yang sudah dikembangkan oleh Pemerintah Pusat maupun Provinsi sehingga nantinya tidak terdapat tumpang tindih layanan pemerintah. Dalam misi ini diharapkan juga adanya pengembangan sumber daya manusia secara digital, keamanan dan perlindungan data-data Pemerintah Daerah serta pengetahuan dan penguasaan teknologi informasi itu sendiri seperti infrastruktur jaringan, keamanan dan pengelolaan data.

#### **2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Global**

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang baik secara fisik dan mental sehingga dapat menjadi pusat pembangunan sosial ekonomi karena memiliki kemampuan dinamis dalam melakukan kegiatan pembangunan. SDM merupakan faktor penting dalam pembangunan daerah. Tanpa SDM yang berkualitas, banyak aspek pembangunan yang akan terhambat. Peningkatan kualitas dilakukan melalui peningkatan kualitas Kesehatan dan peningkatan kualitas pendidikan terutama dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Perubahan yang sangat cepat dalam perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan keterampilan juga sangat cepat menuntut sumber daya manusia Kabupaten Solok mampu bersaing dan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan

itu sendiri. Kreativitas dan inovasi merupakan salah satu bagian penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Untuk menghadapi Indonesia emas tahun 2045 yang akan datang, maka sejak saat ini harus disiapkan dan dihasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya kompetitif tetapi mampu melakukan analisis dan membangun networking dalam berbagai sektor, sehingga potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Solok dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Selain itu, di kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa norma agama juga mempunyai peran yang sangat penting. Norma agama merupakan sebuah aturan dan kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk hidup ini bersifat tidak ada keraguan karena merupakan “anugerah” langsung dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama dapat kita katakan sebagai bentuk kasih sayang Tuhan terhadap manusia, agar manusia dapat selamat dalam menjalani kehidupannya di dunia hingga menuju akhirat nanti.

Ajaran agama akan membentuk penganutnya makin peka terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat seperti kemaksiatan, kemiskinan, keadilan, kesejahteraan dan kemanusiaan. Kepekaan ini juga akan mendorong manusia untuk tidak bisa berdiam diri menyaksikan kebatilan yang merasuki sistem kehidupan yang ada, seharusnya agama menjadi agen perubahan basis-basis nilai dan moral bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

### **3. Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Adat dan Budaya**

Misi ini bertujuan untuk memfasilitasi dan meningkatkan peran pemerintah daerah dalam sektor adat dan budaya melalui peningkatan peran Tungku Tigo Sajaringan dan Tali Tigo Sapilin yang merupakan ciri khas daerah. Pelestarian nilai-nilai adat dan budaya masyarakat sesuai dengan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah juga merupakan salah satu tujuan dari misi ini. Setiap manusia pasti akan mendambakan kehidupan yang harmonis, tentram dan damai dalam kehidupannya. Disinilah norma-norma adat dan budaya tersebut memegang peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Masyarakat berperan penting dalam proses pembangunan, baik sebagai pelaku maupun sebagai objek pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan memenuhi kebutuhan nyata masyarakat dan mendorong kemajuan berkelanjutan. Partisipasi tersebut dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi masalah dan kebutuhan melalui musyawarah-musyawarah dalam proses perencanaan pembangunan, memberikan usulan, saran, dan informasi, memantau dan mengevaluasi proses Pembangunan, serta menyampaikan masukan, tanggapan, laporan, dan

pengaduan.

#### **4. Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi dan Sumber Daya Nagari**

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Sektor-sektor unggulan dan potensi yang ada di Kabupaten Solok. Sektor unggulan tersebut diantaranya adalah sektor Pertanian, UMKM, Perdagangan dan Pariwisata yang nantinya diharapkan dapat memberi dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat secara umum, upaya untuk menciptakan lapangan kerja serta upaya pengurangan kemiskinan dan pemerataan pendapatan.

### **C. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan umum pembangunan Kabupaten Solok adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi secara bertahap persoalan-persoalan pembangunan yang sedang dihadapi. Permasalahan pembangunan tersebut antara lain tercermin dari tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya derajat kesehatan dan pendidikan dan ketimpangan pembangunan antar nagari.

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Solok. Tujuan memuat pernyataan atas apa yang perlu dilakukan dalam mencapai visi dan misi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis serta permasalahan pembangunan daerah yang terlihat pada hasil akhir (final outcome).

Sedangkan sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dapat terukur, spesifik dan dapat tercapai, rasional selama 5 tahun kedepan.

## **II. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh Kepala Daerah karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian Kinerja yang telah dilakukan oleh Kepala Daerah berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola tujuan dan sasaran strategis, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terukur. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kabupaten Solok Tahun 2025 mengacu pada dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029. Pemerintah Kabupaten Solok telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel. 3.1**

### **Perjanjian Kinerja Kabupaten Solok Tahun 2025 berdasarkan RPJMD 2025-2029**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	76.73
2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Angka)	70.1
		Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	WTP
		Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	4,47
		Nilai LPPD (Nilai)	3.25
3	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,18
4	Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	72,79
		Tingkat Kemiskinan (%)	6,08
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pendidikan yang merata	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,01
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,78
		Umur Harapan Hidup (Tahun)	73,58
6	Mewujudkan masyarakat yang berbudaya berlandaskan ABS SBK	Cakupan Implementasi ABS-SBK (%)	50,16
7	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam implementasi nilai - nilai agama berlandaskan ABS SBK	Persentase Nagari yang Memenuhi Indikator Nagari Madani (%)	20

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Indeks Pemajuan Kebudayaan (Indeks)	1,41
9	Pemerataan pendapatan berbasis potensi lokal	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,08
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,66
		Indeks Gini (Indeks)	0,240
10	Meningkatkan perekonomian masyarakat yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan berbasis potensi lokal	PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	49,12
11	Meningkatnya pembangunan berkelanjutan di nagari	Indeks Desa (Indeks)	0,62
12	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan berkeadilan	Indeks Infrastruktur Daerah (%)	63,81
13	Meningkatnya ketahanan bencana dan lingkungan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	78,66
		Indeks Risiko Bencana (IRBI) (Indeks)	135,92

**Tabel. 3.2**  
**Taget Kinerja Tahun 2025 berdasarkan RPJMD 2021-2026**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	(2)	(3)	(4)

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Anggaran Berbasis Kebutuhan Masyarakat	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Nilai)	B
2	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	PDRB Perkapita (ADHK) (Rupiah)	29.720.000
		Pengeluaran Perkapita (Rupiah)	10.985.000
		PDRB Sektor pertanian (Rupiah)	3.934.383
		Persentase peningkatan pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil (Persentase)	4,5
		PDRB sektor perdagangan (Rupiah)	1.327.491
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (Persentase)	0,95
3	Meningkatkan Birokrasi yang Kapabel	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	71
		Level Maturitas SPIP (Level)	4
		Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Indeks)	3,2
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	3,60
		Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	68
5		Angka Kelahiran Total (TFR) (Angka)	2,39

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang Holistik dan Integratif	Indeks Pembangunan Gender (Indeks)	96,67

### III. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan **akuntabilitas kinerja** instansi pemerintah. Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan suatu prestasi yang dapat dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam periode tertentu. Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi, maka seluruh aktivitas organisasi tersebut dapat diukur, dan pengukurannya tidak semata-mata hanya kepada masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) tetapi lebih ditekankan kepada tercapainya sasaran dan tujuan secara efektif serta hasil program dapat dimanfaatkan.

Pengukuran persentase capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja dikali seratus. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas dua jenis yaitu maximize dan minimize.

#### a. Maximize

Rumus **maximize** berlaku bagi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian realisasi indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

#### b. Minimize

Rumus **Minimize** berlaku bagi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menunjukkan ekspektasi kearah pencapaian realisasi indikator kinerja lebih rendah dari nilai target yang ditetapkan.

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Target

Pemerintah Kabupaten Solok menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Capaian target Perjanjian Kinerja untuk Tahun 2024 sebagaimana ter pada Tabel. 3.3 berikut:

**Tabel. 3.3**

**Indikator, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja**

**Kabupaten Solok Tahun 2025 berdasarkan RPJMD 2025-2029**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	76,73	72,18*	94,07
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Angka)	70,1	68,74	98,06
3	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	WTP	WTP	100
4	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	4,47	4,44	99,33
5	Nilai LPPD (Nilai)	3,25	3,1896**	98,14
6	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,18	0,28%	155,56%
7	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	72,79	73,26	100,65
8	Tingkat Kemiskinan (%)	6,08	6,52	92,76
9	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,01	8,25	103
10	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,78	13,66	99,13
11	Umur Harapan Hidup (Tahun)	73,58	72,82	98,97
12	Cakupan Implementasi ABS-SBK (%)	50,16	56,35	112,34

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	Persentase Nagari yang Memenuhi Indikator Nagari Madani (%)	20	14,86	74,3
14	Indeks Pemajuan Kebudayaan (Indeks)	1,41	2,63	186,52
15	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,08	3,02	74,02
16	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,66	4,70	99,14
17	Indeks Gini (Indeks)	0,240	0,219	108,75
18	PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	49,12	46,73	95,13
19	Indeks Desa (Indeks)	0,62	0,75	120,97
20	Indeks Infrastruktur Daerah (%)	63,81	54,30	85,10
21	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	78,66	82,32	104,65
22	Indeks Risiko Bencana (IRBI) (Indeks)	135,92	183,21	65,21

Keterangan: \*Hasil Sementara Tahun 2025

Keterangan: \*\*Realisasi menggunakan Tahun 2023

Berdasarkan Tabel. 3.3 di atas dilihat bahwa dari 22 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Solok yang telah ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja Utama Bupati Tahun 2025, 9 Indikator mencapai target dan 13 Indikator tidak mencapai target.

**Tabel. 3.4**

**Indikator, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja**

**Kabupaten Solok Tahun 2025 berdasarkan RPJMD 2021-2026**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Nilai)	B	B	100
2	PDRB Perkapita (ADHK) (Rupiah)	29.720.000	28.364.433	95,44
3	Pengeluaran Perkapita (Rupiah)	10.985.000	16.194.432	147,42
4	PDRB Sektor pertanian (Rupiah)	3.934.383	4.112.200	104,52
5	Persentase peningkatan pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil (Persentase)	4,5	4,7	104,4
6	PDRB sektor perdagangan (Rupiah)	1.327.491	1.417.260	106,76
7	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (Persentase)	0,95	1,04	109,47
8	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	71	80,54	113,44
9	Level Maturitas SPIP (Level)	4	2	50
10	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Indeks)	3,2	3,71	115,94
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	3,60	3,57	99,17
12	Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	68	49,61	73

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Angka Kelahiran Total (TFR) (Angka)	2,39	1,68	129,71
2	Indeks Pembangunan Gender (Indeks)	96,67	96,22	99,53

Berdasarkan Tabel. 3.2 di atas dilihat bahwa dari 14 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Solok berdasarkan RPJMD 2021-2026, 9 Indikator mencapai target dan 5 Indikator belum mencapai target.

Masing-masing Indikator Kinerja Utama Kabupaten Solok Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

## **CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BERDASARKAN RPJMD 2025-2029**

### **1. INDEKS REFORMASI BIROKRASI**

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan Alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Indeks ini bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pemerintahan, serta sejauh mana pelayanan publik telah ditingkatkan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RB. (pengertian RB)

Pada Tahun 2025 Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Solok adalah 72,18 dengan opini BB, ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintahan Kabupaten Solok sangat baik. Hal ini mengindikasikan bahwa tata Kelola pemerintahan, akuntabilitas kinerja, serta kualitas pelayanan publik telah berjalan dengan baik, meskipun masih diperlukan berbagai upaya perbaikan untuk mencapai tingkat yang lebih optimal.

#### **A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja**

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2025, target Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Solok adalah 76,73 dapat dilihat pada Tabel 3.1.1 sebagai berikut:

**Tabel. 3.1.1**

### Indeks Reformasi Birokrasi

No	Indikator Kinerja	Target (Indeks)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	76,73

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel. 3.1.2 sebagai berikut:

**Tabel. 3.1.2**

### Indeks Reformasi Birokrasi

No	Indikator Kinerja	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	Capaian (%)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	76,73	72,18*	94,07

Sumber: LHE RB Kementerian PANRB 2025

Ket: Hasil Sementara

Berdasarkan Tabel. 3.1.2 jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi pada Tahun 2025 tidak tercapai.

Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi belum memenuhi target ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:

- Terdapat 1 (satu) Kegiatan Utama yang belum ditetapkan target maupun rencana aksinya, yaitu Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas.
- Masih terdapat 3 (tiga) Indikator Kegiatan Utama dengan target yang ditetapkan di bawah minimal kategori "Baik" sesuai KepmenPANRB No. 182 Tahun 2024.
- Tidak terdapat pernyataan keabsahan atas rencana aksi yang ditetapkan pada tahun 2025.
- Beberapa Kinerja Utama didukung oleh rencana aksi yang terbatas, sehingga keterkaitan antara kompleksitas target dengan strategi pencapaiannya belum sepenuhnya tergambar secara memadai.
- Beberapa indikator masih berfokus pada pelaksanaan aktivitas, sehingga belum sepenuhnya menunjukkan kualitas atau hasil yang diharapkan dari pelaksanaan rencana aksi.

- f. Penetapan target indikator output telah memadai, namun masih terdapat ruang penyempurnaan agar lebih selaras dengan dukungan Rencana Aksi.
- g. Dukungan anggaran pada beberapa Rencana Aksi perlu dipastikan proporsional dan relevan dengan output yang dihasilkan.
- h. Belum optimalnya pencapaian target pada rencana aksi.
- i. Sebagian besar target pada kegiatan utama belum tercapai.
- j. Belum maksimalnya pembangunan Zona Integritas pada Organisasi Perangkat Daerah
- k. Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas implementasi kebijakan penanganan gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, dan *Whistle Blowing System*, serta menuntaskan kebijakan benturan kepentingan.

Berdasarkan permasalahan atau penyebab tidak tercapainya kinerja Indeks Reformasi Birokrasi diatas maka diperlukan langkah-langkah strategis atau rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Melakukan pemetaan (*mapping*) kegiatan Renaksi unit kerja terhadap 8 area perubahan dan prioritas RB Tematik.
  - b. Melakukan *self-assessment* capaian 2025, mereviu *baseline*, dan menetapkan ulang target indikator makro/non-makro agar minimal mencapai kategori "Baik" sesuai KepmenPANRB 182/2024.
  - c. Menyusun dokumen Rencana Aksi (Renaksi) 2026, melakukan asistensi, dan menetapkan secara resmi.
  - d. Menyempurnakan indikator *output* agar bergeser dari sekedar pemenuhan dokumen (*administrative compliance*) menjadi indikator dampak/hasil (*outcome-based*).
  - e. Melakukan *reviu* anggaran (anggaran tidak efisien dialihkan ke penguatan RB Tematik) agar proporsional dan mendukung pencapaian indikator.
- C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

**Tabel. 3.1.3**

**Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi**

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Indeks)		Capaian (%)		Tahun 2030 (Target akhir RPJMD)	
		2024	2025	2024	2025	Target (Indeks)	Capaian (%)

1.	Indeks Reformasi Birokrasi	75,12	72,18	100,16	94,07	90,01	80,19
----	----------------------------	-------	-------	--------	-------	-------	-------

Berdasarkan Tabel. 3.1.3 dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD tahun 2030, capaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 masih berada pada 80,19% sehingga diperlukan upaya yang lebih optimal.

- D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

**Tabel. 3.1.4**

**Efisiensi Indikator Indeks Reformasi Birokrasi**

IKU	Kinerja			Program	Keuangan		
	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Indeks Reformasi Birokrasi	76,73	72,18	94,07	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	141.286.655	110.635.728	78,31
				Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	138.978.000	103.979.740	74,82
<b>Rata-rata capaian</b>			<b>94,07</b>	<b>Total Anggaran</b>	<b>280.264.655</b>	<b>214.615.468</b>	<b>76,58</b>

Pada Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Solok tingkat efisiensinya tidak dapat dijabarkan karena target pada perjanjian kinerja tidak dapat dicapai.

- E. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Solok Tahun 2025, terdapat beberapa program/kegiatan penunjang yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah diantaranya, yaitu:

- a. Melakukan asistensi penyusunan rencana aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2026.
- b. Memantau dan melaporkan secara berkala realisasi rencana aksi serta melakukan evaluasi dari rencana aksi yang tidak mencapai target.
- c. Penyusunan rencana aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2025, dilakukan dengan metode asistensi Perangkat Daerah penanggungjawab Reformasi Birokrasi dengan Tim Reformasi Birokrasi.
- d. Melakukan pendampingan dalam penyusunan realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 pada Perangkat Daerah penanggungjawab Reformasi Birokrasi dengan Tim Reformasi Birokrasi.
- e. Melakukan evaluasi terhadap realisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi per triwulan.

## 2. NILAI AKUNTABILITAS KINERJA

Nilai Akuntabilitas Kinerja adalah hasil penilaian terhadap tingkat keterkaitan antara perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja suatu instansi pemerintah. Penilaian ini dilakukan oleh Kementerian PANRB melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Solok menunjukkan nilai sebesar 68,74 dengan predikat “B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama.

### A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2025, target Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Solok adalah 70,1 dapat dilihat pada Tabel 3.1.1 sebagai berikut:

**Tabel. 3.2.1**

#### Nilai Akuntabilitas Kinerja

No	Indikator Kinerja	Target (Angka)
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	70,1

### B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel. 3.2.2 sebagai berikut:

**Tabel. 3.2.2****Nilai Akuntabilitas Kinerja**

No	Indikator Kinerja	Target (Angka)	Realisasi (Angka)	Capaian (%)
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	70,1	68,74	98,06

Sumber: LHE Kementerian PANRB Tahun 2025

Berdasarkan Tabel. 3.2.2 jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja pada Tahun 2025 belum tercapai yaitu sebesar 98,06%.

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB terdapat catatan yang menjadi penyebab tidak tercapainya target akuntabilitas kinerja diantaranya sebagai berikut:

- a. Penjabaran kinerja masih cenderung didasarkan dari struktur dokumen perencanaan dan program/kegiatan yang telah ada, sehingga identifikasi isu strategis, Critical Success Faktor (CSF), serta hubungan sebab-akibat kinerja antar level belum tergambar secara utuh
- b. Penjabaran crosscutting kinerja lintas PD belum sepenuhnya teridentifikasi secara konsisten dalam pohon kinerja.
- c. Penjenjangan kinerja antar level jabatan belum sepenuhnya mencerminkan perbedaan peran dan kontribusi masing-masing level jabatan dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.
- d. Terdapat perumusan indikator kinerja yang belum sepenuhnya selaras antara definisi operasional, rumus perhitungan, dan penjabaran indikator.
- e. Rencana aksi kinerja pada sebagian perangkat daerah masih berfokus pada pelaksanaan kegiatan fisik/rutin dan belum sepenuhnya menggambarkan intervensi yang memadai untuk mendukung pencapaian indikator kinerja. Selain itu, pada beberapa indikator kinerja.
- f. Publikasi laporan kinerja belum sepenuhnya dilakukan secara mutakhir dan mudah diakses oleh publik.
- g. Informasi dan analisis dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menghasilkan umpan balik berupa perbaikan atas perencanaan kinerja strategis.
- h. Analisis capaian kinerja dalam laporan kinerja belum sepenuhnya bersifat analitis dan berorientasi pembelajaran.

Berdasarkan catatan pada laporan hasil evaluasi AKIP Kabupaten Solok Tahun 2025 dapat disampaikan rencana tindak lanjut diantaranya sebagai berikut:

- a. Melakukan *coaching clinic* kepada seluruh PD mengenai tata cara pengunggahan dan kualitas dokumen yang diminta melalui aplikasi [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id).
  - b. Memastikan seluruh dokumen (Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi Internal) tersedia dalam format PDF sesuai tahun berjalan.
  - c. Melakukan *upload* secara konsisten, bukan sekaligus di akhir tahun, terutama untuk dokumen triwulanan/semesteran.
  - d. Melakukan *desk study* dan reviu terhadap Renstra (Rencana Strategis) serta isu faktual terbaru untuk menentukan *Ultimate Outcome* (hasil akhir) yang ingin dicapai.
  - e. Melakukan penjabaran *crosscutting* kinerja lintas PD dan pihak terkait dalam pohon kinerja, dengan memperjelas peran dan kontribusi masing-masing pihak dalam mendukung pencapaian kinerja yang sama.
  - f. Melakukan pemetaan ulang pohon kinerja (*cascading*) mulai dari level Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Administrator, Pengawas, hingga Pelaksana/Fungsional berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 89 Tahun 2021.
  - g. Menyusun dokumen Definisi Operasional yang spesifik dan terukur untuk setiap indikator, mencakup nama indikator, definisi konsep, rumus/metode perhitungan, sumber data, dan unit penanggung jawab;
  - h. Melakukan *desk study* dan reviu terhadap rencana aksi PD.
  - i. Melakukan evaluasi triwulanan atas hasil input kinerja pada aplikasi.
  - j. Melakukan pemantauan secara berkala publikasi laporan kinerja pada tingkat Pemda maupun PD.
  - k. Memastikan target tahun depan lebih tinggi atau lebih baik (*continuous improvement*) berdasarkan laporan kinerja tahun sebelumnya.
  - l. Melakukan bimbingan teknis (*bimtek*) atau workshop bagi unit kerja teknis mengenai teknik penulisan laporan analitis dan analisis kinerja berorientasi pembelajaran.
  - m. Menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Internal melalui [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id).
  - n. Menetapkan kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi AKIP internal sebagai instrumen penguatan implementasi SAKIP di PD.
- C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

**Tabel. 3.2.3**

**Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja**

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Angka)		Capaian (%)		Tahun 2030 (Target akhir RPJMD)	
		2024	2025	2024	2025	Target (Angka)	Capaian (%)
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	68,58	68,74	91,44	98,06	90,01	76,37

Berdasarkan Tabel. 3.2.3 dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD tahun 2030, capaian kinerja Angka Akuntabilitas Tahun 2025 masih berada pada 76,37% sehingga diperlukan upaya yang lebih optimal.

- D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

**Tabel. 3.2.4**

**Efisiensi Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja**

IKU	Kinerja			Keuangan			
	Target (Angka)	Realisasi (Angka)	%	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Nilai Akuntabilitas Kinerja	70,1	68,74	98,06	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	141.509.112	131.184.920	92,7
				Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	138.978.000	103.979.740	74,82
<b>Rata-rata capaian</b>			<b>98,06</b>	<b>Total Anggaran</b>	<b>280.487.112</b>	<b>235.164.660</b>	<b>83,84</b>

Pada Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Solok tingkat efisiensinya tidak dapat dijabarkan karena target pada perjanjian kinerja tidak dapat dicapai.

- E. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mewujudkan pencapaian target Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Solok Tahun 2025, terdapat beberapa program/kegiatan penunjang yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah diantaranya, yaitu:

- a. Melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan
- b. Meningkatkan Kapabilitas APIP secara mandiri dalam rangka melaksanakan fungsi sebagai evaluator LAKIP Perangkat Daerah dan Reviu LKJIP Pemerintah Daerah.
- c. Melakukan Evaluasi atas LAKIP Perangkat Daerah.
- d. Melakukan Reviu terhadap LKJIP pemerintah Daerah.
- e. Melakukan Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Pemerintah dengan Narasumber dari Kementerian PANRB pada Perangkat Daerah diLingkungan Perintah Kabupaten Solok.
- f. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah melakukan bimbingan teknis penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah.
- g. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah melakukan asistensi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah.
- h. Melakukan pendampingan pada Perangkat Daerah dalam penginputan SAKIP ke aplikasi <https://silakip.solokkab.go.id/>



Bimbingan Teknis Penyusunan LKJIP oleh Bagian Organisasi

### 3. OPINI BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini BPK yang ditampilkan pada tahun 2025 merupakan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang hasilnya terbit pada tahun 2024. Pada Tahun 2024 Opini BPK Pemerintah Kabupaten Solok dengan opini WTP, ini menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material

A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan RPJMD 2021-2026 pada Tahun 2025, target Opini BPK Kabupaten Solok adalah WTP dapat dilihat pada Tabel 3.3.1 sebagai berikut:

**Tabel. 3.3.1**

**Opini BPK Daerah**

No	Indikator Kinerja	Target
1	Opini BPK	WTP

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Opini BPK Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel. 3.3.2 sebagai berikut:

**Tabel. 3.3.2**

**Opini BPK Daerah**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Opini BPK	WTP	WTP	100

Sumber: Lap.hasil pemeriksaan atas lap.keuangan (BPK-RI)/2025

Berdasarkan Tabel. 3.3.2 jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Opini BPK Atas Laporan Keuangan pada Tahun 2025 tercapai yaitu 100%.

Pencapaian Opini BPK Atas Laporan Keuangan telah memenuhi target ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:

1. Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang kuat: Adanya sistem kontrol yang baik dalam proses pengelolaan keuangan dan pencatatan aset.
2. SDM aparatur yang memiliki pemahaman yang baik mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

3. Kepatuhan terhadap Peraturan: Ketaatan yang tinggi terhadap perundang-undangan dalam pengelolaan APBN/APBD.
  4. Penggunaan sistem informasi akuntansi keuangan yang terintegrasi.
  5. Komitmen Pimpinan: Adanya komitmen kuat dari kepala daerah atau pimpinan lembaga untuk melakukan perbaikan tata kelola keuangan.
  6. Tindak Lanjut Temuan BPK: Kecepatan dan ketepatan menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK di tahun sebelumnya.
  7. Pengoptimalan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP/Inspektorat) dalam melakukan reuiu atas laporan keuangan sebelum diserahkan ke BPK.
- C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

**Tabel. 3.3.3**

**Perkembangan Opini BPK**

Indikator Kinerja	Realisasi				Capaian				Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
	20	20	20	20	20	20	20	20	Target	Capaian
	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2	2	2	2	2	2	2	2		
	2	3	4	5	2	3	3	5		
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	100	100	100	100	WTP	100

Berdasarkan Tabel. 3.3.3 dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja Opini BPK Tahun 2025 dapat mempertahankan capaian tahun 2024. Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD tahun 2030, capaian kinerja Opini BPK Tahun 2025 telah tercapai.

- D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

**Tabel. 3.3.4**

**Efisiensi Indikator Opini BPK**

IKU	Kinerja			Keuangan			
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%

Opini BPK	WTP	WTP	100	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	3.524.086.559	3.112.048.107	88.31
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.413.592.628	1.177.550.147	83.30
				Reviu Laporan Keuangan	13.997.500	10.650.000	76,09
<b>Rata-rata capaian</b>			<b>100</b>	<b>Total Anggaran</b>	<b>4.951.676.687</b>	<b>4.300.248.254</b>	<b>86.84</b>
<b>Tingkat Efisiensi 13,16</b>							

Pada Indikator Opini BPK Atas Laporan Keuangan Kabupaten Solok tingkat efisiensinya sebesar 13,16% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.951.676.687,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.300.248.254,00.

E. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mendukung pencapaian target Opini BPK di Kabupaten Solok Tahun 2025, terdapat beberapa program/kegiatan penunjang yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah diantaranya, yaitu:

1. Melakukan pelatihan rutin terkait Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan regulasi keuangan terbaru bagi pengelola keuangan.
2. Memastikan seluruh transaksi keuangan terekam dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara real-time dan akurat.
3. Melakukan rapat koordinasi rutin untuk membahas potensi temuan dan perbaikan tata kelola keuangan
4. Melakukan pengawasan Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK (LHP)
5. Melakukan penataan Aset Tetap dan Persediaan.



Workshop Penyusunan Laporan Keuangan

#### 4. INDEKS PELAYANAN PUBLIK

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Kabupaten Solok berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks pelayanan publik.

Pada Tahun 2025 IPP Kabupaten Solok sebesar 4,44 dengan predikat A-. Nilai tersebut mencerminkan bahwa sebagian besar unit layanan publik telah memenuhi komponen penilaian yang meliputi standar pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan, kompetensi penyelenggara layanan, sistem informasi pelayanan publik, pengelolaan pengaduan, serta inovasi pelayanan. Dan masih perlu ditingkatkan lagi untuk mencapai pelayanan prima.

##### A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2025, target Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Solok adalah 4,47 dapat dilihat pada Tabel 3.4.1 sebagai berikut:

**Tabel. 3.4.1**

#### **Indeks Pelayanan Publik**

No	Indikator Kinerja	Target (Indeks)
1	Indeks Pelayanan Publik	4,47

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel. 3.4.2 sebagai berikut:

**Tabel. 3.4.2**

**Indeks Pelayanan Publik**

No	Indikator Kinerja	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	Capaian (%)
1	Indeks Pelayanan Publik	4,47	4.44	99,33

Sumber: KepmenPAN RB Nomor 3 Tahun 2026

Berdasarkan Tabel. 3.4.2 jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Indeks Pelayanan Publik pada Tahun 2025 belum tercapai yaitu sebesar 99,33%.

Belum tercapainya target Indeks Pelayanan Publik tersebut dipengaruhi oleh beberapa factor sebagai berikut:

1. pemenuhan standar pelayanan pada sebagian unit layanan belum sepenuhnya optimal, terutama terkait kelengkapan dan konsistensi publikasi standar pelayanan, pelibatan Masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan, maklumat pelayanan, serta informasi layanan yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik pada beberapa unit layanan masih perlu ditingkatkan, khususnya fasilitas pelayanan yang mendukung aksesibilitas bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan anak.
3. Pemanfaatan sistem informasi pelayanan publik berbasis digital belum sepenuhnya dimaksimalkan, sehingga sebagian layanan masih dilaksanakan secara manual yang berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi pelayanan.
4. Pengelolaan pengaduan masyarakat masih perlu diperkuat, baik dalam hal kecepatan respon, mekanisme tindak lanjut, maupun sistem monitoring terhadap penyelesaian pengaduan.
5. Kapasitas dan kompetensi aparatur penyelenggara pelayanan publik pada beberapa perangkat daerah juga masih perlu ditingkatkan, terutama dalam

penerapan budaya pelayanan prima dan pemahaman terhadap standar pelayanan publik.

Dalam rangka meningkatkan capaian Indeks Pelayanan Publik pada tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Solok akan melaksanakan beberapa strategi perbaikan, antara lain:

1. Pembinaan dan pendampingan terhadap unit pelayanan publik dalam pemenuhan seluruh komponen standar pelayanan.
2. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana pelayanan publik khususnya fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.
3. Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem pelayanan publik berbasis digital guna meningkatkan efektivitas dan transparansi pelayanan.
4. Memperkuat sistem pengelolaan pengaduan masyarakat
5. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggara pelayanan publik melalui pelatihan dan pembinaan.
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada seluruh perangkat daerah.

Melalui berbagai upaya perbaikan tersebut, diharapkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Solok dapat terus meningkat sehingga capaian Indeks Pelayanan Publik pada tahun mendatang dapat mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan serta memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.

- C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

**Tabel. 3.4.3**

**Perkembangan Indeks Pelayanan Publik**

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Indeks)		Capaian (%)		Tahun 2030 (Target akhir RPJMD)	
		2024	2025	2024	2025	Target (Indeks)	Capaian (%)
1.	Indeks Pelayanan Publik	4.46	4.44	N/A	99,33	4,52	98,23

Berdasarkan Tabel. 3.4.3 dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025 mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 0,03 poin. Untuk perbandingan dengan target akhir

RPJMD, capaian kinerja Indeks Pelayanan Publik masih berada pada 98,23% dan diperlukan perbaikan untuk lebih optimal.

- D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

**Tabel. 3.4.4**

**Efisiensi Indikator Indeks Pelayanan Publik**

IKU	Kinerja			Program	Keuangan		
	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Indeks Pelayanan Publik	4,47	4,44	99,33	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	145.417.162	131.128.015	90,17
<b>Rata-rata capaian</b>			<b>99,33</b>	<b>Total Anggaran</b>	<b>145.417.162</b>	<b>131.128.015</b>	<b>90,17</b>

Pada Indikator Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Solok tingkat efisiensinya tidak dapat dijabarkan karena target pada perjanjian kinerja tidak dapat dicapai.

- E. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mewujudkan pencapaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Solok Tahun 2025, terdapat beberapa program/kegiatan penunjang yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah diantaranya, yaitu:

- a. Pemerintah Kabupaten Solok telah mengikuti kegiatan pendampingan pelayanan publik oleh KemenPAN RB.
- b. Melakukan workshop Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Mandiri.
- c. Pemerintah Kabupaten Solok melakukan *coaching clinic* terkait Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Mandiri.



Kegiatan Workshop PEKPPP Mandiri oleh Bagian Organisasi



Kegiatan *coaching clinic* PEKPPP Mandiri 2025

## 5. Nilai LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Nilai LPPD dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui hasil evaluasi LPPD dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan sampai saat ini nilai LPPD Kabupaten Solok belum disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri sampai saat

laporan ini disusun sehingga Indikator Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah belum dapat dijelaskan capaian kerjanya.

## 6. RASIO PAJAK DAERAH TERHADAP PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah.

Secara sederhana, rasio pajak terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sebesar 0,28% di Kabupaten Solok pada tahun 2025 menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap total nilai tambah ekonomi di wilayah tersebut masih sangat rendah.

### A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2025, target Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Solok adalah 0,18 dapat dilihat pada Tabel 3.6.1 sebagai berikut:

**Tabel. 3.6.1**

#### Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

No	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,18

### B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel. 3.6.2 sebagai berikut:

**Tabel. 3.6.2**

#### Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,18	0,28	155,56

Sumber: Laporan Pendapatan Daerah, Bapenda 2025

Berdasarkan Tabel. 3.6.2 jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB pada Tahun 2025 tercapai.

Tercapainya target kinerja Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB terdapat beberapa faktor pendukung diantaranya adalah:

1. **Pendataan Ulang Potensi, melakukan survei lapangan dan pemutakhiran data wajib pajak PBB-P2 dan BPHTB, Rumah Makan, Penginapan dan Sumber pajak lainnya secara berkala untuk memastikan data akurat.**
2. **Penagihan dan pendampingan aktif, melakukan penyelesaian piutang dan penagihan pajak yang lebih aktif kepada wajib pajak.**
3. **Melakukan Sosialisasi Masif manfaat pajak kepada masyarakat hingga daerah terpencil baik secara langsung ataupun menggunakan media sosial, cetak, dan elektronik dan mobil informasi keliling.**
4. **Kerjasama Lintas Instansi, melakukan kolaborasi dengan Ditlantas, Jasa Raharja, dan Bank Daerah (Samsat) untuk mempermudah pelayanan.**
5. **Meningkatkan Kemitraan dengan Pihak Swasta dan Nagari, melibatkan pihak ketiga baik swasta maupun Pemerintahan Nagari dalam pengelolaan dan pemungutan pajak untuk memperluas jangkauan layanan.**

- C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

**Tabel. 3.6.3**

**Perkembangan Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB**

No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)		Capaian (%)		Tahun 2030 (Target akhir RPJMD)	
		2024	2025	2024	2025	Target (%)	Capaian (%)
1.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	N/A	0,28	N/A	155,56	0,28	100

Berdasarkan Tabel. 3.6.3 dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator ini merupakan indikator baru. Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD, capaian kinerja Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB telah tercapai.

- D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

**Tabel. 3.6.4**

**Efisiensi Indikator Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB**

IKU	Kinerja			Program	Keuangan		
	Target (%)	Realisasi (%)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,18	0,28	155,56	Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.867.665.278,00	4.330.812.508,00	63,06
<b>Rata-rata capaian</b>			<b>155,56</b>	<b>Total Anggaran</b>	<b>6.867.665.278,00</b>	<b>4.330.812.508,00</b>	<b>63,06</b>
<b>Tingkat Efisiensi 32,94%</b>							

Pada Indikator Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Solok tingkat efisiensinya sebesar **32,94%** dengan pagu anggaran sebesar Rp. **6.867.665.278,00** dan realisasi anggaran sebesar Rp. **4.330.812.508,00**

Untuk mencapai target indikator Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB sumber daya manusia yang ada belum sesuai dengan jumlah analisis jabatan dan analisis beban kerja dan untuk menyikapinya Pemerintah Kabupaten Solok melakukan inovasi sehingga target tercapai.

- E. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mewujudkan pencapaian target Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Solok Tahun 2025, terdapat beberapa program/kegiatan penunjang yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah diantaranya, yaitu:

- a. Melakukan analisis terhadap potensi pajak daerah untuk mengetahui sumber-sumber pendapatan yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
- b. Mengembangkan basis pajak daerah dengan cara meningkatkan jumlah wajib pajak, meningkatkan tarif pajak, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak.
- c. Mengembangkan sistem pajak daerah yang lebih efektif dan efisien, termasuk penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan pengelolaan pajak.
- d. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang kebijakan pajak daerah, hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, serta manfaat dari membayar pajak.

- e. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pajak daerah melalui media massa, brosur, poster, dan lain-lain.
- f. Membangun sistem informasi pengelolaan pajak daerah yang terintegrasi dan canggih untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak.
- g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pengelolaan pajak dengan cara pelatihan dan pengembangan
- h. Melakukan pendataan terhadap objek pajak daerah, seperti properti, usaha, dan lain-lain.



Masyarakat melakukan pembayaran pajak



Sosialisasi pajak pada wajib pajak

## 7. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari

rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2025, target Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Solok adalah 72,79 dapat dilihat pada Tabel 3.7.1 sebagai berikut:

**Tabel. 3.7.1**

**Indeks Pembangunan Manusia**

No	Indikator Kinerja	Target (Indeks)
1	Indeks Pembangunan Manusia	72,79

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel. 3.7.2 sebagai berikut:

**Tabel. 3.7.2**

**Indeks Pembangunan Manusia**

No	Indikator Kinerja	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	Capaian (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	72,79	73,26	100,65

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka 2026

Berdasarkan Tabel. 3.7.2 jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Indeks Pembangunan Manusia pada Tahun 2025 tercapai.

Keberhasilan pencapaian target tersebut didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Terjadi peningkatan pada aksesibilitas sarana dan prasarana pendidikan, yang mendukung pemerataan kesempatan belajar, serta kuatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan formal.
2. Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) yang dilakukan secara berkelanjutan melalui kunjungan keluarga,

pendataan profil kesehatan keluarga, serta pembinaan perilaku hidup sehat oleh tenaga kesehatan dan kader.

3. Meningkatnya pendapatan masyarakat, baik dari sektor pertanian, perdagangan, maupun jasa.
  4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan konsumsi pangan.
  5. Stabilitas sektor pertanian dan komoditas unggulan daerah, yang masih menjadi penopang utama struktur ekonomi Kabupaten Solok.
  6. Pergerakan sektor perdagangan dan UMKM, terutama pada kegiatan distribusi dan konsumsi masyarakat yang tetap berjalan.
  7. Belanja pemerintah daerah, yang turut memberikan stimulus terhadap aktivitas ekonomi lokal melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
- C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

**Tabel. 3.7.3**

**Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia**

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Indeks)		Capaian (%)		Tahun 2030 (Target akhir RPJMD)	
		2024	2025	2024	2025	Target (Indeks)	Capaian (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	72,29	73,26	100,4	100,65	75,35	97,23

Berdasarkan Tabel. 3.7.3 dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD, capaian kinerja Indeks Pembangunan Manusia belum tercapai.

- D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

**Tabel. 3.7.4**

**Efisiensi Indikator Indeks Pembangunan Manusia**

IKU	Kinerja	Keuangan
-----	---------	----------

	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	%	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Indeks Pembangunan Manusia	72,79	73,26	100,65	Pengelolaan Pendidikan	81.090.498.526	79.596.230.107	98,60
				Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	80.883.507.063	70.355.001.969	86,98
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.830.121.156	1.657.179.563	90,55
				Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	573.102.627	509.545.545,67	88,91
				Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	563.286.300	455.596.000	80,88
				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	135.978.134.157	128.752.760.946	94,68
				<b>Rata-rata capaian</b>			<b>100,65</b>
<b>Tingkat Efisiensi 6,51%</b>							

Pada Indikator Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Solok tingkat efisiensinya sebesar 6,51% dengan pagu anggaran sebesar Rp. **300.918.649.829** dan realisasi anggaran sebesar Rp. **281.326.314.131**

E. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mewujudkan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Solok Tahun 2025, terdapat beberapa program/kegiatan penunjang yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah diantaranya, yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Solok melakukan revitalisasi komprehensif melalui perbaikan sarana prasarana fisik guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Upaya ini diperkuat dengan digitalisasi sekolah, salah satunya melalui pengadaan Interactive Flat Panel (IFP) untuk meningkatkan interaktivitas dan antusiasme siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, peningkatan sarana pendukung melalui pengadaan alat praktek, perlengkapan sekolah, serta pembangunan laboratorium sekolah yang memadai turut diakselerasi untuk menunjang kualitas pengajaran praktis dan kejuruan. Langkah terintegrasi ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar, mengurangi angka putus sekolah, dan pada akhirnya memperpanjang rata-rata lama sekolah di tingkat lokal maupun nasional.
2. Melakukan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan diantaranya Pelatihan Penggunaan IFP (*Interactive Flat Panel*).
3. Melakukan strategi komprehensif yang mencakup penguatan promosi kesehatan (seperti gerakan aksi bergizi, cegah stunting, aktifkan posyandu, dan pengendalian penyakit tidak menular), perluasan Cek Kesehatan Gratis (CKG) dengan target 36% penduduk, serta inovasi pengendalian penyakit menular seperti Pendekar Besti dan IK MAPS untuk TBC. Selain itu, dilakukan upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi melalui audit maternal (AMPSR), peningkatan kualitas sarana prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas/Pustu, penguatan kapasitas tenaga medis dan kader, intervensi gizi spesifik, dukungan sanitasi pada program Makanan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan cakupan UHC hingga 91,41%, serta penjaminan keamanan pangan melalui pengawasan ketat terhadap pelaku usaha P-IRT.
4. Peningkatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, melalui pelatihan manajemen dan produksi, bertujuan untuk meningkatkan produktivitas serta pendapatan masyarakat. Upaya ini diakselerasi dengan pengembangan pemasaran dan digitalisasi, yang memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing usaha di era digital. Terakhir, penguatan kelembagaan dan kemitraan, seperti pembentukan koperasi atau jaringan usaha, sangat krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan memperluas penyerapan tenaga kerja.

5. Meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan melalui penyediaan sarana produksi unggul, modernisasi alat mesin pertanian, pembangunan infrastruktur pendukung, serta penerapan praktik pertanian berkelanjutan yang disertai dengan penguatan kapasitas petani, peran penyuluh, dan efektivitas sekolah lapang guna mengoptimalkan produktivitas serta stabilitas pendapatan sektor pertanian.

## 8. TINGKAT KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Persentase Penduduk Miskin (P0) adalah persentase penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK) pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Indikator ini menunjukkan luasnya penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum, baik makanan maupun non-makanan. Persentase Penduduk Miskin (P0) merupakan indikator utama yang menggambarkan proporsi penduduk Kabupaten Solok yang berada di bawah Garis Kemiskinan. Penurunan P0 mencerminkan meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar secara layak serta efektivitas intervensi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Pada Tahun 2025 Persentase penduduk 6,52%, Angka ini menunjukkan bahwa dari setiap 100 orang penduduk di Kabupaten Solok, terdapat sekitar **6 hingga 7 orang** yang diklasifikasikan sebagai penduduk miskin. Secara statistik, ini disebut sebagai **Head Count Index (P0)**, yaitu persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis.

### A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2025, target Tingkat Kemiskinan Kabupaten Solok adalah 6,08 dapat dilihat pada Tabel 3.8.1 sebagai berikut:

**Tabel. 3.8.1**

### Tingkat Kemiskinan

No	Indikator Kinerja	Target (%)
----	-------------------	------------

1	Tingkat Kemiskinan	6,08
---	--------------------	------

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Tingkat Kemiskinan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel. 3.8.2 sebagai berikut:

**Tabel. 3.8.2**

**Tingkat Kemiskinan**

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Tingkat Kemiskinan	6,08	6,52	92,76

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Solok

Berdasarkan Tabel. 3.8.2 jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Tingkat Kemiskinan pada Tahun 2025 tidak tercapai.

Pencapaian Tingkat kemiskinan belum memenuhi target ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Ketergantungan pada sektor primer, khususnya pertanian tradisional dengan produktivitas relatif rendah dan rentan terhadap perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, serta keterbatasan akses permodalan dan teknologi. Struktur ekonomi yang belum sepenuhnya terdiversifikasi menyebabkan sebagian besar rumah tangga miskin berada pada lapangan usaha berisiko tinggi.
2. Tingginya proporsi pekerja sektor informal dengan tingkat pendapatan tidak tetap dan minim perlindungan sosial ketenagakerjaan. Kondisi ini menyebabkan kelompok hampir miskin (near poor) sangat rentan terhadap guncangan ekonomi, seperti kenaikan harga pangan atau penurunan permintaan pasar
3. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia, termasuk rata-rata lama sekolah dan keterampilan kerja yang belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan pasar.
4. Akurasi dan dinamika data kemiskinan yang masih memerlukan pemutakhiran berkala. Perubahan status sosial ekonomi rumah tangga yang cepat, baik akibat migrasi maupun perubahan pekerjaan, menuntut sistem data yang adaptif agar intervensi program tepat sasaran.

5. Keterbatasan fiskal daerah dalam membiayai program penanggulangan kemiskinan secara masif dan berkelanjutan. Ketergantungan pada transfer pusat serta ruang fiskal yang terbatas memerlukan prioritas dan sinergi lintas sektor yang lebih kuat.
6. Risiko eksternal dan kerentanan wilayah, termasuk potensi bencana alam, perubahan iklim, serta fluktuasi harga pangan dan energi, yang dapat secara cepat meningkatkan jumlah penduduk rentan miskin.
7. Aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang belum merata, terutama pada nagari-nagari dengan kondisi geografis menantang, sehingga membatasi akses masyarakat terhadap layanan dasar, pasar, dan peluang ekonomi.

Berdasarkan permasalahan atau penyebab tidak tercapainya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Solok diperlukan langkah-langkah atau rencana tindak lanjut diantaranya:

1. Penggunaan Basis Data Terpadu/Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTKS) yang akurat untuk memastikan intervensi program tepat sasaran (no one left behind).
  2. Pergeseran fokus intervensi dari berbasis individu menjadi berbasis rumah tangga (keluarga) untuk penanganan yang lebih komprehensif (misal: PKH, BPNT).
  3. Pemberdayaan usaha mikro/kecil (UMKM) dan penciptaan lapangan kerja untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.
  4. Kolaborasi sinergis antara berbagai dinas (Dinsos, Disnaker, Dinkes, Disdik, dll) agar program tidak berjalan sendiri-sendiri
- C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

**Tabel. 3.8.3**

**Perkembangan Tingkat Kemiskinan**

No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)		Capaian (%)		Tahun 2030 (Target akhir RPJMD)	
		2024	2025	2024	2025	Target (%)	Capaian (%)
1.	Tingkat Kemiskinan	7,31	6,52	93,16	92,76	4,29	48,02

Berdasarkan Tabel. 3.8.3 dapat dilihat bahwa realisasi kinerja dan capaian, Persentase Penduduk Miskin Tahun 2025 mengalami penurunan yang dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Sedangkan capaian persentase penduduk miskin tahun 2025 terdapat deviasi absolut sebesar 0,79 point persentase. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Solok dalam menurunkan angka kemiskinan tahun 2025 menunjukkan peningkatan ke arah yang lebih baik. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030 capaian kinerja sebesar 48,02%.

- D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

**Tabel. 3.8.4**

**Efisiensi Indikator Tingkat Kemiskinan**

IKU	Kinerja			Keuangan			
	Target (Angka)	Realisasi (Angka)	%	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Indeks Pembangunan Manusia	6,08	6,25	107,23	Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	233.980.818	226.010.473	96,59
				Sediaan farmasi, Alat kesehatan dan Makanan minuman	573.102.627	509.571.202	88,91
				Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat hukum adat	1.507.480.648	1.452.702.506	96,37
				Penilaian Kesehatan ksp/usp Koperasi	82.456.496	76.498.206	92,77
				Pendidikan dan Latihan perkoperasian	109.000.300	92.179.931	84,57
				Pemberdayaan Dan perlindungan	29.547.700	27.365.663	92,62

				Koperasi			
				Pemberdayaan Usaha menengah, usaha Kecil, dan usaha mikro (umkm)	99.371.140	98,293.254	98,92
				Pengembangan Umkm	986.531.340	951.543.454	96,45
				Penggunaan dan Pemasaran produk dalam Negeri	39.043.882	37.357.880	95,68
				Perencanaan Dan pembangunan Industri	1.237.296.741	1.151.680.978	93,08
				Pelatihan kerja Dan produktivitas tenaga Kerja	184.662.237	163.976.016	88,80
				Penempatan Tenaga kerja	66.978.231	55.767.002	83,26
				Hubungan Industrial	71.184.766	60.055.925	84,37
				Pelayanan Penanaman modal	346.719.043	271.551.886	78,32
				Pengelolaan Perikanan tangkap	109.165.371	94.382.285	86,46
				Pengelolaan Perikanan budidaya	1.149.561.066	1.044.406.500	90,85
				Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan	148.064.255	130.236.341	87,96
				Pengembangan Kesenian tradisional	806.437.918	796.801.078	98,81
				Peningkatan Daya tarik destinasi	972.656.630	956.144.723	98,30

				Pariwisata			
				Pengembangan Sumber daya pariwisata Dan ekonomi kreatif	107.590.317	106.742.535	99,21
				Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian	8.443.008.093	8.334.227.985	98,71
				Penyuluhan Pertanian	4.522.885.647	3.860.066.876	85,35
				Perekonomian Dan pembangunan	1.971.953.518	1.744.723.673	88,48
				Pengelolaan Pendidikan	81.090.498.526	72.070.068.440	88,88
				Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan upaya Kesehatan	80.883.507.062,96	70.540.889.969,13	87,21
				Peningkatan Kapasitas sumber daya Manusia kesehatan	1.830.121.156,29	1.652.779.563	90,31
				Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan	563.286.300	484.556.000	86,02
				Pengembangan Perumahan	712.512.739	679.135.020	95,32
				Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran Dan penyelamatan non Kebakaran	1.304.406.529	1.210.767.205	92,82
				Penanggulangan bencana	2.063.692.338	2.002.200.728	97,02

				Pemberdayaan Sosial	57.288.561	52.152.634	91,03
				Rehabilitasi Sosial	1.300.378.953	1.227.031.320	94,36
				Perlindungan Dan jaminan sosial	512.207.721	492.969.455	96,24
				Penanganan Bencana	530.739.953	486.803.597	91,72
				Pemenuhan hak Anak (pha)	83.396.089	69.533.839	83,38
				Perlindungan Khusus anak	283.696.125	241.700.720	85,20
				Pengendalian Penduduk	520.703.788	497.136.594	95,47
				Pembinaan Keluarga berencana (kb)	3.367.141.349	2.924.983.577	86,87
				Pendaftaran Penduduk	845.922.967	768.985.439	90,90
				Pencatatan sipil	100.156.283	92.720.834	92,58
				Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan	67.828.566	60.031.714	88,51
				Penanganan Kerawanan pangan	113.663.209	106.677.500	93,85
				Pengelolaan Keuangan daerah	176.531.512.852	160.183.316.250	90,74
				Pengelolaan Sumber daya air (sda)	7.344.550.664	7.294.268.488	99,32
				Pengelolaan dan Pengembangan sistem Penyediaan air minum	3.146.677.831	3.081.388.921	97,93

				Pengelolaan dan Pengembangan sistem air Limbah	9.688.028.728	9.604.728.493	99,14
				Penataan Bangunan dan Lingkungannya	7.624.412.578	6.910.199.554,99	90,63
				Penyelenggaraan jalan	29.075.891.086	26.347.863.519	90,62
				Penyelenggaraan Penataan ruang	932.426.860	891.756.969	95,64
				Kawasan Permukiman	5.293.218.551	5.040.923.505	95,23
				Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban umum	647.444.513	633.891.819	97,91
				Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan Perempuan	43.618.000	40.969.820	93,93
				Peningkatan Kualitas keluarga	69.987.438	66.229.021	94,63
				Pengelolaan Persampahan	2.935.128.56	2.910.164.149	99,15
				Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	2.889.846.647	2.812.643.625	97,33
				Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik	3.201.384.240	2.915.805.346	91,08
				Pembinaan Perpustakaan	1.272.198.782	1.120.029.520	88,04
<b>Total Anggaran</b>					<b>450.726.154.329</b>	<b>407.757.589.520</b>	<b>90,47</b>

Pada Indikator Tingkat Kemiskinan Kabupaten Solok tingkat efisiensinya tidak dapat dihitung karena target pada perjanjian kinerja tidak tercapai.

E. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Tingkat Kemiskinan Kabupaten Solok Tahun 2025, terdapat beberapa program/kegiatan penunjang yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah diantaranya, yaitu:

1. Mengurangi beban pengeluaran

Pemerintah Kabupaten melalui melakukan pemberian bantuan sembako lansia terlantar dan anak terlantar, miskin ekstrem, penyediaan alat bantu (kursi roda, kaki palsu, tangan palsu, dll), Bantuan sembako keluarga dan penyediaan logistik bencana dan dapur umum. Penerbitan dokumen kependudukan tanpa biaya (KK, AKTA, KTP dll), melakukan pemberian bantuan untuk KK miskin berupa beras (300 kg, perkarung 5 kg), Pemberian layanan Kesehatan yang mudah diakses oleh Masyarakat, dengan biaya yang terjangkau dan didukung oleh program kepesertaan JKN gratis bagi kelompok Masyarakat yang membutuhkan, memberikan layanan kontrasepsi, merehabilitasi rumah terdampak bencana dan pembangunan rumah terdampak bencana.

2. Meningkatkan pendapatan

Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat Pemerintah Kabupaten Solok melakukan berbagai kegiatan diantaranya memberikan pelatihan pengurus koperasi aktif, fasilitasi kemitraan UMKM dengan lembaga keuangan, Fasilitasi perizinan UMKM, Fasilitasi perizinan kelembagaan UMKM, Pembinaan UMKM, Bantuan peralatan, menyediakan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap, Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan berupa Samosa Tuna, Siomay Tuna, Springroll Tuna dan Sumpia Bilih, memberikan pelatihan pembuatan kue, pelatihan Bisnis administrasi perkantoran, Pelatihan konten pemasaran berbasis aplikasi smart phone, Hydrophonik automatic system, memberi bantuan bibit kopi, cengkeh, kulit manis dan Pupuk Kompos, bibit Alpukat, bibit Durian, benih Bawang Merah, benih Kentang, Pupuk Kompos, melaksanakan pelatihan peternak ayam kukuk balenggek, penyediaan sarana BPP dan sekolah lapangan untuk kelompok tani.

Menyediakan alat kesenian, pembinaan kesenian, penampilan kesenian, merehab sarana prasarana destinasi milik pemerintah daerah, perbaikan cagar budaya) (2026 pemeliharaan sarana dan prasarana dermaga singkarak

dan alahan panjang resort, serta pengadaan plang destinasi wisata di bukit gua basurek nagari bukit bais) dan Sertifikasi pemandu gunung danau kembar.

3. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan

Wilayah kantong kemiskinan di Kabupaten Solok umumnya tersebar di wilayah perdesaan dan kecamatan yang memiliki keterbatasan aksesibilitas. Pemerintah Kabupaten Solok terus berupaya mengurangi angka kemiskina dengan melakukan kegiatan diantaranya pengerukan batang gumanti, pembangunan DAM batang aia kaciak, pengerukan batang lawas, normalisasi sungai batang lawas, normalisasi penguatan sungai sawah panjang, normalisai penguatan sungai batang lembang, penahan tebing sungai nagari batang baru, DAM sungai batang pangalek, penguatan tebing batang aia raso, rehabilitasi jaringan irigasi, meningkatkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat, meningkatkan pengelolaan sampah, menyediakan Bus Sekolah Gratis, Angkutan Barang Gratis, Pembangunan embung pertanian, DAM Parit, Pembangunan dan rehab jalan usaha tanidan Rehab Jaringan Irigasi Usaha Tani serta Perbaikan rumah tidak layak huni.

## 9. RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Rata-rata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut:

Tidak punya ijazah = 0 tahun;

SD = 6 tahun;

SMP = 9 tahun;

SMA = 12 tahun;

D1/D2 = 14 tahun;

D3 = 15 tahun;

D4 = 16 tahun;

S1 = 17 tahun;

S2 = 19 tahun;

S3 = 22 tahun.

Capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di kabupaten Solok pada tahun 2025 adalah 8,25 artinya sebagian besar penduduk dewasa di Kabupaten Solok pernah bersekolah hingga jenjang SMP, namun rata-rata berhenti atau putus sekolah saat berada di kelas 2 atau awal kelas 3 SMP.

A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2025, target Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Solok adalah 8,01 dapat dilihat pada Tabel 3.9.1 sebagai berikut:

**Tabel. 3.9.1**

**Rata-rata Lama Sekolah**

No	Indikator Kinerja	Target (Tahun)
1	Rata-rata Lama Sekolah	8,01

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel. 3.9.2 sebagai berikut:

**Tabel. 3.9.2**

**Rata-rata Lama Sekolah**

No	Indikator Kinerja	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun)	Capaian (%)
1	Rata-rata Lama Sekolah	8,01	8,25	103

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka 2026

Berdasarkan Tabel. 3.9.2 jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Rata-rata Lama Sekolah pada Tahun 2025 melebihi target dengan capaian kinerja sebesar 103%.

Adapun faktor pendukung tercapainya target indikator Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2025 Kabupaten Solok diantaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan infrastruktur Pendidikan, berupa Pembangunan sekolah baru, renovasi fasilitas, bantuan transportasi sekolah (bus sekolah gratis).

2. Kebijakan pemerintah dalam program wajib belajar minimal 9 Tahun dengan pemberian bantuan peralatan belajar berupa seragam gratis, tas dan buku sekolah.
  3. Peningkatan pendapatan dan kemakmuran ekonomi.
  4. Meningkatnya kesadaran orang tua melalui adanya kampanye literasi serta kesetaraan gender.
- C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

**Tabel. 3.9.3**

**Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah**

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Tahun)		Capaian (%)		Tahun 2030 (Target akhir RPJMD)	
		2024	2025	2024	2025	Target (Tahun)	Capaian (%)
1.	Rata-rata Lama Sekolah	7,91	8,25	98,87	103	8,37	98,57

Berdasarkan Tabel. 3.9.3 dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD tahun 2030, capaian kinerja Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2025 masih berada pada 98,57% sehingga diperlukan upaya yang lebih optimal.

- D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

**Tabel. 3.9.4**

**Efisiensi Indikator Rata-rata Lama Sekolah**

IKU	Kinerja			Program	Keuangan		
	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Rata-rata Lama Sekolah	8,01	8,25	103	Program Pengelolaan Pendidikan	81.090.498.526	79.596.230.107	98,60
Rata-rata capaian			103	<b>Total Anggaran</b>	<b>81.090.498.526</b>	<b>79.596.230.107</b>	<b>98,60</b>
<b>Tingkat Efisiensi 1,40%</b>							

Pada Indikator Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Solok tingkat efisiensinya sebesar 1,40% dengan pagu anggaran sebesar Rp 81.090.498.526 dan realisasi anggaran sebesar Rp 79.596.230.107.

E. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Solok Tahun 2025, terdapat beberapa program/kegiatan penunjang yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Solok diantaranya:

1. Pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas sekolah,
2. Pengadaan perlengkapan sekolah.
3. Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan.



Revitalisasi SKB

## 10. HARAPAN LAMA SEKOLAH

Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.

Capaian Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di kabupaten Solok pada tahun 2025 adalah 13,66 artinya anak-anak di Kabupaten Solok diprediksi tidak hanya tamat SMA, tetapi rata-rata yang tamat SMA melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah meskipun mungkin tidak semuanya sampai lulus sarjana (wisuda).

A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2025, target Harapan Lama Sekolah Kabupaten Solok adalah 13,78 dapat dilihat pada Tabel 3.10.1 sebagai berikut:

**Tabel. 3.10.1**

### Harapan Lama Sekolah

No	Indikator Kinerja	Target (Tahun)
1	Harapan Lama Sekolah	13,78

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Harapan Lama Sekolah Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel. 3.10.2 sebagai berikut:

**Tabel. 3.10.2**

### Harapan Lama Sekolah

No	Indikator Kinerja	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun)	Capaian (%)
1	Harapan Lama Sekolah	13,78	13,66	99,13

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka 2026

Berdasarkan Tabel. 3.10.2 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025 tidak tercapai, pada tahun 2025 target Harapan Lama Sekolah dengan usia 13,78 Tahun dan terealisasi sebesar 13,66 Tahun dengan capaian kinerja sebesar 92,92% atau tidak tercapai.

Adapun tidak tercapainya target indikator Harapan Lama Sekolah Kabupaten Solok Tahun 2025 terdapat beberapa faktor sebagai berikut:

a. Kemiskinan dan biaya Pendidikan

Orang tua lebih memprioritaskan anak untuk bekerja setelah tamat SMA dari pada melanjutkan keperguruan tinggi karena asumsi biaya Pendidikan kuliah yang tinggi akan sangat membebani keluarga miskin.

b. Keterbatasan akses dan infrastruktur

Jauh jarak tempuh tempat tinggal dengan perguruan tinggi negeri atau swasta.

c. Tingginya angka putus sekolah (DO) yang disebabkan oleh desakan kebutuhan ekonomi dan perkawinan dini.

Berdasarkan permasalahan atau penyebab tidak tercapainya kinerja angka Harapan Lama Sekolah (HLS) maka diperlukan langkah-langkah strategis atau rencana tindak lanjut sebagai berikut:

a. Sosialisasi pendidikan formal dan nonformal secara konsisten terhadap

seluruh masyarakat kabupaten Solok.

- b. Pengentasan Anak Tidak Sekolah (ATS) terutama bagi masyarakat berusia diatas 25 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.
  - c. Pemerintah daerah perlu membangun perguruan tinggi yang memiliki spesifikasi sesuai kearifan lokal untuk mengakomodir masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.
  - d. Pemerintah Daerah perlu menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Sumatera Barat.
  - e. Pemerintah Daerah perlu menganggarkan Pembebasan Biaya Pendidikan Formal bagi masyarakat tidak mampu melalui Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
- C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

**Tabel. 3.10.3**

**Perkembangan Harapan Lama Sekolah**

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Tahun)		Capaian (%)		Tahun 2030 (Target akhir RPJMD)	
		2024	2025	2024	2025	Target (Tahun)	Capaian (%)
1.	Harapan Lama Sekolah	13,56	13,66	94,16	99,13	14,41	94,80

Berdasarkan Tabel. 3.10.3 dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja Harapan Lama Sekolah tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD tahun 2030, capaian kinerja Angka Akuntabilitas Tahun 2025 sebesar 94,80%.

- D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

**Tabel. 3.10.4**

**Efisiensi Indikator Harapan Lama Sekolah**

IKU	Kinerja			Program	Keuangan		
	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%

Harapan Lama Sekolah	13,78	13,66	99,13	Program Pengelolaan Pendidikan	81.090.498.526	79.596.230.107	98,60
Rata-rata capaian			99,13	<b>Total Anggaran</b>	<b>81.090.498.526</b>	<b>79.596.230.107</b>	<b>98,60</b>

Pada Indikator Harapan Lama Sekolah Kabupaten Solok tingkat efisiensinya tidak dapat dijabarkan karena target pada perjanjian kinerja tidak dapat dicapai.

E. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mencapai target indikator harapan lama sekolah, pemerintah Kabupaten Solok telah melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Revitalisasi komprehensif melalui perbaikan sarana prasarana fisik guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Upaya ini diperkuat dengan digitalisasi sekolah, salah satunya melalui pengadaan Interactive Flat Panel (IFP) untuk meningkatkan interaktivitas dan antusiasme siswa dalam proses pembelajaran.
2. Peningkatan sarana pendukung melalui pengadaan alat praktek, perlengkapan sekolah, serta pembangunan laboratorium sekolah yang memadai turut diakselerasi untuk menunjang kualitas pengajaran praktis dan kejuruan. Langkah terintegrasi ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar, mengurangi angka putus sekolah, dan pada akhirnya memperpanjang rata-rata lama sekolah di tingkat lokal maupun nasional.



Digitalisasi Sekolah melalui *Pengadaan Interactive Flat Panel (IFP)*

## 11. UMUR HARAPAN HIDUP

Umur Harapan Hidup adalah Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.

Pada tahun 2025 Umur Harapan Hidup penduduk Kabupaten Solok 72.82 tahun. Artinya setiap bayi yang dilahirkan hidup akan mempunyai peluang hidup hingga umur 72-73 tahun. Pencapaian Umur Harapan Hidup (UHH) menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan derajat kesehatan masyarakat yang dipengaruhi oleh meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan, penguatan pelayanan kesehatan dasar, peningkatan cakupan imunisasi, pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta perbaikan perilaku hidup bersih dan sehat.

### A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2025, target Umur Harapan Hidup Kabupaten Solok adalah 73,58 dapat dilihat pada Tabel 3.11.1 sebagai berikut:

**Tabel. 3.11.1**

#### Umur Harapan Hidup

No	Indikator Kinerja	Target (Tahun)
1	Umur Harapan Hidup	73,58

### B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Umur Harapan Hidup Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel. 3.11.2 sebagai berikut:

**Tabel. 3.11.2**

#### Umur Harapan Hidup

No	Indikator Kinerja	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun)	Capaian (%)
1	Umur Harapan Hidup	73,58	72,82	98.97

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka 2026

Berdasarkan Tabel. 3.11.2 jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Umur Harapan Hidup pada Tahun 2025 tidak tercapai yaitu 98.96%

Beberapa faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target UHH antara lain:

1. Masih adanya kesenjangan akses pelayanan kesehatan di wilayah tertentu.
2. Terbatasnya sumber daya tenaga kesehatan di beberapa fasilitas pelayanan.
3. Faktor sosial ekonomi dan perilaku masyarakat yang berdampak terhadap status Kesehatan.
4. Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi.

Berdasarkan permasalahan atau penyebab tersebut maka diperlukan langkah-langkah strategis atau rencana tindak lanjut, diantaranya:

1. Pemerintah Kabupaten Solok akan terus memperkuat integrasi layanan primer.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sepanjang siklus hidup
3. Memperluas cakupan skrining dan deteksi dini penyakit.
4. Meningkatkan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan kesehatan secara berkelanjutan.

- C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

**Tabel. 3.11.3**

**Perkembangan Umur Harapan Hidup**

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Tahun)		Capaian (%)		Tahun 2030 (Target akhir RPJMD)	
		2024	2025	2024	2025	Target (Tahun)	Capaian (%)
1.	Umur Harapan Hidup	72.52	72.82	99.34	98.97	74,91	97.20

Berdasarkan Tabel. 3.11.3 dapat dilihat bahwa capaian kinerja mengalami sedikit penurunan, namun jika realisasi kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,3. Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD, capaian kinerja Umur Harapan Hidup masih berada pada 98,96% sehingga diperlukan upaya yang lebih optimal.

- D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

**Tabel. 3.11.4**

### Efisiensi Indikator Umur Harapan Hidup

IKU	Kinerja			Keuangan			
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Umur Harapan Hidup	73,58	72.82	98.97	Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	80.883.507.063	70.355.001.969	86.98
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.830.121.156	1.657.179.563	90.55
				Sediaan Farmasi. Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	573.102.627	509.545.545,67	88.91
				Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	563.286.300	455.596.000	80.88
				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	135.978.134.157	128.752.760.946	94.68
				<b>Rata-rata capaian</b>			<b>98.97</b>

Pada Indikator Umur Harapan Hidup Kabupaten Solok tingkat efisiensinya tidak dapat dihitung karena target pada perjanjian kinerja tidak tercapai.

E. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Umur Harapan Hidup Kabupaten Solok Tahun 2025, terdapat beberapa program/kegiatan penunjang yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah diantaranya, yaitu:

- a. Peningkatan kegiatan promosi kesehatan diantaranya Gerakan aksi bergizi, Gerakan cegah stunting yang kolektif dan sinergis, Gerakan aktifkan posyandu, Gerakan ibu hamil sehat dan Gerakan pengendalian penyakit prioritas (Kardiovaskuler, kanker, jantung dan stroke).
- b. Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk Masyarakat Kabupaten Solok. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian CKG salah satunya dengan membuat Surat Edaran Bupati tentang kewajiban untuk CKG bagi semua ASN, PPPK dan seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok
- c. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular melalui:
  1. Peningkatan penemuan dan pengobatan kasus TBC melalui beberapa inovasi yaitu:
    - 1) Pendekar Besti (Pencarian dan Deteksi Dini Kontak Erat Tuberkulosis dan Diobati) yaitu investigasi kontak terhadap kasus yang sudah ditemukan dengan mendatangkan dokter spesialis paru dan dokter spesialis anak
    - 2) IK MAPS (Investigasi Kontak melalui Goggle Maps) dengan melakukan pendataan kasus satu tahun terakhir di puskesmas dan RS. yang kemudian dilakukan pemetaan melalui google maps untuk melacak tempat kasus dan jumlah rumah yang akan dilakukan investigasi kontak serta memberikan gambaran wilayah dengan resiko tinggi penularan TBC
  2. Peningkatan cakupan imunisasi melalui inovasi DOPING (Drop Out Follow Up dan Sweeping yaitu melakukan kunjungan rumah terhadap sasaran yang tidak datang ke posyandu dan di imunisasi sesuai antigen
  3. Melakukan penilaian reseptifitas daerah yang beresiko timbulnya kasus berpotensi wabah seperti malaria dan melakukan penyelidikan epidemiologi tidak hanya pada saat ada kasus agar dapat menekan angka kesakitan dan kematian penyakit berbasis vector
- d. Melakukan upaya penurunan angka kematian ibu dan kematian bayi melalui:
  1. Audit Maternal Perinatal Surveilens Respon (AMPSR) adalah kegiatan pengkajian kasus kematian ibu dan bayi.

2. Pendampingan dokter spesialis kandungan dan anak ke puskesmas untuk peningkatan kapasitas petugas dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, kegawatdaruratan maternal dan neonatal serta sistem rujukan
3. Diseminasi hasil kajian audit maternal perinatal yaitu pertemuan guna mempelajari hasil pengkajian kasus kematian maternal dan perinatal di Kabupaten Solok
- e. Peningkatan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas dan puskesmas pembantu meliputi Renovasi dan penambahan ruangan Puskesmas, Pembangunan Puskesmas Pembantu Baru, Pengadaan IPAL, penyediaan air bersih dan instalasi pengolahan air bersih Puskesmas, penyediaan alat kesehatan (USG, EKG, Sterilisator dan Nebulizer).
- f. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader melalui pelatihan dan workshop yang meliputi
  1. Pelatihan konseling menyusui terhadap tenaga bidan dan tenaga gizi puskesmas
  2. Pelatihan gizi bencana terhadap tenaga gizi puskesmas
  3. Pelatihan kekerasan terhadap perempuan dan anak terhadap dokter, bidan dan perawat puskesmas
  4. On Job Training kegawatdaruratan maternal dan perinatal bagi dokter umum, bidan dan perawat, dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dengan 2 (dua) Angkatan di RSUD Arosuka
  5. Pelatihan pencegahan penularan HIV, Sifilis, Hepatitis B dari Ibu ke Anak
  6. Pelatihan keterampilan dasar kader posyandu dengan 25 (dua puluh lima) kompetensi dasar mencakup pelayanan kesehatan siklus hidup dan manajemen posyandu
- g. Melakukan upaya perbaikan gizi dengan melakukan kegiatan:
  1. Investigasi kasus balita gizi buruk dengan melakukan peninjauan dan menelusuri kasus gizi buruk pada balita. Tahun 2025 terdapat 6 (enam) kasus gizi buruk yang dilakukan investigasi dan pemantuan serta melakukan intervensi spesifik sesuai dengan masalah kesehatan
  2. PMT (Pemberian Makanan Tambahan) pada ibu hamil KEK (Kurang Energi Kalori) dan Balita Gizi Kurang, Balita Tidak Naik Berat Badan dan Balita Berat Badan Kurang berbasis bahan pangan lokal
- h. Mendukung program MBG (Makanan Bergizi Gratis) dengan target 60 SPPG. Sampai tahun 2025 SPPG yang sudah beroperasi sebanyak 30 dengan jumlah penerima manfaat 60.019 orang. Peran Dinas Kesehatan meliputi:
  1. Pelatihan penjamah makanan untuk pekerja dapur

2. Uji sampel air hygiene sanitasi yang digunakan untuk pengolahan makanan
  3. Uji sampel makanan yang siap disajikan
  4. Inspeksi kesehatan lingkungan dapur dengan format IKL yang terstandar minimal harus memenuhi 80% daftar tilik dan dilaksanakan 1 kali 6 bulan
  5. Penerbitan sertifikat SLHS (Sanitasi Layak Higiene Sanitasi) dengan masa berlaku 3 tahun
- i. Peningkatan cakupan Universal Health Coverage (UHC) dalam tiga tahun terakhir. Peningkatan ini mencerminkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan melalui Program **Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)**. Pada tahun 2025 UHC Kabupaten Solok sudah 91,41%
  - j. Menjamin keamanan pangan yang beredar di masyarakat dengan melakukan kegiatan:
    1. Penyuluhan keamanan pangan kepada 110 pelaku usaha dan bimbingan
    2. Bimbingan teknis CPPOB (Cara pengolahan pangan olahan yang baik) pada 70 pelaku usaha
    3. Pemeriksaan sampel terhadap produk P-IRT (Produksi Industri Rumah Tangga) yang beredar sebanyak 35 sampel
    4. Melakukan pengawasan pada P-IRT secara berkala dan membuat komitmen dengan pelaku usaha dalam pemenuhan CAPA (Corrective Action dan Preventive action) yaitu rencana perbaikan dan pencegahan atas temuan BPOM



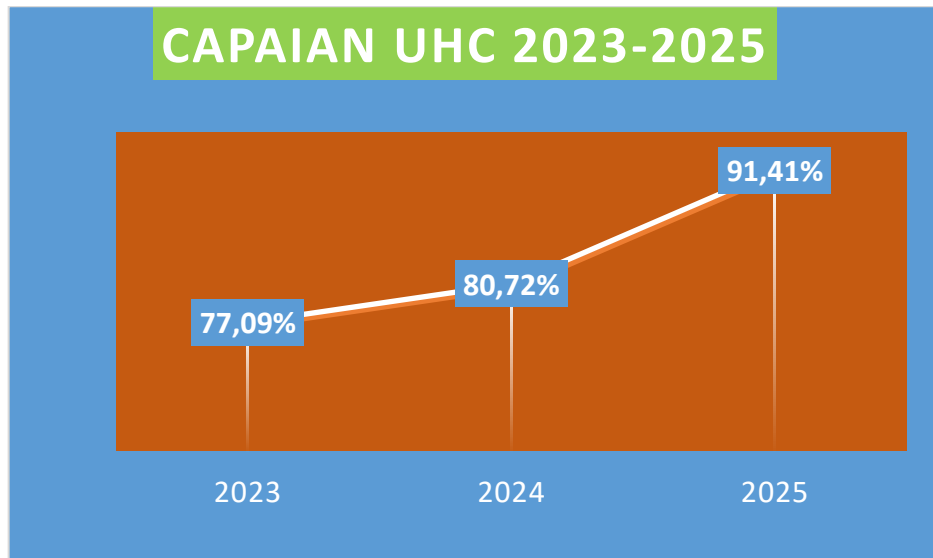
Gerakan aktifkan posyandu



PMT (Pemberian Makanan Tambahan) pada ibu hamil KEK (Kurang Energi Kalori) dan Balita Gizi Kurang



Penerbitan sertifikat SLHS (Sanitasi Layak Higiene Sanitasi)



Peningkatan cakupan **Universal Health Coverage (UHC)**

## 12. CAKUPAN IMPLEMENTASI ABS-SBK

Cakupan Implementasi ABS-SBK adalah ABS-SBK sebagai filosofi hidup masyarakat Minangkabau yang memiliki cakupan implementasi yang luas dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Implementasi Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah (ABS-SBK) di Kabupaten Solok mencerminkan upaya pelestarian nilai-nilai budaya Minangkabau yang harmonis dengan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Cakupan implementasi ABS-SBK diukur melalui melalui persentase capaian dari indikator yang meliputi pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga adat nagari, Indeks Pemajuan Kebudayaan, serta persentase Nagari yang memenuhi indikator nagari madani.

Cakupan implementasi ABS-SBK Kabupaten Solok Tahun 2025 sebesar 56,35%.

### A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2025, target Cakupan Implementasi ABS-SBK Kabupaten Solok adalah 50,16 dapat dilihat pada Tabel 3.12.1 sebagai berikut:

**Tabel. 3.12.1**

### Cakupan Implementasi ABS-SBK

No	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Cakupan Implementasi ABS-SBK	50,16

### B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Cakupan Implementasi ABS-SBK Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel. 3.12.2 sebagai berikut:

**Tabel. 3.12.2**

**Cakupan Implementasi ABS-SBK**

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Cakupan Implementasi ABS-SBK	50,16	56,35	112,34

Sumber: Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Solok

Berdasarkan Tabel. 3.12.2 jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Cakupan Implementasi ABS-SBK pada Tahun 2025 tercapai.

Tercapainya kinerja Cakupan Implementasi ABS-SBK didukung oleh beberapa faktor diantaranya Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat nagari di Kabupaten Solok telah secara optimal. Adapun Lembaga kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Solok antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN), PKK Nagari, Posyandu dan Karang Taruna. Sedangkan Lembaga Adat Nagari yang ada di Kabupaten Solok adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN).

- C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

**Tabel. 3.12.3**

**Perkembangan Cakupan Implementasi ABS-SBK**

No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)		Capaian (%)		Tahun 2030 (Target akhir RPJMD)	
		2024	2025	2024	2025	Target (%)	Capaian (%)
1.	Cakupan Implementasi ABS-SBK	N/A	56,35	N/A	112,34	100	56,35

Berdasarkan Tabel. 3.12.3 dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Cakupan Implementasi ABS-SBK Tahun 2025 sebesar 56,35, karena Cakupan Implementasi ABS-SBK merupakan indikator baru, sehingga belum bisa dihitung peningkatannya dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Untuk perbandingan

dengan target akhir RPJMD, capaian kinerja Cakupan Implementasi ABS-SBK belum tercapai.

- D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

**Tabel. 3.12.4**

**Efisiensi Indikator Cakupan Implementasi ABS-SBK**

IKU	Kinerja			Keuangan			
	Target (%)	Realisasi (%)	%	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Cakupan Implementasi ABS-SBK	50,16	56,35	112,34	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	7.601.435.962	6.629.665.718	87,22
				Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	1.507.480.648	1.452.702.506	96,37
				Pengelolaan Kebudayaan	999.961.597	987.570.880	98,76
				Kesenian	806.437.918	796.801.078	98,81
				Cagar Budaya	49.054.506	46.521.630	94,84
<b>Rata-rata capaian</b>			<b>112,34</b>	<b>Total Anggaran</b>	<b>10.964.370.631</b>	<b>9.913.261.812</b>	<b>90,41</b>
<b>Tingkat Efisiensi 9,59%</b>							

Pada Indikator Cakupan Implementasi ABS-SBK Kabupaten Solok tingkat efisiensinya sebesar 9,59% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.964.370.631 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.913.261.812.

- E. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Cakupan Implementasi ABS-SBK Kabupaten Solok Tahun 2025, terdapat beberapa program/kegiatan penunjang yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah diantaranya, yaitu:

- a. Pembinaan untuk peningkatan kapasitas SDM Pemangku adat, LKAAM dan Pelaku Seni

- b. Pendataan dan pendaftaran Warisan Budaya Tak Benda Indonesia (WBTbI) untuk bisa ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia (WBTbI) oleh Kementerian Kebudayaan
- c. Pendaftaran Ekpresi Budaya Tradisional (EBT) ke Kementerian Hukum untuk sertifikat Kekataan Intelektual Komunal (KIK)
- d. Pendataan Objek diduga Cagar Budaya (ODCB) dan mengundang Tim ahli Cagar Budaya (TACB) untuk bisa dilakukan penetapan Cagar Budaya peringkat Kabupaten dan juga mendaftarkan Cagar Budaya peringkat Kabupaten untuk penetapan tingkat provinsi ke Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
- e. Kegiatan sosial bantuan peduli bencana  
Dengan kondisi Kabupaten Solok yang mendapatkan bencana banjir dan tanah longsor pada tahun 2025, hal tersebut membangkitkan kepedulian sosial dari masyarakat Kabupaten Solok untuk mengumpulkan dan menyalurkan bantuan ke daerah-daerah yang terdampak dari bencana yang melanda tersebut.
- f. Mediasi Kenakalan Remaja  
Mediasi kenakalan remaja di Kabupaten Solok merupakan salah satu upaya penyelesaian permasalahan sosial yang dilakukan secara persuasif dan kekeluargaan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Melegitimasi budaya Gotong Royong ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Solok dengan mendorong penyusunan Peraturan Nagari (Perna) terkait Gotong Royong.
- g. Pemberian bantuan masjid–masjid pada kegiatan Safari Ramadhan.



Pembukaan festival lima danau di Kabupaten Solok tahun 2025



Pelaksanaan Safari Ramadhan di Kabupaten Solok

### 13. PERSENTASE NAGARI YANG MEMENUHI INDIKATOR NAGARI MADANI

Persentase Nagari yang Memenuhi Indikator Nagari Madani adalah Implementasi nilai-nilai keagamaan ditengah masyarakat kabupaten Solok diwujudkan melalui penyelenggaraan nagari madani.

Dari **74 nagari** yang dianalisis pada tabel tersebut, tercatat **11 nagari telah** memenuhi **indikator Nagari Madani**, sedangkan **65 nagari lainnya masih belum memenuhi** seluruh kriteria yang dipersyaratkan. Dengan demikian, tingkat capaian pemenuhan indikator Nagari Madani di Kabupaten Solok berada pada **14,86% dari total nagari**.

Penilaian indikator Nagari Madani dilakukan melalui beberapa aspek utama, yaitu pendidikan **informal masyarakat, peran rumah ibadah dalam pembinaan sosial, perlindungan masyarakat, serta penguatan nilai kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat**. Berdasarkan hasil pengukuran pada masing-masing nagari, terlihat bahwa sebagian nagari telah menunjukkan perkembangan pada beberapa indikator, terutama pada aktivitas keagamaan dan keberadaan kegiatan pendidikan informal di masyarakat. Namun demikian, masih terdapat nagari yang belum mampu memenuhi seluruh komponen indikator secara terpadu. **Persentase Nagari Madani Kabupaten Solok Tahun 2025 sebesar 14,86.**

#### A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2025, target Persentase Nagari yang Memenuhi Indikator Nagari Madani Kabupaten Solok adalah 20 dapat dilihat pada Tabel 3.13.1 sebagai berikut:

**Tabel. 3.13.1**

#### **Persentase Nagari yang Memenuhi Indikator Nagari Madani**

No	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Persentase Nagari yang Memenuhi Indikator Nagari Madani	20

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Persentase Nagari yang Memenuhi Indikator Nagari Madani Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel. 3.13.2 sebagai berikut:

**Tabel. 3.13.2**

**Persentase Nagari yang Memenuhi Indikator Nagari Madani**

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase Nagari yang Memenuhi Indikator Nagari Madani	20	14,86	74,3

Sumber: Kompilasi Data DPMN Tahun 2025

Berdasarkan Tabel. 3.13.2 jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Persentase Nagari yang Memenuhi Indikator Nagari Madani pada Tahun 2025 tidak tercapai.

Terdapat 11 nagari dari 74 nagari di Kabupaten Solok yang telah memenuhi semua indikator nagari madani, yaitu Nagari Singkarak, Nagari Tanjung Alai, Sibarambang, Sulit Air Indudur, Surian, Gaung, Tanjung Bingkuang, Koto baru, Salayo dan Nagari Sumani.

Dalam mewujudkan pencapaian persentase nagari yang memenuhi indikator nagari madani Kabupaten Solok pada Tahun 2025 terdapat beberapa faktor penghambat diantaranya sebagai berikut:

1. Masih rendahnya pemahaman pemerintah nagari dan masyarakat terhadap konsep Nagari Madani.  
Sebagian aparatur nagari dan masyarakat belum sepenuhnya memahami indikator dan kriteria Nagari Madani, sehingga implementasi program yang mendukung pemenuhan indikator tersebut belum berjalan secara optimal.
2. Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di nagari

Lembaga seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN), LPM, Bundo Kandung, dan organisasi pemuda di beberapa nagari belum berfungsi secara maksimal dalam melakukan pembinaan sosial kemasyarakatan.

3. Terbatasnya kegiatan pendidikan informal dan pembinaan generasi muda
4. Belum optimalnya fungsi rumah ibadah sebagai pusat pembinaan masyarakat  
Di beberapa nagari, rumah ibadah masih lebih banyak difungsikan sebagai tempat ibadah semata dan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan pembinaan masyarakat.
5. Masih terbatasnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
6. Keterbatasan pembinaan dan pendampingan dari pemerintah daerah
7. Pengaruh perubahan sosial dan perilaku generasi muda

Berdasarkan permasalahan atau penyebab tidak tercapainya kinerja persentase nagari yang memenuhi indikator nagari madani diatas maka diperlukan langkah-langkah strategis atau rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman pemerintah nagari dan masyarakat terhadap konsep Nagari Madani.
2. Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat.
3. Pembinaan Generasi Muda dan Pendidikan Informal.
4. Meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Daerah.

- C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

**Tabel. 3.13.3**

**Perkembangan Persentase Nagari yang Memenuhi Indikator Nagari Madani**

No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)		Capaian (%)		Tahun 2030 (Target akhir RPJMD)	
		2024	2025	2024	2025	Target (%)	Capaian (%)
1.	Persentase Nagari yang Memenuhi Indikator Nagari Madani	N/A	14,86	N/A	74,3	90	16,51

Berdasarkan Tabel. 3.13.3 dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Persentase Nagari yang Memenuhi Indikator Nagari Madani Tahun 2025 tidak dapat dilihat penurunan/peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2024 dikarenakan data tahun 2024 tidak tersedia. Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD,

capaian kinerja Persentase Nagari yang Memenuhi Indikator Nagari Madani belum tercapai.

- D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

**Tabel. 3.13.4**

**Efisiensi Indikator Persentase Nagari yang Memenuhi Indikator Nagari Madani**

IKU	Kinerja			Keuangan			
	Target (%)	Realisasi (%)	%	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Persentase Nagari yang Memenuhi Indikator Nagari Madani	20	14,86	74,3	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	7.601.435.962	6.629.665.718	87,22
				Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	1.507.480.648	1.452.702.506	96,37
<b>Rata-rata capaian</b>			<b>74,3</b>	<b>Total Anggaran</b>	<b>9.108.916.610</b>	<b>8.082.368.224</b>	<b>88,73</b>

Pada Indikator Persentase Nagari yang Memenuhi Indikator Nagari Madani Kabupaten Solok tingkat efisiensinya tidak dapat hitung karena tidak mencapai target.

- E. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Persentase Nagari yang Memenuhi Indikator Nagari Madani Kabupaten Solok Tahun 2025, terdapat beberapa program/kegiatan penunjang yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah diantaranya, yaitu:

- a. Kegiatan sosial bantuan peduli bencana

Dengan kondisi Kabupaten Solok yang mendapatkan bencana banjir dan tanah longsor pada tahun 2025, hal tersebut membangkitkan kepedulian sosial dari masyarakat Kabupaten Solok untuk mengumpulkan dan menyalurkan bantuan ke daerah-daerah yang terdampak dari bencana yang melanda tersebut.

- b. Mediasi Kenakalan Remaja

Mediasi kenakalan remaja di Kabupaten Solok merupakan salah satu upaya penyelesaian permasalahan sosial yang dilakukan secara persuasif dan kekeluargaan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Di Kabupaten Solok, pendekatan mediasi ini juga selaras dengan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau yang mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian masalah di tengah masyarakat. Peran lembaga adat, ninik mamak, serta tokoh masyarakat sangat penting dalam memberikan nasihat dan pembinaan kepada remaja agar tidak mengulangi perbuatannya.

- c. Kegiatan Pemberian Reward Wisuda Tahfidz dan Khatam Qur'an  
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan apresiasi, meningkatkan motivasi, serta memuliakan penghafal Al-Qur'an.
- d. Kegiatan Pawai Khatam Qur'an TPA/TPQ  
Kegiatan ini merupakan arak-arakan santri yang telah menyelesaikan tadarus Al-Qur'an (khatam), biasanya berbusana muslim/muslimah seragam (seperti pakaian adat atau jubah), berjalan mengelilingi kampung atau rute tertentu untuk syiar agama, memperingati pencapaian santri, serta memeriahkan acara wisuda khataman.
- e. Masjid yang memberikan bantuan untuk fakir miskin dan anak yatim  
Penyerahan santunan untuk anak yatim merupakan agenda rutin yang telah dilakukan oleh pengurus masjid sebagai bentuk kepedulian dan rasa kemanusiaan terhadap anak-anak yatim, sehingga mereka juga merasakan momen bahagia dalam menyambut hari Raya Idul Fitri.



Pawai Khatam Qur'an di TPQ Al Fathan Jorong Kayu Aro Nagari Batang Barus Kec.Gunung Talang



Kegiatan Sosial Bantuan Peduli Bencana Nagari Cupak

#### 14. INDEKS PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Indeks Pemajuan Kebudayaan merupakan indeks yang mengukur beberapa program yang memotret capaian pembangunan kebudayaan nasional, dengan tujuan memberikan gambaran holistik tentang kemajuan budaya serta menjadi dasar formulasi kebijakan dan acuan koordinasi antar sektor, yang mengacu pada kerangka *Culture Development Indicators (CDI)*. Indeks Pemajuan Kebudayaan merupakan indikator baru yang dihitung berdasarkan gabungan indikator beberapa program yang meliputi pelestarian kesenian tradisional, pengelolaan sejarah lokal, pengembangan budaya lokal, hingga penetapan dan perlindungan cagar budaya dan arisan budaya tak benda, pada dasarnya mencerminkan upaya pelestarian nilai budaya dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Pada Tahun 2025 Indeks Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Solok sebesar 2,63 artinya upaya pelestarian nilai budaya dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Solok berjalan dengan baik.

##### A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2025, target Indeks Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Solok adalah 1,41 dapat dilihat pada Tabel 3.14.1 sebagai berikut:

**Tabel. 3.14.1**

#### Indeks Pemajuan Kebudayaan

No	Indikator Kinerja	Target (Indeks)
----	-------------------	-----------------

1	Indeks Pemajuan Kebudayaan	1,41
---	----------------------------	------

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Indeks Pemajuan Kebudayaan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel. 3.14.2 sebagai berikut:

**Tabel. 3.14.2**

**Indeks Pemajuan Kebudayaan**

No	Indikator Kinerja	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	Capaian (%)
1	Indeks Pemajuan Kebudayaan	1,41	2,63	186,52

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Berdasarkan Tabel. 3.14.2 jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Indeks Pemajuan Kebudayaan pada Tahun 2025 tercapai.

Tercapainya kinerja Indeks Pemajuan Kebudayaan didukung oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Keberadaan kesenian seperti randai, tari piring dan sastra lisan Minang Kabau, serta kekayaan cagar budaya berbasis sejarah lokal di Kabupaten Solok, sejatinya merupakan modal sosial yang perlu dikapitalisasi sebagai bagian dari pembangunan berbasis identitas kultural. Jumlah Group/sanggar yang terdaftar di kabupaten Solok 300 group dan tahun 2025 telah dilakukan pembinaan, penampilan dan Peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk pelaku seni sebanyak 50 group/sanggar, dan untuk sejarah lokal dan museum belum ada,
2. Keberadaan Budaya local, Budaya lokal yang sudah tercatat dan terdata sebanyak 80 karya budaya dengan yang terdaftar sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari kementerian Kebudayaan sebanyak 7 karya budaya dan yang tercatat di Kementerian Hukum sebagai Kekayaan intelektual komunal sebanyak 22 karya budaya.
3. Keberadaan Cagar budaya, Cagar budaya yang sudah terdata sebagai sebagai objek diduga cagar budaya sebanyak 119 objek dan yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat kabupaten sebanyak 15 objek dan untuk cagar budaya tingkat provinsi sebanyak 2 objek dan sekarang sedang diusulkan untuk percepatan cagar budaya nasional untuk mesjid tuo kayu jao,

untuk pemangku adat dari LKAAM, KAN dan Bundo kandung juga telah dilakukan Peningkatan kapasitas berupa sosialisasi dan FGD.

- C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

**Tabel. 3.14.3**

**Perkembangan Indeks Pemajuan Kebudayaan**

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Indeks)		Capaian (%)		Tahun 2030 (Target akhir RPJMD)	
		2024	2025	2024	2025	Target (Indeks)	Capaian (%)
1.	Indeks Pemajuan Kebudayaan	N/A	2,63	N/A	186,52	5	52,6

Berdasarkan Tabel. 3.14.3 dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Indeks Pemajuan Kebudayaan Tahun 2025 sebesar 2,63, karena indeks pemajuan kebudayaan merupakan indikator baru, sehingga belum bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD, capaian kinerja Indeks Pemajuan Kebudayaan belum tercapai.

- D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

**Tabel. 3.14.4**

**Efisiensi Indikator Indeks Pemajuan Kebudayaan**

IKU	Kinerja			Keuangan			
	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	%	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Indeks Pemajuan Kebudayaan	1,41	2,63	186,52	Pengelolaan Kebudayaan	999.961.597	987.570.880	98,76
				Kesenian	806.437.918	796.801.078	98,81
				Cagar Budaya	49.054.506	46.521.630	94,84
<b>Rata-rata capaian</b>			<b>186,52</b>	<b>Total Anggaran</b>	<b>1.855.454.021</b>	<b>1.830.893.588</b>	<b>98,68</b>
<b>Tingkat Efisiensi 1,32%</b>							

Pada Indikator Indeks Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Solok tingkat efisiensinya sebesar 1,32% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.855.454.021 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.830.893.588.

E. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Indeks Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Solok Tahun 2025 terdapat beberapa program/kegiatan penunjang yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah diantaranya. yaitu:

- a. Pembinaan untuk peningkatan kapasitas SDM Pemangku adat, LKAAM dan Pelaku Seni
- b. Pendataan dan pendaftaran Warisan Budaya Tak Benda Indonesia (WBTbI) untuk bisa ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia (WBTbI) oleh Kementerian Kebudayaan
- c. Pendaftaran Ekpresi Budaya Tradisional (EBT) ke Kementerian Hukum untuk sertifikat Kekataan Intelektual Komunal (KIK)
- d. Pendataan Objek diduga Cagar Budaya (ODCB) dan mengundang Tim ahli Cagar Budaya (TACB) untuk bisa dilakukan penetapan Cagar Budaya peringkat Kabupaten dan juga mendaftarkan Cagar Budaya peringkat Kabupaten untuk penetapan tingkat provinsi ke Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat



Pembinaan Bundo kanduang



Pengukuhan LKAAM

## 15. PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi adalah keadaan ekonomi suatu negara selama periode tertentu, baik semester, tahunan, maupun triwulanan. Pertumbuhan ekonomi ini dapat meningkat maupun menurun dari periode sebelumnya, yang dapat diketahui melalui beberapa indikator. Dalam hal ini, terdapat empat komponen atau indikator pertumbuhan ekonomi yang bisa digunakan, yakni pendapatan domestik bruto, pendapatan per kapita, kesejahteraan penduduk, dan tingkat pengangguran. Untuk mengukur indikator laju pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah indikator laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010 yang dikeluarkan oleh BPS

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Tahun 2025 sebesar 3,02% ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Solok mengalami ekspansi atau peningkatan produksi barang dan jasa sebesar 3,02% secara riil pada tahun yang bersangkutan dibandingkan tahun sebelumnya. Angka positif ini menandakan perbaikan kinerja perekonomian, peningkatan aktivitas ekonomi, dan potensi peningkatan pendapatan masyarakat.

### A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan RPJMD 2021-2026 pada Tahun 2025. target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Solok adalah 4,08% dapat dilihat pada Tabel 3.15.1 sebagai berikut:

**Tabel. 3.15.1**

### **Pertumbuhan Ekonomi Daerah**

No	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,08

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel. 3.15.2 sebagai berikut:

**Tabel. 3.15.2**

**Pertumbuhan Ekonomi Daerah**

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,08	3,02	74,02

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka 2026

Berdasarkan Tabel. 3.15.2 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025, target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok ditetapkan sebesar 4,08%, sementara realisasi yang dicapai sebesar 3,02%. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja hanya mencapai 74,02%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pertumbuhan ekonomi belum memenuhi target yang telah ditetapkan dan masih terdapat selisih sebesar 1,07 poin persentase dari target.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi belum capaian target pertumbuhan ekonomi antara lain:

1. Perlambatan ekonomi nasional dan global yang berdampak pada melemahnya daya beli dan permintaan terhadap komoditas.
2. Fluktuasi harga komoditas pertanian yang mempengaruhi pendapatan petani dan kontribusi sektor basis terhadap PDRB.
3. Adanya penurunan produksi pada beberapa komoditi pertanian tahun ini dibandingkan pada tahun 2024, yang disebabkan oleh:
  - a. Curah hujan pada bulan Januari-Agustus 2025 lebih rendah dari tahun 2024.
  - b. Adanya Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dengan luas serangan 157,45 ha pada tanaman padi, 146,25 ha pada tanaman bawang merah 13,4 Ha pada tanaman cabe merah 2,5 Ha pada tanaman kubis 27 Ha pada tanaman tomat dan 18 Ha pada pada tanaman kentang.
  - c. Masih rendahnya penggunaan benih bersertifikat.
  - d. Turunnya animo masyarakat dalam beternak sapi karena masih adanya penyakit PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) sehingga populasi ternak sapi

semakin berkurang. Populasi ternak sapi pada tahun 2024 sebanyak 22.270 ekor dan pada tahun 2025 sebanyak 21.288 ekor.

- e. Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan petani dalam pengelolaan manajemen kelompok tani, pengembangan agribisnis bagi anggota dan penerapan teknologi tepat guna.
4. Keterbatasan investasi baru baik dari dalam maupun luar daerah sehingga ekspansi sektor produktif belum maksimal.
5. Ketergantungan pada sektor primer yang cenderung rentan terhadap faktor cuaca perubahan iklim dan gejolak harga pasar.
6. Belum optimalnya hilirisasi dan penciptaan nilai tambah sehingga pertumbuhan ekonomi masih bertumpu pada aktivitas produksi dasar.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok pada Tahun 2026, diperlukan langkah strategis yang terintegrasi dan berorientasi pada penguatan sektor unggulan daerah serta percepatan transformasi ekonomi berupa:

4. Penguatan sektor basis daerah, khususnya sektor pertanian, perlu dilakukan melalui peningkatan produktivitas dan kualitas komoditas unggulan, Intervensi dapat berupa penyediaan sarana produksi, penguatan penyuluhan, pemanfaatan teknologi pertanian, serta pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan. Selain itu, perlu didorong pengembangan sistem pasca panen dan pemasaran agar petani memperoleh nilai jual yang lebih baik.
5. Pengembangan hilirisasi dan nilai tambah produk lokal harus menjadi prioritas, mendorong tumbuhnya industri pengolahan skala kecil dan menengah akan meningkatkan kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB serta mengurangi ketergantungan pada sektor primer. Dukungan regulasi, kemudahan perizinan dan fasilitasi kemitraan usaha menjadi kunci dalam strategi ini.
6. Peningkatan investasi daerah perlu diakselerasi melalui promosi potensi unggulan, penyediaan data peluang investasi, serta penyederhanaan prosedur perizinan. Peningkatan iklim usaha yang kondusif akan menarik investor dan memperluas lapangan kerja produktif.
7. Penguatan UMKM dan ekonomi kerakyatan menjadi langkah penting dalam menjaga daya tahan ekonomi lokal, Dukungan akses pembiayaan, pelatihan manajemen usaha, digitalisasi pemasaran, serta fasilitasi akses pasar akan mendorong peningkatan skala usaha dan pendapatan masyarakat.
8. Optimalisasi belanja pemerintah daerah agar lebih produktif dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Belanja modal yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur pendukung produksi, distribusi, dan konektivitas

antar wilayah akan memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian.

9. Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai alternatif sumber pertumbuhan baru. Pemanfaatan potensi alam dan budaya daerah secara terintegrasi dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, memperluas peluang usaha, serta meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat.

- C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD

**Tabel. 3.15.3**

**Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi**

No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)				Capaian (%)				Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2022	2023	2024	2025	2021	2022	2024	2025	Target	Capaian
1.	Pertumbuhan Ekonomi	4,31	4,36	3,91	3,02	123,42	135,53	81,29	74,02	5,05	59,80

Berdasarkan Tabel. 3.15.3 dapat dilihat bahwa Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok selama periode 2022–2025 menunjukkan dinamika yang berfluktuasi dengan kecenderungan melambat dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2022, realisasi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,31% dan meningkat tipis menjadi 4,36% pada tahun 2023. Capaian kinerja pada periode tersebut tergolong sangat baik, bahkan melampaui target yang ditetapkan dengan tingkat capaian masing-masing sebesar 123,42% pada tahun 2021 dan 135,53% pada tahun 2022.

Namun demikian, pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi mulai mengalami perlambatan menjadi 3,91% dengan capaian kinerja sebesar 81,29%. Kondisi ini berlanjut pada tahun 2025, di mana realisasi pertumbuhan ekonomi kembali menurun cukup signifikan menjadi 3,02%. Penurunan sebesar 0,89 poin persentase dibandingkan tahun 2024 menunjukkan adanya tekanan yang cukup kuat terhadap kinerja perekonomian daerah. Sejalan dengan itu, capaian kinerja tahun 2025 hanya sebesar 74,02%, lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dalam RPJMD yang menetapkan target akhir tahun 2026 sebesar 5,05%, maka realisasi tahun 2025 masih berada jauh di bawah target tersebut. Tingkat capaian terhadap target akhir RPJMD baru mencapai 59,80%. Artinya, masih terdapat selisih sebesar 2,03 poin

persentase yang harus dikejar sampai akhir periode RPJMD. Dengan tren pertumbuhan yang cenderung menurun dalam dua tahun terakhir, pencapaian target tersebut memerlukan upaya akselerasi yang cukup signifikan.

- D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

**Tabel. 3.15.4**

**Efisiensi Indikator Pertumbuhan Ekonomi**

IKU	Kinerja			Keuangan			
	Target (%)	Realisasi (%)	%	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pertumbuhan Ekonomi	4,08	3,02	74,02	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.222.909.503	2.992.335.831	92,85
				Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	8.443.008.093	8.334.227.985	98,71
				Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.131.924.426	891.676.761	78,78
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	372.110.772	318.664.179	85,63
				Penyuluhan Pertanian	4.522.885.647	3.860.066.876	85,35
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.573.178.851	12.479.246.545	91,94
				Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk	6.335.450	5.232.500	83

				Kedaulatan dan kemandirian Pangan			
				Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	808.301.409	776.615.471	96
				Penanganan Kerawanan Pangan	113.663.209	106.667.500	94
				Pengawasan Keamanan Pangan	13.145.840	12.728.600	97
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.053.018.153	3.743.004.180	92
				Pengelolaan Perikanan Tangkap	109.165.371	94.382.285	85
				Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.149.561.066	1.044.406.500	91
				Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	148.064.255	130.236.341	88
				Pengebangan Iklim Penanaman Modal	56.495.025	40.002.043	70,80
				Promosi Penanaman Modal	37.074.405	34.523.286	93,11
				Pelayanan Penanaman Modal	346.719.043	271.551.886	78,32
				Pengendalian Pelaksanaan	63.067.177	58.535.218	92,81

				Penanaman Modal			
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.683.055.030.17	4.196.511.890	89,61
				Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	82.456.496	76.498.206 92.77	92,77
				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	109.000.299.83	92.179.931	84,57
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	29.547.700	27.365.663	92,62
				Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	99.371.140	98.293.254	98,92
				Pengembangan UMKM	986.531.340	951.543.454	96,45
				Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	466.796.311	437.642.265.0	93,75
				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	972.656.629	956.144.723	97
				Pemasaran Pariwisata	1.240.198.080	1.238.108.317	99,83
				Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	107.590.317	106.742.535	99
				Pengembangan Ekonomi Kreatif	821.404.394	695.611.521	99

				melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual			
<b>Rata-rata capaian</b>			<b>73.77</b>	<b>Total Anggaran</b>	<b>47.769.235.432</b>	<b>44.070.745.746</b>	<b>92,28</b>

Pada Indikator Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Solok tingkat efisiensinya tidak dapat dijabarkan karena target pada perjanjian kinerja tidak dapat dicapai.

E. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Solok Tahun 2025, terdapat beberapa program/kegiatan penunjang yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah diantaranya, yaitu:

1. Urusan Pertanian

- a. Menyalurkan alat mesin pertanian (alsintan) sebanyak 25 unit dari APBD Kabupaten Solok dan 92 unit dari APBN serta pupuk organik cair sebanyak 1.160 liter.
- b. Meningkatkan penggunaan benih bersertifikat padi sawah dengan oupkup benih padi berlabel dari kelompok tani penangkar sebanyak 7.100 kg.
- c. Pemurnian varitas padi lokal yang sudah dilepas yaitu varitas caredek merah dan padi harum solok bertujuan untuk mendapatkan benih padi yang bersertifikat.
- d. Penanaman padi dengan konsep Sawah Pokok Murah (SPM) pada 12 kecamatan dan 64 Nagari dengan luas 30 Ha.
- e. Melaksanakan kegiatan pelatihan penyusunan SOP GAP pertanian organik untuk pengembangan pertanian organik
- f. Fasilitasi bantuan benih ubi jalar sebanyak 9.600 stek untuk pengembangan ubi jalar 0,3 ha.
- g. Meningkatkan dan mempertahankan ketersediaan sumber air ditingkat usaha tani sebagai suplai air irigasi dan mengurangi resiko terjadinya kegagalan panen pada musim kemarau dengan membangun dam parit 2 unit, embung pertanian 2 unit dan jaringan irigasi tersier 16 unit.

2. Urusan Perikanan dan Pangan

- a. Melakukan pengadaan cadangan pangan pemerintah sebanyak 2.973,50 kg yang bekerja sama dengan PT. Bulog.

- b. Melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 6 kali Kecamatan Kubung, Kecamatan Gunung Talang, Kecamatan Danau Kembar, Kecamatan Lembah Gumanti dan Kecamatan Bukit Sundi.
- c. Monitoring pemantauan harga bahan pangan seperti beras, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, gula pasir, daging ayam, telur, daging sapi, minyak goreng dan tepung terigu.
- d. Melakukan gerakan menanam cabai di pekarangan dengan memberi bantuan bibit cabe 1.000 btg. polibag 60 kg. kompos 1.800 kg dan pestisida nabati 10 sachet dalam penanganan inflasi pada KWT berkah sinergi nagari salimpek dan KWT annisa nagari aripan.
- e. Melakukan kegiatan pemanfaatan pekarangan melalui budidaya itik petelur sebanyak 1.911 ekor dan pakan 7.170 kg pada kelompok tani.
- f. Melakukan kegiatan pengembangan desa Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) pada kelompok wanita tani berupa rumah bibit, sosialisasi dan bimbingan teknis pangan beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA).
- g. Melakukan kegiatan pengawasan keamanan pangan diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Bentuk kegiatan melalui pemeriksaan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang bekerja sama dengan UPTD Balai Pengawasan dan sertifikasi mutu pangan Laboratorium Keamanan Pangan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat terhadap 5 sampel yaitu bawang merah, bawang putih, cabe merah, cabai hijau dan tomat.
- h. Melakukan kegiatan penanganan kerawanan pangan berupa pengadaan beras sebanyak 300 kg untuk KK miskin serta kacang hijau, gula pasir dan telur untuk balita stunting.
- i. Memfasilitasi alat tangkap ramah lingkungan untuk nelayan tradisional berupa jaring 2 unit dan mesin tempel 4 unit pada kelompok nelayan muaro lembang nagari saniang baka Kecamatan X Koto Singkarak.
- j. Melaksanakan pemberian bantuan diserahkan ke masyarakat berupa olahan hasil perikanan terdiri dari samosa tuna 280 bungkus, sumpia bilih 280 bungkus, siomay tuna 280 bungkus dan spring roll tuna 280 bungkus untuk 6 nagari berisiko stunting.
- k. Melakukan penyerahan bantuan benih (benih ikan lele, ikan mas dan ikan nila) dan pakan pada pelaku usaha perikanan/pokdakan.

- l. Mendukung peningkatan faktor produksi perikanan melalui Fasilitasi pakan, calon induk ikan mas dan rehab kolam pada UPT Balai Benih Ikan Sungai Janiah.
  - m. Melaksanakan bimbingan teknis Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) bagi 8 pelaku usaha perikanan.
  - n. Melaksanakan pembinaan pada pelaku usaha budidaya berupa aspek teknis, manajemen, kesehatan dan kesejahteraan ikan serta aspek lingkungan dan sosial.
3. Urusan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
- a. Melaksanakan kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan melalui Revitalisasi Pasar.
  - b. Melakukan kegiatan Survei Ketersediaan Bahan Pokok dan Pengendalian Harga Bahan Pokok.
  - c. Melaksanakan kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi.
  - d. Melakukan Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan.
  - e. Melakukan kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).
  - f. Fasilitasi Perijinan, Monitoring & Pembinaan UMKM
  - g. Fasilitasi bantuan peralatan bagi UMKM bagi 371 UMKM
  - h. Fasilitasi Bantuan Kemasan UMKM bagi 10 UMKM
  - i. Operasional kegiatan di Klinik Desain dan Kemasan UMKM
4. Urusan Pariwisata
- a. Melaksanakan Event Tea Run and walk 2025  
Tea Run & Walk 2025 adalah kolaborasi event antara Pemerintah Kabupaten Solok dengan Yayasan Patamuan Alam Indonesia.
  - b. Melaksanakan Event Mambadak Musajik  
Kegiatan ini merupakan tradisi penggalangan dana untuk pembangunan masjid yang diawali dengan penyembelihan sapi dan doa bersama.
  - c. Melaksanakan Event “*BAVESPA di Ranah Minang*”  
Kegiatan ini menghadirkan berbagai atraksi budaya, hiburan, serta aktivitas komunitas otomotif yang dipadukan dengan potensi wisata Kabupaten Solok.
  - d. Melaksanakan Lomba Ayam Kukuak Balenggek  
Kegiatan ini bertujuan melestarikan ayam Kukuak Balenggek sebagai warisan hayati daerah dan warisan budaya Minangkabau, sekaligus

memperkuat identitas budaya lokal serta menjaga kearifan tradisi masyarakat Kabupaten Solok.

e. Melaksanakan Festival 5 Danau Tahun 2025

Merupakan salah satu event pariwisata unggulan Kabupaten Solok yang kembali masuk dalam Karisma Event Nusantara (KEN), program nasional yang diprakarsai oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Pelaksanaan Festival 5 Danau Tahun 2025 diselenggarakan selama 3 (tiga) hari, yaitu pada tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 2025 di 5 (lima) ikonik danau Kabupaten Solok. Danau Singkarak ( Muaro Pingai), Danau Tuo, Danau Talang, Danau Diatas dan Danau Dibawah.

Berikut rangkaian kegiatan yang dilakukan di festival 5 danau adalah sebagai berikut:

- a) Malamang Siarang 1.000 batang
  - b) Silaturahmi **Sasaran Silek Kubuang Tigo Baleh**
  - c) Kegiatan **Lomba Masak Samba Lado**
- f. Melaksanakan Alahan Panjang Tourism Run 2025

Event ini terdiri dari tiga kategori lomba, yaitu 5K Fun Run untuk masyarakat umum dan pelari pemula, 10K Race Run untuk komunitas pelari tingkat daerah dan nasional, serta 25K Challenge Run bagi pelari profesional dan komunitas trail running.



*Penyerahan bantuan alsintan ke Kelompok tani*



Gerakan Pangan Murah (GPM)



Event 5K Fun Run. 10K Race Run dan 25K Challenge Run



Kegiatan malamang (membaka lamang)

## 16. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Solok Tahun 2025 sebesar 4,70% ini menunjukkan tingkat pengangguran yang moderat/rendah di Kabupaten Solok, yang berarti mayoritas angkatan kerja telah terserap dalam aktivitas ekonomi.

### A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2025, target Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Solok adalah 4,66 dapat dilihat pada Tabel 3.16.1 sebagai berikut:

**Tabel. 3.16.1**

#### Tingkat Pengangguran Terbuka

No	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,66

### B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel. 3.16.2 sebagai berikut:

**Tabel. 3.16.2**

#### Tingkat Pengangguran Terbuka

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,66	4,70	99,14

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka 2026

Berdasarkan Tabel. 3.16.2 dapat dilihat bahwa capaian kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Solok Tahun 2025 menunjukkan bahwa kinerja belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi belum tercapainya target TPT pada tahun 2025 antara lain:

1. Pertumbuhan angkatan kerja baru, terutama dari lulusan pendidikan menengah dan perguruan tinggi, yang belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja.
2. Terbatasnya kesempatan kerja pada sektor formal, sehingga sebagian tenaga kerja masih berada pada sektor informal atau belum terserap secara optimal.
3. Keterbatasan investasi dan pengembangan sektor ekonomi produktif, khususnya pada sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi seperti industri pengolahan dan jasa.
4. Ketidakesesuaian keterampilan (skill mismatch) antara kebutuhan dunia kerja dengan kompetensi tenaga kerja yang tersedia.

Berdasarkan permasalahan di atas disusun upaya atau rencana tindak lanjut penurunan tingkat pengangguran perlu terus diperkuat melalui:

1. Peningkatan investasi daerah.
  2. Pengembangan sektor ekonomi yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi.
  3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi.
  4. Mendorong pertumbuhan wirausaha baru
- C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

**Tabel. 3.16.3**

**Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka**

No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)		Capaian (%)		Tahun 2030 (Target akhir RPJMD)	
		2024	2025	2024	2025	Target (%)	Capaian (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,91	4,7	86,34	99,14	3,84	77,6

Berdasarkan Tabel. 3.16.3 dapat dilihat bahwa capaian kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Solok Tahun 2025 mengalami penurunan namun jika realisasi kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun

2024 Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan adanya tren penurunan tingkat pengangguran dalam beberapa tahun terakhir dengan capaian kinerja meningkat secara signifikan dari tahun sebelumnya.

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2030 sebesar 3,84% dan realisasi tahun 2025 sebesar 4,70% maka capaian kinerja 77,6% dari target jangka menengah tersebut. Artinya, masih terdapat selisih sekitar 0,86 poin persentase yang perlu diturunkan dalam beberapa tahun ke depan agar target RPJMD dapat tercapai.

- D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

**Tabel. 3.16.4**

**Efisiensi Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka**

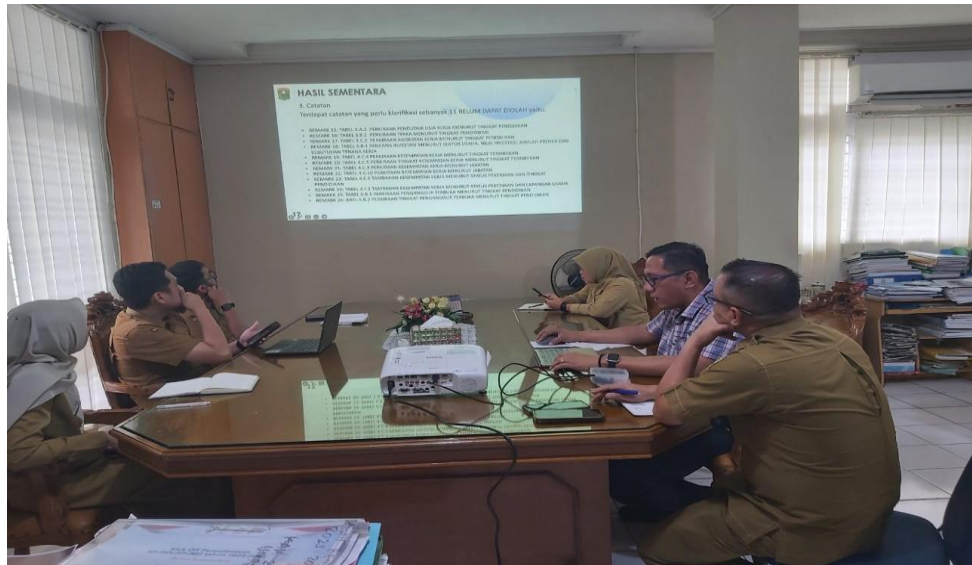
IKU	Kinerja			Keuangan			
	Target (%)	Realisasi (%)	%	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,66	4,70	99,14	Penempatan Tenaga Kerja	66.978.231	55.767.002	83,2
				Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	184.662.237	163.976.016	88,79
				Hubungan Industrial	71.184.766	60.055.925	84,36
				Perencanaan Tenaga Kerja	170.198.240	150.609.398	88,49
<b>Rata-rata capaian</b>			<b>99,14</b>	<b>Total Anggaran</b>	<b>493.023.474</b>	<b>430.408.341</b>	<b>87,29</b>

Pada Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Solok tingkat efisiensinya tidak dapat dihitung karena target pada perjanjian kinerja tidak tercapai.

- E. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Solok Tahun 2025, terdapat beberapa program/kegiatan penunjang yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah diantaranya, yaitu:

1. Melakukan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri, penyusunan rencana tenaga kerja.
2. Melakukan konsultasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Provinsi Sumatera Barat dalam Penyusunan Rencana Tenaga Kerja tahun 2025-2029 di Kabupaten Solok
3. Melakukan sosialisasi Pencegahan dan penanganan CPMI non procedural di Kabupaten Solok.
4. Melakukan wawancara serta verifikasi dokumen Rekomendasi Penempatan Tenaga Kerja Ke luar Negeri.
5. Melakukan sosialisasi kegiatan Program Pinjaman Pola Grameen bank yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan bantuan pinjaman modal usaha bagi UMKM.
6. Konsultasi dengan Wali Nagari terkait pembentukan Desa Migran Emas yang yang memberikan manfaat utama berupa perlindungan prosedural, pencegahan perdagangan Orang (TPPO), dan pemberdayaan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya, program ini menjadikan desa pusat informasi migrasi, membantu optimalisasi remitansi serta mendampingi purna PMI untuk berwirausaha mandiri.
7. Monitoring dan evaluasi perusahaan terkait Hak dan Kewajiban Buruh pada perusahaan sebagai bentuk perlindungan bagi Pekerja, serta sosialisasi kepada perusahaan terkait penyampaian lowongan pekerjaan pada Dinas yang membindangi tenaga kerja.
8. Monitoring dan evaluasi penempatan tenaga kerja pada Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).
9. Menerima pengaduan terkait PMI yang bermasalah di luar negeri.
10. Wawancara serta melakukan verifikasi dokumen perjanjian penempatan tenaga kerja ke luar negeri



Rapat penyusunan rencana kerja



Sosialisasi Pencegahan dan penanganan CPMI non procedural di Kabupaten Solok

## 17. INDEKS GINI

Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva Lorenz dan aspek matematis.

Rasio gini pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2025 sebesar 0,219, berarti tingkat ketimpangan pendapatan penduduk sangat kecil dan pemerataan pendapatan tergolong merata di Kabupaten Solok.

### A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2025, target Indeks Gini Kabupaten Solok adalah 0,240 dapat dilihat pada Tabel 3.17.1 sebagai berikut:

**Tabel. 3.17.1**

**Indeks Gini**

No	Indikator Kinerja	Target (Indeks)
1	Indeks Gini	0,240

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja,

Pencapaian Indikator Indeks Gini Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel. 3.17.2 sebagai berikut:

**Tabel. 3.17.2**

**Indeks Gini**

No	Indikator Kinerja	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	Capaian (%)
1	Indeks Gini	0,240	0,219	108,75

Sumber: Sumbang Dalam Angka 2026

Berdasarkan Tabel. 3.17.2 jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan dapat disimpulkan bahwa Pada Tahun 2025, target Indeks Gini Kabupaten Solok ditetapkan sebesar 0,240, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 0,219 dengan demikian tingkat capaian kinerja mencapai 108,75%, yang menunjukkan bahwa kinerja pemerataan pendapatan di Kabupaten Solok telah melampaui target yang ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa distribusi pendapatan masyarakat di Kabupaten Solok cenderung lebih merata. Hal ini mencerminkan bahwa manfaat pembangunan dan aktivitas ekonomi relatif dapat dirasakan oleh berbagai kelompok masyarakat, sehingga kesenjangan ekonomi antar kelompok pendapatan dapat ditekan.

Beberapa faktor pendorong yang mendukung tercapainya kinerja tersebut antara lain:

1. meningkatnya peran sektor ekonomi berbasis masyarakat, seperti pengoptimalan tenaga kerja disektor pertanian, perdagangan kecil, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

2. Adanya program pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi Masyarakat.
  3. Dukungan terhadap usaha produktif masyarakat turut berkontribusi dalam menjaga pemerataan pendapatan.
  4. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
- C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

**Tabel. 3.17.3**

**Perkembangan Indeks Gini**

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Indeks)		Capaian (%)		Tahun 2030 (Target akhir RPJMD)	
		2024	2025	2024	2025	Target (Indeks)	Capaian (%)
1.	Indeks Gini	N/A	0,241	N/A	108,75	0,235	102,55

Berdasarkan Tabel. 3.17.3 dapat dilihat bahwa pada Tahun 2025, capaian kinerja Indeks Gini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator tersebut merupakan indikator baru.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam RPJMD, yaitu target akhir tahun 2030 sebesar **0,235**, maka realisasi tahun 2025 yang sebesar **0,241** telah mencapai tingkat capaian sebesar **102,55%**.

- D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

**Tabel. 3.17.4**

**Efisiensi Indikator Indeks Gini**

IKU	Kinerja			Keuangan			
	Target (Angka)	Realisasi (Angka)	%	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Indeks Gini	6.08	6.25	108,75	Pengembangan	233.980.818	226.010.473	96,59

			kapasitas daya saing kepemudaan			
			sediaan farmasi. alat kesehatan dan makanan minuman	573.102.627	509.571.202	88,91
			pemberdayaan lembaga kemasyarakatan. lembaga adat dan masyarakat hukum adat	1.507.480.648	1.452.702.506	96,37
			penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	82.456.496	76.498.206	92,77
			pendidikan dan latihan perkoperasian	109.000.300	92.179.931	84,57
			pemberdayaan dan perlindungan koperasi	29.547.700	27.365.663	92,62
			pemberdayaan usaha menengah. usaha	99.371.140	98.293.254	98,92

			kecil. dan usaha mikro (umkm)			
			pengembangan umkm	986.531.340	951.543.454	96,45
			penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	39.043.882	37.357.880	95,68
			perencanaan dan pembangunan industri	1.237.296.741	1.151.680.978	93,08
			pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	184.662.237	163.976.016	88,80
			Penempatan tenaga kerja	66.978.231	55.767.002	83,26
			Hubungan industrial	71.184.766	60.055.925	84,37
			Pelayanan penanaman modal	346.719.043	271.551.886	78,32
			Pengelolaan perikanan tangkap	109.165.371	94.382.285	86,46
			Pengelolaan perikanan budidaya	1.149.561.066	1.044.406.500	90,85
			Pengolahan dan	148.064.255	130.236.341	87,96

				pemasaran hasil perikanan			
				Pengembangan kesenian tradisional	806.437.918	796.801.078	98,81
				Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	972.656.630	956.144.723	98,30
				Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	107.590.317	106.742.535	99,21
				Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	8.443.008.093	8.334.227.985	98,71
				Penyuluhan pertanian	4.522.885.647	3.860.066.876	85,35
				Perekonomian dan pembangunan	1.971.953.518	1.744.723.673	88,48
				Pengelolaan pendidikan	81.090.498.526	72.070.068.440	88,88
				Pemenuhan upaya keehatan perorangan dan upaya keehatan	80.883.507.062 .96	70.540.889.969 .13	87,21
				Peningkatan	1.830.121.156. 29	1.652.779.563	90,31

				kapasitas sumber daya manusia kesehatan			
				Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	563.286.300	484.556.000	86,02
				Pengembangan perumahan	712.512.739	679.135.020	95,32
				Pencegahan Penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	1.304.406.529	1.210.767.205	92,82
				Penanggulangan bencana	2.063.692.338	2.002.200.728	97,02
				Pemberdayaan sosial	57.288.561	52.152.634	91,03
				Rehabilitasi sosial	1.300.378.953	1.227.031.320	94,36
				Perlindungan dan jaminan sosial	512.207.721	492.969.455	96,24
				Penanganan bencana	530.739.953	486.803.597	91,72
				Pemenuhan hak anak (pha)	83.396.089	69.533.839	83,38

			Perlindungan khusus anak	283.696.125	241.700.720	85,20
			Pengendalian penduduk	520.703.788	497.136.594	95,47
			Pembinaan keluarga berencana (kb)	3.367.141.349	2.924.983.577	86,87
			Pendaftaran penduduk	845.922.967	768.985.439	90,90
			Pencatatan sipil	100.156.283	92.720.834	92,58
			Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	67.828.566	60.031.714	88,51
			Penanganan kerawanan pangan	113.663.209	106.677.500	93,85
			Pengelolaan keuangan daerah	176.531.512.852	160.183.316.250	90,74
			Pengelolaan sumber daya air (sda)	7.344.550.664	7.294.268.488	99,32
			Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	3.146.677.831	3.081.388.921	97,93
			Pengelolaan dan	9.688.028.728	9.604.728.493	99,14

			pengembangan sistem air limbah			
			Penataan bangunan dan lingkungannya	7.624.412.578	6.910.199.554.99	90,63
			Penyelenggaraan jalan	29.075.891.086	26.347.863.519	90,62
			Penyelenggaraan penataan ruang	932.426.860	891.756.969	95,64
			Kawasan permukiman	5.293.218.551	5.040.923.505	95,23
			Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	647.444.513	633.891.819	97,91
			Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	43.618.000	40.969.820	93,93
			Peningkatan kualitas keluarga	69.987.438	66.229.021	94,63
			Pengelolaan persampahan	2.935.128.56	2.910.164.149	991,49
			Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	2.889.846.647	2.812.643.625	97,33

				(Ilaj)			
				Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	3.201.384.240	2.915.805.346	91,08
				Pembinaan perpustakaan	1.272.198.782	1.120.029.520.00	88,04
<b>Rata-rata</b>			<b>108,75</b>	<b>Total Anggaran</b>	<b>448.084.538.625,25</b>	<b>407.757.589.520,12</b>	<b>91</b>
<b>Tingkat Efisiensi 9%</b>							

Pada Indikator Indeks Gini Kabupaten Solok tingkat efisiensinya sebesar 9% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 448.084.538.625,25 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 407.757.589.520,12.

E. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Indeks Gini Kabupaten Solok Tahun 2025. terdapat beberapa program/kegiatan penunjang yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah diantaranya, yaitu:

1. Urusan Pertanian

- a. Menyalurkan alat mesin pertanian (alsintan) sebanyak 25 unit dari APBD Kabupaten Solok dan 92 unit dari APBN serta pupuk organik cair sebanyak 1.160 liter.
- b. Meningkatkan penggunaan benih bersertifikat padi sawah dengan benih padi berlabel dari kelompok tani penangkar sebanyak 7.100 kg.
- c. Pemurnian varitas padi lokal yang sudah dilepas yaitu varitas caredek merah dan padi harum solok bertujuan untuk mendapatkan benih padi yang bersertifikat.
- d. Penanaman padi dengan konsep Sawah Pokok Murah (SPM) pada 12 kecamatan dan 64 Nagari dengan luas 30 Ha.
- e. Melaksanakan kegiatan pelatihan penyusunan SOP GAP pertanian organik untuk pengembangan pertanian organik
- f. Fasilitasi bantuan benih ubi jalar sebanyak 9.600 stek untuk pengembangan ubi jalar 0,3 ha.
- g. Meningkatkan dan mempertahankan ketersediaan sumber air ditingkat usaha tani sebagai suplai air irigasi dan mengurangi resiko terjadinya

kegagalan panen pada musim kemarau dengan membangun dam parit 2 unit, embung pertanian 2 unit dan jaringan irigasi tersier 16 unit.

2. Urusan Perikanan dan Pangan
  - a. Melakukan pengadaan cadangan pangan pemerintah sebanyak 2.973,50 kg yang bekerja sama dengan PT. Bulog.
  - b. Melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 6 kali Kecamatan Kubung, Kecamatan Gunung Talang, Kecamatan Danau Kembar, Kecamatan Lembah Gumanti dan Kecamatan Bukit Sundi.
  - c. Monitoring pemantauan harga bahan pangan seperti beras, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, gula pasir, daging ayam, telur, daging sapi, minyak goreng dan tepung terigu.
  - d. Melakukan gerakan menanam cabai di pekarangan dengan memberi bantuan bibit cabe 1.000 btg. polibag 60 kg. kompos 1.800 kg dan pestisida nabati 10 sachet dalam penanganan inflasi pada KWT berkah sinergi nagari salimpek dan KWT annisa nagari aripan.
  - e. Melakukan kegiatan pemanfaatan pekarangan melalui budidaya itik petelur sebanyak 1.911 ekor dan pakan 7.170 kg pada kelompok tani.
  - f. Melakukan kegiatan pengembangan desa Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) pada kelompok wanita tani berupa rumah bibit, sosialisasi dan bimbingan teknis pangan beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA).
  - g. Melakukan kegiatan pengawasan keamanan pangan diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Bentuk kegiatan melalui pemeriksaan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang bekerja sama dengan UPTD Balai Pengawasan dan sertifikasi mutu pangan Laboratorium Keamanan Pangan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat terhadap 5 sampel yaitu bawang merah, bawang putih, cabe merah, cabai hijau dan tomat.
  - h. Melakukan kegiatan penanganan kerawanan pangan berupa pengadaan beras sebanyak 300 kg untuk KK miskin serta kacang hijau, gula pasir dan telur untuk balita stunting.
  - i. Memfasilitasi alat tangkap ramah lingkungan untuk nelayan tradisional berupa jaring 2 unit dan mesin tempel 4 unit pada kelompok nelayan muaro lembang nagari saniang baka Kecamatan X Koto Singkarak.

- j. Melaksanakan pemberian bantuan diserahkan ke masyarakat berupa olahan hasil perikanan terdiri dari samosa tuna 280 bungkus, sumpia bilih 280 bungkus, siomay tuna 280 bungkus dan spring roll tuna 280 bungkus untuk 6 nagari berisiko stunting.
  - k. Melakukan penyerahan bantuan benih (benih ikan lele, ikan mas dan ikan nila) dan pakan pada pelaku usaha perikanan/pokdakan.
  - l. Mendukung peningkatan faktor produksi perikanan melalui Fasilitasi pakan, calon induk ikan mas dan rehab kolam pada UPT Balai Benih Ikan Sungai Janiah.
  - m. Melaksanakan bimbingan teknis Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) bagi 8 pelaku usaha perikanan.
  - n. Melaksanakan pembinaan pada pelaku usaha budidaya berupa aspek teknis, manajemen, kesehatan dan kesejahteraan ikan serta aspek lingkungan dan sosial.
3. Urusan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
- a. Melaksanakan kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan melalui Revitalisasi Pasar.
  - b. Melakukan kegiatan Survei Ketersediaan Bahan Pokok dan Pengendalian Harga Bahan Pokok.
  - c. Melaksanakan kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi.
  - d. Melakukan Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan.
  - e. Melakukan kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).
  - f. Fasilitasi Perijinan, Monitoring & Pembinaan UMKM
  - g. Fasilitasi bantuan peralatan bagi UMKM bagi 371 UMKM
  - h. Fasilitasi Bantuan Kemasan UMKM bagi 10 UMKM
  - i. Operasional kegiatan di Klinik Desain dan Kemasan UMKM
4. Urusan Pariwisata
- a. Melaksanakan Event Tea Run and walk 2025  
Tea Run & Walk 2025 adalah kolaborasi event antara Pemerintah Kabupaten Solok dengan Yayasan Patamuan Alam Indonesia.
  - b. Melaksanakan Event Mambadak Musajik  
Kegiatan ini merupakan tradisi penggalangan dana untuk pembangunan masjid yang diawali dengan penyembelihan sapi dan doa bersama.
  - c. Melaksanakan Event “BAVESPA di Ranah Minang”

Kegiatan ini menghadirkan berbagai atraksi budaya, hiburan, serta aktivitas komunitas otomotif yang dipadukan dengan potensi wisata Kabupaten Solok.

d. Melaksanakan Lomba Ayam Kukuak Balenggek

Kegiatan ini bertujuan melestarikan ayam Kukuak Balenggek sebagai warisan hayati daerah dan warisan budaya Minangkabau, sekaligus memperkuat identitas budaya lokal serta menjaga kearifan tradisi masyarakat Kabupaten Solok.

e. Melaksanakan Festival 5 Danau Tahun 2025

Merupakan salah satu event pariwisata unggulan Kabupaten Solok yang kembali masuk dalam Karisma Event Nusantara (KEN), program nasional yang diprakarsai oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Pelaksanaan Festival 5 Danau Tahun 2025 diselenggarakan selama 3 (tiga) hari, yaitu pada tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 2025 di 5 (lima) ikonik danau Kabupaten Solok. Danau Singkarak ( Muaro Pingai), Danau Tuo, Danau Talang, Danau Diatas dan Danau Dibawah.

Berikut rangkaian kegiatan yang dilakukan di festival 5 danau adalah sebagai berikut:

d) Malamang Siarang 1.000 batang

e) Silaturahmi **Sasaran Silek Kubuang Tigo Baleh**

f) Kegiatan **Lomba Masak Samba Lado**

f. Melaksanakan Alahan Panjang Tourism Run 2025

Event ini terdiri dari tiga kategori lomba, yaitu 5K Fun Run untuk masyarakat umum dan pelari pemula, 10K Race Run untuk komunitas pelari tingkat daerah dan nasional, serta 25K Challenge Run bagi pelari profesional dan komunitas trail running.



*Penyerahan bantuan alsintan ke Kelompok tani*



Gerakan Pangan Murah (GPM)



Event Mambadak Musajik



Lomba Ayam Kukuak Balenggek

## 18. PDRB PERKAPITA (ADHB)

Pengertian PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB per kapita atas

dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Cara perhitungannya dengan membagi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu.

PDRB Perkapita atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Solok pada Tahun 2025 sebesar Rp 46.728.264 menunjukkan nilai rata-rata pendapatan atau nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh setiap penduduk di Kabupaten Solok dalam satu tahun, dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku pada tahun berjalan.

Angka Rp 46.728.264 per kapita menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di Kabupaten Solok cukup aktif, dengan rata-rata kontribusi ekonomi per orang mencapai kisaran menengah.

A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan RPJMD 2021-2026 pada Tahun 2025, target PDRB Perkapita (ADHB) di Kabupaten Solok adalah Rp. 49,12 (juta rupiah) dapat dilihat pada Tabel 3.18.1 sebagai berikut:

**Tabel. 3.18.1**

**PDRB Perkapita (ADHB) Daerah**

No	Indikator Kinerja	Target (Juta Rupiah)
1	PDRB Per Kapita ADHB	49,12

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator PDRB Perkapita (ADHB) Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel. 3.18.2 sebagai berikut:

**Tabel. 3.18.2**

**PDRB Perkapita (ADHB) Daerah**

No	Indikator Kinerja	Target (Juta Rupiah)	Realisasi (Juta Rupiah)	Capaian (%)
1	PDRB Per Kapita ADHB	49,12	46,73	95,13

Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka 2026

Berdasarkan Tabel. 3.18.2 dapat dijelaskan bahwa Pencapaian indikator PDRB Perkapita (ADHB) Kabupaten Solok Tahun 2025 tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2025, target PDRB Perkapita (ADHB) ditetapkan sebesar Rp. 49,12 (Juta), sementara realisasi mencapai Rp. 46,73 (juta) dengan capaian kinerja sebesar 95,13%.

Tidak tercapainya target PDRB Perkapita (ADHB) dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut:

1. Kenaikan harga komoditas unggulan daerah.
2. Inflasi yang mendorong peningkatan nilai nominal output.
3. Peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa.
4. Perluasan investasi dan konsumsi rumah tangga.

Berdasarkan permasalahan diatas disusun rencana tindak lanjut dalam peningkatan PDRB per kapita (ADHB), antaranya:

1. Meningkatkan nilai produksi dan transaksi pada sektor unggulan daerah.
2. Menjaga stabilitas harga komoditas dan inflasi yang mendorong peningkatan nilai nominal PDRB.
3. Perbaiki iklim usaha dan investasi di daerah.

- C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

**Tabel. 3.18.3**

**Perkembangan PDRB Perkapita (ADHB)**

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Juta Rupiah)		Capaian (%)		Tahun 2030 (Target akhir RPJMD)	
		2024	2025	2024	2025	Target (Juta Rupiah)	Capaian (%)
1.	PDRB Per Kapita ADHB	44,52	46,73	101,98	95,13	82,12	56,89

Berdasarkan Tabel. 3.18.3 dapat dilihat bahwa capaian kinerja PDRB Perkapita (ADHB) Kabupaten Solok Tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya namun realisasi mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030 maka capaian kinerja

sebesar 56.89% ini perlu perhatian serius dari Pemerintah agar target pada akhir RPJMD tercapai.

- D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

**Tabel. 3.18.4**

**Efisiensi Indikator PDRB Per Kapita ADHB**

IKU	Kinerja			Keuangan			
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PDRB Per Kapita ADHB	49,12	46,73	95,13	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.222.909.503	2.992.335.831	92,85
				Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	8.443.008.093	8.334.227.985	98,71
				Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.131.924.426	891.676.761	78,78
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	372.110.772	318.664.179	85,63
				Penyuluhan Pertanian	4.522.885.647	3.860.066.876	85,35
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.573.178.851	12.479.246.545	91,94
				Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan	6.335.450	5.232.500	83

				kemandirian Pangan			
				Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	808.301.409	776.615.471	96
				Penanganan Kerawanan Pangan	113.663.209	106.667.500	94
				Pengawasan Keamanan Pangan	13.145.840	12.728.600	97
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.053.018.153	3.743.004.180	92
				Pengelolaan Perikanan Tangkap	109.165.371	94.382.285	85
				Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.149.561.066	1.044.406.500	91
				Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	148.064.255	130.236.341	88
				Pengebangn Iklim Penanaman Modal	56.495.025	40.002.043	70,80
				Promosi Penanaman Modal	37.074.405	34.523.286	93,11
				Pelayanan Penanaman Modal	346.719.043	271.551.886	78,32
				Pengendalian Pelaksanaan	63.067.177	58.535.218	92,81

				Penanaman Modal			
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.683.055.030.17	4.196.511.890	89,61
				Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	82.456.496	76.498.206 92,77	92,77
				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	109.000.299.83	92.179.931	84,57
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	29.547.700	27.365.663	92,62
				Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	99.371.140	98.293.254	98,92
				Pengembangan UMKM	986.531.340	951.543.454	96,45
				Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	466.796.311	437.642.265	93,75
				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	972.656.629	956.144.723	97
				Pemasaran Pariwisata	1.240.198.080	1.238.108.317	99,83
				Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	107.590.317	106.742.535	99
				Pengembangan Ekonomi Kreatif	821.404.394	695.611.521	99

				melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual			
<b>Rata-rata capaian</b>			<b>95,13</b>	<b>Total Anggaran</b>	<b>47.769.235.432</b>	<b>44.070.745.746</b>	<b>92.28</b>

Pada Indikator PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Solok tingkat efisiensinya tidak dapat dijabarkan karena target pada perjanjian kinerja tidak dapat dicapai.

E. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja PDRB Per Kapita ADHB di Kabupaten Solok Tahun 2025, terdapat beberapa program/kegiatan penunjang yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah diantaranya, yaitu:

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Solok Tahun 2025, terdapat beberapa program/kegiatan penunjang yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah diantaranya, yaitu:

1. Urusan Pertanian

- a. Menyalurkan alat mesin pertanian (alsintan) sebanyak 25 unit dari APBD Kabupaten Solok dan 92 unit dari APBN serta pupuk organik cair sebanyak 1.160 liter.
- b. Meningkatkan penggunaan benih bersertifikat padi sawah dengan oupkup benih padi berlabel dari kelompok tani penangkar sebanyak 7.100 kg.
- c. Pemurnian varitas padi lokal yang sudah dilepas yaitu varitas caredek merah dan padi harum solok bertujuan untuk mendapatkan benih padi yang bersertifikat.
- d. Penanaman padi dengan konsep Sawah Pokok Murah (SPM) pada 12 kecamatan dan 64 Nagari dengan luas 30 Ha.
- e. Melaksanakan kegiatan pelatihan penyusunan SOP GAP pertanian organik untuk pengembangan pertanian organik
- f. Fasilitasi bantuan benih ubi jalar sebanyak 9.600 stek untuk pengembangan ubi jalar 0,3 ha.
- g. Meningkatkan dan mempertahankan ketersediaan sumber air ditingkat usaha tani sebagai suplai air irigasi dan mengurangi resiko terjadinya kegagalan panen pada musim kemarau dengan membangun dam parit 2 unit, embung pertanian 2 unit dan jaringan irigasi tersier 16 unit.

2. Urusan Perikanan dan Pangan
  - a. Melakukan pengadaan cadangan pangan pemerintah sebanyak 2.973,50 kg yang bekerja sama dengan PT. Bulog.
  - b. Melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 6 kali Kecamatan Kubung, Kecamatan Gunung Talang, Kecamatan Danau Kembar, Kecamatan Lembah Gumanti dan Kecamatan Bukit Sundi.
  - c. Monitoring pemantauan harga bahan pangan seperti beras, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, gula pasir, daging ayam, telur, daging sapi, minyak goreng dan tepung terigu.
  - d. Melakukan gerakan menanam cabai di pekarangan dengan memberi bantuan bibit cabe 1.000 btg. polibag 60 kg. kompos 1.800 kg dan pestisida nabati 10 sachet dalam penanganan inflasi pada KWT berkah sinergi nagari salimpek dan KWT annisa nagari aripan.
  - e. Melakukan kegiatan pemanfaatan pekarangan melalui budidaya itik petelur sebanyak 1.911 ekor dan pakan 7.170 kg pada kelompok tani.
  - f. Melakukan kegiatan pengembangan desa Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) pada kelompok wanita tani berupa rumah bibit, sosialisasi dan bimbingan teknis pangan beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA).
  - g. Melakukan kegiatan pengawasan keamanan pangan diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Bentuk kegiatan melalui pemeriksaan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang bekerja sama dengan UPTD Balai Pengawasan dan sertifikasi mutu pangan Laboratorium Keamanan Pangan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat terhadap 5 sampel yaitu bawang merah, bawang putih, cabe merah, cabai hijau dan tomat.
  - h. Melakukan kegiatan penanganan kerawanan pangan berupa pengadaan beras sebanyak 300 kg untuk KK miskin serta kacang hijau, gula pasir dan telur untuk balita stunting.
  - i. Memfasilitasi alat tangkap ramah lingkungan untuk nelayan tradisional berupa jaring 2 unit dan mesin tempel 4 unit pada kelompok nelayan muaro lembang nagari saniang baka Kecamatan X Koto Singkarak.
  - j. Melaksanakan pemberian bantuan diserahkan ke masyarakat berupa olahan hasil perikanan terdiri dari samosa tuna 280 bungkus, sumpia bilih

- 280 bungkus, siomay tuna 280 bungkus dan spring roll tuna 280 bungkus untuk 6 nagari berisiko stunting.
- k. Melakukan penyerahan bantuan benih (benih ikan lele, ikan mas dan ikan nila) dan pakan pada pelaku usaha perikanan/pokdakan.
  - l. Mendukung peningkatan faktor produksi perikanan melalui Fasilitasi pakan, calon induk ikan mas dan rehab kolam pada UPT Balai Benih Ikan Sungai Janiah.
  - m. Melaksanakan bimbingan teknis Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) bagi 8 pelaku usaha perikanan.
  - n. Melaksanakan pembinaan pada pelaku usaha budidaya berupa aspek teknis, manajemen, kesehatan dan kesejahteraan ikan serta aspek lingkungan dan sosial.
3. Urusan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
- a. Melaksanakan kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan melalui Revitalisasi Pasar.
  - b. Melakukan kegiatan Survei Ketersediaan Bahan Pokok dan Pengendalian Harga Bahan Pokok.
  - c. Melaksanakan kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi.
  - d. Melakukan Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan.
  - e. Melakukan kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).
  - f. Fasilitasi Perijinan, Monitoring & Pembinaan UMKM
  - g. Fasilitasi bantuan peralatan bagi UMKM bagi 371 UMKM
  - h. Fasilitasi Bantuan Kemasan UMKM bagi 10 UMKM
  - i. Operasional kegiatan di Klinik Desain dan Kemasan UMKM
4. Urusan Pariwisata
- a. Melaksanakan Event Tea Run and walk 2025  
Tea Run & Walk 2025 adalah kolaborasi event antara Pemerintah Kabupaten Solok dengan Yayasan Patamuan Alam Indonesia.
  - b. Melaksanakan Event Mambadak Musajik  
Kegiatan ini merupakan tradisi penggalangan dana untuk pembangunan masjid yang diawali dengan penyembelihan sapi dan doa bersama.
  - c. Melaksanakan Event “BAVESPA di Ranah Minang”

Kegiatan ini menghadirkan berbagai atraksi budaya, hiburan, serta aktivitas komunitas otomotif yang dipadukan dengan potensi wisata Kabupaten Solok.

d. Melaksanakan Lomba Ayam Kukuak Balenggek

Kegiatan ini bertujuan melestarikan ayam Kukuak Balenggek sebagai warisan hayati daerah dan warisan budaya Minangkabau, sekaligus memperkuat identitas budaya lokal serta menjaga kearifan tradisi masyarakat Kabupaten Solok.

e. Melaksanakan Festival 5 Danau Tahun 2025

Merupakan salah satu event pariwisata unggulan Kabupaten Solok yang kembali masuk dalam Karisma Event Nusantara (KEN), program nasional yang diprakarsai oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Pelaksanaan Festival 5 Danau Tahun 2025 diselenggarakan selama 3 (tiga) hari, yaitu pada tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 2025 di 5 (lima) ikonik danau Kabupaten Solok. Danau Singkarak ( Muaro Pingai), Danau Tuo, Danau Talang, Danau Diatas dan Danau Dibawah.

Berikut rangkaian kegiatan yang dilakukan di festival 5 danau adalah sebagai berikut:

g) Malamang Siarang 1.000 batang

h) Silaturahmi **Sasaran Silek Kubuang Tigo Baleh**

i) Kegiatan **Lomba Masak Samba Lado**

f. Melaksanakan Alahan Panjang Tourism Run 2025

Event ini terdiri dari tiga kategori lomba, yaitu 5K Fun Run untuk masyarakat umum dan pelari pemula, 10K Race Run untuk komunitas pelari tingkat daerah dan nasional, serta 25K Challenge Run bagi pelari profesional dan komunitas trail running.



*Penyerahan bantuan alsintan ke Kelompok tani*



Gerakan Pangan Murah (GPM)



Event 5K Fun Run, 10K Race Run dan 25K Challenge Run



Kegiatan malamang (membaka lamang)

## 19. INDEKS DESA

Indeks Desa adalah suatu ukuran komposit yang digunakan untuk menilai kondisi, capaian, dan tingkat perkembangan desa berdasarkan sejumlah indikator tertentu, Indeks ini biasanya dipakai pemerintah sebagai alat analisis untuk memetakan situasi desa, merumuskan kebijakan pembangunan. serta menentukan intervensi program yang lebih tepat sasaran.

Indeks Desa merupakan perubahan dari Indeks Desa Membangun yang mana komposit penghitungannya dipecah dari 3 Komponen Pembentuk Indeks Desa Membangun menjadi 6 Dimensi pada Indeks Desa dengan menambahkan dimensi tata kelola pemerintahan desa.

Indeks Desa (ID) disusun dengan landasan bahwa peningkatan kemandirian desa yang berkelanjutan merupakan proses akumulasi dari dimensi layanan dasar, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas dan dimensi tata kelola pemerintahan Desa.

Keenam Dimensi menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan yang mengedepankan pembangunan manusia didasarkan pada ruang dimensi layanan dasar, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas dan dimensi tata kelola pemerintahan Desa, Dalam penyusunan ID 6 dimensi dibentuk oleh sejumlah 13 Sub Dimensi dan 48 indikator.

Pada Tahun 2025 ID Kabupaten Solok sebesar 0,75, ini dapat dikatakan bahwa desa tersebut dapat dikategorikan sebagai desa maju, yang menunjukkan bahwa desa tersebut telah mencapai tingkat pembangunan yang cukup tinggi dalam beberapa aspek, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur.

### A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2025. target Indeks Desa Kabupaten Solok adalah 0.62 dapat dilihat pada Tabel 3.19.1 sebagai berikut:

**Tabel. 3.19.1**

### Indeks Desa

No	Indikator Kinerja	Target (Indeks)
1	Indeks Desa	0.62

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Indeks Desa Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel. 3.19.2 sebagai berikut:

**Tabel. 3.19.2**

**Indeks Desa**

No	Indikator Kinerja	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	Capaian (%)
1	Indeks Desa	0,62	0,75	120,97

Sumber: Kementerian Desa

Berdasarkan Tabel. 3.19.2 jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Indeks Desa pada Tahun 2025 tercapai.

Terwujudnya pencapaian target Indeks Desa didukung oleh beberapa faktor diantaranya pada tahun 2025 terjadi peningkatan jumlah desa/nagari mandiri di Kabupaten Solok, pada tahun 2024 desa/nagari mandiri yang ada di Kabupaten Solok berjumlah sebanyak 19 desa/nagari, sedangkan pada tahun 2025 terjadi peningkatan desa/nagari mandiri menjadi 26 desa/nagari serta adanya penghargaan kepada Nagari dan Perangkat Nagari yang berhasil mencapai status Desa Mandiri.

C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

**Tabel. 3.19.3**

**Perkembangan Indeks Desa**

No	Indikator Kinerja	Realisasi (indeks)				Capaian (%)				Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Target (indeks)	Capaian (%)
1	Indeks Desa	0,691	0,72	0,75	0,75	101,92	105,44	102,74	107,14	0,712	105,34

Berdasarkan Tabel. 3.19.3 dapat dilihat bahwa capaian kinerja Indeks Desa Tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun

sebelumnya. Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD Indeks Desa telah tercapai.

- D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

**Tabel. 3.19.4**

**Efisiensi Indikator Indeks Desa**

IKU	Kinerja			Keuangan			
	Target (indek)	Realisasi (indeks)	%	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Indeks Desa	0,62	0,75	120,97	Penataan Desa	300.326.349	255.330.351	85,02
				Peningkatan Kerjasama Desa	1.760.000	0	0
				Administrasi Pemerintahan Desa	1.577.784.810	1.547.140.941	98,06
				Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	1.507.480.648	1.452.702.506	96,37
				Penataan Desa	300.326.349	255.330.351	85,02
Rata-rata capaian			107,14	<b>Total Anggaran</b>	<b>3.387.351.807</b>	<b>3.255.173.798</b>	<b>96.1</b>
<b>Tingkat Efisiensi 5.9</b>							

Pada Indikator Indeks Desa di Kabupaten Solok tingkat efisiensinya sebesar 5,9% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.387.351.807 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.255.173.798

- E. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Indeks Desa di Kabupaten Solok Tahun 2025, terdapat beberapa program/kegiatan penunjang yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah diantaranya, yaitu:

1. Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Tingkat Nagari

Dalam kegiatan musrenbang ini disampaikan ke nagari terkait rekomendasi perbaikan yang akan ditindaklanjuti oleh nagari berdasarkan kewenangan dalam rangka peningkatan status pada Indeks Desa.

2. Melakukan rapat Koordinasi stakeholder terkait diantaranya DPMN, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PRKPP, Dinas PUPR, Dinas KUKMPP, Inspektorat, Bapelitbang, Wali Nagari dan Tenaga Ahli Kementerian Desa, PDTT.
3. Melakukan Koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka peningkatan desa mandiri.



*Keterangan: Kegiatan Rapat Koordinasi IDM Provinsi Sumatera Barat*



*Keterangan: Kegiatan Musrenbang Tingkat Nagari*

## 20. INDEKS INFRASTRUKTUR DAERAH

Indeks Infrastruktur Daerah adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan pemerataan infrastruktur dasar dan

strategis di suatu wilayah, Indeks ini digunakan untuk menilai seberapa baik daerah dalam menyediakan sarana prasarana yang mendukung kehidupan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Solok mengukur indeks infrastruktur daerah dari rata-rata kondisi layanan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan, akses masyarakat terhadap sanitasi layak dan aman, jalan mantap, jembatan kondisi baik, daerah irigasi kondisi baik, embung kondisi baik, gedung kantor pemerintah kondisi baik, rumah layak huni dan terjangkau, pemenuhan PSU perumahan, kawasan kumuh dibawah 10 Hektar yang dientaskan, serta pemenuhan PJU dan rambu pada ruas jalan kewenangan kabupaten.

Indeks Infrastruktur Kabupaten Solok pada Tahun 2025 sebesar 54,30 saat ini secara umum masih dalam tahap pemerataan, perbaikan dan peningkatan, terutama pada sektor air minum, sanitasi, jalan, irigasi dan sarana lainnya. Keterbatasan anggaran pada saat efisiensi menjadi salah satu kendala, namun berbagai upaya terus dilakukan termasuk permintaan bantuan kepada pemerintah pusat, Penurunan kualitas infrastruktur terbangun tidak hanya disebabkan oleh usia pakai tetapi lebih besar disebabkan oleh bencana.

A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2025. target Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Solok adalah 63.81 dapat dilihat pada Tabel 3.20.1 sebagai berikut:

**Tabel. 3.20.1**

**Indeks Infrastruktur Daerah**

No	Indikator Kinerja	Target (Indeks)
1	Indeks Infrastruktur Daerah	63.81

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Indeks Infrastruktur Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel. 3.20.2 sebagai berikut:

**Tabel. 3.20.2**

**Indeks Infrastruktur Daerah**

No	Indikator Kinerja	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	Capaian (%)
1	Indeks Infrastruktur Daerah	63.81	54.30	85.10

Sumber: Data Kinerja Perangkat Daerah Terkait Tahun 2025

Berdasarkan Tabel. 3.20.2 jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Indeks Infrastruktur Daerah pada Tahun 2025 tidak tercapai.

Tidak tercapainya target Indeks Infrastruktur Daerah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut:

1. Kabupaten Solok memiliki wilayah berbukit dan rawan longsor serta curah hujan relatif tinggi, sehingga infrastruktur permukiman seperti jalan lingkungan dan drainase lebih cepat mengalami kerusakan.
2. Pola permukiman yang tersebar di berbagai nagari menyebabkan kebutuhan biaya mobilisasi, pengawasan, dan distribusi material menjadi lebih tinggi, sehingga intervensi tidak dapat menjangkau seluruh wilayah secara optimal dalam satu tahun anggaran.
3. Kawasan kumuh di Kabupaten Solok umumnya berskala kecil dan tersebar, sehingga intervensi penanganan membutuhkan pendekatan berbasis lokasi prioritas dan integrasi lintas kegiatan (jalan lingkungan, drainase, sanitasi).
4. Kapasitas fiskal daerah yang terbatas menyebabkan alokasi anggaran pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur belum sepenuhnya mampu mengimbangi tingkat kerusakan yang terjadi.
5. Pelaksanaan peningkatan kualitas infrastruktur permukiman sebagian bergantung pada DAK Fisik atau program tematik pusat (misalnya DAK Tematik PPKT), sehingga apabila terjadi
6. Pemeliharaan masih dominan bersifat reaktif, belum sepenuhnya terjadwal secara preventif dan berbasis kondisi riil lapangan.
7. Kesadaran dalam menjaga drainase, jalan lingkungan, dan sarana sanitasi belum merata di seluruh nagari, sehingga mempercepat penurunan kualitas infrastruktur.

Berdasarkan permasalahan atau penghambat diatas disusun beberapa rencana tidak lanjut diantaranya sebagai berikut:

1. Mengembangkan Prioritisasi Berbasis Risiko dan Dampak (Risk-Based Planning)
2. Penguatan Integrasi Program dan Sumber Pendanaan

3. Penerapan Desain Infrastruktur Tahan Bencana
  4. Pengembangan Sistem Monitoring Berbasis Data Nagari
  5. Penguatan Pemeliharaan Preventif dan Berbasis Komunitas
  6. Evaluasi Efisiensi dan Value for Money
  7. Peningkatan Kapasitas SDM Teknis dan Pengawasan Lapangan
- C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

**Tabel. 3.20.3**

**Perkembangan Indeks Infrastruktur Daerah**

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Indeks)		Capaian (%)		Tahun 2030 (Target akhir RPJMD)	
		2024	2025	2024	2025	Target (Indeks)	Capaian (%)
1.	Indeks Infrastruktur Daerah	63.07	54.30	85,23	85.10	70.33	77.21

Berdasarkan Tabel. 3.20.3 dapat dilihat bahwa capaian kinerja Indeks Infrastruktur Daerah Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD, capaian kinerja Indeks Infrastruktur Daerah belum tercapai.

- D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

**Tabel. 3.20.4**

**Efisiensi Indikator Indeks Infrastruktur Daerah**

**Tabel. 3.1.4**

**Efisiensi Indikator Indeks Infrastruktur Daerah**

IKU	Kinerja			Keuangan			
	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	%	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Indeks Infrastruktur Daerah	63,81	54,30	85,10	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	7,344,550,663	7,294,268,488	99,32

				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3,146,677,831	3,081,388,921	97,93
				Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1,433,209,847	843,590,455	58,88
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	9,688,028,728	9,604,728,493	99,14
				Penataan Bangunan dan Lingkungannya	7,624,412,578	6,910,199,554	90,63
				Pengembangan Jasa Konstruksi	28,311,582	10,980,000	38,78
				Penyelenggaraan Jalan	29,075,891,086	26,347,861,519	90,62
				Kawasan Permukiman	5,293,218,551,40	5,040,923,505,60	95,23
				Peningkatan Prasarana. Sarana dan Utilitas	4,642,166,093,60	4,259,813,699,05	91,76

			Umum (PSU)			
			Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2,889,846,647	2,812,643,625	97,00
<b>Rata-rata capaian</b>			<b>54,30</b>	<b>Total Anggaran</b>	<b>71.166.313.607</b>	<b>66.206.398.259.65</b>
						<b>93,03</b>

Pada Indikator Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Solok tingkat efisiensinya tidak dapat diukur dikarenakan capaian kinerja tidak tercapai.

E. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025, terdapat beberapa program/kegiatan penunjang yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah diantaranya, yaitu:

1. Pemeliharaan sungai dengan pemasangan bronjong/penahan tebing. normalisasi Sungai.
2. Rehabilitasi 49 daerah irigasi.
3. Penyusunan perencanaan dan pengawasan, penambahan sambungan rumah, pembangunan reservoir, perbaikan jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum, pembangunan bak penampungan sampah sementara, pembangunan tangka septik skala individual sebanyak 646 rumah dan pemasangan closet jongkok, pembangunan MCK untuk sarana ibadah dan fasilitas umum.
4. Rehab gedung kantor penghubung, rehab kantor camat, rehab sarana olahraga Pemerintah Kabupaten Solok.
5. Pembangunan, rekonstruksi dan pemeliharaan berkala jalan dan jembatan kewenangan kabupaten.
6. Melakukan pendataan Rumah tidak layak Huni di Kabupaten Solok berdasarkan ketentuan dan kriteria hunian layak yang telah ditetapkan.
7. Memberikan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni sebesar Rp. 20.000.000 per unit rumah.
8. Melakukan perbaikan rumah tidak layak huni dengan melibatkan tenaga kerja (tukang) dari masyarakat sekitar.

9. Melakukan update Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) yang didalamnya memuat peta deliniasi kawasan kumuh serta data numerik terkait kawasan kumuh.
10. Melaksanakan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu.
11. Pembangunan PJU dan rambu-rambu di jalan kewenangan kabupaten diutamakan ditempat-tempat rawan kecelakaan.



Penyerahan Bantuan Perbaikan RTLH dan Rumah Terdampak Bencana



Survei Rumah Tidak Layak Huni

## 21. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah Angka indeks komposit yang menggambarkan kondisi kualitas lingkungan hidup berdasarkan tiga aspek utama: kualitas udara, kualitas air, dan tutupan lahan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok pada tahun 2025 sebesar 82,32 yang berarti kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Solok telah hijau/sehat.

A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2025. target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok adalah 78,66 dapat dilihat pada Tabel 3.21.1 sebagai berikut:

**Tabel. 3.21.1**

**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

No	Indikator Kinerja	Target (Indeks)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,66

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel. 3.21.2 sebagai berikut:

**Tabel. 3.21.2**

**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

No	Indikator Kinerja	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	Capaian (%)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,66	82,32	104,65

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Solok

Berdasarkan Tabel. 3.21.2 jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada Tahun 2025 telah tercapai.

Tercapainya kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Tahun 2025 didukung oleh beberapa faktor utama yaitu:

1. Keberhasilan dalam menjaga empat indikator dasar, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) melalui pengendalian limbah, Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan menekan emisi polutan, Indeks Kualitas Lahan (IKL) melalui perluasan tutupan hutan dan Ruang Terbuka Hijau, serta Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).
2. Regulasi pemerintah yang ketat, ketersediaan teknologi pemantauan yang akurat.

3. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian ekosistem di lingkungan sekitar.
- C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

**Tabel. 3.21.3**

**Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Indeks)		Capaian (%)		Tahun 2030 (Target akhir RPJMD)	
		2024	2025	2024	2025	Target (Indeks)	Capaian (%)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,47	82,32	97,99	104,65	79.72	101,35

Berdasarkan Tabel. 3.21.3 dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup telah tercapai.

- D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

**Tabel. 3.21.4**

**Efisiensi Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

IKU	Kinerja			Keuangan			
	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	%	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,66	82,32	104,65	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	2.810.500	2.349.000	83,58
				Penangan pengduan lingkungan	2.412.000	2.412.000	100
				Pengelolaan Persampahan	2.935.128.563	2.910.164.149	99,15

Rata-rata capaian	82,32	Total Anggaran	2.940.351.063	2.914.925.149	99,14
-------------------	-------	----------------	---------------	---------------	-------

Pada Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok tingkat efisiensinya 0,86% dengan total pagu anggaran Rp. **2.940.351.063** dengan realisasi Rp. **2.914.925.149**.

E. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Tahun 2025, terdapat beberapa program/kegiatan penunjang yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah diantaranya, yaitu:

- a. Pengujian kualitas sampel air sungai dilakukan 2 Kali dalam satu tahun, yaitu bulan Januari s/d Juni & Juni s/d Desember.
- b. Pengukuran kualitas udara tersebut dilakukan di beberapa titik dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang berbeda- beda.
- c. Tahun 2025 kegiatan izin usaha yang diperiksa sebanyak 48 buah usaha yang diperiksa yang taat administrasinya sebanyak 8 buah perusahaan yang tidak taat sebanyak 40 buah usaha diberikan sanksi administratif dibandingkan dengan Realisasi tahun 2024 realisasi sebesar 10% target sebesar 40% dan capaian sebesar 25% dikategorikan Sangat Baik. dengan rincian sebagai berikut:
  - Tingkat kepatuhan pelaku usaha sangat tinggi
  - Sebagian besar usaha yang terinventarisasi telah memiliki Persetujuan Lingkungan
  - Kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan dengan baik
  - Pengawasan dan pembinaan berjalan efektif
- d. melakukan pembinaan bank sampah sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan bernilai ekonomis.



Pengambilan Sampling Air di Danau Diatas



Pengawasan izin usaha



Sosialisasi Bank Sampah di Nagari Sulit Air

## 22. INDEKS RISIKO BENCANA (IRBI)

IRBI dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan dan kapasitas wilayah tersebut. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan.

Nilai IRBI Kabupaten Solok pada Tahun 2025 sebesar 183,21 yang termasuk dalam kategori risiko sedang. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat risiko bencana di Kabupaten Solok masih berada pada tingkat yang cukup tinggi sehingga diperlukan berbagai upaya untuk menurunkannya.

A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2025, target Indeks Risiko Bencana (IRBI) Kabupaten Solok adalah 135,92 dapat dilihat pada Tabel 3.22.1 sebagai berikut:

**Tabel. 3.22.1**

**Indeks Risiko Bencana (IRBI)**

No	Indikator Kinerja	Target (Indeks)
1	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	135,92

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Indeks Risiko Bencana (IRBI) Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel. 3.22.2 sebagai berikut:

**Tabel. 3.22.2**

**Indeks Risiko Bencana (IRBI)**

No	Indikator Kinerja	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	Capaian (%)
1	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	135,92	183,21	65,21

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Berdasarkan Tabel. 3.22.2 jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Indeks Risiko Bencana (IRBI) pada Tahun 2025 tidak tercapai.

Tidak tercapainya target Indeks Risiko Bencana (IRBI) dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, yaitu:

**1. Karakteristik geografis wilayah**

Kabupaten Solok memiliki kondisi topografi yang didominasi oleh daerah perbukitan dan pegunungan sehingga memiliki potensi bencana seperti tanah longsor dan banjir.

**2. Faktor hidrometeorologi**

Curah hujan yang tinggi di wilayah Sumatera Barat meningkatkan potensi terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor.

**3. Tingkat kerentanan masyarakat dan lingkungan**

Sebagian wilayah permukiman masyarakat berada di daerah yang memiliki tingkat kerentanan cukup tinggi terhadap bencana.

**4. Kapasitas penanggulangan bencana**

Upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat telah dilakukan, namun masih memerlukan penguatan secara berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan atau hambatan diatas disusun rencana strategis atau rencana tindak lanjut diantaranya:

1. Peningkatan koordinasi antar instansi
2. Penguatan sistem mitigasi bencana.
3. Peningkatan kapasitas Masyarakat dalam tanggap darurat bencana
4. Pemanfaatan sistem pemetaan risiko bencana seperti InaRISK.

C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

**Tabel. 3.22.3**

**Perkembangan Indeks Risiko Bencana (IRBI)**

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Indeks)		Capaian (%)		Tahun 2030 (Target akhir RPJMD)	
		2024	2025	2024	2025	Target (Indeks)	Capaian (%)
1.	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	N/A	183.21	N/A	65,21	130,79-129,52	59,92

Berdasarkan Tabel. 3.22.3 dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Indeks Risiko Bencana (IRBI) tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan

indikator tersebut belum menjadi Indikator Kinerja Utama. Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD capaian kinerja Indeks Risiko Bencana (IRBI) belum tercapai.

- D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

**Tabel. 3.22.4**

**Efisiensi Indikator Indeks Risiko Bencana (IRBI)**

IKU	Kinerja			Program	Keuangan		
	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Indeks Risiko Bencana (IRBI)	135,92	183,21	65,21	Penanggulangan bencana	2.063.692.338	2.002.200.728	97.02%
<b>Rata-rata capaian</b>			<b>65,21</b>	<b>Total Anggaran</b>	<b>2.063.692.338</b>	<b>2.002.200.728</b>	<b>97.02%</b>

Pada Indikator Indeks Risiko Bencana (IRBI) Kabupaten Solok tingkat efisiensinya tidak dapat diukur dikarenakan perjanjian kinerja tidak tercapai.

- E. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Indeks Risiko Bencana (IRBI) Kabupaten Solok Tahun 2025. terdapat beberapa program/kegiatan penunjang yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah diantaranya. yaitu:

- a. Penyusunan dan pembaruan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD).
- b. Pemetaan wilayah rawan bencana dengan menggunakan data geospasial.
- c. Peningkatan koordinasi antarinstansi dalam menghadapi bencana, termasuk koordinasi dengan relawan dan lembaga masyarakat.
- d. Pelatihan dan simulasi kebencanaan bagi masyarakat di desa dan kelurahan.
- e. Sosialisasi dan edukasi tentang mitigasi bencana serta pengelolaan lingkungan yang aman.
- f. Pembentukan Desa Tangguh Bencana untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana.
- g. Pelatihan bagi aparatur pemerintah dan relawan kebencanaan.
- h. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, termasuk peralatan SAR dan kendaraan darurat.

- i. Pengembangan pusat informasi kebencanaan untuk mendukung respons cepat dan koordinasi penanganan bencana.
- j. Penggunaan sistem seperti InaRISK untuk memetakan wilayah rawan bencana.
- k. Analisis data risiko bencana untuk menentukan prioritas mitigasi dan penanganan.
- l. Pemantauan dan evaluasi program pengurangan risiko bencana berbasis data.

## **CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET KINERJA TAHUN 2025 BERDASARKAN RPJMD 2021-2025**

### **1. INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Solok pada Tahun 2025 sebesar 64,77 dengan kategori "B" ini menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan keuangan Kabupaten Solok pada Tahun 2025 berada dalam kategori "Cukup" atau "Sedang".

#### **A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja**

Berdasarkan RPJMD 2021-2026 pada Tahun 2025, target IPKD Kabupaten Solok adalah B dapat dilihat pada Tabel 3.23.1 sebagai berikut:

**Tabel. 3.23.1**

#### **Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah**

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target (Indeks)</b>
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B

#### **B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.**

Pencapaian Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel. 3.23.2 sebagai berikut:

**Tabel. 3.23.2**

#### **Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah**

No	Indikator Kinerja	Target (Nilai)	Realisasi (Nilai)	Capaian (%)
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B	B	100

Sumber: Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 070-805-2025

Berdasarkan Tabel. 3.23.2 jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja IPKD pada Tahun 2025 tercapai.

Tercapainya target indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah didukung oleh beberapa faktor diantaranya telah sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran serta ketepatan waktu dalam penetapan APBD sehingga seluruh program kerja berjalan sesuai jadwal. Selain itu, pemerintah Kabupaten Solok telah fokus pada kualitas alokasi belanja dengan memenuhi *mandatory spending* dan meningkatkan transparansi informasi keuangan kepada publik sehingga meraih opini WTP dari BPK. Efisiensi dalam penyerapan anggaran yang merata sepanjang tahun serta upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## 2. PDRB PERKAPITA (ADHK)

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Tahun dasar yang digunakan oleh BPS adalah harga tahun 2010. PDRB per kapita atas dasar harga konstan menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Cara perhitungannya dengan membagi PDRB Atas Dasar harga Konstan dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu.

PDRB per kapita atas dasar harga konstan Kabupaten Solok pada Tahun 2025 sebesar Rp. 28.364.433 ini menunjukkan bahwa secara rata-rata setiap penduduk menghasilkan nilai tambah barang dan jasa sekitar Rp28.36 juta dalam satu tahun.

### A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan RPJMD 2021-2026 pada Tahun 2025. target PDRB Perkapita (ADHK) di Kabupaten Solok adalah Rp. 29.720.000 dapat dilihat pada Tabel 3.24.1 sebagai berikut:

**Tabel. 3.24.1**

### **PDRB Perkapita (ADHK) Daerah**

No	Indikator Kinerja	Target (Rp)
1	PDRB Perkapita (ADHK)	29.720.000

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator PDRB Perkapita (ADHK) Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel. 3.24.2 sebagai berikut:

**Tabel. 3.24.2**

**PDRB Perkapita (ADHK) Daerah**

No	Indikator Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	PDRB Perkapita (ADHK)	29.720.000	28.364.433	95,44

Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka 2025

Berdasarkan Tabel. 3.24.2 dapat dijelaskan bahwa Pencapaian Indikator PDRB Perkapita (ADHK) Kabupaten Solok Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang relatif baik, meskipun belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2025 target PDRB Perkapita (ADHK) ditetapkan sebesar Rp29.720.000 sementara realisasinya mencapai Rp28.364.433 atau sebesar 95,44%.

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi belum tercapainya target PDRB per kapita (ADHK) diantaranya sebagai berikut:

1. Struktur ekonomi yang masih didominasi sektor primer, khususnya pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang sangat rentan terhadap faktor cuaca, fluktuasi harga komoditas, dan produktivitas lahan.
2. Terbatasnya akselerasi sektor bernilai tambah tinggi, seperti industri pengolahan dan jasa modern, sehingga peningkatan output ekonomi belum optimal.
3. Dinamika ekonomi global dan nasional, termasuk perlambatan ekonomi, tekanan harga komoditas, dan perubahan pola permintaan pasar.
4. Pertumbuhan penduduk, yang apabila lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi riil, akan menekan nilai PDRB per kapita.

Berdasarkan permasalahan diatas dapat disusun rencana tidak lanjut tahun berikutnya diantaranya peningkatan produktivitas sektor unggulan, penguatan hilirisasi komoditas pertanian, perluasan investasi, serta pengembangan sektor jasa dan industri berbasis potensi lokal.

Dengan strategi yang tepat pada tahun berikutnya diharapkan PDRB per kapita Kabupaten Solok dapat melampaui target dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

### 3. PENGELUARAN PERKAPITA

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

Pada Tahun 2025 Pengeluaran Perkapita Kabupaten Solok sebesar Rp. 16.194.432 ini artinya Kabupaten Solok memiliki tingkat kesejahteraan menengah yang distribusinya sangat merata di seluruh lapisan masyarakat, sehingga hampir tidak ada kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin

#### A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan RPJMD 2021-2026 pada Tahun 2025, target Pengeluaran Perkapita di Kabupaten Solok adalah Rp. 10.985.000 dapat dilihat pada Tabel 3.25.1 sebagai berikut:

**Tabel. 3.25.1**

#### Pengeluaran Perkapita Daerah

No	Indikator Kinerja	Target (Rp)
1	Pengeluaran Perkapita	10.985.000

#### B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Pengeluaran Perkapita Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel. 3.25.2 sebagai berikut:

**Tabel. 3.25.2**

#### Pengeluaran Perkapita Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pengeluaran Perkapita	10.985.000	16.194.432	147.42

Sumber: Solok Dalam Angka. 2025

Berdasarkan Tabel. 3.25.1 dapat dijelaskan bahwa Pencapaian indikator Pengeluaran Perkapita Kabupaten Solok Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan jauh melampaui target yang telah ditetapkan.

Capaian yang melampaui target secara signifikan ini mengindikasikan bahwa tingkat konsumsi masyarakat Kabupaten Solok mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Peningkatan pengeluaran per kapita umumnya mencerminkan meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat serta perbaikan tingkat kesejahteraan. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat berjalan cukup dinamis, terutama pada sektor-sektor yang berkaitan dengan perdagangan, jasa, serta konsumsi rumah tangga.

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi tingginya realisasi pengeluaran per kapita antara lain:

1. Meningkatnya pendapatan masyarakat, baik dari sektor pertanian, perdagangan, maupun jasa.
2. Pertumbuhan aktivitas ekonomi daerah yang mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga.
3. Kenaikan harga barang dan jasa (inflasi) yang turut meningkatkan nilai pengeluaran secara nominal.
4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan konsumsi pangan.

#### **4. PDRB SEKTOR PERTANIAN**

Menurut Badan Pusat Statistik. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. PDRB sektor pertanian mencakup segala perusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau dijual kepada pihak lain.

Menurut Badan Pusat Statistik. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. PDRB sektor pertanian mencakup segala perusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup)

yang hasilnya dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau dijual kepada pihak lain.

Pada tahun 2025 Nilai PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Solok sebesar Rp. 4.112.200 dengan laju pertumbuhan 3.13%, ini artinya Sektor pertanian di Kabupaten Solok berhasil menciptakan keadilan ekonomi (pemerataan) bagi masyarakat. Peningkatan produksi komoditi pertanian pada tahun 2025 naik 11.33% akan tetapi peningkatannya belum optimal karena belum seluruh komoditi mengalami peningkatan produksi. Untuk melihat perkembangan produksi komoditi pertanian pada tahun 2024-2025 dapat dilihat pada tabel dibawah:

**Tabel. 3.26.1**

**Perkembangan Produksi Komoditi Pertanian Tahun 2024-2025**

Komoditi		2025	2024	% Peningkatan 2025/2024
Padi sawah	Ton	210.788.07	165.693.70	27.22
Jagung	Ton	7.301.70	6.563.60	11.25
Ubi Kayu	Ton	12.489.00	10.019.55	24.65
Ubi Jalar	Ton	46.942.90	42.620.48	10.14
Kacang Tanah	Ton	547	294.176	85.94
Talas	Ton	1.968.50	701.5	180.61
Bawang Daun	Ton	13.779.70	13.595.00	1.36
Bawang Merah	Ton	218.861.65	214.306.24	2.13
Bawang Putih	Ton	598.97	867.85	-30.98
B a y a m	Ton	634	562.53	12.71
B u n c i s	Ton	22.076.77	17.038.80	29.57
C a b e keriting	Ton	46.189.15	36.332.47	27.13
Cabe Rawit	Ton	6.179.31	5.208.54	18.64
Jamur	Kw	336.9	370.9	-9.17
Kacang Panjang	Ton	926.75	922.48	0.46

Komoditi		2025	2024	% Peningkatan 2025/2024
Kangkung	Ton	539.4	567.54	-4.96
Kentang	Ton	25.632.10	16.161.05	58.60
K e t i m u n	Ton	933.8	728.46	28.19
Kubis	Ton	243.224.70	232.922.60	4.42
Labu siam	Ton	2.602.55	2.308.57	12.73
Petsai/sawi	Ton	4.291.55	3.843.10	11.67
Semangka	Ton	3.9	2.45	59.18
Stroberi	Ton	63.36	40.7	55.68
Terung	Ton	8.703.45	7.886.32	10.36
Tomat	Ton	60.729.00	49.525.50	22.62
Wortel	Ton	18.235.40	17.727.55	2.86
Alpokar	Ton	54.349.14	56.073.94	-3.08
Apel	Ton	1.97	1.93	2.07
Belimbing	Ton	7.12	15.76	-54.82
Duku	Ton	37.06	17.8	108.20
Durian	Ton	6.997.50	4.859.61	43.99
Jambu Air	Ton	139.16	164.18	-15.24
Jambu Biji	Ton	500.13	579.307	-13.67
Jengkol	Ton	675.15	817.47	-17.41
Jeruk siam/keprok /	Ton	1.504.63	1.770.10	-15.00
Mangga	Ton	505.27	662.28	-23.71
Manggis	Ton	1.941.38	1.283.56	51.25
Melinjo	Ton	19.61	29.07	-32.53

Komoditi		2025	2024	% Peningkatan 2025/2024
Nangka	Ton	618.48	633.39	-2.35
Nenas	Ton	1.69	2.08	-18.55
Pepaya	Ton	2.210.60	2.209.60	0.05
Pisang	Ton	6.661.42	7.985.83	-16.58
Rambutan	Ton	2547.03	991.7	156.83
Salak	Ton	1.1	30.2	-96.36
Sawo	Ton	631.67	875.15	-27.82
Sirsak	Ton	572.45	664.65	-13.87
Sukun	Ton	61.93	55.90	10.79
Buah naga	Ton	3.152.26	2.594.03	21.52
Lengkeng	Ton	59.4	28.09	111.46
Jahe	Ton	482.72	646.52	-25.34
Laos	Ton	683.07	865.12	-21.04
Kunyit	Ton	590.23	831.19	-28.99
Kapulaga	Ton	349.84	349.81	0.01
Jeruk Nipis	Ton	26.81	21.47	24.87
Kelapa	Ton	3.307.25	3.306.35	0.03
Karet	Ton	4.587.55	3.376.50	35.87
Kopi Arabika	Ton	2127.45	2121.70	0.27
Kopi Robusta	Ton	5.910.80	5.716.60	3.40
Cengkeh	Ton	1.411.76	1.568.34	-9.98
Kulit Manis	Ton	2.155.65	1.742.85	23.69
Tebu	Ton	223.68	340.00	-34.21
Cokelat	Ton	3.316.47	3.682.05	-9.93

Komoditi		2025	2024	% Peningkatan 2025/2024
Pala	Ton	6.5	14.83	-56.17
Enau	Ton		78.57	-100.00
Kemiri	Ton	1.056.00	1.274.75	-17.16
Teh	Ton	1051.2	980.08	7.26
Kapuk	Ton	49.59	186.54	-73.42
Pinang	Ton		399.75	-100.00
Daging Sapi	Ton	1.596.40	1.401.81	13.88
Daging Kerbau	Ton	18.77	9.75	92.42
Daging Kambing	Ton	52.94	43.40	21.99
Daging Ayam Buras	Ton	269.503	322.626	-16.47
Daging Ras Pedaging	Ton	4014.363	3800.516	5.63
Daging Ras Petelur	Ton	58.874	32.801	79.49
Daging Itik	Ton	81.38	69.91	16.40
Telur Ayam Ras	Ton	411.675	247.093	66.61
Telur Ayam Buras	Ton	91.876	106.032	-13.35
Telur Itik	Ton	759.81	634.83	19.69
<b>Total</b>		<b>1.072.467.88</b>	<b>963.329.04</b>	<b>11.33</b>

A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan RPJMD 2021-2026 pada Tahun 2025, target PDRB Sektor pertanian Kabupaten Solok adalah Rp. 3.934.383 dapat dilihat pada Tabel 3.8.1 sebagai berikut:

**Tabel. 3.26.2**

### PDRB Sektor pertanian Daerah

No	Indikator Kinerja	Target (Rp)
1	PDRB Sektor pertanian	3.934.383

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator PDRB Sektor pertanian Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel. 3.26.3 sebagai berikut:

**Tabel. 3.26.3**

### PDRB Sektor pertanian Daerah

No	Indikator Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	PDRB Sektor pertanian	3.934.383	4.112.200	104,52

Sumber: Kabuapten Solok Dalam Angka 2026

Berdasarkan Tabel. 3.26.3 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025 tercapai, pada Tahun 2025 target PDRB Sektor Pertanian sebesar Rp. 3.934.383 dan terealisasi sebesar Rp. 4.112.200 dengan capaian kinerja sebesar 104.52%.

Tercapainya target kinerja PDRB Sektor pertanian karena naiknya produksi pertanian tahun 2025 yang didukung oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut:

- a. Adanya sumber daya manusia baik petugas maupun petani yang mendukung peningkatan produksi komoditi pertanian.
- b. Sumber daya alam yang mendukung pertanian di Kabupaten Solok.
- c. Sinergi yang baik antar bidang, BPP dan UPT Puskesmas maupun dengan instansi eksternal untuk mendukung pembangunan pertanian.
- d. Ketersediaan unit kerja sampai ke wilayah kecamatan
- e. Adanya kerjasama dengan stakeholder yang bertujuan untuk memperluas pemasaran produk pertanian

## 5. PERSENTASE PENINGKATAN PENDAPATAN PADA USAHA MIKRO DAN KECIL

Pengertian indikator untuk persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil adalah Nilai omset Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Solok di Tahun 2025 di bandingkan dengan nilai omset UMKM Tahun 2024.

Kondisi pada pendapatan UMKM di Kabupaten Solok Tahun 2025 terdapat peningkatan sebesar 4,7% atau sebesar Rp. 1.172.457.442.000.

A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan RPJMD 2021-2026 target pada Tahun 2025. target Persentase peningkatan pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Solok adalah 4.5% dapat dilihat pada Tabel 3.27.1 sebagai berikut:

**Tabel. 3.27.1**

**Persentase peningkatan pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil Daerah**

No	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Persentase peningkatan pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil	4,5

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Persentase peningkatan pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel. 3. 27.2 sebagai berikut:

**Tabel. 3.27.2**

**Persentase peningkatan pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil Daerah**

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase peningkatan pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil	4,5	4,7	104,4

Sumber: Dinas KUKMPP Kabupaten Solok Tahun 2025

Berdasarkan Tabel. 3.27.2 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025 tercapai/tidak tercapai pada Tahun 2025 target Persentase peningkatan pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil sebesar 4.5% dan terealisasi sebesar 4.7% dengan capaian kinerja sebesar 104.4%.

Tercapainya target kinerja Persentase peningkatan pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil didukung oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Ketahanan Terhadap Krisis Ekonomi : UMKM cenderung berbasis pada asset ekonomi lokal dan tidak bergantung pada impor, sehingga lebih tangguh saat terjadi krisis.
2. Pemanfaatan Bahan Baku Lokal : Banyak UMKM menggunakan bahan baku domestik, yang menciptakan rantai pasok lokal dan meningkatkan perputaran uang di daerah.

3. Fleksibilitas dan Inovasi : UMKM lebih cepat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pasar lokal dibandingkan perusahaan besar.
4. Peran Pemerintah dan Akses Digital : Program pemerintah yang mendorong UMKM naik kelas, serta adopsi teknologi (digitalisasi/e-commerce) membantu perluasan pasar dan meningkatkan efisiensi.
5. Pemberdayaan Ekonomi Lokal : UMKM mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan meningkatkan permintaan akan bahan baku dan produk/jasa lokal.

## 6. PDRB SEKTOR PERDAGANGAN

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi.

Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi. akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor perdagangan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan aktivitas ekonomi pada sektor perdagangan di suatu daerah. Sektor ini memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa, meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Perkembangan sektor perdagangan di Kabupaten Solok dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain aktivitas perdagangan di pasar rakyat, perkembangan usaha perdagangan skala mikro, kecil, dan menengah, serta kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting. Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam penguatan sarana distribusi perdagangan, pengendalian harga barang kebutuhan pokok, serta promosi produk unggulan daerah turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan sektor perdagangan.

Pada Tahun 2025 PDRB sektor perdagangan Kabupaten Solok sebesar Rp. 1.294.350 artinya sektor perdagangan Kabupaten Solok merupakan **penopang ekonomi yang stabil**. Sektor ini berhasil menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara merata, meskipun kecepatannya masih bersifat moderat dibandingkan sektor industri di kota-kota besar.

A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan RPJMD 2021-2026 pada Tahun 2025. target PDRB sektor perdagangan Kabupaten Solok adalah Rp. 1.327.491 dapat dilihat pada Tabel 3.28.1 sebagai berikut:

**Tabel. 3.28.1**

**PDRB sektor perdagangan Daerah**

No	Indikator Kinerja	Target (Rp)
1	PDRB sektor perdagangan	1.327.491

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator PDRB sektor perdagangan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel. 3.28.1 sebagai berikut:

**Tabel. 3.28.2**

**PDRB sektor perdagangan Daerah**

No	Indikator Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	PDRB sektor perdagangan	1.327.491	1.417.260	106,76

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka 2024

Berdasarkan Tabel. 3.28.2 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025 tercapai, pada Tahun 2025 target PDRB sektor perdagangan sebesar Rp. 1.327.491 dan terealisasi sebesar Rp. 1.417.260 dengan capaian kinerja sebesar 106,76%.

Terwujudnya pencapaian kinerja PDRB sektor perdagangan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan Perdagangan antar daerah: Jumlah antar daerah yang tinggi berpengaruh signifikan positif terhadap PDRB sektor perdagangan, Kemitraan dalam negeri membantu meningkatkan pendapatan.
2. Pertumbuhan Jumlah Perusahaan/UMKM: banyaknya perusahaan, perdagangan besar, maupun eceran (pasar tradisional/swalayan) yang beroperasi meningkatkan aktivitas ekonomi daerah.
3. Peningkatan Daya Beli dan Konsumsi Rumah Tangga : Jumlah penduduk yang besar dan daya beli masyarakat yang meningkat akan menaikkan volume perdagangan eceran.

4. Infrastruktur Transportasi dan Pergudangan : Jaringan transportasi, jalan, dan sarana pergudangan yang memadai mempermudah distribusi barang, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan efisiensi sektor perdagangan.
5. Kemajuan Teknologi dan E-commerce : Penggunaan teknologi digital dalam perdagangan mempercepat transaksi dan memperluas jangkauan pasar.
6. Konektivitas dan Aksesibilitas : Lokasi yang strategis memudahkan aksesibilitas perdagangan antar wilayah

## 7. KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar sektor pariwisata berkontribusi terhadap perekonomian suatu daerah atau negara.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sebesar 1,4% dengan pertumbuhan ekonomi 3,1% di Kabupaten Solok pada tahun 2025 menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor pendukung yang sedang berkembang, namun belum menjadi penggerak utama ekonomi.

### A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan RPJMD 2021-2026 pada Tahun 2025. target sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Solok adalah 0,95% dapat dilihat pada Tabel 3.29.1 sebagai berikut:

**Tabel. 3.29.1**

#### Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Daerah

No	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0.95

### B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel. 3.29.2 sebagai berikut:

**Tabel. 3.29.2**

#### Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Daerah

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
----	-------------------	------------	---------------	-------------

1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,95	1,04	109,47
---	--	------	------	--------

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka 2026

Berdasarkan Tabel. 3.29.2 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025 tercapai, pada Tahun 2025 target Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sebesar 0.95% dan terealisasi sebesar 1,04% dengan capaian kinerja sebesar 109,47%.

Faktor yang mendorong tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya mobilitas wisatawan nusantara. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi wisata di daerah yang berdampak langsung terhadap meningkatnya tingkat hunian hotel, homestay, serta konsumsi pada usaha restoran dan rumah makan.
- b. Pengembangan destinasi wisata dan event daerah. Pemerintah daerah secara aktif menyelenggarakan berbagai event pariwisata, festival budaya, serta promosi destinasi wisata yang mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung dan tinggal lebih lama di daerah.
- c. Pertumbuhan usaha pariwisata skala kecil dan menengah. Munculnya usaha baru seperti homestay, kafe, rumah makan, serta usaha kuliner lokal turut memperluas aktivitas ekonomi pada subsektor penyediaan akomodasi dan makan minum.
- d. Sinergi program pengembangan pariwisata dengan sektor ekonomi kreatif. Kolaborasi antara pelaku pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif memberikan multiplier effect terhadap peningkatan belanja wisatawan pada sektor kuliner dan jasa akomodasi.
- e. Meningkatnya promosi digital pariwisata daerah. Pemanfaatan media sosial, platform digital, dan promosi daring turut memperluas jangkauan informasi destinasi wisata sehingga mendorong peningkatan kunjungan wisatawan.

## 8. INDEKS PROFESIONALITAS ASN

Pengertian Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menerangkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan, Indeks Profesionalitas ASN bertujuan untuk memberikan standar bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

**Tabel. 3.30.1**

**Kategori tingkat profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai**

No	RENTANG NILAI	KATEGORI
1	91-100	Sangat Tinggi
2	81-90	Tinggi
3	71-80	Sedang
4	61-70	Rendah
5	60 ke bawah	Sangat Rendah

Sesuai dengan Surat BKN Nomor 15014/B.BM.02.01/SD.C.VII/2025 tanggal 24 Oktober 2025 tentang Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN dinyatakan bahwa BKN tidak lagi melaksanakan pengukuran IP ASN dalam rangka percepatan pembangunan Manajemen Talenta Instansi Pemerintah, untuk itu akan digunakan indikator serupa dengan pengukuran IP ASN dan mendukung pengintergrasian indeks dalam penyelenggaraan manajemen ASN (Indeks Sistem merit). Oleh karena itu disarankan agar instansi menyesuaikan kembali indikatornya/ dirubah indikator yang terdapat di dalam Renstra Instansi.

Nilai IP ASN Kabupaten Solok tahun 2025 adalah 80,54 dengan kategori sedang dan berimbang namun masih perlu dilakukan usaha untuk perbaikan dimasa yang akan datang agar nilai IP ASN Kabupaten Solok bisa mencapai kategori tinggi dengan rentang nilai (81-90).

A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan RPJMD 2021-2026 pada Tahun 2025. target Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Solok adalah 71 dapat dilihat pada Tabel 3.30.1 sebagai berikut:

**Tabel. 3.30.1**

**Indeks Profesionalitas ASN Daerah**

No	Indikator Kinerja	Target
1	Indeks Profesionalitas ASN	71

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel. 3.30.2 sebagai berikut:

**Tabel. 3.30.2**

**Indeks Profesionalitas ASN Daerah**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Profesionalitas ASN	71	80,54	113,44

Sumber: Surat BKN Nomor: 1001/B.BM.02.01/SD/C.VII/20026 tentang Penyampaian Nilai IP ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok

Berdasarkan Tabel. 3.30.2 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025 tercapai, pada Tahun 2025 target Indeks Profesionalitas ASN sebesar 71 dan terealisasi sebesar 80,54 dengan capaian kinerja sebesar 113,44%.

Adapun faktor yang mendorong tercapaian target kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan sehingga memungkinkan pengembangan kompetensi secara berkesinambungan untuk ASN di Kabupaten Solok.
- b. Campaign update data mandiri ASN melalui ASN Digital BKN melalui Sosialisasi Penerapan Multi-Faktor Authentication (MFA), Pemanfaatan Fitur SIMPEG dan ASN Digital serta Rekonsiliasi Data SIMPEG–SIASN BKN.
- c. Pelayanan e-Kinerja yang intensif untuk memfasilitasi ASN dalam penyusunan SKP, penilaian kinerja dan sinkronisasi e-kinerja.
- d. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Nomor 3 Tahun 2025 mengatur tentang Penjelasan Terkait Layanan Pencantuman Gelar Aparatur Sipil Negara (ASN).
- e. Adanya kebijakan Internal seperti Perbub TPP dan Perbub Kode Etik yang mendukung perolehan nilai dimensi disiplin. Hal ini didukung dengan

penerapan absensi mobile serasi yang merupakan aplikasi yang terintegrasikan dengan e-kinerja pada ASN Digital.

## 9. LEVEL MATURITAS SPIP

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan, Maturitas yang rendah mencerminkan kemungkinan yang lebih rendah dalam mencapai tujuan, sedangkan tingkat maturitas yang lebih tinggi mencerminkan kemungkinan keberhasilan yang lebih tinggi. Nilai Maturitas SPIP didapatkan berdasarkan Quality Assurance yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia.

Berdasarkan release terakhir yang dikeluarkan oleh BPKP melalui surat Nomor PE.09.03/LHP-471/PW03/3/2025 tanggal 23 Desember 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Solok sudah berada pada level 2 dengan skor 2.741.

### A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan RPJMD 2021-2026 pada Tahun 2025. target Level Maturitas SPIP Kabupaten Solok adalah Level 4 dapat dilihat pada Tabel 3.31.1 sebagai berikut:

**Tabel. 3.31.1**

#### Level Maturitas SPIP Daerah

No	Indikator Kinerja	Target
1	Level Maturitas SPIP	4

### B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Level Maturitas SPIP Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel. 3.31.2 sebagai berikut:

**Tabel. 3.31.2**

#### Level Maturitas SPIP Daerah

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Level Maturitas SPIP	4	2	50

Sumber: BPKP

Berdasarkan tabel 3.31.2 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025 tidak tercapai, pada Tahun 2025 target Level Maturitas SPIP pada Level 4 dan realisasi masih pada Level 2. Sehingga capaian kinerja 50%.

Level Maturitas SPIP sebelumnya telah mencapai level 3 untuk beberapa tahun belakangan, penilaian tahun 2025 terjadi peningkatan standar kualitas penilaian oleh BPKP sehingga terdapat beberapa catatan penilaian yang perlu menjadi perhatian diantaranya:

1. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Perlu melaksanakan reviu dan perbaikan atas dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas konstruksi perencanaan oleh Perangkat Daerah.
2. Inspektorat Daerah Perlu melaksanakan penilaian efektivitas pengendalian Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang telah dibangun.
3. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok untuk meningkatkan penerapan SPIP dan manajemen risiko melalui penguatan komitmen pimpinan, pengukuran efektivitas pengendalian intern, serta peningkatan koordinasi dan monitoring antar OPD

## **10. NILAI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)**

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.

Hasil evaluasi atas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Solok pada Tahun 2025 sebesar 3,71 dengan predikat “sangat baik”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) “sangat baik”, yaitu implementasi SPBE sudah baik pada pemerintah daerah, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan komitmen dengan perangkat daerah.

### **A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja**

Berdasarkan RPJMD 2021-2026 pada Tahun 2025. target Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Solok adalah 3,2 dapat dilihat pada Tabel 3.32.1 sebagai berikut:

**Tabel. 3.32.1**

### **Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Daerah**

No	Indikator Kinerja	Target
1	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,2

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel. 3.32.2 sebagai berikut:

**Tabel. 3.32.2**

**Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Daerah**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,2	3,71	115,94

Sumber: Keputusan Kementerian PAN dan RB No. 13 Tahun 2025.

Kinerja pada Tahun 2025 tercapai, pada Tahun 2025 target Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 3,2 dan terealisasi sebesar 3,17 dengan capaian kinerja sebesar 115,94%.

Terwujudnya pencapaian kinerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut:

1. Semua tata kelola layanan publik dan administrasi (aplikasi) pada indikator SPBE telah sesuai dengan kriteria dan acuan pada pedoman SPBE, dalam pelaksanaan layanan Publik dan Administrasi secara elektronik telah dilengkapi dengan regulasi dan proses manajemen SPBE
2. Kegiatan SPBE di Kabupaten Solok telah dilakukan Audit Aplikasi dan Audit Infrastruktur SPBE
3. Pelaksanaan SPBE di Kabupaten Solok juga telah didukung dengan regulasi dan penetapan Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Solok

**11. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya

Formulasi penghitungan IKM sebagai berikut:

$$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}}$$

Hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025, Kabupaten Solok memperoleh nilai indeks sebesar 3,57. Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara umum kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah penyelenggara pelayanan di Kabupaten Solok berada pada kategori baik. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar masyarakat sebagai pengguna layanan telah merasakan pelayanan yang cukup memuaskan, baik dari segi prosedur pelayanan, kompetensi petugas, sikap petugas, maupun sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan RPJMD 2021-2026 pada Tahun 2025, target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Solok adalah 3,60 dapat dilihat pada Tabel 3.33.1 sebagai berikut:

**Tabel. 3.33.1**

**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah**

No	Indikator Kinerja	Target
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,60

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel. 3.33.2 sebagai berikut:

**Tabel. 3.33.2**

**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,60	3,57	99,17

Sumber: Pemerintah Kab. Solok

Berdasarkan Tabel. 3.33.2 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025 tidak tercapai, pada Tahun 2025 target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 3.60 dan terealisasi sebesar 3.57 dengan capaian kinerja sebesar 99.58%.

Meskipun capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan publik yang diberikan secara umum telah memenuhi harapan masyarakat. capaian tersebut belum

sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan sebesar 3,60, sehingga terdapat kesenjangan sebesar 0,03 poin.

Beberapa faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target SKM antara lain:

1. Waktu penyelesaian layanan yang belum konsisten optimal. sehingga sebagian masyarakat masih merasakan proses pelayanan cukup lama dan memerlukan langkah tambahan.
2. Kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik yang belum merata, khususnya fasilitas yang mendukung akses bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan anak-anak.
3. Mekanisme pengaduan dan penanganan keluhan masyarakat yang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik di Perangkat Daerah.
4. Kurang jelasnya informasi persyaratan dan prosedur layanan yang ditampilkan di ruang layanan.
5. Kapasitas aparatur dan budaya pelayanan prima yang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal sikap, komunikasi, dan pemahaman prosedur pelayanan.

## **12. INDEKS INOVASI DAERAH**

Pengertian Inovasi Daerah adalah Himpunan Inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah bentuk pembaharuan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintah daerah pada setiap tingkatannya.

Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah. Data Indeks Inovasi Daerah merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun.

Penilaian Indeks Government Award (IGA) Kabupaten Solok untuk Tahun 2025 mendapatkan skor 49,61 dengan predikat Inovatif, ini menunjukkan bahwa Kabupaten Solok adalah daerah yang aktif berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, meskipun masih memiliki ruang untuk meningkatkan kualitas inovasi tersebut agar bisa masuk ke jajaran daerah.

- A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan RPJMD 2021-2026 pada Tahun 2025. target Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Solok adalah 68 dapat dilihat pada Tabel 3.34.1 sebagai berikut:

**Tabel. 3.34.1**

**Indeks Inovasi Daerah Daerah**

No	Indikator Kinerja	Target (Indeks)
1	Indeks Inovasi Daerah	68

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel. 3.34.2 sebagai berikut:

**Tabel. 3.34.2**

**Indeks Inovasi Daerah Daerah**

No	Indikator Kinerja	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	Capaian (%)
1	Indeks Inovasi Daerah	68	49,61	73

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:400.10.11-6287

Berdasarkan Tabel. 3.34.2 dapat dilihat capaian kinerja indikator Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025 menunjukkan bahwa kinerja inovasi daerah masih belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Beberapa faktor penghambat yang memengaruhi belum optimalnya capaian Indeks Inovasi Daerah antara lain:

1. Belum meratanya budaya inovasi di seluruh perangkat daerah, sehingga pengembangan dan implementasi inovasi masih terbatas pada beberapa instansi tertentu.
2. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam pengembangan ide, pengelolaan inovasi, serta penyusunan dokumentasi inovasi yang sesuai dengan standar penilaian.
3. Belum optimalnya sistem pengelolaan dan pelaporan inovasi daerah, sehingga inovasi yang telah dilakukan belum seluruhnya terinventarisasi dan dilaporkan secara baik dalam sistem penilaian inovasi daerah.

4. Terbatasnya dukungan anggaran dan pemanfaatan teknologi, yang memengaruhi keberlanjutan dan pengembangan inovasi di berbagai sektor pelayanan publik.

Dengan mempertimbangkan capaian tahun 2025 sebesar 73%, diperlukan upaya peningkatan yang lebih sistematis dalam pengembangan inovasi daerah, antara lain melalui penguatan kapasitas SDM, peningkatan koordinasi antar perangkat daerah, penguatan sistem dokumentasi dan pelaporan inovasi, serta pemberian apresiasi terhadap perangkat daerah yang berhasil mengembangkan inovasi. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Solok dapat meningkat secara signifikan pada tahun-tahun mendatang serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.

### 13. ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa suburnya (umur 15 Th- 49 Th) per 1000 wanita.

Total Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa suburnya (umur 15 Th- 49 Th) per 1000 wanita.

Untuk mendapatkan TFR terlebih dahulu diketahui ASFR (Age Spesific Fertility Rate) atau angka kelahiran menurut kelompok umur yaitu banyak kelahiran setiap seribu wanita pada kelompok umur tertentu seperti daftar dibawah ini.

**Tabel. 3.35.1**

#### **ASFR (AGE SPECIPIK FERTILITY RATE ) TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>Kelompok Umur Wanita</b>	<b>Jumlah Wanita</b>	<b>Jumlah Kelahiran</b>	<b>ASFR</b>
1	15–19	17.920	141	7.9
2	20–24	18.501	1235	66.75
3	25–29	15.788	1751	110.90
4	30–34	13.159	1226	93.17
5	35–39	13.873	587	42.31
6	40–44	14.348	174	12.13
7	45–49	13.520	8	0.59

	<b>Total</b>	<b>107.109</b>	<b>5122</b>	<b>333.75</b>
--	--------------	----------------	-------------	---------------

Sumber: data DPPKB&P3A. Disduk Capil dan Dinas Kesehatan Kab. Solok

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat pencapaian target Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2025 di Kabupaten Solok 1,68% menunjukkan bahwa Kabupaten Solok sedang menuju fase **transisi demografi**, di mana pertumbuhan penduduk mulai melambat karena keluarga lebih mengutamakan **kualitas anak** daripada jumlah.

A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan RPJMD 2021-2026 pada Tahun 2025. target Angka Kelahiran Total (TFR) Kabupaten Solok adalah 2,39 dapat dilihat pada Tabel 3.35.1 sebagai berikut:

**Tabel. 3.35.2**

**Angka Kelahiran Total (TFR) Daerah**

No	Indikator Kinerja	Target (Rasio)
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,39

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Angka Kelahiran Total (TFR) Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel. 3.35.3 sebagai berikut:

**Tabel. 3.35.3**

**Angka Kelahiran Total (TFR) Daerah**

No	Indikator Kinerja	Target (Rasio)	Realisasi (Rasio)	Capaian (%)
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,39	1,68	129,71

Sumber: DPPKB&P3A. Disduk Capil dan Dinas Kesehatan Kab. Solok

Berdasarkan Tabel. 3.25.3 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025 tercapai pada Tahun 2025 target Angka Kelahiran Total (TFR) pada rasio 2,35 dan terealisasi pada rasio 1,68 dengan capaian kinerja sebesar,128,5%. Adapun faktor pendorong tercapainya target dari TFR di Kabupaten Solok diantaranya sebagai berikut:

1. Penggunaan akses Keluarga Berencana di Kabupaten Solok dan penggunaan kontrasepsi yang efektif dapat mengurangi angka kelahiran.

2. Pemahaman PUS tentang ber KB cukup baik, peningkatan pendidikan perempuan dapat meningkatkan kesadaran dan penggunaan Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur di Kabupaten meningkat.
3. Ketersediaan layanan kesehatan yang memadai dan terjangkau dapat membantu meningkatkan akses Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
4. Dengan melakukan KIE (Komunikasi.Informasi dan Edukasi ) di tingkat Nagari dan Jorong kepada Kader yang telah dilakukan oleh Penyuluh Keluarga Berencana setiap bulannya di setiap kecamatan dalam Kabupaten Solok.
5. Adanya Kerja sama antara pemerintah, masyarakat dan organisasi terkait peningkatan akses pelayanan Keluarga Berencana.

#### 14. INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

Tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender dapat diukur salah satunya adalah dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah Rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan terhadap IPM laki –laki. IPG suatu ukuran komposit yang mencerminkan perbedaan dalam prestasi pembangunan manusia dalam mengungkapkan kesetaraan pencapaian antara perempuan dan laki-laki. dengan komponen pengukurnya sama dengan pengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu kesehatan. pendidikan. dan standar hidup layak/ekonomi.

IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender, Indeks ini dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, Nilai IPG Berkisar antara 0-100 persen, semakin tinggi angka IPG atau mendekati 100 dapat dikatakan semakin mendekati kesetaraan atau semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki laki dan perempuan dan apabila IPG diatas 100 mengindikasikan bahwa capaian pembangunan perempuan diatas laki-laki.

Indeks Pembangunan Gender dapat diukur dengan formulasi komponen pembentuknya yaitu dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

**Tabel. 3.36.1**

#### **Indikator Pengukur Indeks Pembangunan Gender Tahun 2025**

No.	Indikator	Perhitungan Berdasarkan Jenis Kelamin
-----	-----------	---------------------------------------

		P	L
1.	Angka Harapan Hidup	74,58	70,56
2.	Rata Rata Lama Sekolah	7,91	7,94
3.	Harapan Lama Sekolah	14,61	12,91
4.	Pengeluaran Perkapita disesuaikan	10,533	15,292

Sumber data: Dinas Kesehatan. Dinas Pendidikan. Dinas Pertanian

Berdasarkan data diatas didapatkan dapat dilihat Angka Harapan Hidup Perempuan tahun 2025 sebesar 74,58 sedangkan laki-laki sebesar 76,56, ini menunjukkan Harapan Hidup laki-laki lebih tinggi dari pada AHH perempuan.

Angka Harapan Lama Sekolah perempuan tahun 2025 sebesar 14,61 sedangkan laki-laki sebesar 12,91, ini menunjukkan Harapan Lama Sekolah perempuan lebih tinggi dari pada HLS laki-laki.

Rata-rata Lama Sekolah perempuan tahun 2025 sebesar 7.91 sedangkan laki-laki sebesar 7.94 Data menunjukkan Rata-rata lama Sekolah Perempuan lebih rendah daripada Rata-rata Lama Sekolah laki-laki.

Pengeluaran Perkapita disesuaikan

Pengeluaran Perkapita perempuan tahun 2025 sebesar 10.533 sedangkan laki-laki 15.292. Data menunjukkan Pengeluaran Perkapita Perempuan lebih rendah daripada Pengeluaran Perkapita laki-laki.

**Tabel. 3.36.2**

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Solok Tahun 2025**

No	Wilayah	Jenis Kelamin	
		Perempuan	Laki-Laki
1	IPM Kab. Solok	70,98	74,02

Sumber: Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan (70.98) masih lebih rendah dibandingkan dengan IPM laki-laki (73.77). Artinya masih terjadi ketimpangan pembangunan gender di Kabupaten Solok meskipun tidak terlalu signifikan.

Angka IPG (Indeks Pembangunan Gender) sebesar 96,22 untuk Kabupaten Solok menunjukkan tingkat kesetaraan yang sangat tinggi antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan

A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan RPJMD 2021-2026 pada Tahun 2025. target Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Solok adalah 96,67 dapat dilihat pada Tabel 3.36.1 sebagai berikut:

**Tabel. 3.36.3**

**Indeks Pembangunan Gender Daerah**

No	Indikator Kinerja	Target (Indeks)
1	Indeks Pembangunan Gender	96,67

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Indeks Pembangunan Gender Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel. 3.36.4 sebagai berikut:

**Tabel. 3.36.4**

**Indeks Pembangunan Gender Daerah**

No	Indikator Kinerja	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	Capaian (%)
1	Indeks Pembangunan Gender	96,67	96,22	99,53

Sumber: Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.36.4 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025 tidak tercapai, pada Tahun 2025 target Indeks Pembangunan Gender sebesar 96,67 dan terealisasi sebesar 96,22 dengan capaian kinerja sebesar 99,53%.

Tidak tercapainya kinerja Indeks Pembangunan Gender disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut:

- a. Belum sinergi Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dilakukan pada PD.

- b. Belum sinerginya organisasi wanita di Kabupaten Solok dan kesadaran untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan kegiatan yang melibatkan organisasi perempuan.
- c. Masih kurangnya pelatihan peningkatan keterampilan terhadap perempuan dalam pengembangan industri rumahan sebagai upaya dalam meningkatkan perekonomian perempuan serta rendahnya kesadaran dan kepedulian serta kepekaan perempuan dalam peningkatan pendapatan ekonomi keluarga.
- d. Kurangnya kesadaran dan Edukasi tentang pentingnya kesetaraan gender dapat menghambat peningkatan IPG.
- e. Kurangnya partisipasi perempuan dalam politik. Partisipasi perempuan dalam politik masih rendah sehingga membatasi kesempatan perempuan untuk mempengaruhi kebijakan publik.

## **BAB III**

### **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

#### **1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan**

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Solok, maka pemerintah pusat mengalokasikan anggaran Tugas Pembantuan (APBN/TP) untuk Kabupaten Solok melalui Dinas Pertanian. Program pembangunan pertanian di Kabupaten Solok Tahun 2025, diprioritaskan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok serta sesuai dengan misi Bupati dan Wakil Bupati Solok Periode 2025-2029 yaitu Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi dan Sumber Daya Nagari.

Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target pembangunan pertanian maka ditetapkan program yang berkelanjutan untuk mendukung kebijakan percepatan pemulihan ekonomi dan peningkatan produktifitas melalui pengembangan ekonomi kerakyatan, penguatan unit-unit usaha yang difokuskan dengan mengakomodir ikon-ikon sebagai produk unggulan dibidang pertanian.

Pada Tahun 2025 Dinas Pertanian melaksanakan 2 Program Kementerian Pertanian yang anggarannya berasal dari APBN Tugas Pembantuan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Satuan Kerja 08 Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian dan Satuan Kerja 08 Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian. Adapun dasar hukum program tugas pembantuan tersebut sebagai berikut:

- a. Satker 08 Ditjen PSP Dasar Hukum SP DIPA Nomor: SP DIPA 018.08.089137 / 2025 tanggal 18 Juli 2025;
- b. Satker 13 Ditjen PSP Dasar Hukum SP DIPA Nomor: SP DIPA 018.13.4.691327 / 2025 tanggal 18 Juli 2025.

#### **2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Solok**

Pada tahun 2025 program pusat kementerian pertanian melalui dana APBN / Tugas Pembantuan yang sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional yang mendukung peningkatan produksi sektor pangan, hortikultura, pekebunan dan peternakan, adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025, yaitu :

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
  - a. Kegiatan Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan (QW)
  - b. Kegiatan Fasilitas Pupuk dan Pestisida
  - c. Kegiatan Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida
2. Program Dukungan Manajemen
  - a. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
3. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

- a. Kegiatan Optimasi Lahan

### 3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

#### 3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan

Pada tahun 2025 Kabupaten Solok tidak mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten Solok.

#### 3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan

##### 3.2.1 Target Kinerja

Pada tahun 2025, Target Tugas Pembantuan Propinsi yang dilaksanakan Dinas Pertanian Kabupaten Solok terdapat pada 3 program. Adapun rincian target tugas pembantuan sebagai berikut:

1. Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (Satker 08)
  - a. Kegiatan Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan (QW)
    - Persiapan Monev, dan Pelaporan (QW Insentififikasi) 1 Paket
  - b. Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida
    - Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi 1 Laporan
  - c. Kegiatan Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida
    - Persiapan Monev, dan Pelaporan 1 Paket
2. Program Dukungan Manajemen
  - a. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
    - Layanan Dukungan Manajemen Internal (Base Line) 1 Tahun
3. Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (Satker 13)
  - a. Kegiatan Optimasi Lahan
    - Persiapan Optimasi Lahan dan Perbaikan Infrastruktur Optimasi Lahan 2005 Ha

##### 3.2.2 Realisasi

Realisasi anggaran dana Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian pada tahun 2025 sebagai berikut :

- a. Satker 08 Ditjen PSP

Pada satker 08 Ditjen PSP yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian mendapat anggaran sebesar **Rp. 225.880.000,-** dengan rincian realisasi sebagai berikut :

Pagu Anggaran : Rp. 225.880.000,-  
Realisasi Anggaran : Rp. 223.676.000- (99,02 %)

- b. Satker 13 Ditjen PSP

Pada satker 13 Ditjen PSP yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian mendapat anggaran sebesar **Rp. 11.238.671.000,-** dengan rincian realisasi sebagai berikut :

Pagu Anggaran : Rp. 11.238.671.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 11.234.713.749- (99,96 %)

### Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kab.Solok Tahun 2025

NO.	NOMOR DIPA	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN	PAGU	VOLUME	LOKASI	FISIK			KEUANGAN			SISA ANGGARAN	KET.
						Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	018.08.089137 / 2025 tanggal 18 Juli 2025	Kabupaten Solok	225.880.000						225.880.000	223.676.000	99,02	2.204.000	
		Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	200.880.000		Kabupaten Solok				200.880.000	198.736.000	98,93	2.144.000	Satuan Kerja Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat (08)
		Kegiatan Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan (QW)	15.000.000						15.000.000	14.560.000	97,07	440.000	
		Keluaran (Output)											
		Persiapan Monev, dan Pelaporan (QW Insentifkasi)	15.000.000	1 Paket	Kabupaten Solok	1 Paket	1 Paket	100,00	15.000.000	14.560.000	97,07	440.000	
		Kegiatan Fasilitas Pupuk dan Pestisida	156.680.000						156.680.000	155.326.000	99,14	1.354.000	
		Keluaran (Output)											
		Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi	156.680.000	1 Laporan	Kabupaten Solok	1 Laporan	1 Laporan	100,00	156.680.000	155.326.000	99,14	1.354.000	
		Kegiatan Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida	29.200.000						29.200.000	28.850.000	98,80	350.000	
		Keluaran (Output)											
		Persiapan Monev, dan Pelaporan	29.200.000	2 Paket	Kabupaten Solok	2 Paket	2 Paket	100,00	29.200.000	28.850.000	98,80	350.000	
		Program Dukungan Manajemen	25.000.000						25.000.000	24.940.000	99,76	60.000	
		Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	25.000.000						25.000.000	24.940.000	99,76	60.000	
		Keluaran (Output)											
		1. Layanan Dukungan Manajemen Internal (Base Line)	25.000.000	1 Tahun	Kabupaten Solok	1 Tahun	1 Tahun	100,00	25.000.000	24.940.000	99,76	60.000	
02	018.13.4.691327 / 2025 tanggal 18 Juli 2025	Kabupaten Solok	11.238.671.000						11.238.671.000	11.234.713.749	99,96	3.957.251	
		Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	11.238.671.000						11.238.671.000	11.234.713.749	99,96	3.957.251	Satuan Kerja Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat (13)
		Kegiatan Optimasi Lahan	11.238.671.000						11.238.671.000	11.234.713.749	99,96	3.957.251	
		Keluaran (Output)											
		Persiapan Optimasi Lahan	74.831.000	2005 Ha	Kabupaten Solok	2005 Ha	2005 Ha	100,00	74.831.000	74.745.749	99,89	85.251	
		Perbaikan Infrastruktur Optimasi Lahan	11.163.840.000	2005 Ha	Kabupaten Solok	2005 Ha	2005 Ha	100,00	11.163.840.000	11.159.968.000	99,97	3.872.000	
	<b>Total</b>		<b>11.464.551.000</b>						<b>11.464.551.000</b>	<b>11.458.389.749</b>	<b>99,95</b>	<b>6.161.251</b>	

### **3.3 Permasalahan dan Kendala**

Permasalahan dan kendala pada pelaksanaan program dan kegiatan Tugas Pembantuan adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM pengelola kegiatan Tugas Pembantuan, baik di tingkat kabupaten maupun pelaksana teknis di lapangan, berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan, administrasi, dan pelaporan kegiatan.
2. Faktor cuaca ekstrem, bencana alam, serta kondisi iklim yang tidak menentu berdampak pada keterlambatan atau perubahan pelaksanaan kegiatan, khususnya kegiatan yang bersifat fisik dan berbasis musim tanam.

### **3.4 Saran dan Tindak Lanjut**

Saran dan tindak lanjut pada pelaksanaan program dan kegiatan Tugas Pembantuan adalah sebagai berikut :

1. Diperlukan dukungan sarana, prasarana, dan logistik pendukung yang memadai agar pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan dapat berjalan efektif, khususnya pada daerah dengan keterbatasan akses dan infrastruktur.
2. Diperlukan percepatan proses administrasi penetapan dan penyaluran anggaran Tugas Pembantuan agar pelaksanaan kegiatan tidak terkendala oleh keterlambatan penyaluran anggaran.

## BAB IV

### PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### 4.1 Bidang Urusan Pendidikan

##### 4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang/ jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.

Jenis pelayanan dasar untuk daerah Kabupaten Solok pada urusan pendidikan sebagai berikut:

1. Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Pelayanan Pendidikan Dasar.
3. Pelayanan Pendidikan Kesetaraan.

##### 4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Untuk mencapai target pelayanan dasar SPM dibidang pendidikan di Kabupaten Solok, maka ditetapkan target indikator beserta batas waktu pencapaian SPM. Proses pengumpulan data setiap indikator dilakukan melalui:

1. Rekapitulasi jumlah peserta didik berdasarkan usia yang diperoleh dari Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) bagi sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Rekapitulasi jumlah peserta didik berdasarkan usia yang diperoleh dari Data EMIS Kemenag bagi sekolah-sekolah yang dinaungi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
3. Jumlah penduduk di usia tertentu diperoleh berdasarkan data hasil konsolidasi kependudukan dan atau Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Batas Waktu (Tahun)
I	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Masyarakat Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	2025
II	Pendidikan Dasar	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/Mts)	100%	2025
III	Pendidikan Kesetaraan	Persentase Warga Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Atau Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	100%	2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa setiap indikator pencapaian memiliki target 100% jumlah yang akan dilayani pada tahun 2025.

#### 4.1.3 Realisasi

Realisasi Dalam mutu pelayanan dasar daerah wajib menguraikan mengenai jenis layanan dasar yang harus dilakukan sesuai dengan wilayah kewenangan pemerintahan Kabupaten.

##### a. Hasil Capaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)

No	Jenis Layanan Dasar	Tahun 2025			
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian
1	Pendidikan Anak Usia Dini	1173	1173	0	100.00 %
2	Pendidikan Dasar	1043	1043	0	100.00 %
3	Pendidikan Kesetaraan	1402	1402	0	100.00 %

##### b. Hasil Capaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Barang			Total Pencapaian (%)	Ket
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
I	Pendidikan Anak Usia Dini					
1.	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	43	43	0	100.00 %	
2.	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	72	72	0	100.00 %	
II	Pendidikan Dasar					
	Sekolah Dasar					
1.	Kemampuan literasi	64.59	64.59	0	100.00 %	
2.	Kemampuan numerasi	49.95	49.95	0	100.00 %	
3.	Indeks iklim keamanan	77	77	0	100.00 %	
4.	Indeks iklim kebhinekaan	74	74	0	100.00 %	
5.	Indeks iklim inklusivitas	63	63	0	100.00 %	
	Sekolah Menengah Pertama					
1.	Kemampuan literasi	71	71	0	100.00 %	
2.	Kemampuan numerasi	69	69	0	100.00 %	
3.	Indeks iklim keamanan	71.4	71.4	0	100.00 %	

	4.	Indeks iklim kebhinekaan	69.4	69.4	0	100.00 %	
	5.	Indeks iklim inklusivitas	58.63	58.63	0	100.00 %	
III	Pendidikan Kesetaraan						
	1.	Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	50.7	46.45	4.2500	91.62 %	

Data tersebut diperoleh dari aplikasi e-spm bangda kemendagri yang menunjukkan bahwa Capaian Penerima dan Mutu Layanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Daerah Kab. Solok sudah maksimal, akan tetapi masih ada mutu layanan dasar yang masih ditutup karena pelaksanaan kegiatan belum maksimal.

#### 4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

No	Pendanaan	Pagu
1	Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Solok	1,321,543,449,296
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	493,097,666,990
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Satker PD	210,887,375,000
	APBD	210,887,375,000
	APBD Murni	1,000,000,000
	APBD DAU	456,700,000
	APBD DAK Fisik	2,326,204,000
	APBD DAK Non Fisik	207,104,471,000

#### 4.1.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, sebagai berikut:

1. 1 (satu) orang Kepala Disdikpora;
2. 1 (satu) orang Sekretaris Disdikpora;
3. 1 (satu) orang Kabid Pembinaan PAUD;
4. 1 (satu) orang Kabid Pembinaan SD;
5. 1 (satu) orang Kabid Pembinaan SMP;
6. 3 (satu) orang Kasi pada Bidang PAUD;
7. 3 (satu) orang Kasi pada Bidang SD;
8. 3 (satu) orang Kasi pada Bidang SMP;
9. 1 (satu) orang Kasubag Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

10. 1 (satu) orang Operator Bidang PAUD;
11. 1 (satu) orang Operator Bidang SD;
12. 1 (satu) orang Operator Bidang SMP;
13. 1 (satu) orang Operator di subbag Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Berdasarkan personil diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 19 orang yang terlibat aktif dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, serta pegawai lainnya yang juga turut membantu pencapaian SPM tersebut.

#### 4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Permasalahannya:

1. Adanya kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 sehingga tidak optimalnya pencapaian realisasi penerapan SPM;
2. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan tentang perundungan (bullying) terhadap warga sekolah belum konsisten;
3. Belum optimalnya Proses Pengawasan dan Supervisi di tingkat Satuan Pendidikan sehingga mempengaruhi pemerolehan skor Iklim Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas;
4. Masih rendahnya kualitas proses pembelajaran disekolah sehingga mempengaruhi pencapaian skor Literasi dan Numerasi di SD dan SMP;
5. Terdapat kesulitan pemerolehan data Anak Usia Sekolah yang bersekolah diluar wilayah Kabupaten Solok sehingga Pemenuhan Data Statistik belum Optimal.

## 4.2 Urusan Kesehatan

### 4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan dasar pada urusan kesehatan antara lain:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan	Penerima Layanan Dasar	Pernyataan Dasar
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Sesuai standar pelayanan antenatal	Ibu hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan	Ibu bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Sesuai standar pelayanan	Bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir usia

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan	Penerima Layanan Dasar	Pernyataan Dasar
		kesehatan bayi baru lahir		0-28 hari mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
4.	Pelayanan kesehatan balita	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita	Balita	Setiap balita 0-59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar	Anak pada usia pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun.	Setiap warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut	Warga Negara Indonesia usia $\geq 60$ tahun keatas	Setiap warga Negara Indonesia usia $\geq 60$ tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Penderita hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Penderita Diabetes Melitus	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
11.	Pelayanan kesehatan orang TB	Sesuai standar pelayanan kesehatan TB	Orang Terduga Tuberkulosis	Setiap orang Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan Tubu manusia (Virus HIV)	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, penggunaan apza, dan warga binaan lembaga masyarakat)	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, penggunaan apza, dan warga binaan lembaga masyarakat) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar

#### 4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	Satu Tahun
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	Satu Tahun
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %	Satu Tahun
4.	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100 %	Satu Tahun
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	Satu Tahun
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %	Satu Tahun
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %	Satu Tahun
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	Satu Tahun
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus	Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	Satu Tahun
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 %	Satu Tahun
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 %	Satu Tahun
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi Virus yang melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga permasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100 %	Satu Tahun

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa setiap indikator pencapaian memiliki target 100% jumlah yang akan dilayani pada tahun 2025.

#### 4.2.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

- a. Hasil Capaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)

No	Jenis Layanan Dasar	Tahun 2025			
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1316	1316	0	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1316	1316	0	93.59%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1122	1122	0	93.87%
4	Pelayanan Kesehatan Anak Balita	5754	5754	128	99.16%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25903	25903	0	100%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	66395	54032	12363	81.38 %
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	13531	12503	1028	92.40 %
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi	23235	20181	3054	86.86 %
9	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	3290	2629	661	79.91 %
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa	811	811	0	100.00 %
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	1803	1476	327	81.86 %
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko Terinfeksi HIV	2132	2132	0	100.00 %

b. Hasil Capaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Barang			Total Pencaipaan (Persen)
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
<b>I Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</b>					
1.	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	1053	1053	0	100.00 %
2.	Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	236880	236880	0	100.00 %
3.	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	1316	1316	0	100.00 %
4.	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	1316	1316	0	100.00 %
5.	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	1316	1316	0	100.00 %
6.	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	197	197	0	100.00 %
7.	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	1316	1316	0	100.00 %
8.	Kartu ibu/rekam medis ibu	1316	1316	0	100.00 %
9.	Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	1316	1316	0	100.00 %
10.	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	19	19	0	100.00 %
11.	Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	88	88	0	100.00 %
12.	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"	31	31	0	100.00 %
13.	Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	109	109	0	100.00 %
14.	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	128	128	0	100.00 %
15.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	19	19	0	100.00 %
16.	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	30	30	0	100.00 %
17.	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	1316	1316	0	100.00 %
<b>II Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</b>					
1.	Formulir Partograf	1316	1316	0	100.00 %
2.	Kartu ibu (rekam medis)	1316	1316	0	100.00 %
3.	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa	1316	1316	0	100.00 %

		kehamilan)				
	4.	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	19	19	0	100.00 %
	5.	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	31	31	0	100.00 %
	6.	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	109	109	0	100.00 %
	7.	Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	128	128	0	100.00 %
	8.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	19	19	0	100.00 %
	9.	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	30	30	0	100.00 %
<b>III</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</b>					
	1.	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	1122	1122	0	100.00 %
	2.	Vitamin K1 injeksi	1122	1122	0	100.00 %
	3.	Salep/tetes mata antibiotik	1122	1122	0	100.00 %
	4.	Formulir bayi baru lahir	1122	1122	0	100.00 %
	5.	Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	3366	3366	0	100.00 %
	6.	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	1122	1122	0	100.00 %
	7.	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	19	19	0	100.00 %
	8.	Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	31	31	0	100.00 %
	9.	Tenaga kesehatan : Bidan	109	109	0	100.00 %
	10.	Tenaga kesehatan : Perawat	128	128	0	100.00 %
	11.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	19	19	0	100.00 %
	12.	Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	31	31	0	100.00 %
	13.	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	30	30	0	100.00 %
	14.	Kader Kesehatan	3170	3170	0	100.00 %
<b>IV</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Balita</b>					
	1.	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	40278	40278	0	100.00 %
	2.	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	40278	40278	0	100.00 %
	3.	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	5754	5754	0	100.00 %
	4.	Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	575	575	0	0.00 %
	5.	Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	4603	4603	0	0.00 %
	6.	Vaksin imunisasi dasar: BCG	1151	1151	0	100.00 %
	7.	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	1151	1151	0	100.00 %

8.	Vaksin imunisasi dasar: IPV	1151	1151	0	100.00 %
9.	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	1151	1151	0	100.00 %
10.	Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	1151	1151	0	100.00 %
11.	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	1151	1151	0	100.00 %
12.	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	1151	1151	0	100.00 %
13.	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	1151	1151	0	100.00 %
14.	Peralatan Anafilaktik	115	115	0	100.00 %
15.	Formula Terapi Gizi Buruk	19	19	0	100.00 %
16.	Tenaga medis : Dokter	30	30	0	100.00 %
17.	Tenaga kesehatan : Bidan	109	109	0	100.00 %
18.	Tenaga kesehatan : Perawat	128	128	0	100.00 %
19.	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	30	30	0	100.00 %
20.	Guru PAUD	0	0	0	100.00 %
21.	Kader Kesehatan	3170	3170	0	100.00 %
<b>V</b>	<b>Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar</b>				
1.	Form pencatatan/buku rapor kesehatan (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	25903	25903	0	100.00 %
2.	Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	25903	25903	0	100.00 %
3.	Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	25903	25903	0	100.00 %
4.	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/ madrasah/ pesantren)	497	497	0	100.00 %
5.	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	74	74	0	100.00 %
6.	Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)	422513	422513	0	100.00 %
7.	Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb	19	19	0	100.00 %

		meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)				
8.		Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	3087	3087	0	100.00 %
9.		Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	19	19	0	100.00 %
10.		Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	8634	8634	0	100.00 %
11.		Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	49	49	0	100.00 %
12.		Tenaga kesehatan : Bidan	109	109	0	100.00 %
13.		Tenaga kesehatan : Perawat	128	128	0	100.00 %
14.		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	30	30	0	100.00 %
15.		Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	19	19	0	100.00 %
16.		Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	31	31	0	100.00 %
17.		Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	0	0	0	100.00 %
18.		Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	547	547	0	100.00 %
<b>VI Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif</b>						
1.		Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	19	19	0	100.00 %
2.		Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	19	19	0	100.00 %
3.		Alat : Tensimeter	19	19	0	100.00 %
4.		Alat : Glukometer	19	19	0	100.00 %
5.		Alat: Alat Pemeriksa Hb	19	19	0	100.00 %
6.		Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	19	19	0	100.00 %
7.		Alat : KIT IVA Tes	19	19	0	100.00 %
8.		Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	66395	66395	0	100.00 %
9.		Kit Ophthalmologi Komunitas	19	19	0	100.00 %
10.		Kuesioner PUMA	103244	103244	0	100.00 %
11.		Alat Pelayanan KB	38	38	0	100.00 %
		a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	19	19	0	
		b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	19	19	0	
		c. Vasektomi set	0	0	0	
12.		Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular	19	19	0	100.00 %

	(SIPTM)				
13.	Vaksin Tetanus Difteri (td)	11157	11157	0	100.00 %
14.	Tenaga medis : Dokter	30	30	0	100.00 %
15.	Tenaga kesehatan : Bidan	109	109	0	100.00 %
16.	Tenaga kesehatan : Perawat	128	128	0	100.00 %
17.	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	30	30	0	100.00 %
18.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	31	31	0	100.00 %
19.	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	0	0	0	100.00 %
<b>VII Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut</b>					
1.	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	19	19	0	100.00 %
2.	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	19	19	0	100.00 %
3.	Alat pemeriksaan kolesterol	19	19	0	100.00 %
4.	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	19	19	0	100.00 %
5.	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	13531	13531	0	100.00 %
6.	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	13531	13531	0	100.00 %
7.	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	19	19	0	100.00 %
8.	Tenaga medis : Dokter	30	30	0	100.00 %
9.	Tenaga kesehatan : Bidan	109	109		100.00 %
10.	Tenaga kesehatan : Perawat	128	128	0	100.00 %
11.	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	30	30	0	100.00 %
12.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	31	31	0	100.00 %
13.	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	0	0	0	100.00 %
<b>VIII Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi</b>					
1.	Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	38	38	0	100.00 %
2.	Obat Hipertensi	23235	23235	0	100.00 %
3.	Tensimeter (mengukur tekanan darah)	19	19	0	100.00 %
4.	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	19	19	0	100.00 %

	5.	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	19	19	0	100.00 %
	6.	Tenaga medis : Dokter	30	30	0	100.00 %
	7.	Tenaga kesehatan : Bidan	109	109	0	100.00 %
	8.	Tenaga kesehatan : Perawat	128	128	0	100.00 %
	9.	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	30	30	0	100.00 %
	10.	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	31	31	0	100.00 %
	11.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	19	19	0	100.00 %
	12.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	31	31	0	100.00 %
<b>IX</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</b>					
	1.	Obat Diabetes Melitus	3290	3290	0	100.00 %
	2.	Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	19	19	0	100.00 %
	3.	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	3290	3290	0	100.00 %
	4.	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	19	19	0	100.00 %
	5.	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	19	19	0	100.00 %
	6.	Tenaga medis : Dokter	30	30	0	100.00 %
	7.	Tenaga kesehatan : Bidan	109	109	0	100.00 %
	8.	Tenaga kesehatan : Perawat	128	128	0	100.00 %
	9.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	19	19	0	100.00 %
	10.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	31	31	0	100.00 %
	11.	Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	30	30	0	100.00 %
	12.	Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	19	19	0	100.00 %
<b>X</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat</b>					
	1.	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) bentuk fisik atau elektronik)	19	19	0	100.00 %
	2.	Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	811	811	0	100.00 %
	3.	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	19	19	0	100.00 %
	4.	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi	19	19	0	100.00 %

		kesehatan (pencatatan dan pelaporan)				
	5.	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	19	19	0	100.00 %
	6.	Tenaga kesehatan : Dokter	30	32	0	100.00 %
	7.	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	19	19	0	100.00 %
	8.	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	0	0	0	0.00 %
	9.	Tenaga profesional lainnya	19	19	0	0.00 %
<b>XI</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</b>					
	1.	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	19	19	0	100.00 %
	2.	Reagen Zn TB	180	180	0	100.00 %
	3.	Masker bedah dan Masker N95	1803	1803	0	100.00 %
	4.	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	1803	1803	0	100.00 %
	5.	Katrid tes cepat molekuler	1803	1803	0	100.00 %
	6.	Formulir pencatatan dan pelaporan	19	19	0	100.00 %
	7.	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	19	19	0	100.00 %
	8.	Tuberkulin	1803	1803	0	100.00 %
	9.	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	31	31	0	100.00 %
	10.	Tenaga kesehatan : Perawat	128	128	0	100.00 %
	11.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	19	19	0	100.00 %
	12.	Tenaga Kesehatan: Tenaga kesehatan masyarakat	31	31	0	100.00 %
	13.	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	19	19	0	100.00 %
	14.	Tenaga kesehatan : Radiografer	1	1	0	100.00 %
	15.	Kader Kesehatan	3170	3170	0	100.00 %
<b>XII</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)</b>					
	1.	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	19	19	0	100.00 %
	2.	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	2132	2132	0	100.00 %
	3.	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sput yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	2132	2132	0	100.00 %
	4.	Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	2132	2132	0	100.00 %
	5.	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	31	31	0	100.00 %

6.	Tenaga kesehatan : Bidan	109	109	0	100.00 %
7.	Tenaga kesehatan : Perawat	128	128	0	100.00 %
8.	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	19	19	0	100.00 %
9.	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	31	31	0	100.00 %
10.	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	0	0	0	100.00 %

#### 4.2.4 Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

No	Pendanaan	Pagu
1	APBD KAB. SOLOK	1,321,543,449,296
2	Alokasi anggaran satker perangkat daerah	219,828,151,303
3	Alokasi anggaran penerapan SPM Pada Satker PD	2,722,081,077
	APBD	2,722,081,077
	APBD DAU	836,566,000
	APBD DAK NON FISIK	1,885,515,077

#### 4.2.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Kesehatan, sebagai berikut:

1. 1 (satu) orang Kepala Dinas Kesehatan;
2. 1 (satu) orang Sekretaris Dinas Kesehatan;
3. 1 (satu) orang Kabid Kesmas pada Dinas Kesehatan;
4. 1 (satu) orang Kabid P2P pada Dinas Kesehatan;
5. 1 (satu) orang Kasi Kesra Gizi pada Dinas Kesehatan;
6. 1 (satu) orang Kasi Promosi Kesehatan Gizi pada Dinas Kesehatan;
7. 1 (satu) orang Kasi Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan;
8. 1 (satu) orang Kasi PTM Jiwa Napza pada Dinas Kesehatan;
9. 1 (satu) orang Kasi Pelayanan Primer dan Tradisional pada Dinas Kesehatan;
10. 1 (satu) orang Kasubag Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Berdasarkan personil diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 10 orang yang terlibat aktif dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Kesehatan, serta pegawai lainnya yang juga turut membantu pencapaian SPM tersebut.

#### 4.2.6 Kendala, Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Permasalahan penerapan dan pencapaian SPM sebagai berikut:

1. Keterbatasan dan ketidakmerataan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, khususnya sarana Posyandu, alat kesehatan, dan transportasi pelayanan luar gedung, sehingga berdampak pada rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan sesuai standar SPM
2. Belum optimal akibat keterlibatan lintas sektor yang belum terintegrasi secara sistematis, khususnya peran OPD non-kesehatan dan pemerintah nagari, sehingga intervensi promotif dan preventif belum menyentuh akar permasalahan kesehatan masyarakat
3. Belum optimalnya pelaksanaan program (cakupan pelayanan ibu hamil, bersalin, nifas dan BBL belum merata terutama di daerah sulit akses, pemantauan tumbuh kembang balita belum rutin terutama balita non posyandu aktif, penemuan kasus aktif belum optimal karena stigma masyarakat sehingga menghambat pelacakan kasus, kesadaran masyarakat rendah terhadap deteksi dini penyakit)
4. Permasalahan pada SDM Kesehatan (Distribusi tenaga kesehatan belum merata, beban kerja nakes tinggi akibat rangkap tugas, kompetensi teknis SPM belum merata)

#### 4.3 Urusan Pekerjaan Umum

##### 4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

No	Indikator	Sub Indikator
1	Kuantitas	Kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari diperuntukkan kepada daerah kabupaten/kota yang tidak ada sumber air baku. Untuk daerah kabupaten/kota yang memiliki sumber air baku, maka pemenuhan kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari dengan menyesuaikan pada penggunaan air di kawasan tersebut.
2	Kualitas	Parameter fisik kualitas air yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan, antara lain: a. Keruh : air minum keruh, tidak jernih/ tidak bening. b. Berwarna : air minum terlihat berwarna seperti kekuningan, kemerahan dan kecokelatan atau warna lainnya. c. Berasa : air minum terasa asam, manis, pahit atau asin. Misalkan ketika digunakan untuk berkumur. Rasa asam disebabkan oleh adanya asam organik maupun anorganik, sedangkan rasa asin disebabkan adanya garam yang larut dalam air. d. Berbusa : air minum mengeluarkan busa baik saat diaduk maupun tidak. e. Berbau : air minum yang berbau jika dicium. Airnya berbau busuk bila mengandung bahan organik yang mengalami dekomposisi (penguraian) oleh mikroorganisme air. Parameter tersebut di atas disesuaikan Keputusan Menteri Kesehatan, serta disesuaikan Pedoman Konsep dan Definisi Sesenas.

## b. Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi)

### 1. Air Limbah Permukiman

Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota.

### 2. Pengelolaan Sampah

Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan dan tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.

Adapun jenis pelayanan dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bagi pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian
I	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- hari
II	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

### 4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Sesuai dengan Permendagri Nomor 100 tahun 2018 serta Peraturan K/L terkait tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal masing-masing urusan, target capaian Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM adalah 100%.

Tahapan pengumpulan data dilakukan oleh staf bidang Cipta Karya, data target berupa jumlah KK per Nagari se-Kabupaten Solok Tahun 2025. Data target diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Batas
I	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Penduduk Kabupaten Solok Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- hari	100%	1 Tahun
II	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Penduduk Kabupaten Solok Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100%	1 Tahun

Target pelayanan untuk semua penduduk Kabupaten Solok tahun 2025 yang terdiri dari 14 Kecamatan dan 74 Nagari. Dimana jumlah penduduk dari 14 kecamatan didapatkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok. Setiap penduduk Kabupaten Solok berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar.

### 4.3.3 Realisasi

Realisasi Dalam mutu pelayanan dasar daerah wajib menguraikan mengenai jenis layanan dasar yang harus dilakukan sesuai dengan wilayah kewenangan pemerintahan Kabupaten.

a. Hasil Capaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)

No	Jenis Layanan Dasar	Tahun 2025			
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	2644	2644	0	100.00 %
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	2731	2731	0	100.00 %

b. Hasil Capaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Mutu Barang			Total Pencapaian (Persen)
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
<b>I</b>	<b>Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari</b>					
	<b>Jaringan Perpipaan</b>					
1.	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	661	661	0	100.00 %
2.	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	661	661	0	100.00 %
	<b>Bukan Jaringan Perpipaan</b>					
3.	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	74	74	0	100.00 %

No	Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Mutu Barang			Total Pencaipaan (Per sen)
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air 4. Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	Rumah Tangga	74	74	0	100.00 %
<b>II</b>	<b>Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik</b>					
	<b>KUANTITAS SPALD</b>					
	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah 1. Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	679	679	0	100.00 %
	<b>KUALITAS SPALD</b>					
	<b>Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)</b>					
	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota 1.	Rumah Tangga	1	1	0	100.00 %
	<b>Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)</b>					
	Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana 1. bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	1	1	0	100.00 %

No	Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Mutu Barang			Total Pencapaian (Per sen)
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana 2. bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	679	679	0	100.00 %

#### 4.3.4 Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

No	Pendanaan	Pagu
1	APBD KAB. SOLOK	1,321,543,449,296
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	71,300,141,002
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	15,234,706,559
	APBD	12,834,706,559
	APBN TUGAS PEMBANTUAN	2,400,000,000

#### 4.3.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat, sebagai berikut:

1. 1 (satu) orang Kepala PU PR;
2. 1 (satu) orang Sekretaris PU PR;
3. 1 (satu) orang Kabid Cipta Karya;
4. 1 (satu) orang Kasi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan;
5. 1 (satu) orang Kasubag Perencanaan dan Keuangan;
6. Diana Syafriani, S. Tr. T;
7. Indra Supandi.

Berdasarkan personil diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 7 orang yang terlibat aktif dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat, serta pegawai lainnya yang juga turut membantu pencapaian SPM tersebut.

#### 4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam upaya pemenuhan pencapaian target SPM Dinas PUPR Kabupaten Solok terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Solok di antaranya adalah Kegiatan dan Pagu Anggaran Kemungkinan Masih Dilakukan Perubahan Atau Efisiensi Sehingga Penetapan Target Kegiatan SPM Air Minum dan Sanitasi Belum Valid.

### 4.4 Urusan Perumahan Rakyat

#### 4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian
I	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	Persentase Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni
II	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni

Jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pada saat masa pasca Bencana
- Surat penetapan bencana dari Bupati
- Dampak bencana di Daerah Administrasi Kabupaten

#### 4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Batas Waktu
I	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten	Persentase Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	100%	1 Tahun
II	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	1 Tahun

#### 4.4.3 Realisasi

Realisasi Dalam mutu pelayanan dasar daerah wajib menguraikan mengenai jenis layanan dasar yang harus dilakukan sesuai dengan wilayah kewenangan pemerintahan.

a. Hasil Capaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Terlayani)	Realisasi		
				Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Total Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian
I	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	Persentase Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	6	6	0	100%
II	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	1	0	1	100%

b. Hasil Capaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Barang			Total Pencapaian
		Target (Jumlah Yang Harus Terlayani)	Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Total Yang Belum Terlayani	
<b>I</b>	<b>Penyediaan &amp; Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana</b>				100 %
1.	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	7	7	0	100.00 %
2.	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	5	5	0	100.00 %
3.	Pemukiman kembali bagi korban bencana	0	0	0	0.00 %
4.	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	0	0	0.00 %
<b>II</b>	<b>Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah</b>				100 %
1.	Pendataan				100 %
	Form 4.A.4 Identifikasi Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana				100 %

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Barang			Total Pencapaian
		Target (Jumlah Yang Harus Terlayani)	Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Total Yang Belum Terlayani	
	Form 4.A.5 Identifikasi Lahan Potensial Sebagai Relokasi Perumahan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana				100 %
	Form 4.A.6 Pengumpulan Data Rumah Yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana				100 %
	Form 4.A.10 Identifikasi Perumahan Di Lokasi Yang Menimbulkan Bahaya Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah				100 %
	Form 4.A.11 Identifikasi Perumahan Di Atas Lahan Bukan Fungsi Permukiman Di Kabupaten Solok				100 %
	Form 4.A.12 Identifikasi Perumahan Di Kawasan Kumuh Kabupaten Solok (<10 Ha)				100 %
	Form 4.A.13 Pengumpulan Data Rumah Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten Solok				100 %
2.	Perhitungan				
	Form 4.B.3 Penghitungan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi				100 %

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Barang			Total Pencapaian
		Target (Jumlah Yang Harus Terlayani)	Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Total Yang Belum Terlayani	
	Korban Bencana				
	Form 4.B.4 Penghitungan Kebutuhan Biaya Layanan Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Terkena Bencana Kabupaten Solok				100 %
	Form 4.B.7 Penghitungan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten Solok				100 %
	Form 4.B.8 Penghitungan Kebutuhan Biaya Layanan Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten Solok				100 %
3.	Perencanaan				
	Form 4.C.2 Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Bencana Kabupaten Solok				100 %
	Form 4.C.4 Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Kabupaten Solok				100 %

#### 4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

No	Pendanaan	Pagu
1	Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Solok	1,321,543,449,296
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat daerah	15,261,255,923
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Satker PD	696,531,704
	APBD	696,531,704
	APBD Murni	696,531,704

#### 4.4.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sebagai berikut:

1. 1 (satu) orang Kepala DPRKPP;
2. 1 (satu) orang Sekretaris DPRKPP;
3. 1 (satu) orang Kabid Perumahan;
4. 2 (satu) orang Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;
5. 1 (satu) orang Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan;
6. 1 (satu) orang Kasubag Perencanaan dan Keuangan;
7. 4 orang operator di DPRKPP.

Berdasarkan personil diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 11 orang yang terlibat aktif dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta pegawai lainnya yang juga turut membantu pencapaian SPM tersebut.

#### 4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam upaya pemenuhan pencapaian target SPM Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Solok di antaranya adalah Masih adanya calon penerima manfaat yang belum memenuhi persyaratan administrasi.

## 4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

### 4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian
I	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Capaian Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
II	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana
III	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
IV	Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
V	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Satpol PP dan Damkar serta BPBD Pemda Kab.Solok yaitu mencakup Standar Pelayanan yang terkena Dampak Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum akibat dari Penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada dengan Jenis Pelayanan Dasar yang meliputi :

- I. Kategori pencapaian Trantibum yang terdiri dari Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban umum.
- II. Kategori Pencapaian Kebencanaan yang terdiri dari :
  - a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana.
  - b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
  - c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
- III. Kategori Pencapaian Damkar yang terdiri dari Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

### 4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)
I	Pelayanan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Capaian Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	2025
II	Pelayanan informasi rawanbencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%	2025
III	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	2025
IV	Pelayanan Penyelamatan dan	Persentase Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi	100%	2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)
	Evakuasi Korban Bencana	Korban Bencana		
V	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	2025

#### 4.5.3 Realisasi

Realisasi Dalam mutu pelayanan dasar daerah wajib menguraikan mengenai jenis layanan dasar yang harus dilakukan sesuai dengan wilayah kewenangan pemerintahan Kabupaten.

##### a. Hasil Capaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Terlayani)	Realisasi		
				Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Total Yang Belum Terlayani	Persentase(%)
I	Pelayanan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Capaian Pelayanan ketenteraman dan Ketertiban Umum	200	200	0	100.00 %
II	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	413075	413075	0	100.00 %
III	Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	413075	413075	0	100.00 %
IV	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	49	49	0	100.00 %

##### b. Hasil Capaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Barang			Total Pencapaian
		Target (Jumlah Yang Harus Terlayani)	Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Total Yang Belum Terlayani	
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					
I	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)				
1	Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	19	19	0	100.00 %
2	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	9	9	0	100.00 %
3	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	770	770	0	100.00 %
4	Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada	1	1	0	100.00 %

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Barang			Total Pencapaian
		Target (Jumlah Yang Harus Terlayani)	Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Total Yang Belum Terlayani	
	terhadap pelayanan kerugian material				
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	1	1	0	100.00 %
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	1	1	0	100.00 %
<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN</b>					
I	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)</b>				
1.	<b>Penyusunan Kajian Risiko Bencana</b>				100.00 %
	Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	1	1	0	100.00 %
	Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	2	2	0	100.00 %
	Tersedianya Berita Acara Asistensi yang ditandatangani BNPPB (minimal 3)	3	3	0	100.00 %
	Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusunan KRB (sesuai dengan kebutuhan)	3	3	0	100.00 %
	Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	10	10	0	100.00 %
2.	<b>Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana</b>				100.00 %
	1) Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana				100.00 %
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	30	30	0	100.00 %
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	12	12	0	100.00 %
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	5	5	0	100.00 %
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	10	10	0	100.0 %
	2) Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia				100.00 %
	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	0	100.00 %
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	0	100.00 %
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	5	5	0	100.00 %
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	2	2	0	100.00 %
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	0	100.00 %
	3) . Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik				100.00 %
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	29	29	0	100.00 %
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	19	19	0	100.00 %
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	2	2	0	100.00 %
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	10	10	0	100.00 %
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	5	5	0	100.00 %
II	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)</b>				
1.	<b>Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana</b>	0	0	0	0.00 %
2.	<b>Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)</b>	0	0	0	100.00 %
3.	<b>Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi</b>	0	0	0	100.00 %
	1) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur				100.00 %
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0	100.00 %
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0	100.00 %
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0	100.00 %
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0	100.00 %
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0	100.00 %
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0	100.00 %
	2) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara				100.00 %

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Barang			Total Pencapaian
		Target (Jumlah Yang Harus Terlayani)	Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Total Yang Belum Terlayani	
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0	100.00 %
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0	100.00 %
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0	100.00 %
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0	100.00 %
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0	100.00 %
4.	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	0	0	0	100.00 %
	1) . Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise)				100.00 %
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	0	100.00 %
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	0	100.00 %
	c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	10	10	0	100.00 %
	2) . Gladi Lapangan				100.00 %
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	0	100.00 %
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	0	100.00 %
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	10	10	0	100.00 %
5.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	0	0	0	100.00 %
	1) . Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				100.00 %
	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	365	365	0	100.00 %
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	12	12	0	100.00 %
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	1	1	0	100.00 %
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	3	3	0	100.00 %
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	3	3	0	100.00 %
	2) . Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana				100.00 %
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	7	7	0	100.00 %
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	0	100.00 %
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	0	100.00 %
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	0	100.00 %
	3) . Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast				100.00 %
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	0	100.00 %
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	0	100.00 %
	4) . Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat				100.00 %
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	0	100.00 %
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	0	100.00 %
6	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	0	0		100.00 %
	Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	0	100.00 %
	Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	0	100.00 %
	Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	0	100.00 %
	Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	15	15	0	100.00 %
III	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)				

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Barang			Total Pencapaian
		Target (Jumlah Yang Harus Terlayani)	Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Total Yang Belum Terlayani	
1.	Respon Cepat Darurat Bencana	0	0		100.00 %
	Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	1	1	0	100.00 %
	Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	30	30	0	100.00 %
2.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	0	0		100.00 %
	Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	0	100.00 %
	Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	10	10	0	100.00 %
	Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	10	10	0	100.00 %
	Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	0	100.00 %
	Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	0	100.00 %
	Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	7	7	0	100.00 %
	Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	21	21	0	100.00 %
	Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	21	21	0	100.00 %
<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR</b>					
I	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran				
1.	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	150	150	0	100.00 %
2.	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	1	1	0	100.00 %
3.	Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	10	10	0	100.00 %
4.	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	82	82	0	100.00 %
5.	Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	1	1	0	100.00 %
6.	Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	40	40	0	100.00 %

#### 4.5.4 Alokasi Anggaran

Di dalam Alokasi anggaran menggambarkan alokasi anggaran bidang urusan SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

No	Pendanaan	Pagu
1	Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Solok	1,321,543,449,296
2	Alokasi anggaran satker PD	4,015,543,380
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker Perangkat Daerah	4,015,543,380
	APBD	4,015,543,380
	APBD MURNI	1,951,851,042
	APBD DAU	2,063,692,338

#### 4.5.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Satpol PP dan Damkar serta BPBD Pemda Kab.Solok.

Dukungan personil pada Dinas Satpol PP dan Damkar sebagai berikut:

1. 1 (satu) orang Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar;
2. 1 (satu) orang Sekretaris Dinas Satpol PP dan Damkar;
3. 1 (satu) orang Kabid Tribumtranmas;
4. 1 (satu) orang Kabid Penegakkan Perda;
5. 1 (satu) orang Kabid Perlindungan Masyarakat;
6. 1 (satu) orang Kabid Pemadam Kebakaran;
7. 1 (satu) orang Kasi Operasional dan Pengamanan BMD;
8. 1 (satu) orang Kasi Pengendalian Ketertiban Umum;
9. 1 (satu) orang Kasi Intelijen;
10. 1 (satu) orang Kasi Penindakan dan Peraturan Daerah;
11. 1 (satu) orang Kasi Kerjasama;
12. 1 (satu) orang Kasi Penyisihan dan Pembinaan PPNS;
13. 1 (satu) orang Kasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
14. 1 (satu) orang Kasi Pembinaan dan Penyuluhan;
15. 1 (satu) orang Kasi Bina Potensi Masyarakat;
16. 1 (satu) orang Kasi Pencegahan dan Pengendalian;
17. 1 (satu) orang Kasi Sarana dan Prasarana;
18. 1 (satu) orang Kasi Keselamatan dan Kebakaran;
19. 1 (satu) orang Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
20. 1 (satu) orang Kasubag Umum;
21. 1 (satu) orang Kasubag Keuangan.

Dukungan personil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagai berikut:

1. 1 (satu) orang Kepala Pelaksana BPBD;
2. 1 (satu) orang Sekretaris BPBD;
3. 1 (satu) orang Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
4. 1 (satu) orang Kabid Kedaruratan dan Logistik;
5. 1 (satu) orang Kasi Pencegahan;
6. 1 (satu) orang Kasi Kesiapsiagaan;
7. 1 (satu) orang Kasi Kedaruratan;
8. 1 (satu) orang Kasubag Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
9. 1 (satu) orang Operator pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
10. 1 (satu) orang Operator pada Bidang Kedaruratan dan Logistik;

11. 1 (satu) orang Operator pada Subbag Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Berdasarkan personil diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 32 orang yang terlibat aktif dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Satpol PP dan Damkar serta BPBD Pemda Kab.Solok, serta pegawai lainnya yang juga turut membantu pencapaian SPM tersebut.

#### 4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam permasalahan menggambarkan masalah yang pemerintah daerah hadapi dalam pelaksanaan penerapan SPM TA. 2025 yaitu Peralatan kebencanaan belum memadai, seperti : chainsaw, perahu dan tenda lapangan.

### 4.6 Urusan Sosial

#### 4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang/ jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.

Jenis pelayanan dasar untuk daerah Kabupaten Solok pada urusan sosial sebagai berikut:

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

#### 4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama tahun 2025 sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Capaian
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	100 %	100 %
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	100 %	100 %
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	100 %	100 %
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	100 %	100 %
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten	100 %	100 %

### 4.6.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

a. Hasil Capaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Barang			Total Pencapaian
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
I	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	40	45	-5	100.00 %
II	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	482	482	0	100.00 %
III	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	2331	2331	0	100.00 %
IV	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	20	20	0	100.00 %
V	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	2500	2500	0	100.00 %

b. Hasil Capaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Barang			Total Pencapaian
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
I	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti				
1.	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	30	31	-1	100.00 %
2.	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	1	1	0	100.00 %
3.	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi	1	1	0	100.00 %

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Barang			Total Pencapaian
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)				
4.	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	1	1	0	100.00 %
5.	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	11	11	0	100.00 %
6.	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	1	1	0	100.00 %
7.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	3	3	0	100.00 %
8.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	11	11	0	100.00 %
9.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk	1	1	0	100.00 %

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Barang			Total Pencapaian
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK				
10.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	1	1	0	100.00 %
11.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	1	1	0	100.00 %
12.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	1	1	0	100.00 %
13.	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	1	1	0	100.00 %
II	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti				
1.	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	1	1	0	100.00 %
2.	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	2	2	0	100.00 %
3.	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	274	274	0	100.00 %
4.	Penyediaan sandang	244	244	0	100.00 %

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Barang			Total Pencapaian
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)				
5.	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	1	1	0	100.00 %
6.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	2	2	0	100.00 %
7.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	482	482	0	100.00 %
8.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	1	1	0	100.00 %
9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	1	1	0	100.00 %
10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	2	2	0	100.00 %
11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga	1	1	0	100.00 %

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Barang			Total Pencapaian
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	berada di lingkungan yang terlindungi)				
12.	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	1	1	0	100.00 %
III	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti				
1.	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	1	1	0	100.00 %
2.	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)	1	1	0	100.00 %
3.	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	2144	2144	0	100.00 %
4.	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	236	236	0	100.00 %
5.	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	18	18	0	100.00 %
6.	Penyediaan perbekalan kesehatan	1	1	0	100.00 %

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Barang			Total Pencapaian
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)				
7.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	2331	2331	0	100.00 %
8.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	2331	2331	0	100.00 %
9.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	1	1	0	100.00 %
10.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	1	1	0	100.00 %
11.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	2	2	0	100.00 %
12.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	2	2	0	100.00 %
13.	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	1	1	0	100.00 %
IV	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti				

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Barang			Total Pencapaian
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
1.	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	1	1	0	100.00 %
2.	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	1	1	0	100.00 %
3.	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	1	1	0	100.00 %
4.	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	20	20	0	100.00 %
5.	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	1	1	0	100.00 %
6.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan	20	20	0	100.00 %

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Barang			Total Pencapaian
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)				
7.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	1	1	0	100.00 %
8.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	1	1	0	100.00 %
9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	1	1	0	100.00 %
10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	1	1	0	100.00 %
11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	1	1	0	100.00 %
12.	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	1	1	0	100.00 %
V	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana				
1.	Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana	2500	2500	0	100.00 %

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Barang			Total Pencapaian
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)				
2.	Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	1	1	0	100.00 %
3.	Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	1	1	0	100.00 %
4.	Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	1	1	0	100.00 %
5.	Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	1	1	0	100.00 %

#### 4.6.4 Alokasi Anggaran

Di dalam Alokasi anggaran menggambarkan alokasi anggaran bidang urusan SPM Dinas Sosial.

No	Pendanaan	Pagu
1	Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Solok	1,321,543,449,296
2	Alokasi anggaran satker PD	1,831,118,906
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker Perangkat Daerah	1,831,118,906
	APBD	1,831,118,906
	APBD DAU	1,831,118,906

#### **4.6.5 Dukungan Personil**

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Sosial, sebagai berikut:

1. 1 (satu) orang Kepala Dinas Sosial;
2. 1 (satu) orang Sekretaris Dinas Sosial;
3. 1 (satu) orang Kabid Rehabilitasi Sosial;
4. 1 (satu) orang Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. 1 (satu) orang Kasi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, Pengangkatan Anak, dan Taman Anak Sejahtera;
6. 1 (satu) orang Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
7. 1 (satu) orang Kasi Rehabilitasi Sosial, Tuna Wisma, dan Korban NAPZA dan Perdagangan Orang;
8. 1 (satu) orang Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial;
9. 1 (satu) orang Kasubag Perencanaan dan Keuangan.

Berdasarkan personil diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 9 orang yang terlibat aktif dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Sosial, serta pegawai lainnya yang juga turut membantu pencapaian SPM tersebut.

#### **4.6.6 Permasalahan dan Solusi**

Apa yang telah dicapai pada tahun ini, tentunya masih perlu untuk ditingkatkan kembali agar apa yang menjadi target dan sasaran pembangunan dalam tahun mendatang, kami mengakui terhadap berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan tahun ini tentu akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Permasalahan:

1. Kurangnya mobil operasional untuk menunjang kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang rehabilitasi sosial dan penanganan bencana;
2. Terbatasnya anggaran yang tersedia dalam pencapaian penerapan SPM;
3. Pada penanganan data disabilitas khususnya disabilitas mental/ ODGJ terkendala pada ketidakadaan identitas yang bersangkutan sehingga memakan waktu dan biaya untuk mencari informasi;
4. Masih belum Optimalnya Koordinasi dengan Pihak Pemerintahan Nagari terkait dengan data dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

## 4.7 Progam dan Kegiatan

### 4.7.1 Urusan Pendidikan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSEN TASE
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
								9,656,454,227	8,829,217,557	91.43 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									
	1	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) K20240327112412						3,605,568,290	3,570,925,633	99.04 %
Angka Partisipasi Sekolah										
		1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0051	0	0	0.00 %
		2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0011	19,631,918	19,131,834	97.45 %
		3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0015	12,631,918	11,631,668	92.08 %
		4	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0025	12,631,918	11,231,591	88.91 %
		5	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0030	0	0	0.00 %
		6	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0040	0	0	0.00 %
		7	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0041	0	0	0.00 %
Kekhususan PAUD										
		1	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0045	2,003,300,285	1,986,210,895	99.15 %
		2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Paket	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0046	0	0	0.00 %
		3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0016	19,631,918	18,517,555	94.32 %
		4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0017	1,463,525,553	1,450,002,159	99.08 %
		5	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0023	10,444,084	10,444,084	100.00 %
		6	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0024	10,000,000	10,000,000	100.00 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSEN TASE
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
		7	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0026	0	0	0.00 %
		8	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0029	53,770,696	53,755,847	99.97 %
		9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0039	0	0	0.00 %
JUMLAH INDIKATOR					3,605,568,290	3,570,925,633	99.04 %			
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) K20240327110629						4,356,824,898	3,876,051,441	88.97 %
Angka Partisipasi Sekolah										
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0001	0	0	0.00 %
		2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD / Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / Nonformal/Kesetaraan	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0054	0	0	0.00 %
		3	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0038	0	0	0.00 %
		4	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0046	0	0	0.00 %
		5	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0047	736,750,000	732,862,000	99.47 %
		6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0051	740,227,908	735,273,726	99.33 %
Literasi										
		1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0055	413,923,000	316,636,493	76.50 %
		2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0026	0	0	0.00 %
		3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0027	50,433,101	36,088,151	71.56 %
		4	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0035	1,950,000	450	23.08 %
		5	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0036	19,500,000	2,548,000	13.07 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSEN TASE
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
		6	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0037	14,430,000	14,430,000	100.00 %
		7	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0041	1,250,000	1,250,000	100.00 %
		8	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0045	353,644,800	249,932,610	70.67 %
		9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0049	0	0	0.00 %
		10	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0050	24,700,000	15,451,000	62.55 %

Numerasi

		1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0026	0	0	0.00 %
		2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0027	50,433,101	48,433,000	96.03 %
		3	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0035	1,170,000	1,170,000	100.00 %
		4	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0037	14,430,000	14,430,000	100.00 %
		5	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0041	1,250,000	1,250,000	100.00 %
		6	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0050	24,700,000	14,541,000	58.87 %
		7	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0045	353,644,800	353,644,800	100.00 %
		8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0055	413,923,000	316,636,493	76.50 %
		9	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0036	19,550,000	2,548,000	13.03 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSEN TASE
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
		10	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0049	0	0	0.00 %
Keamanan										
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0036	19,550,000	2,548,000	13.03 %
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0049	0	0	0.00 %
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0028	344,088,396	326,944,056	95.02 %
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0043	10,000,000	10,000,000	100.00 %
Kebhinekaan										
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0036	19,550,000	2,548,000	13.03 %
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0049	0	0	0.00 %
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0028	344,088,396	326,944,056	95.02 %
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0043	10,000,000	10,000,000	100.00 %
Inklusifitas										
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0036	19,550,000	2,548,000	13.03 %
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0049	0	0	0.00 %
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0028	344,088,396	326,944,056	95.02 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSEN TASE
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0043	10,000,000	10,000,000	100.00 %
JUMLAH INDIKATOR					4,356,824,898	3,876,051,441	88.97 %			
	3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) K20240327110647						1,668,881,039	1,357,613,843	81.35 %
Angka Partisipasi Sekolah										
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0001	0	0	0.00 %
		2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0014	0	0	0.00 %
		3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0032	0	0	0.00 %
		4	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0051	5,476,000	0	0.00 %
		5	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0059	0	0	0.00 %
		6	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0062	797,532,285	777,496,217	97.49 %
Literasi										
		1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0067	239,705,992	231,659,008	96.64 %
		2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0039	308	0	0.00 %
		3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0040	34,974,395	13,848,634	39.60 %
		4	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0048	16,731,000	450	2.69 %
		5	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0049	19,550,000	2,548,000	13.03 %
		6	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0050	8,330,000	6,345,000	76.17 %
		7	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0054	21,900,000	14,088,000	64.33 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSEN TASE
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
		8	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0058	16,274,990	9,041,551	55.55 %
		9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060	0	0	0.00 %
		10	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0061	0	0	0.00 %
Numerasi										
		1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0039	308	0	0.00 %
		2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0040	40,974,395	13,848,634	33.80 %
		3	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0048	16,731,000	450	2.69 %
		4	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0054	21,900,000	14,088,000	64.33 %
		5	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0050	8,330,000	7,630,240	91.60 %
		6	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0058	16,274,990	9,041,551	55.55 %
		7	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0061	0	0	0.00 %
		8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0067	239,705,992	231,659,008	96.64 %
		9	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0049	19,550,000	2,548,000	13.03 %
		10	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060	0	0	0.00 %
Keamanan										
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0049	19,550,000	2,548,000	13.03 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSEN TASE
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060	0	0	0.00 %
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0041	1,808,000	1,500,000	82.96 %
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Keluarga	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0055	26,750,000	3,576,000	13.37 %
Kebhinekaan										
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0049	19,550,000	2,548,000	13.03 %
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060	0	0	0.00 %
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0041	1,808,000	1,500,000	82.96 %
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0055	26,750,000	3,576,000	13.37 %
Inklusifitas										
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0049	19,550,000	2,548,000	13.03 %
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060	0	0	0.00 %
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0041	1,808,000	1,500,000	82.96 %
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0055	26,750,000	3,576,000	13.37 %
	JUMLAH INDIKATOR					1,668,881,039	1,357,613,843			81.35 %
	4	Pendidikan Kesetaraan						25,180,000	24,626,640	97.80 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSEN TASE
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
			Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan K20250805052437							
Angka Partisipasi Sekolah										
		1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	1.01.02	1.01.04.2.01	1.01.04.2.01.0001	25,180,000	24,626,640	97.80 %
		1	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	1.01.02	1.01.04.2.01	1.01.04.2.01.0002	0	0	0.00 %
	JUMLAH INDIKATOR				25,180,000	24,626,640	97.80 %			
	5		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah K20250807081842					0	0	0.00 %
Literasi										
		1	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	Buku	1.01.02	1.01.06.2.01	1.01.06.2.01.0005	0	0	0.00 %
Numerasi										
		1	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	Buku	1.01.02	1.01.06.2.01	1.01.06.2.01.0005	0	0	0.00 %
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %			
	JUMLAH PROGRAM				9,656,454,227	8,829,217,557	91.43 %			

#### 4.7.2 Urusan Kesehatan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KAB. SOLOK				2,722,081,077	1,720,172,162	63.19 %
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				2,722,081,077	1,720,172,162	63.19 %
1		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota K2023237			2,722,081,077	1,720,172,162	63.19 %
	1.02.02.2.02.0001	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	1,381,132,000	705,126,354	51.05 %
	1.02.02.2.02.0002	2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	107,456,854	84,397,236	78.54 %
	1.02.02.2.02.0003	3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	11,444,850	9,850,457	86.07 %
	1.02.02.2.02.0004	4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	42,940,000	23,850,585	55.54 %
	1.02.02.2.02.0005	5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	549,430,114	447,747,078	81.49 %
	1.02.02.2.02.0006	6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	4,418,220	4,162,236	94.21 %
	1.02.02.2.02.0007	7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	77,844,000	68,700,000	88.25 %
	1.02.02.2.02.0008	8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	6,523,720	6,417,370	98.37 %
	1.02.02.2.02.0009	9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	14,321,435	10,222,410	71.38 %
	1.02.02.2.02.0010	10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	146,635,265	84,727,590	57.78 %
	1.02.02.2.02.0011	11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	362,549,619	260,588,796	71.88 %
	1.02.02.2.02.0012	12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	17,385,000	14,382,050	82.73 %
	JUMLAH INDIKATOR				2,722,081,077	1,720,172,162	63.19 %
	JUMLAH PROGRAM				2,722,081,077	1,720,172,162	63.19 %
KEGIATAN LAINNYA							
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA							

### 4.7.3 Urusan Pekerjaan Umum

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KAB. SOLOK				12,834,706,559	12,256,555,389	95.50 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				3,146,677,831	3,081,388,921	97.93 %
1		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K2023638			3,146,677,831	3,081,388,921	97.93 %
	1.03.03.2.01.0001	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0002	2	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0003	3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0004	4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0005	5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0006	6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Liter/Detik	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0007	7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0008	8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0009	9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum	Penyelenggara SPAM	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0010	10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0011	11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0012	12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0013	13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0014	14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0015	15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0016	16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0017	17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0018	18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0019	19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0020	20	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0021	21	Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0022	22	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN	
	1.03.03.2.01.0023	23	Peningkatan KapasitasKelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	0	0	0%	
	1.03.03.2.01.0024	24	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	0	0	0%	
	1.03.03.2.01.0025	25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	0	0	0%	
	1.03.03.2.01.0026	26	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	3,146,677,831	3,081,388,921	97.93 %	
	1.03.03.2.01.0027	27	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Desa	0	0	0%	
	1.03.03.2.01.0028	28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	0	0	0%	
	1.03.03.2.01.0029	29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	0	0	0%	
	1.03.03.2.01.0030	30	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0%	
	1.03.03.2.01.0031	31	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%	
	1.03.03.2.01.0032	32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	0	0	0%	
	1.03.03.2.01.0033	33	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%	
	JUMLAH INDIKATOR					3,146,677,831	3,081,388,921	97.93 %
	JUMLAH PROGRAM					3,146,677,831	3,081,388,921	97.93 %
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				9,688,028,728	9,175,166,468	94.71 %	
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota K20240327112559				9,688,028,728	9,175,166,468	94.71 %	
	1.03.05.2.01.0001	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%	
	1.03.05.2.01.0002	2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	0	0	0%	

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	1.03.05.2.01.0003	3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0004	4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0005	5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0006	6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0007	7	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0008	8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok Masyarakat	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0009	9	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0010	10	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0011	11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Dokumen	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0012	12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0013	13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0014	14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0015	15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	M <sup>3</sup> /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0016	16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	M <sup>3</sup> /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0017	17	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0018	18	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0019	19	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0020	20	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M <sup>3</sup> /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0021	21	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M <sup>3</sup> /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0022	22	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M <sup>3</sup> /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0023	23	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M <sup>3</sup> /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0024	24	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0025	25	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M <sup>3</sup> /Hari	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN	
	1.03.05.2.01.0026	26	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0%	
	1.03.05.2.01.0027	27	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M <sup>3</sup> /Hari	0	0	0%	
	1.03.05.2.01.0028	28	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M <sup>3</sup> /Hari	0	0	0%	
	1.03.05.2.01.0029	29	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Unit	0	0	0%	
	1.03.05.2.01.0030	30	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M <sup>3</sup> /Hari	0	0	0%	
	1.03.05.2.01.0031	31	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M <sup>3</sup> /Hari	0	0	0%	
	1.03.05.2.01.0032	32	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M <sup>3</sup> /Hari	0	0	0%	
	1.03.05.2.01.0033	33	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	0	0	0%	
	1.03.05.2.01.0034	34	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Desa	0	0	0%	
	1.03.05.2.01.0035	35	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Penyelenggara	0	0	0%	
	1.03.05.2.01.0036	36	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M <sup>3</sup> /Hari	0	0	0%	
	1.03.05.2.01.0037	37	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	0	0	0%	
	1.03.05.2.01.0038	38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit	0	0	0%	
	1.03.05.2.01.0039	39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga	9,688,028,728	9,175,166,468	94.71 %	
	1.03.05.2.01.0040	40	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	0	0	0%	
	1.03.05.2.01.0041	41	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	0	0	0%	
	JUMLAH INDIKATOR					9,688,028,728	9,175,166,468	94.71 %
	JUMLAH PROGRAM					9,688,028,728	9,175,166,468	94.71 %

#### 4.7.4 Urusan Perumahan Rakyat

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN	
	KAB. SOLOK					586,371,704	563,219,808	96.05 %
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					586,371,704	563,219,808	96.05 %
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023340				11,570,000	5,384,775	46.54 %
	1.04.02.2.01.0001	1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen		0	0	0%
	1.04.02.2.01.0002	2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen		0	0	0%
	1.04.02.2.01.0003	3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen		0	0	0%
	1.04.02.2.01.0004	4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen		0	0	0%
	1.04.02.2.01.0005	5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen		0	0	0%
	1.04.02.2.01.0006	6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen		0	0	0%
	1.04.02.2.01.0007	7	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen		0	0	0%
	1.04.02.2.01.0008	8	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen		0	0	0%
	1.04.02.2.01.0009	9	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		0	0	0%
	1.04.02.2.01.0010	10	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		11,570,000	5,384,775	46.54 %
	JUMLAH INDIKATOR					11,570,000	5,384,775	46.54 %
	2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023348				574,801,704	557,835,033	97.05 %
	1.04.02.2.03.0001	1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah		441,871,298	431,008,259	97.54 %
	1.04.02.2.03.0002	2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen		0	0	0%
	1.04.02.2.03.0003	3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha		0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	1.04.02.2.03.0004	4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	132,930,406	126,826,774	95.41 %
	1.04.02.2.03.0005	5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0006	6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0007	7	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0008	8	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0009	9	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0010	10	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0011	11	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0012	12	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				574,801,704	557,835,033	97.05 %
	JUMLAH PROGRAM				586,371,704	563,219,808	96.05 %
KEGIATAN LAINNYA							
3	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA							

#### 4.7.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KAB. SOLOK				4,038,346,380	3,846,859,752	95.26 %
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)				647,444,513	633,891,819	97.91 %
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota K2023444			536,785,231	524,452,169	97.70 %
	1.05.02.2.01.0003	1	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0004	2	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	33,250,202	23,129,750	69.56 %
	1.05.02.2.01.0005	3	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0006	4	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	44,415,632	42,764,250	96.28 %
	1.05.02.2.01.0007	5	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Unit	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0008	6	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Dokumen	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0009	7	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0010	8	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol Pngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Orang	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0011	9	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0012	10	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Orang	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0013	11	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Orang	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0014	12	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0015	13	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0015	14	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan	Laporan	459,119,397	458,558,169	99.88 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN	
			dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan					
	1.05.02.2.01.0016	15	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	0	0	0%	
	1.05.02.2.01.0016	16	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	0	0	0%	
	1.05.02.2.01.0017	17	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Laporan	0	0	0%	
	1.05.02.2.01.0018	18	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit	0	0	0%	
	JUMLAH INDIKATOR					536,785,231	524,452,169	97.70 %
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota K2023455				110,659,282	109,439,650	98.90 %
	1.05.02.2.02.0001	1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0%	
	1.05.02.2.02.0002	2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0%	
	1.05.02.2.02.0003	3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0%	
	1.05.02.2.02.0004	4	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%	
	1.05.02.2.02.0005	5	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	0	0	0%	
	1.05.02.2.02.0006	6	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Unit	0	0	0%	
	1.05.02.2.02.0007	7	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%	
	1.05.02.2.02.0008	8	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan	0	0	0%	
	1.05.02.2.02.0009	9	Pemberkasas Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen	0	0	0%	
	1.05.02.2.02.0010	10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	80,709,282	79,490,350	98.49 %	
	1.05.02.2.02.0011	11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Laporan	0	0	0%	
	1.05.02.2.02.0012	12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	29,950,000	29,949,300	100.00 %	

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN	
	JUMLAH INDIKATOR					110,659,282	109,439,650	98.90 %
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota K2023457				0	0	0.00 %
	1.05.02.2.03.0002	1	Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	0	0	0%	
	1.05.02.2.03.0003	2	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	0	0	0%	
	1.05.02.2.03.0004	3	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	0	0	0%	
	1.05.02.2.03.0005	4	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan	0	0	0%	
	1.05.02.2.03.0006	5	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	0	0	0%	
	JUMLAH INDIKATOR					0	0	0.00 %
	JUMLAH PROGRAM					647,444,513	633,891,819	97.91 %
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)				2,086,495,338	2,002,200,728	95.96 %	
	4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota K2023456				727,013,042	704,551,567	96.91 %
	1.05.03.2.01.0003	1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	184,552,375	182,515,424	98.90 %	
	1.05.03.2.01.0004	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	542,460,667	522,036,143	96.23 %	
	JUMLAH INDIKATOR					727,013,042	704,551,567	96.91 %
	5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana K20240401115443				170,060,017	165,186,165	97.13 %
	1.05.03.2.02.0001	1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%	
	1.05.03.2.02.0002	2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%	
	1.05.03.2.02.0003	3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%	
	1.05.03.2.02.0004	4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	0	0	0%	

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN	
	1.05.03.2.02.0005	5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Kawasan	170,060,017	165,186,165	97.13 %	
	1.05.03.2.02.0006	6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	0	0	0%	
	1.05.03.2.02.0007	7	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	-	0	0	0%	
	1.05.03.2.02.0008	8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%	
	1.05.03.2.02.0009	9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	0	0	0%	
	1.05.03.2.02.0010	10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	0	0	0%	
	1.05.03.2.02.0011	11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	0	0	0%	
	1.05.03.2.02.0012	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	0	0	0%	
	1.05.03.2.02.0013	13	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	0	0	0%	
	1.05.03.2.02.0014	14	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%	
	1.05.03.2.02.0015	15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Unit	0	0	0%	
	1.05.03.2.02.0016	16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kawasan	0	0	0%	
	1.05.03.2.02.0017	17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	0%	
	JUMLAH INDIKATOR					170,060,017	165,186,165	97.13 %
	6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana K2023445				1,143,816,279	1,110,535,838	97.09 %
	1.05.03.2.03.0001	1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan	0	0	0%	
	1.05.03.2.03.0002	2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%	
	1.05.03.2.03.0003	3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	1,143,816,279	1,110,535,838	97.09 %	
	1.05.03.2.03.0007	4	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%	
	1.05.03.2.03.0008	5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%	
	1.05.03.2.03.0009	6	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%	
	1.05.03.2.03.0010	7	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen	0	0	0%	
	1.05.03.2.03.0011	8	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	0	0	0%	

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN	
	JUMLAH INDIKATOR					1,143,816,279	1,110,535,838	97.09 %
	7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana K2023446				45,606,000	21,927,158	48.08 %
	1.05.03.2.04.0001	1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%	
	1.05.03.2.04.0002	2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%	
	1.05.03.2.04.0003	3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%	
	1.05.03.2.04.0004	4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	0	0	0%	
	1.05.03.2.04.0005	5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan	0	0	0%	
	1.05.03.2.04.0006	6	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	22,803,000	21,927,158	96.16 %	
	1.05.03.2.04.0007	7	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%	
	1.05.03.2.04.0008	8	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%	
	1.05.03.2.04.0009	9	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%	
	1.05.03.2.04.0010	10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen	22,803,000	0	69.06 %	
	1.05.03.2.04.0011	11	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usahadalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Lembaga	0	0	0%	
	1.05.03.2.04.0012	12	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan	0	0	0%	
	1.05.03.2.04.0013	13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Dokumen	0	0	0%	
	JUMLAH INDIKATOR					45,606,000	21,927,158	48.08 %
	JUMLAH PROGRAM					2,086,495,338	2,002,200,728	95.96 %
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)					1,304,406,529	1,210,767,205	92.82 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN	
	8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023449				1,304,406,529	1,210,767,205	92.82 %
	1.05.04.2.01.0001	1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%	
	1.05.04.2.01.0002	2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	823,357,500	779,920,310	94.72 %	
	1.05.04.2.01.0003	3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	175,820,000	146,415,000	83.28 %	
	1.05.04.2.01.0004	4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%	
	1.05.04.2.01.0005	5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	0	0	0%	
	1.05.04.2.01.0007	6	Pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran	Dokumen	0	0	0%	
	1.05.04.2.01.0008	7	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	0	0	0%	
	1.05.04.2.01.0011	8	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0	0	0%	
	1.05.04.2.01.0012	9	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran	Laporan	0	0	0%	
	1.05.04.2.01.0013	10	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0	0	0%	
	1.05.04.2.01.0014	11	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analisis Kebakaran	Dokumen	0	0	0%	
	1.05.04.2.01.0015	12	Permutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	0	0	0%	
	1.05.04.2.01.0016	13	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen	0	0	0%	
	1.05.04.2.01.0017	14	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	299,999,029	280,171,895	93.39 %	
	1.05.04.2.01.0018	15	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	5,230,000	4,260,000	81.45 %	
	1.05.04.2.01.0019	16	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen	0	0	0%	
	JUMLAH INDIKATOR					1,304,406,529	1,210,767,205	92.82 %
	9	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran K2023450				0	0	0.00 %
	1.05.04.2.02.0001	1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	0	0	0%	
	1.05.04.2.02.0002	2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	0	0	0%	

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %
	10	Investigasi Kejadian Kebakaran K2023451			0	0	0.00 %
	1.05.04.2.03.0001	1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %
	11	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran K2023459			0	0	0.00 %
	1.05.04.2.04.0001	1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	0	0	0%
	1.05.04.2.04.0002	2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa	0	0	0%
	1.05.04.2.04.0003	3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %
	12	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia K2023458			0	0	0.00 %
	1.05.04.2.05.0001	1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	0	0	0%
	1.05.04.2.05.0002	2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	0	0	0%
	1.05.04.2.05.0004	3	Pembinaan aparaturnya pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan	0	0	0%
	1.05.04.2.05.0005	4	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	JUMLAH PROGRAM				1,304,406,529	1,210,767,205	92.82 %

#### 4.7.6 Urusan Sosial

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KAB. SOLOK				1,831,118,906	1,713,534,877	93.58 %
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				1,787,855,729	1,676,405,669	93.77 %
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K2023152			1,300,378,953	1,226,731,280	94.34 %
	1.06.04.2.01.0001	1	Penyediaan permakanan	Orang	736,898,653	697,265,333	0%
	1.06.04.2.01.0002	2	Penyediaan sandang	Orang	0	0	0%
	1.06.04.2.01.0003	3	Penyediaan alat bantu	Orang	176,795,773	152,856,535	0%
	1.06.04.2.01.0004	4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0%
	1.06.04.2.01.0005	5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	73,338,394	70,631,506	0%
	1.06.04.2.01.0006	6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	0	0	0%
	1.06.04.2.01.0007	7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0%
	1.06.04.2.01.0008	8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0%
	1.06.04.2.01.0009	9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	11,130,000	10,610,894	0%
	1.06.04.2.01.0010	10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	284,768,035	279,416,658	0%
	1.06.04.2.01.0011	11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	1.06.04.2.01.0012	12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	17,448,098	15,950,354	0%
	JUMLAH INDIKATOR				1,300,378,953	1,226,731,280	94.34 %
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K2023153			487,476,776	449,674,389	92.25 %
	1.06.06.2.01.0001	1	Penyediaan makanan	Orang	487,476,776	449,674,389	92.25 %
	1.06.06.2.01.0002	2	Penyediaan sandang	Orang	0	0	0%
	1.06.06.2.01.0003	3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	0	0	0%
	1.06.06.2.01.0004	4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	0	0	0%
	1.06.06.2.01.0005	5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				487,476,776	449,674,389	92.25 %
	JUMLAH PROGRAM				1,787,855,729	1,676,405,669	93.77 %
KEGIATAN LAINNYA							
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
		1.	Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		43,263,177	37,129,208	85.82 %

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Kewajiban penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan pemenuhan konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Realisasi capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan realisasi pelaksanaan program pembangunan yang disajikan dalam Laporan ini merupakan kinerja bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD, sesuai dengan norma yang telah disepakati dan dijalani bersama sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025.

Secara umum seluruh program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan Tahun 2025 telah dapat dilaksanakan dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal, walaupun disadari bahwa masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus segera diatasi dan dibenahi bersama. Tantangan Kabupaten Solok ke depan adalah meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi darat dan meningkatkan perekonomian masyarakat, guna mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, mempercepat peningkatan pendapatan masyarakat dan mencapai tingkat kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan.

Demikian Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Solok Tahun 2025 ini, semoga bermanfaat untuk bahan evaluasi dan sebagai dasar perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten Solok ke depannya, terima kasih.